



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM
IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

**Erickson Sidjabat
0906589122**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM
IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Administrasi**

**Erickson Sidjabat
0906589122**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JUNI 2012**

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Erickson Sidjabat

NPM : 0906589122

Tanda Tangan :





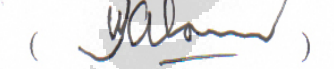

Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Erickson Sidjabat
NPM : 0906589122
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Partisipasi Masyarakat Desa dalam Implementasi
Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
di Kabupaten Grobogan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. DR. Azhar Kasim, MPA ()
Penguji : DR. Ir. Soedarsono H, MA ()
Ketua Sidang : DR. Roy V Salomo, M.Soc.Sc ()
Sekretaris Sidang : Teguh Kurniawan, M.Sc ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Magister Ilmu Administrasi Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, tidaklah mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Jajaran Pemerintah Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
2. Jajaran Pemerintah Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang juga telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
3. Prof. DR. Azhar Kasim, MPA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
4. Yohanna Octora RD Pakpahan, istri saya yang telah banyak memberikan dukungan doa dan moril bagi saya.
5. Laura A Hukom, sebagai atasan saya yang telah memberi dukungan dan fasilitas cuti sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 22 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erickson Sidjabat

NPM : 0906589122

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM IMPLEMENTASI STRATEGI
NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI
KABUPATEN GROBOGAN**

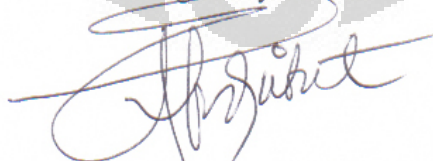
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan



(Erickson Sidjabat)

ABSTRAK

Nama : Erickson Sidjabat
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Administrasi
Judul : Partisipasi Masyarakat Desa dalam Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Grobogan

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menetapkan sebagai prinsip yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar, sebagai pokok kegiatan yaitu mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dan mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh tim kerja STBM tingkat rukun tetangga/dusun/kampung. Di kabupaten Grobogan khususnya di desa-desa yang diteliti menunjukkan beragam kegiatan partisipasi masyarakat namun belum diketahui gambaran partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi tersebut sehingga penelitian ini ingin mengetahui gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi tersebut dan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil eksplorasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi strategi ini tidak muncul inisiatif dari masyarakat desa mengatasi masalah perilaku buang air besar di sembarang tempat berupa sebuah usulan dalam musyawarah, memutuskan adanya kegiatan untuk mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat secara partisipatif, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dikumpulkan secara kolektif dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah ini seperti pada kegiatan-kegiatan yang mereka sudah kerjakan secara partisipatif di desa mereka.

Kata kunci :

Partisipasi masyarakat, pemucuan, implementasi strategi

ABSTRACT

Name : Erickson Sidjabat
Study Program : Pasca Sarjana Ilmu Administrasi
Title : Village Community Participation in Implementing
Community Based Total Sanitation National Strategy in
Grobogan District

In Community Based Total Sanitation National Strategy was established as principle that is negate assistance for providing basic sanitation facility, as main activity that is enhancing social solidarity (mutual cooperation) and to prepare community for participating as a role and responsible that should be undertake by Community Based Total Sanitation team at smallest neighborhood group/hamlet/kampung. In Grobogan district, particularly in researched villages showed various community participation activities however has not known community participation figure in the strategy implementation so as this research would like to know community participation actual description in implementing the strategy and what driving factors and constrains in community participation during the strategy implementation. This research was using qualitative approach and decriptive method. Explorative result showed that not appear new initiative from village community that come up as a suggestion through discussion among community, make decision to establish activity for solving open defecation problem in participatory way, including utilize resource mobilization and conducting activity similar with community participation in activities planned by them.

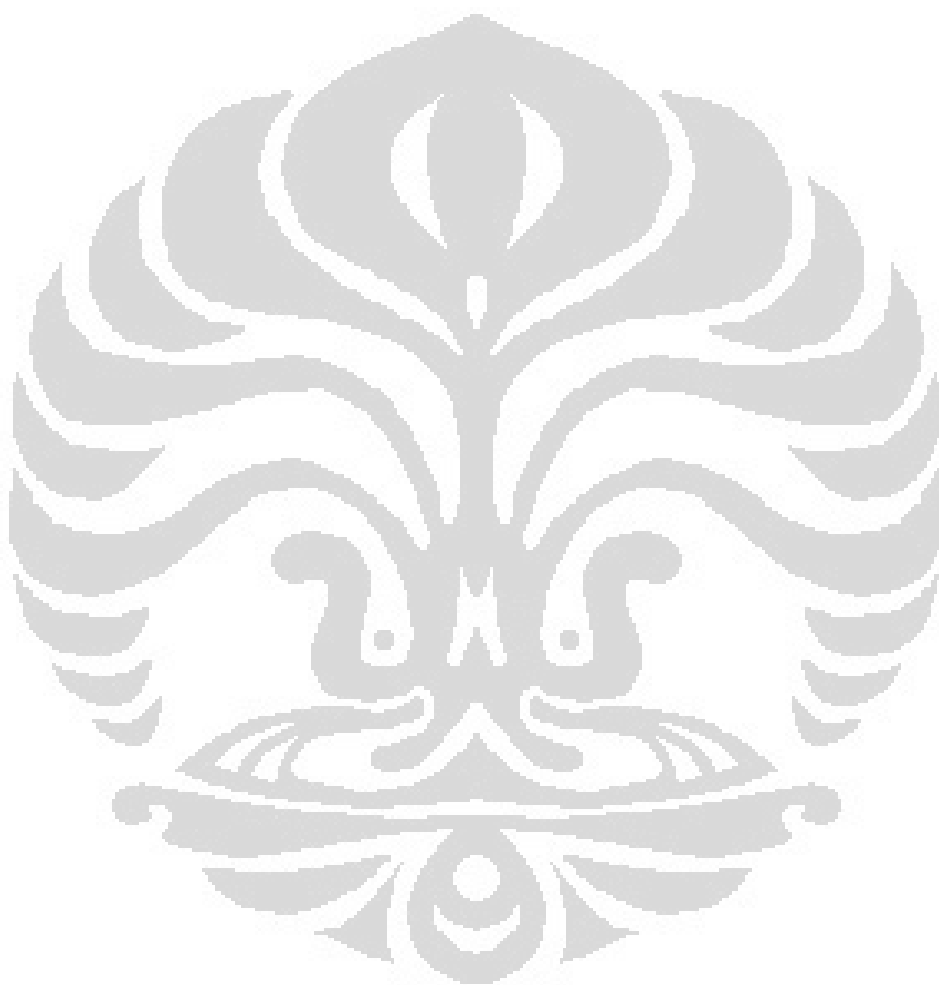
keyword :

community participation, triggering, strategy implementation

DAFTAR ISI

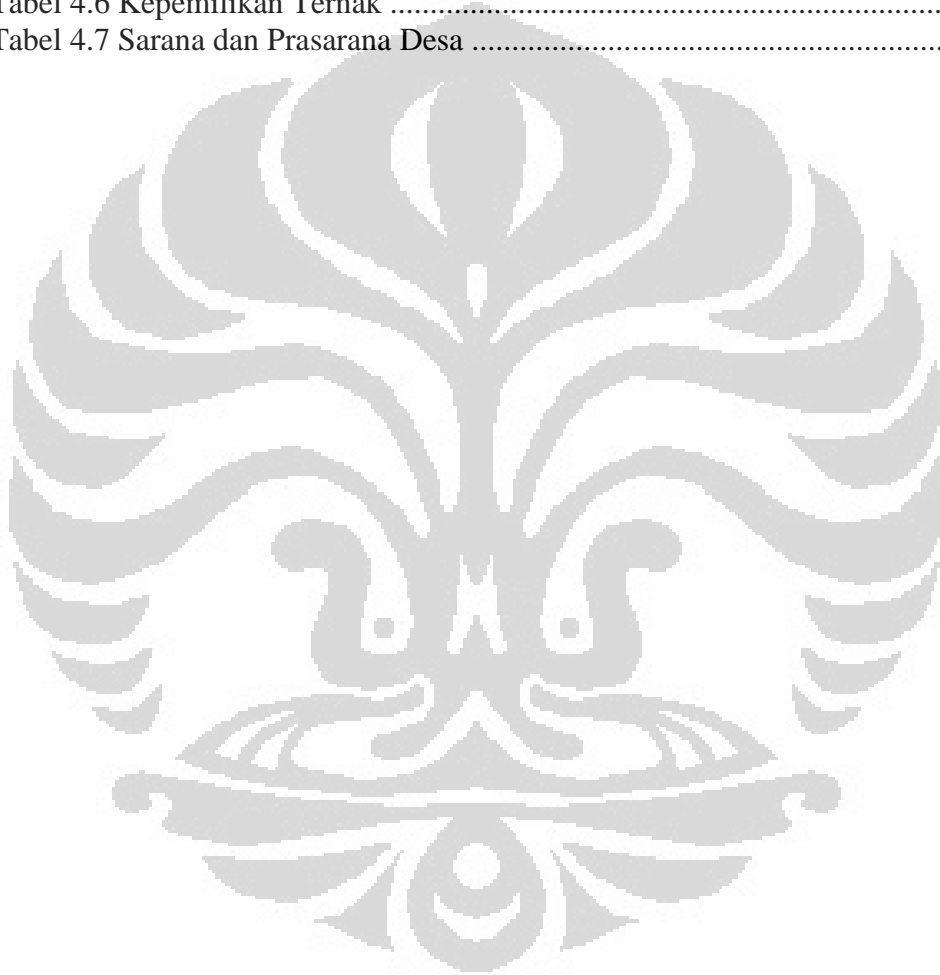
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Batasan Penelitian	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Teori Implementasi Strategi	12
2.2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	16
2.3. Teori Partisipasi Masyarakat	22
2.4. Kerangka Berpikir Penelitian	41
3. METODE PENELITIAN	43
3.1. Pendekatan Penelitian	43
3.1 Tipe Penelitian	43
3.2. Lokasi Penelitian	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data	44
3.5. Teknik Pemilihan Informan.....	45
3.6. Teknik Analisa Data.....	46
4. STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN PROFIL SANITASI KABUPATEN GROBOGAN DAN DUA DESA YANG DITELITI	48
4.1. Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	48
4.2. Kondisi Geografis	54
4.3. Kondisi Kesehatan Masyarakat	55
4.4. Desa Tajemsari	57
4.5. Desa Kronggen	61
5. PEMBAHASAN	66
5.1. Fakta-fakta Empiris dari Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	66

5.2. Analisa Fakta-fakta Empiris dalam Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	115
6. KESIMPULAN DAN SARAN	135
6.1. Kesimpulan	135
6.2. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	



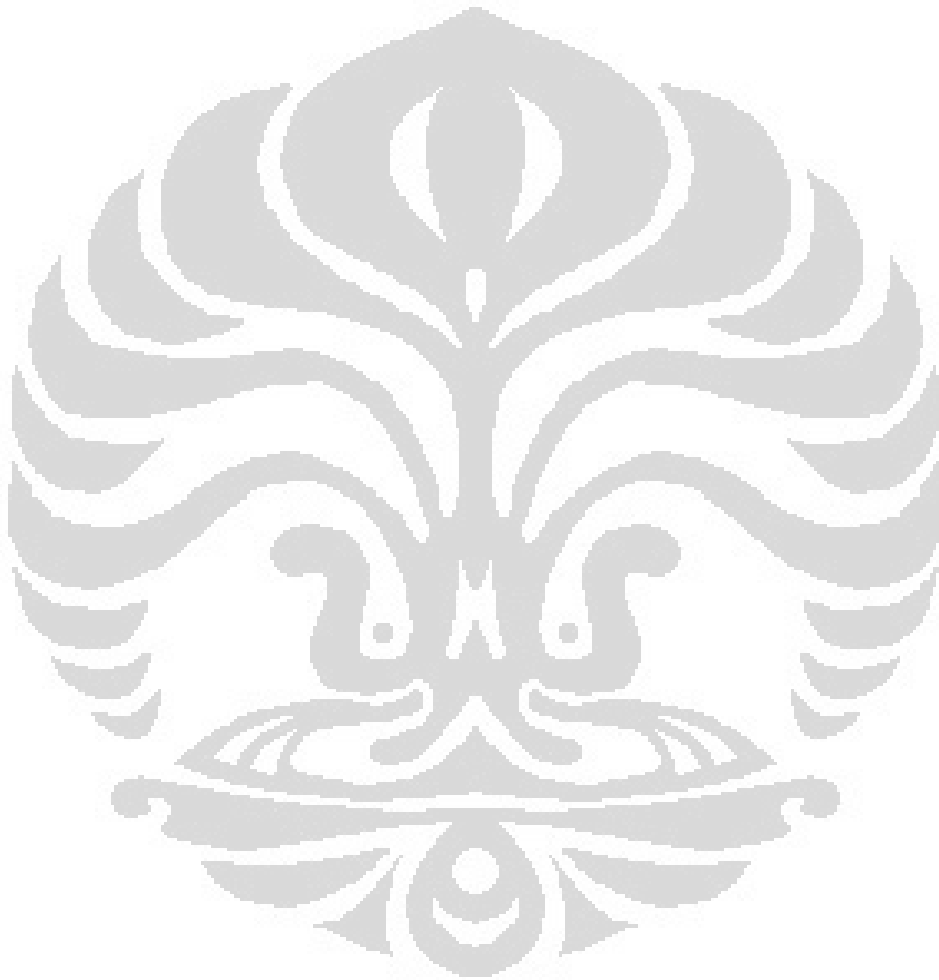
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Komposisi Kepala Keluarga Pra Sejahtera dan Penduduk Tidak Tamat Sekolah Dasar Kecamatan Mendapat Program STBM tahun 2011	48
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana di Desa Tajemsari	58
Tabel 4.3 Gambaran Kondisi Lembaga yang ada di Desa Tajemsari.....	59
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Desa Kronggen	64
Tabel 4.5 Struktur Mata Pencaharian Penduduk	65
Tabel 4.6 Kepemilikan Ternak	65
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Desa	66



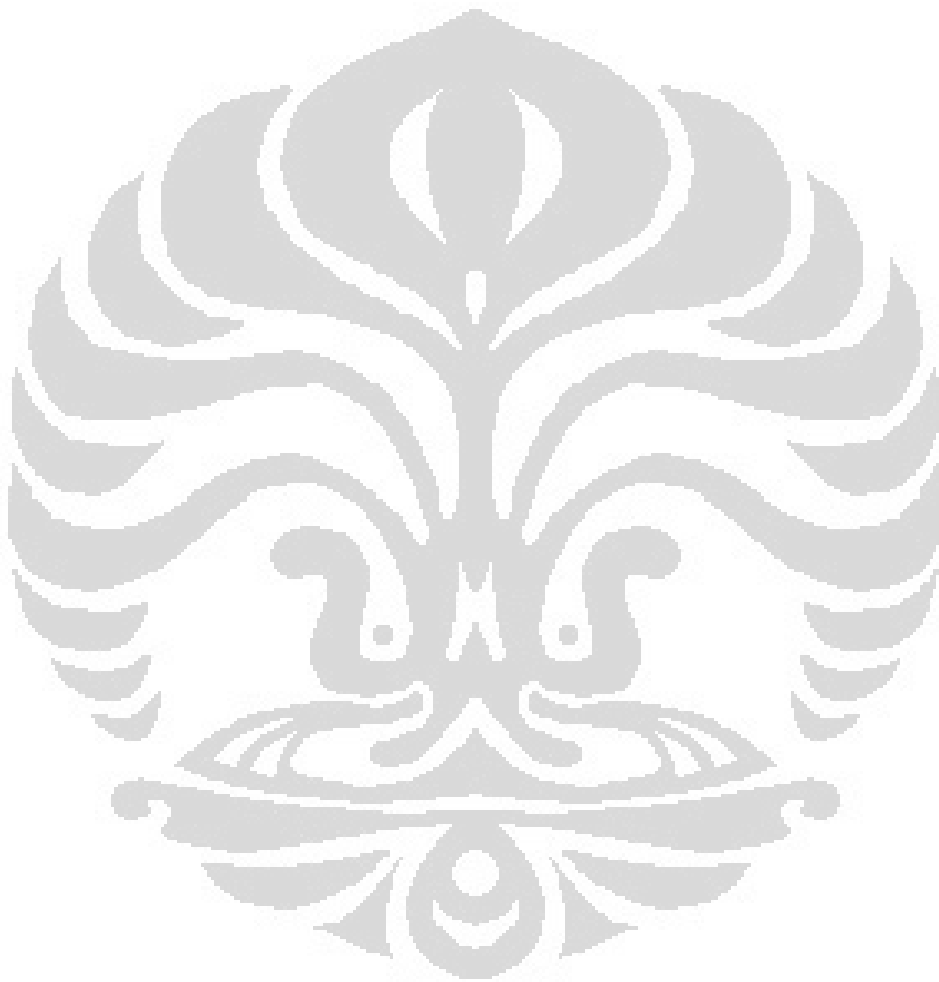
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Delapan tangga dari Jenjang Partisipasi Masyarakat	29
Gambar 2.2. Kerangka berpikir penelitian	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	xiv
Lampiran 2. Transkrip wawancara	xxxvi
Lampiran 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008	cvii



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang *hygiene* dan sanitasi dengan menetapkan *Open Defecation Free* (ODF) dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 - 2009. Pemberian perhatian tersebut didorong oleh hasil studi *Indonesia Sanitation Sector Development Program* (ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka yang telah berkontribusi kepada tingginya angka kejadian diare di Indonesia yang menunjukkan 423 per seribu penduduk pada tahun 2006. Selain itu didasari pengalaman intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total yang dibuktikan oleh hasil studi WHO tahun 2007 dimana kejadian diare menurun 32 % dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. Upaya perhatian tersebut itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses. Perhatian tersebut diatas diwujudkan oleh pemerintah dengan melaksanakan ujicoba implementasi *Community Led Total Sanitation* (CLTS) di 6 kabupaten pada tahun 2005 dan dilanjutkan dengan penancangan gerakan sanitasi total oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2006 di Sumatera Barat.

Pemerintah menyatakan perlunya strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat. Hal ini didorong oleh fakta pengalaman dimana replikasi CLTS terjadi diberbagai lokasi oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang menghasilkan perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat sehingga pada tahun 2007 mencapai 500 desa telah dinyatakan ODF (Depkes, 2007) dan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis

dan peningkatan akses sanitasi. Strategi tersebut merupakan strategi baru dengan melibatkan lintas sektor dengan *leading* sektornya adalah Kementerian Kesehatan dengan alasan sanitasi total berbasis masyarakat ini menekankan kepada lima perubahan perilaku higienis.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat disebutkan pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan dan sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan (BABS) atau telah disebutkan diatas *open defecation Free* (ODF). Dalam keputusan menteri tersebut disebutkan tentang prinsip yang meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar dengan pokok kegiatan yaitu menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dan mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong). Kemudian dalam keputusan menteri tersebut juga disebutkan mengenai peran dan tanggung jawab beberapa pemangku kepentingan dimana tingkat RT/Dusun/Kampung memiliki peran dan tanggung jawab salah satunya yaitu mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong), pada tingkat desa berperan dan bertanggung jawab membentuk tim fasilitator desa atau kader pemicu STBM untuk memfasilitasi gerakan masyarakat dan pada tingkat kecamatan dalam hal ini pemerintah kecamatan berperan dan bertanggung jawab berkoordinasi dengan berbagai lapisan Badan Pemerintah dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong gerakan solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sanitasi setelah melihat keberhasilan ujicoba dan replikasi CLTS. Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat desa (Soelaiman dalam Suparjan dan Hemptri Suyatno, 2003:21). Kamar Kar (2003) mendeskripsikan CLTS sebagai suatu pendekatan dengan memberdayakan

(*empowering*) masyarakat lokal dan menginisiasi aksi lokal kolektif atau partisipasi masyarakat untuk bebas dari buang air besar di sembarang tempat. Solidaritas sosial, membantu dan bekerjasama antar keluarga didalam komunitas merupakan suatu unsur yang utama dan penting dalam CLTS dan tidak menyediakan subsidi untuk pembelian material dan barang secara individual. CLTS diawali dengan komunitas melakukan analisa kondisi sanitasi di lingkungan mereka sendiri dalam kerangka untuk memperoleh profil sanitasi setempat sebagai upaya penyadaran kolektif, dilanjutkan dengan proses perencanaan aksi komunitas dan monitoring secara terbuka dengan menginformasikan secara progresif.

Melihat kepada informasi dan data mengenai implementasi keputusan menteri kesehatan tersebut yang digambarkan oleh Sekretariat STBM Nasional bahwa di banyak tempat yang telah menunjukkan keberhasilan stop buang air besar sembarangan (BABS). Salah satu contoh data yang telah terverifikasi dari Provinsi Jawa Timur menunjukkan kemajuan perubahan perilaku dengan peningkatan sebanyak 31% dari seluruh kepala keluarga telah berhenti BABS dan peningkatan akses jamban sehat permanen dengan peningkatan sebesar 27% dari seluruh kepala keluarga di provinsi tersebut dan prosentase tertinggi, berdasarkan data yang belum terverifikasi, terdapat pada provinsi Sumatera Selatan dari 6 propinsi yang termonitor. Informasi yang lain yaitu Kabupaten Sumedang sudah mencapai 103 desa yang terbebas dari BABS dari 277 desa yang ada.

Terdapat beberapa praktek terbaik dalam upaya melaksanakan kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut seperti pengalaman di Kabupaten Sumedang, pelaksanaan program STBM tanpa dukungan dana dari pemerintah. Pemicuan dilakukan oleh kader lokal secara swadaya. Ketika masyarakat terbentur dengan kondisi ekonomi, maka mulailah dicari jalan keluarnya. Masyarakat difasilitasi melakukan pengelolaan sampah mandiri untuk menghasilkan kerajinan yang bisa dijual sehingga dananya bisa membantu masyarakat untuk membangun jambannya sendiri dan ternyata pencapaian ODF

meningkat¹. Di Kabupaten Ciamis tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Mandalika menunjukkan bahwa diperlukan waktu yang cukup lama untuk mensosialisasikan sampai akhirnya terdapat 8 desa di kabupaten tersebut diidentifikasi ODF². Di Kabupaten Ciamis, strategi yang dilakukan adalah dengan prinsip keteladanan. Pendekatan ini dimulai dari para tokoh masyarakat, karena budaya meniru tokoh panutan di masyarakat Ciamis cukup tinggi. Para tokoh masyarakat melihat dirinya sendiri, dan menilai sendiri apakah mereka sudah merubah perilaku atau belum. Sesudah para tokoh masyarakat dan kadernya berubah perilakunya (stop buang air besar sembarangan), baru mereka masuk ke masyarakat untuk memicu³.

Gambaran pencapaian diatas belum menunjukkan hasil 100% pencapaian atau seluruh desa yang ada di sebuah kabupaten 100% belum terbebas dari BABS sampai dengan saat ini dan keterangan yang dapat diperoleh bahwa daerah-daerah masih terus bekerja melaksanakan kebijakan keputusan menteri kesehatan tersebut bagi daerah yang menjalankannya. Terdapat persoalan-persoalan yang muncul dalam implementasi kebijakan tersebut seperti di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur sebagaimana dikatakan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek bahwa terdapat faktor kemiskinan, pendidikan dan kesadaran hidup sehat yang rendah yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dan ditambahkannya juga bahwa program membebaskan desa dari BABS ini hanya sebatas memberikan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat pentingnya buang air besar pada tempatnya dan selebihnya pemerintah hanya meminjamkan cetakan konstruksi membuat jamban⁴. Di Kabupaten Jombang tepatnya di wilayah pelayanan Puskesmas Mojoagung, upaya membebaskan desa dari BABS menunjukkan adanya hambatan

¹ Dikutip dari http://ampl.or.id/detail/detail01.php?row=2&tp=laporan_kunjungan&ktg=&kd_link=2&jns=&kode=106 dan diakses tanggal 8 Februari 2012

² Dikutip dari <http://puskesmasmandalika.blogspot.com/2010/03/8-desa-di-ciamis-diidentifikasi-odf.html> dan diakses pada tanggal 8 Februari 2012

³ Dikutip dari http://ampl.or.id/detail/detail01.php?row=2&tp=laporan_kunjungan&ktg=&kd_link=2&jns=&kode=106 dan diakses pada tanggal 10 Februari 2012

⁴ Dikutip dari <http://news.okezone.com/read/2010/07/09/340/351348/mayoritas-warga-trenggalek-masih-bab-di-kebun> dan diakses tanggal 8 Februari 2012.

berupa penolakan masyarakat karena alasan biaya yang mana masyarakat berpikir bahwa untuk memiliki jamban itu mahal⁵.

Sebuah studi evaluasi oleh Nevawan (2009) terhadap pelaksanaan CLTS pada dua kecamatan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa saat pemicuan mayoritas masyarakat yang menjadi responden studi tersebut lebih banyak tergugah oleh rasa malu yang mencapai 55% dan 62% di kedua kecamatan yang diteliti. Pemicuan tersebut telah mendorong aksi cepat masyarakat untuk membangun jamban kurang dari 3 minggu sebanyak 80% dan 98%. Kedua kecamatan menunjukkan perbedaan pencapaian kepemilikan jamban keluarga yang cukup besar dimana yang satu sudah mencapai 100% dan yang lain sebanyak 27% dan perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendampingan oleh fasilitator yang adalah petugas puskesmas, peran pemimpin lokal dan komitmen sosial. Hasil studi evaluasi tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang besar antara kedua kecamatan terhadap faktor-faktor tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Surotinojo (2009) tentang partisipasi masyarakat dalam program sanitasi total berbasis masyarakat di sebuah desa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa perhatian dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan fasilitator lapangan yang turun langsung berinteraksi dengan masyarakat mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program. Kemudian faktor-faktor internal atau karakteristik masyarakat seperti jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang program mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat.

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang juga menjalankan kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut melalui komitmen bersama Wakil Bupati Grobogan bersama 10 orang camat untuk

⁵ Dikutip dari <http://puskesmasmojoagung.wordpress.com/2010/06/11/menjawab-tantangan-berbuah-keberhasilan-program-stops-pengadaan-jamban-sehat-di-wilayah-kerja-puskesmas-mojoagung/> dan diakses pada tanggal 8 Februari 2012

membebaskan desa-desa dari kebiasaan BABS dan meningkatkan akses jamban oleh masyarakat desa lewat penandatanganan deklarasi pada bulan Juni tahun 2010. Komitmen ini muncul sebagai pilihan untuk mengatasi masalah adanya 14 kasus diare di kabupaten ini pada tahun 2010 dan juga didasari oleh keberhasilan ujicoba sanitasi total berbasis masyarakat melalui gerakan partisipasi masyarakat yang terjadi pada dua desa di kabupaten tersebut. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Grobogan telah membuahkan hasil dengan adanya 100 desa yang ODF yang dirayakan pada bulan Desember 2011⁶. Belum ada penelitian dan evaluasi seperti di daerah yang disebutkan sebelumnya terkait dengan implementasi sanitasi total berbasis masyarakat tersebut di kabupaten ini. Belum diketahui gambaran gerakan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah sanitasi khususnya terkait dengan target kebijakan tersebut dan fenomena gerakan partisipasi masyarakat desa sampai sejauhmana dan bagaimana bisa terjadi. Seperti disebutkan dalam penelitian diatas bahwa karakteristik masyarakat menjadi faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan Kabupaten Grobogan sendiri memiliki keadaan komposisi penduduk pada tingkat pendidikan sekolah dasar kebawah dan tidak sekolah yang mencapai 74, 86% dan tingkat pendidikan SLTP yang mencapai 15, 28%, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan rendahnya pendapatan petani akibat rendahnya harga komoditas hasil pertanian dan Kabupaten Grobogan juga sering dilanda bencana kekeringan dan banjir dimana lebih dari 50% tanah di kabupaten ini diperuntukan bagi lahan pertanian⁷. Dari sisi partisipasi masyarakat di tingkat desa, masyarakat desa di kabupaten ini memiliki kesempatan untuk menyusun RPJM Desa secara partisipatif, mendapat kesempatan program langsung dari pemerintah kabupaten berupa bantuan material untuk program yang didanai dari APBD, mendapat kesempatan program PNPM Mandiri yang dikelola secara partisipatif dan pernah terjadi di desa-desa kegiatan pembangunan yang dananya

⁶ Diakses dari <http://grobogan.go.id/info-daerah/berita-terbaru/629-seratus-desa-di-kabupaten-grobogan-bebas-babs.html> pada tanggal 8 Februari 2012

⁷ RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 diakses dari <http://grobogan.go.id/rpjmd.html> pada tanggal 10 Februari 2012

bersumber dari swadaya masyarakat untuk membiayai usulan pembangunan dari masyarakat seperti pembangunan jalan dan sarana tempat ibadah.

Dari perspektif teoritis menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994 : 137 – 143) dan Sastropoetro (1985) menyebutkan juga pendidikan dan kemiskinan sebagai faktor pengaruh terhadap partisipasi masyarakat demikian juga dengan Sunarti (2003) menyebutkan kemiskinan sebagai faktor penghambat partisipasi masyarakat. Menurut Sunarti (2003) menyebutkan petaruh (*stakeholder*) yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan disebutkan juga tentang sistem birokrasi sebagai penghambat bagi partisipasi masyarakat.

Kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan telah menetapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam strategi nasional sanitasi berbasis masyarakat untuk mengatasi persoalan sanitasi. Pelaksanaan kebijakan ini diberbagai daerah berhadapan dengan beragam faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan berjalannya waktu, kondisi dan situasi yang dinamis merubah faktor-faktor pengaruh tersebut. Bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan ini pemerintah daerah berhadapan dengan program dan rutinitas yang terjadi termasuk juga pada tingkat desa. Kebijakan ini telah menetapkan perlunya strategi yang baru dengan pelibatan lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bupati Grobogan telah mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada tingkat kabupaten untuk mempromosikan strategi yang baru tersebut, mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi mengenai pendekatan yang baru dan koordinasi implementasi strategi yang baru dan memberikan dukungan pengembangan kapasitas yang diperlukan kepada semua

institusi di kabupaten. Kemudian bagaimana kelompok tersebut pada akhirnya dapat memberikan dukungan bagi partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa dalam implementasi amanat kebijakan strategi yang baru tersebut dan sejauhmana keberhasilan dari strategi yang baru tersebut terimplementasi dan mencapai output yang diinginkan akan menjadi perhatian dalam penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan telah menetapkan strategi yang baru yang dimunculkan setelah memetik pelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang diakui telah mengalami kegagalan karena telah memberikan subsidi dalam pemecahan masalah sanitasi. Suatu strategi yang menetapkan menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dan mengembangkan solidaritas sosial dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan meningkatnya ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suatu strategi baru yang mendorong gerakan partisipasi masyarakat desa. Sementara partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor untuk bisa terjadi. Sampai saat ini upaya kebijakan tersebut belum selesai dan masih berlangsung dan akan sampai kapan hasil-hasil yang diinginkan tercapai dan dapat bertahan dengan gerakan partisipasi masyarakat desa tersebut. Publikasi media internet menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan sudah melakukan selebrasi atas 100 desa yang telah ODF. Belum diketahui gambaran gerakan partisipasi masyarakat desa dalam upaya mengatasi masalah sanitasi seperti diinginkan oleh keputusan menteri kesehatan itu untuk mewujudkan komunitas yang ODF dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat desa. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :

- (a). Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat desa sebagai sebuah gerakan yang diinginkan oleh Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Grobogan ?

Universitas Indonesia

- (b). Apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat bagi partisipasi masyarakat desa sebagai gerakan yang diinginkan oleh Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Grobogan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mencari jawaban atas kedua pertanyaan penelitian diatas sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk terjadi dari pokok kegiatan dari Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dan mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh tim kerja STBM tingkat rukun tetangga/dusun/kampung ketika Strategi Nasional STBM diimplementasikan dalam konteks pedesaan yang beragam di Indonesia khususnya di Kabupaten Grobogan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

- (a). Memberikan sumbangan penting bagi dunia pendidikan dan masyarakat umum sehingga dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pemerintah yang mendorong gerakan partisipasi masyarakat desa dalam mengatasi masalah-masalah pada masyarakat desa seperti masalah sanitasi dalam kebijakan tersebut.
- (b). Dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun program STBM kedepan pada kecamatan yang belum diintervensi atau program jenis lainnya yang menjadikan masyarakat desa sebagai sasaran penerima manfaat sehingga apakah perlu melibatkan partisipasi masyarakat desa sasaran untuk mencapai sebuah keberhasilan program STBM atau

program jenis lainnya atau prasyarat-prasyarat apa yang diperlukan dalam melibatkan partisipasi masyarakat desa.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan menyoroti pada partisipasi masyarakat desa dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati Grobogan untuk dilaksanakan pada 10 kecamatan di Kabupaten Grobogan dan pelaksanaan program ini sebagai tindak lanjut kebijakan nasional yang dituangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Kesepuluh kecamatan tersebut antara lain adalah Kecamatan Tegowanu, Kedungjati, Kradenan, Brati, Tawangharjo, Wirosari, Godong, Penawangan, Karangrayung dan Klambu. Program STBM ini berlangsung dalam skala nasional yang berlangsung juga di kabupaten dan provinsi lain di Indonesia. Dasar pemilihan Kabupaten Grobogan sebagai lokasi penelitian adalah kabupaten ini merupakan salah satu dari sedikit kabupaten yang mencapai 100 desa yang terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat dengan jumlah rumah tangga miskin mencapai 37,33% pada tahun 2010⁸ dan sering terkena bencana banjir. Setelah terpilih kabupaten kemudian ditentukan desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Tajemsari di Kecamatan Tegowanu. Desa ini dipilih karena berada di kecamatan dengan kemajuan pencapaian program STBM yang paling baik. Kemudian Desa Kronggen yang berada di Kecamatan Brati dengan pencapaian program STBM paling rendah. Namun kedua desa tersebut memiliki kesamaan dalam hal adanya bencana alam banjir, berada di kecamatan yang memiliki keluarga pra sejahtera dalam jumlah besar.

⁸ Diakses dari <http://grobogan.go.id/penduduk-miskin.html> pada tanggal 10 Februari 2012.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam pembahasan di bab berikutnya untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penelitian ini.

- (a). Djamhuri, Tri Lestari mempublikasikan hasil penelitiannya dengan judul “*Community Participation in a Social Forestry Program in Central Java, Indonesia : the Effect of Incentive Structure and Social Capital*” pada tahun 2008 yang dimuat dalam *Agroforest Syst.* Penelitian ini menginvestigasi struktur insentif lengkap dari program hutan sosial dan bagaimana struktur insentif merubah partisipasi anggota masyarakat dalam manajemen hutan. Penelitian ini menggunakan analisis ekonomi dan transfer hak milik. Sampai sejauhmana partisipasi masyarakat bergantung tidak hanya pada struktur insentif tetapi pada modal sosial yang ada di masyarakat.
- (b). Howat, Peter, et.al mempublikasikan hasil penelitiannya dengan judul “*Community Participation in Road Safety : Barriers and Enablers*” pada tahun 2001 yang dimuat dalam *Journal of Community Health.* Paper ini bertujuan mengidentifikasi penghalang-penghalang partisipasi masyarakat dalam aktivitas keamanan jalan dan merekomendasikan strategi mereduksi penghalang-penghalang yang dimaksud. Informasi didapat dari mengkaji literatur yang relevan, dari penulis-penulis pengalaman berbasis masyarakat, dari melaksanakan riset berbasis masyarakat dan dari wawancara dengan stakeholder kunci di Australia Barat. Terdapat sepuluh penghalang partisipasi masyarakat yang teridentifikasi dan diklasifikasi dalam dua kelompok yaitu isu personal dan isu perencanaan. Termasuk alasan mengapa orang sering enggan terlibat dalam proyek-proyek didalam masyarakat, kesenjangan kepemimpinan dan kesenjangan ketrampilan. Kemudian yang terakhir adalah

fokus program yang tidak sesuai, evaluasi program yang tidak tepat, kesenjangan sumber daya dan kesenjangan keberlanjutan. Disimpulkan bahwa penghalang-penghalang keterlibatan masyarakat dalam inisiatif keamanan jalan sama juga di banyak bagian dari Australia dan luar negeri dan digunakan lebih luas dalam intervensi promosi kesehatan.

- (c). Nahar, Tasmin, et. al. mempublikasikan hasil penelitiannya dengan judul “*Scaling up community mobilization through womens’s groups for maternal and neonatal health : experiences from rural Bangladesh*” pada bulan Januari 2012. Paper ini menggambarkan proses dan pengukuran cakupan perluasan intervensi mobilisasi masyarakat untuk kesehatan ibu, anak dan neonatal di pedesaan Bangladesh. Metode : aktivitas perluasan mengambil tempat dalam sembilan kesatuan di pedesaan Bangladesh. Perekrutan dan pelatihan bagi mereka yang menyalurkan intervensi, komunikasi dan keterlibatan dengan masyarakat dan pemangku-pemangku kepentingan lain dan diseminasi aktif aktivitas intervensi digambarkan. Evaluasi proses dan data survey populasi disajikan dan digunakan untuk mengukur cakupan dan keberhasilan perluasan. Hasil : Intervensi diperluas dari 162 kelompok perempuan menjadi 810 kelompok, perwakilan *five-fold* meningkat dalam cakupan populasi. Proporsi wanita usia produktif dan ibu hamil yang terlibat dalam intervensi masing-masing meningkat dari 9% dan 3% menjadi 23% dan 29%. Kesimpulan : adalah mungkin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan intervensi tanpa insentif finansial dan tanpa meningkatkan staf manajerial.

2.2. Teori Implementasi Strategi

Banyak pemimpin-pemimpin dan manajer-manajer puncak di organisasi pelayanan publik besar sekarang mempercayai bahwa manajemen strategi dibutuhkan. Organisasi mereka begitu besar dan begitu kompleks dan keadaan begitu semrawut bekerja dengan tanpa manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan instrumen yang dapat menolong mereka (Joyce, 1999 : 1).

Universitas Indonesia

Management strategis adalah suatu yang sulit karena diperlukan kepemimpinan yang efektif, aksi managerial dalam menyesuaikan sumberdaya-sumberdaya, strategi dan aktivitas, dan membawa perbedaan individu dan kelompok secara bersama dalam langkah yang efektif untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi (Joyce, 1999 : 85).

2.2.1. Definisi Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas-aktivitas dan pilihan-pilihan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi rencana strategi. Merupakan proses dengan mana strategi dan kebijakan diletakkan kedalam tindakan melalui pengembangan program-program, anggaran-anggaran dan prosedur-prosedur (Hunger dan Wheleen, 2007: 106). Siapa-siapa yang mengimplementasikan strategi kemungkinan kelompok-kelompok orang yang berbeda yang lebih banyak dari orang-orang yang memformulasikan strategi. Pelaksana strategi adalah setiap orang dalam organisasi (Hunger dan Wheleen, 2007: 106). Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai rencana dan tujuan program adalah untuk membuat strategi yang berorientasi tindakan (Hunger dan Wheleen, 2007: 106). Anggaran adalah pernyataan program-program organisasi dalam mata uang. Setelah program dibangun, proses anggaran dimulai dan perencanaan keuangan merupakan pengecekan nyata terakhir sebuah organisasi untuk memperhitungkan kelayakan sebuah strategi yang dipilih (Hunger dan Wheleen, 2007: 107). Prosedur, kadang disebut dengan prosedur operasional standar yang merupakan sebuah sistem dari langkah-langkah berurut atau teknik yang menggambarkan secara detil bagaimana tugas tertentu atau pekerjaan diselesaikan. Setelah program dan anggaran disetujui maka prosedur operasional standar dibangun atau direvisi. Secara spesifik prosedur operasional standar berisi beragam aktivitas detil yang harus dijalankan untuk menyelesaikan program organisasi (Hunger dan Wheleen, 2007: 107).

Salah satu sasaran yang dicapai dalam implementasi strategi adalah sinergi diantara fungsi-fungsi dan unit-unit bisnis. Sinergi dicapai menurut salah satu dari cara-cara berikut : berbagi pengetahuan dan cara, strategi-strategi yang dikoordinasikan, berbagi sumberdaya nyata, skala ekonomi atau cakupan, kekuatan negosiasi yang dikumpulkan dan menciptakan bisnis baru (Hunger dan Wheleen, 2007: 107).

2.2.2. Mendesain Pekerjaan dalam Implementasi Strategi

Mengorganisir aktivitas-aktivitas organisasi dan orang untuk implementasi strategi meliputi lebih dari mendesain struktur keseluruhan organisasi, meliputi mendesain cara pekerjaan diselesaikan. Dengan meningkatkan penekanan pada rekayasa ulang, banyak organisasi mulai memikirkan kembali proses-proses kerja mereka. Langkah-langkah proses secara tradisional dijalankan berurutan dapat ditingkatkan dengan menjalankan berbarengan menggunakan tim kerja lintas fungsi. Penstrukturan ulang melalui lebih sedikit orang yang membutuhkan perluasan cakupan pekerjaan-pekerjaan dan mendorong tim kerja. Desain pekerjaan-pekerjaan dan kinerja pekerjaan berikut karena itu semakin dipertimbangkan sebagai sumber-sumber persaingan lanjutan (Hunger dan Wheleen, 2007: 112).

Perencanaan Pekerjaan adalah memikirkan ulang tugas-tugas secara individu dalam rangka untuk mengikat mereka baik kepada organisasi dan kepada pekerja. Dalam upaya untuk meminimalkan beberapa konsekuensi yang sifatnya merugikan dari tugas spesialisasi, badan hukum berpaling kepada teknik-teknik perencanaan pekerjaan yang baru, pemekaran pekerjaan (mengkombinasikan pekerjaan untuk memberikan seorang pekerja jenis pekerjaan yang sama untuk memangku pekerjaan), rotasi pekerjaan (perpindahan pekerja-pekerja melalui berbagai pekerjaan untuk meningkatkan variasi), dan peningkatan pekerjaan (perubahan pekerjaan dengan memberi pekerja lebih banyak autonomi dan kontrol atas kegiatan-kegiatan). Walaupun setiap metode ini memiliki pengikutnya,

Universitas Indonesia

namun tidak semua dari metoda ini berlaku untuk semua situasi (Hunger dan Wheleen, 2007: 112).

Model karakteristik pekerjaan adalah suatu pendekatan lanjutan kepada peningkatan pekerjaan yang berbasis kepercayaan bahwa pekerjaan bisa dijelaskan dalam istilah dari karakteristik objektif tertentu dan bahwa karakteristik ini mempengaruhi motivasi pegawai. Untuk pekerjaan menjadi hal yang memotivasi, (1) pekerja perlu untuk merasa tanggung jawab, merasa bahwa tugasnya menjadi berharga, dan menerima *feedback* yang berguna dari pelaksanaan pekerjaannya, dan (2) pekerjaan harus memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang berarti untuk para pekerja. Model ini menyarankan bahwa para manager mengikuti prinsip-prinsip untuk merencanakan kembali pekerjaan-pekerjaan (Hunger dan Wheleen, 2007: 112):

- (a). Mengkombinasikan pekerjaan untuk meningkatkan jenis tugas dan memungkinkan para pekerja mengidentifikasi dengan apa yang mereka kerjakan
- (b). Membentuk unit-unit kerja yang lazim yang membuat seorang pekerja lebih bertanggung jawab dan dapat dipertanggung gugatkan kepada pelaksanaan pekerjaannya.
- (c). Memastikan hubungan pelanggan sehingga para pekerja akan mengetahui bahwa pekerjaannya diperlukan dan mengapa diperlukan
- (d). Memuat pekerjaan secara vertikal dengan cara memberi para pekerja meningkatkan autoritasnya dan tanggungjawabnya kepada aktivitas yang dilakukannya.
- (e). Membuka saluran *feedback* dengan menyediakan informasi kepada para pekerja bagaimana caranya melaksanakan pekerjaannya.

2.3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

2.3.1. Pengertian¹

Dalam dokumen surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat digambarkan mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dikenal sebagai *Community Led Total Sanitation*. Menurut Kamal Kar (2003), *Community Led Total Sanitation* (CLTS) adalah suatu pendekatan dengan memfasilitasi melalui proses membangkitkan (*inspiring*) dan memberdayakan (*empowering*) masyarakat lokal untuk menganalisis profil sanitasi mereka sendiri, meliputi luas buang air besar sembarangan, sebaran kontaminasi faecal-oral (kotoran masuk melalui mulut) yang mempengaruhi dan mengganggu di masyarakat serta menginisiasi aksi lokal kolektif untuk bebas dari buang air besar di sembarang tempat. Sanitasi total difokuskan pada perubahan perilaku dan bukan membangun jamban sehat. CLTS dilakukan melalui suatu proses perubahan sosial yang dirangsang oleh fasilitator yang berada di dalam atau diluar komunitas atau kelompok sasaran proyek atau kegiatan.

CLTS bertumpu pada perubahan perilaku seluruh komunitas dan bukan terbatas pada perilaku individu. Manfaat kolektif yang dirasakan dari berhentinya kebiasaan praktik buang air besar sembarangan (BABS) akan mampu mendorong terjadinya kondisi yang lebih kooperatif, sehat, dan higienis. Suatu hal yang sangat mendasar bahwa CLTS tidak menyediakan subsidi untuk pembelian material dan barang secara individual, disamping itu CLTS juga tidak menentukan model-model jamban. Solidaritas sosial, membantu dan bekerjasama antar keluarga didalam komunitas merupakan suatu unsur yang utama dan penting dalam CLTS. Hal-hal penting lainnya adalah timbulnya para pemimpin alamiah

¹ Dikutip dari buku *Hanbook on Community-Led Total Sanitation* yang ditulis oleh Kamal Kar bersama Robert Chambers tahun 2008 yang diterbitkan bersama oleh Plan UK dan Institute of Development Study Universitas Sussex Brighton UK.

atau sering disebut dengan “*natural leader*”. Muncul secara spontan di komunitas ketika proses stop BABS sedang berjalan; ketika inovasi-inovasi lokal muncul terkait dengan berbagai model-model jamban murah dengan menggunakan bahan-bahan lokal, dan ketika cara pemberian imbalan, pengenaan denda, penyebaran dan peningkatan baik dalam jumlah maupun mutu yang diinovasi oleh komunitas sendiri. CLTS mendorong dan memberikan peluang kepada komunitas untuk bertanggung jawab dan mengambil tindakan sendiri.

Secara umum, dapat diartikan bahwa, sanitasi total merupakan serangkaian perilaku seperti : menghentikan semua bentuk buang air besar sembarangan; penggunaan toilet yang bersih dan sehat; mencuci tangan dengan sabun sebelum mempersiapkan makanan dan makan, setelah buang air besar dan setelah kontak dengan tinja bayi, atau kotoran burung dan binatang lainnya, kemudian mengelola makanan dan air dengan cara yang higienis; dan cara pembuangan kotoran binatang dan limbah rumah tangga yang aman agar tercipta lingkungan yang bersih dan aman. CLTS diawali dengan berkonsentrasi pada upaya untuk mengakhiri kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) sebagai suatu langkah pertama yang signifikan dan sebagai pintu masuk untuk perubahan perilaku. CLTS diawali dengan komunitas melakukan analisa kondisi sanitasi di lingkungan mereka sendiri dalam kerangka untuk memperoleh profil sanitasi setempat. Kegiatan ini dilakukan melalui penilaian, pengamatan dan analisa terhadap BAB sembarangan yang mereka lakukan dan secara bersama-sama menganalisa sendiri pengaruh BAB sembarangan terhadap kehidupan mereka.

2.3.2. Elemen-Elemen Pemicuan CLTS²

(a). Pra Pemicuan

Tanggapan komunitas terhadap pemicuan CLTS berbeda-beda. Beberapa komunitas terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan dengan segera

² *Ibid*

namun ada komunitas lainnya merasa keberatan atau diawali dengan keraguan akan tetapi kemudian setuju setelah melihat atau mendengar bahwa komunitas-komunitas lainnya telah berubah. Pada umumnya, desa-desa yang lebih berhasil mempunyai karakter kepemimpinan yang bersemangat baik awalnya dari seorang pemimpin tradisional atau muncul pemimpin-pemimpin baru. Selain itu kondisi sosial, fisik dan institusional lokal lainnya memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi hasil capaian dari suatu pemicuan. Tahapan ini membutuhkan tindakan kajian dan refleksi yang banyak. Selama pra pemicuan, pertimbangan-pertimbangan yang rasional diperlukan seperti memilih hari, musim, dan waktu-waktu yang tepat untuk pertemuan. Persiapan yang penuh kehati-hatian akan berguna untuk memastikan bahwa para peserta dalam pertemuan pemicuan benar-benar mewakili komunitas secara keseluruhan. Ketidakhadiran orang-orang dari semua tingkatan dimungkinkan namun dapat memperlemah kekuatan kebersamaan dari keputusan pemicuan.

(b). Pemicuan

Pemicuan didasarkan pada rangsangan kolektif terhadap rasa jijik dan malu menghadapi fakta-fakta yang sederhana tentang buang air besar sembarangan yang dilakukan secara bersama dan akibat negatif yang ditimbulkan dan ditanggung oleh seluruh komunitas. Asumsi dasar yang dipakai adalah bahwa tidak ada manusia yang tetap tidak tergerak manakala mereka mengetahui bahwa mereka telah makan tinja orang lain. Tujuan dari yang telah dilakukan fasilitator adalah benar-benar membantu para anggota komunitas agar mereka dapat melihat kelakuan mereka sendiri bahwa buang air besar sembarangan adalah menjijikan dan berakibat pada lingkungan hidup yang buruk dan tidak sehat. Tentu kemudian semuanya tergantung pada para anggota komunitas untuk mengambil keputusan bagaimana cara menangani masalah dan mencari jalan keluar dan tindakan yang akan diambil. Mereka yang ada didalam masyarakat sendiri dapat didorong

sebagai kelompok penekan untuk melakukan perubahan bagi yang lainnya yang ada di komunitas.

Cara transek merupakan metode yang paling efektif dalam motivasi. Rasa malu yang muncul selama transek dan terbangun rasa jijik yang amat sangat dapat mendorong motivasi yang kuat untuk segera menghentikan buang air besar sembarangan. Melalui cara transek ini untuk menemukan lokasi yang biasa digunakan untuk buang air besar sembarangan dan melihat berbagai bentuk jamban disepanjang jalan. Kemudian memfasilitasi komunitas untuk membuat suatu peta sederhana yang menunjukkan lokasi rumah tangga, sumber-sumber daya, tempat buang air besar, titik-titik lokasi dan masalah-masalah air. Dalam pemetaan ini, masyarakat diminta untuk menunjukkan tempat mereka melakukan buang air besar sembarangan dan letak jamban-jamban mereka. Melalui pemetaan tersebut juga mengidentifikasi lingkungan yang paling kotor. Dalam proses memfasilitasi tersebut dilakukan penghitungan jumlah kotoran (tinja) yang dihasilkan di suatu wilayah dapat membantu untuk mengilustrasikan besarnya masalah sanitasi, berapa banyak uang yang mereka gunakan untuk pengobatan kesehatan. Diskusi-diskusi selanjutnya dalam memfasilitasi komunitas tersebut membahas mengenai bagaimana cara melakukan pemicuan agar kontaminasi tinja dapat memunculkan rasa jijik.

Saat pemicuan adalah saatnya kesadaran kolektif karena adanya buang air besar secara sembarangan. Mereka tahu bahwa mereka telah saling menelan tinja orang lain. Ini bagian dimana biasanya para peserta bersemangat tinggi dan penuh argument-argumen yang agresif dan harus dipikirkan bagaimana menghentikan buang air besar sembarangan dan proses perencanaan haruslah konkret mengenai rencana-rencana aksi yang positif dan segera akan dilakukan. Proses-proses perencanaan ini meliputi pemindahan peta yang digambarkan di tanah ke atas kertas, menulis nama-nama komite yang baru dibentuk, rencana aksi komunitas untuk mencapai stop BABS dan nama-nama mereka yang memutuskan

untuk memulai menggali lubang pembuangan tinja dengan segera yang diformulasi dalam hari/pekan ke depan. Peta diatas kertas tersebut dapat diberi tanda dengan status sanitasinya dari setiap rumah tangga dan kemudian status terkini untuk menunjukkan kemajuan.

(c). Pasca Pemicuan

Peta diatas harus terus bersifat dinamis sampai seluruh rumah tangga ditandai sebagai rumah tangga yang menggunakan jamban dan desa ini dinyatakan terbebas dari komunitas yang buang air besar di tempat terbuka. Penggunaan peta yang dipajang di tempat yang mudah dilihat oleh publik juga mendorong motivasi mereka dalam bertindak dan berperilaku yang lebih baik.

Hal-hal yang dapat terjadi selama pasca pemicuan adalah pertama, pemantauan proses dan kemajuan. Peta sanitasi yang ditampilkan didepan publik agar mudah dilihat oleh semua anggota komunitas sebagai pengingat komitmen untuk bertindak yang pernah dicanangkan sebelumnya dan peta harus terus bersifat dinamis sampai seluruh rumah tangga ditandai sebagai rumah tangga yang menggunakan jamban dan desa dinyatakan terbebas dari komunitas buang air besar sembarangan. Komunitas dan pemimpin juga diminta mengenai indikator lain yang mereka ingin gunakan untuk memantau kemajuan. Kedua, lahirnya pemimpin alamiah segera setelah proses pemicuan dan para pemimpin alamiah ini adalah orang-orang yang aktif melakukan kegiatannya melalui proses kegiatan konstruksi, inovasi, pemantauan, pengembangan, dan pelaksanaan norma dan aturan-aturan komunitas, penyebarluasan disain kosntruksi dan prilaku hidup bersih dan sehat dan juga memberikan kesempatan untuk bersuara dan berpendapat dalam pertemuan publik. Ketiga, mengenali dan mendorong peran agama dan pemimpin agama dan dukungan dari pemimpin agama seringkali ditemukan sangat efektif dan cukup berpengaruh dalam mempercepat tindakan kolektif lokal terhadap pencapaian status stop BABS. Keempat, pelibatan anak-anak dalam kampanye. Kelima, memfasiltasi akses untuk perlengkapan sanitasi.

Universitas Indonesia

Fasilitator harus membantu dalam membangun hubungan dengan pasar setempat. Keenam, verifikasi dan sertifikasi status stop BABS dan ini merupakan kegiatan kunci. Verifikasi memerlukan pemeriksaan yang cukup mendalam apakah suatu komunitas sudah berstatus stop BABS dan sertifikasi adalah konfirmasi dari status stop BABS, komunitas dan para pejabat diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan sebelum status stop BABS diterima secara penuh. Ketujuh, merayakan pencapaian status stop BABS dan kedelapan adalah memonitor dan menjaga kelangsungan status stop BABS.

2.3.3. Pemantauan Partisipatif dan Indikatornya³

Dengan menggunakan peta sanitasi yang diperbaharui terus menerus untuk menggambarkan rumah tangga yang memiliki jamban dan rumah tangga yang tidak memiliki jamban. Ini ditampilkan didepan publik yang dapat dilihat oleh semua anggota komunitas berfungsi sebagai pengingat komitmen. Peta ini diperbaharui ketika rumah tangga telah mempunyai akses buang air besar di jamban (jamban sendiri atau jamban bersama) dan menghentikan tindakan buang air besar di tempat terbuka. Peta ini bersifat dinamis sampai seluruh rumah tangga ditandai sebagai rumah tangga yang menggunakan jamban dan desa ini dinyatakan terbebas dari komunitas yang buang air besar di tempat terbuka.

2.3.4. Verifikasi dan Sertifikasi Status Stop BABS⁴

Memverifikasi status stop BABS merupakan kegiatan kunci. Verifikasi memerlukan pemeriksaan mendalam apakah suatu komunitas sudah berstatus stop BABS. Sertifikasi adalah konfirmasi dari status stop BABS dan pengakuan resminya. Ketika ada penghargaan untuk stop BABS, komunitas dan para pejabat diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan sebelum status stop BABS diterima secara penuh. Kegiatan verifikasi dapat meliputi :

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

- (a). Kunjungan ke bekas wilayah praktik BABS.
- (b). Pemeriksaan sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam
- (c). Inspeksi terhadap keadaan jamban
- (d). Catat apakah jalan menuju jamban telah digunakan
- (e). Percakapan dengan orangtua dan anak-anak
- (f). Mempertanyakan bagaimana masyarakat sendiri memonitor perubahan perilaku hidup bersih dan sehat mereka
- (g). Membedakan dan membuat tanda yang jelas untuk mengindikasikan perubahan PHBS, misalnya ada sabun untuk mencuci tangan, tempat penampungan air dekat jamban dan lain sebagainya.
- (h). Mempertanyakan mengenai pelanggaran dan apa yang telah dilakukan
- (i). Mengikuti binatang yang makan kotoran manusia
- (j). Memeriksa apakah jamban yang digantung dan mengapung telah dihancurkan
- (k). Ketika ada komunitas stop BABS yang ikut sebagai anggota tim evaluasi, sering menggunakan cara cerdas untuk memeriksa status stop BABS. Misalnya memotong mangga, nangka atau buah-buah lain (yang mengeluarkan aroma yang kuat yang dapat menarik lalat) di ruangan terbuka dan menunggu untuk memeriksa apakah ada penurunan dalam populasi lalat karena stop BABS.

2.4. Teori Partisipasi Masyarakat

2.4.1. Pengertian dan Karakteristik Partisipasi

Mubyarto (1984) dalam Ndraha (1990:102) mendefinisikan partisipasi sebagai “kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa seseorang yang aktif berpartisipasi tidak harus mengesampingkan keperluan pribadi atau berada di suatu kegiatan pembangunan yang menyangkut hidup mereka secara langsung karena partisipasi dilakukan secara sukarela dan dalam bentuk yang bermacam-macam.

Adapun Davis (1962) dalam Sastropoetra (1986:13) terdapat tiga unsur penting dalam konsep partisipasi :

- (a). Partisipasi/keterlibatan/peran serta sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- (b). Kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
- (c). Tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*”.

Pandangan Davis diatas didukung Allport (dalam Sastropoetra, 1988: 12-23) berpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja dan artinya adanya keterlibatan pikiran dan perasaan.

Terdapat beberapa pengertian lain mengenai partisipasi, diantaranya definsi-definisi yang dikemukakan Mikkelsen dalam Adi (2007b:106-107) berikut

Universitas Indonesia

- (a). Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- (b). Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon beberapa proyek pembangunan.
- (c). Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.
- (d). Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
- (e). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukannya sendiri oleh masyarakat.
- (f). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri.

Definisi partisipasi masyarakat terus berkembang. Menurut Mikkelsen, beberapa pengertian partisipasi diatas kadangkala lebih merupakan kata-kata populer yang sering digunakan dan belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya. Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (dalam Adi, 2007b:108) “berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dari suatu proses demokrasi (*genuine participation, initiated and managed by people themselves, is a good in the democratic process*)”. Kemudian Midgley (1986), partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan secara langsung masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat.

Partisipasi sangat berperan dalam proses pembangunan, dimana sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan mengingat masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Menurut Adi (2007a:27) definisi partisipasi masyarakat antara lain sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Definisi diatas memperlihatkan bahwa terdapat keterlibatan aktif dari masyarakat dapat terlihat dari tahap awal yaitu identifikasi masalah yang dihadapi bersama, pengambilan keputusan, serta tahapan implementasi kegiatan pembangunan yang menjawab permasalahan tersebut. Peran masyarakat menjadi diutamakan dalam berbagai tahap pembangunan karena mereka lebih mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Studi yang dilakukan oleh Uma Lele (dalam Bryant dan White, 1987) menambahkan bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. Kemudian Griesgraber dan Gunter (1996) melengkapi hal yang sama yaitu evaluasi dengan mengartikan partisipasi sebagai suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program mulai dari tahap identifikasi sampai implementasi dan evaluasi. Kemudian Midgley (1986) melengkapi lagi dengan penegasan bahwa partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh masyarakat itu sendiri setelah dukungan eksternal berakhir. Hoofsteede memiliki pendapat yang berbeda (dalam Khairudin, 1992: 124-125) dan menyebutkan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses.

Sudut pandang pemerintah bahwa partisipasi masyarakat adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin. Alasan-alasan

Universitas Indonesia

efektifitas dan efisiensi dengan adanya partisipasi masyarakat yang nyata diungkapkan oleh Rukmana (1993:214) sebagai berikut :

- (a). Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas;
- (b). Partisipasi masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya mereka seperti uang dan tenaga;
- (c). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikutsertakan dalam aktifitas pembangunan. Peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggan.

2.4.2. Fungsi dan Tujuan Partisipasi Masyarakat

Lebih lanjut, Soelaiman (1980:17) menjelaskan fungsi-fungsi partisipasi masyarakat sebagai berikut :

- (a). Pengarah dan penggerak proses perubahan berencana.
- (b). Pendidikan dan proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat
- (c). Penghimpun sumber dana dan daya pembangunan
- (d). Pemupuk harga diri dan kepercayaan diri masyarakat
- (e). Pemeliharaan kesadaran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sosial masyarakat.

(f). Pemerataan kegiatan-kegiatan pembangunan dan kesempatan untuk ikut memetik manfaat dan hasilnya.

(g). Pengawasan sosial masyarakat

Dari fungsi-fungsi diatas, terlihat bahwa partisipasi akan memberikan efek individual seperti diperolehnya pengetahuan baru, terjadinya perubahan sikap, terbangunnya kepemimpinan dan rasa percaya diri. Selain efek individual tersebut, partisipasi juga dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang dihasilkan, yaitu menjadi lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, lebih diterima dan dengan demikian lebih mudah diterapkan.

Menurut Conyers (1991:154-155), ada beberapa tujuan pelibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu :

- (a). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap pembangunan. Tanpa informasi tersebut, program-program dan proyek-proyek pembangunan akan gagal;
- (b). Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
- (c). Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan yang menjadikan mereka obyek pembangunan. Dengan melibatkan mereka dalam pembangunan, berarti mereka bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

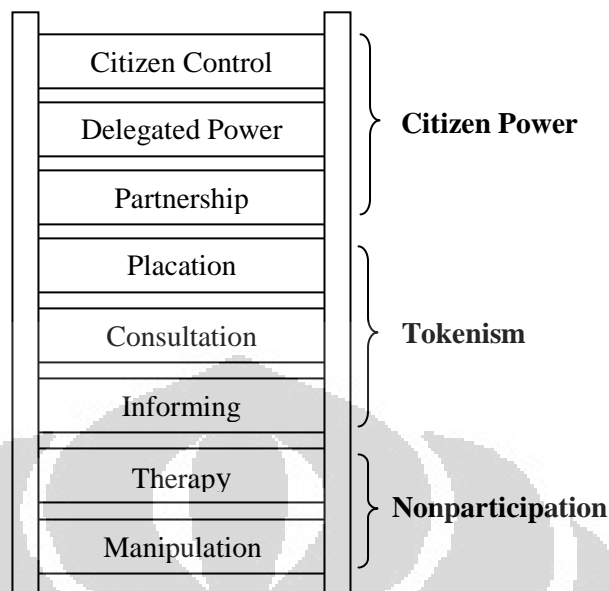
Sedangkan menurut Henry Sanoff (2000:9-10) bahwa tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah :

- (a). Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya akan meningkatkan kepercayaan mereka kepada organisasi tertentu, hingga pada akhirnya akan menerima segala keputusan dan rencana serta akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab;
- (b). Untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan suara/aspirasinya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tujuan supaya rencana, keputusan dan pelaksanaan yang dijalankan dapat diterima dengan baik;
- (c). Untuk meningkatkan rasa memiliki dalam masyarakat dengan mengumpulkan orang-orang yang akan saling membagi ide/tujuan yang sama

Partisipasi menjadi penting dalam pendekatan pembangunan sosial yang mengalami pergeseran dimana masyarakat tidak ditempatkan sebagai obyek, tetapi berfungsi sebagai subyek dan pusat pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Adi (2002:50) bahwa, “partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material, maupun financial diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di komunitas tersebut”

2.4.3. Tingkatan dari Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein (1967), terdapat delapan tingkatan dari partisipasi (lihat gambar 2.1).



Gambar 2.1. Delapan Tangga dari Jenjang Partisipasi Masyarakat

Pembahasan tentang partisipasi sulit mengabaikan kenyataan bahwa konsep ini dalam pelaksanaannya banyak mengalami reduksi dan simplifikasi yang menjurus pada manipulasi makna. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan yang bukan, dalam penelitian ini akan mempergunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) Arnstein.

Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan peran serta masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*” (Arnstein,1967:217). Secara umum, dalam model ini, ada tiga derajat partisipasi masyarakat : (1) tidak partisipatif (*nonparticipation*); (2) derajat semu (*degress of tokenism*) dan (3) kekuatan masyarakat (*degress of citizen powers*).

Dua tangga terbawah dari gambar diatas yang dikategorikan dalam derajat non partisipasi (*nonparticipation*) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Dalam bentuk

Universitas Indonesia

manipulasi (*manipulation*) ini, partisipasi masyarakat diatasnamakan. Ada orang ditempatkan pada komite penasehat yang fungsinya hanya menyetujui atau pengurus-pengurus untuk merekayasa dukungan masyarakat. Golongan sosial kelas atas diminta penguasa atau pemerintah untuk menduduki komite-komite tersebut menjadi bapak bagi masyarakat yang fungsinya mengatasnamakan masyarakat. Ini merupakan bentuk partisipasi yang dibuat-buat. Program tidak didiskusikan dengan masyarakat. Terdapat komite atau kelompok yang dibentuk penguasa atau badan pemerintah yang tidak mempunyai fungsi legitimasi untuk membuktikan adanya partisipasi masyarakat dalam program. Pemerintah atau pemegang kekuasaan hanya membutuhkan tandatangan dari komite atau kelompok tersebut. Tidak ada transparansi mengenai program secara lengkap. Program dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki relasi menguntungkan secara personal dari penguasa atau orang-orang dari badan pemerintah. Pihak pemerintah atau penguasa menyampaikan kepada publik bahwa pencapaian program adalah hasil partisipasi masyarakat. Hasil program belum tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti yang dijanjikan dan dapat menambah masalah bagi masyarakat.

Bagian berikutnya dari bentuk non partisipasi yaitu terapi (*therapy*). Dalam jenis ini, penguasa atau badan-badan pemerintah menyelenggarakan suatu aktivitas lain sebagai bentuk penyembuhan masyarakat yang tidak menghilangkan atau mengatasi penyebab masyarakat tersakiti atau tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap penyebab-penyebab terjadinya kerugian masyarakat. Masyarakat diminta untuk mengambil sebuah tindakan atau mengikuti sebuah aktivitas yang sudah ditentukan oleh penguasa atau badan-badan pemerintah atau badan-badan perwakilan masyarakat dan diberikan respon sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dari partisipasi dikategorikan dalam derajat semu (*degree of tokenism*) dan bagian paling bawah dari derajat semu

adalah menginformasikan (*informing*). Pada bagian ini, badan-badan pemerintah menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan pilihan yang dapat menjadi langkah pertama yang paling penting kearah legitimasi partisipasi masyarakat. Terlalu sering penekanan menempatkan pada satu cara aliran informasi yaitu dari pemerintah kepada masyarakat, dengan tidak ada saluran yang disediakan untuk memberikan umpan balik dan tidak ada kekuatan untuk bernegosiasi. Dengan kondisi seperti ini, khususnya ketika informasi disediakan pada tahap akhir dalam perencanaan, orang memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program yang didesain memberikan manfaat bagi masyarakat. Perangkat yang paling sering digunakan untuk satu cara komunikasi adalah media berita, pamflet, poster dan menanggapi permintaan. Pertemuan-pertemuan dapat dijadikan kendaraan bagi satu cara komunikasi dengan alat sederhana menyediakan informasi supervisi, pertanyaan-pertanyaan melemahkan atau memberikan jawaban-jawaban yang tidak relevan atau jawaban-jawaban terlalu teknis yang tidak dimengerti. Sesungguhnya pada badan-badan pemerintah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran tersedia kemungkinan pilihan yang lebih adil dan merata tetapi intimidasi dilakukan oleh badan-badan pemerintah kepada masyarakat dan tetap diputuskan program yang dijalankan sesuai keinginan pemerintah dimana pilihan yang tidak merata itu tidak terjadi.

Tangga keempat dari kategori partisipasi derajat semu yaitu konsultasi (*consultation*). Disini badan-badan pemerintah mengundang opini-opini masyarakat, seperti menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini menjadi sebuah langkah legitimasi kearah partisipasi penuh masyarakat. Dalam bentuk konsultasi ini tidak menawarkan jaminan bahwa perhatian dan ide masyarakat akan diperhitungkan. Metode-metode yang paling sering digunakan untuk berkonsultasi dengan masyarakat adalah survey-survey sikap dan mendengar publik dan pemegang kekuasaan membatasi masukan ide-ide masyarakat. Masyarakat terutama dipersepsikan sebagai abstraksi statistik dan partisipasi

Universitas Indonesia

diukur dengan berapa banyak orang datang ke pertemuan, membawa brosur pulang atau menjawab kuesioner. Ketika masyarakat menjawab kuesioner itu tanpa mengetahui apa opini mereka sendiri. Dengan demikian apa yang masyarakat capai melalui aktivitas-aktivitas seperti diatas bahwa mereka telah berpartisipasi dalam partisipasi dan apa yang pemerintah capai adalah sebuah bukti bahwa mereka telah menempuh gerakan-gerakan melibatkan masyarakat yang dipersyaratkan.

Untuk tangga kelima dari derajat semu (*tokenism*) yaitu penentruman (*placation*). Pada tingkat ini bahwa masyarakat mulai memiliki beberapa derajat pengaruh. menempatkan sedikit orang-orang patut kalangan miskin yang dipilih dengan teliti pada pengurus agen-agen tindakan warga atau badan-badan publik seperti komite pendidikan, komisi kepolisian atau otoritas pemukiman. Pemegang kekuasaan atau badan-badan pemerintah mengizinkan masyarakat untuk memberikan saran nasihat atau rencana tetapi pemegang kekuasaan tetap menguasai hak untuk mempertimbangkan legitimasi atau kelayakan saran masyarakat. Badan-badan pemerintah membuat ketetapan dengan alasan partisipasi layak maksimum mengunci kekuatan masyarakat dimana badan-badan pemerintah membuat kebijakan adanya seperti perwakilan kota sebagai pemegang kekuasaan akhir dalam perencanaan dan pemograman dan mengesampingkan hubungan langsung badan-badan pemerintah dengan masyarakat termasuk dalam pendanaan. Badan-badan pemerintah memerlukan seperti perwakilan kota tersebut untuk menciptakan koalisi. Pengurus pembuatan kebijakan melibatkan pemegang kekuasaan lokal penting untuk membuat rencana. Badan-badan pemerintah tidak memasukan masyarakat kelas bawah dalam pengurus pembuatan kebijakan perwakilan kota. Ada juga perwakilan kota mencoba membuat komite untuk mengakomodasikan masyarakat tingkat bawah tetapi tidak memiliki fungsi membuat kebijakan atau diberi wewenang yang sangat terbatas. Perwakilan kota tidak menegosiasikan persyaratan partisipasi masyarakat dengan masyarakat pada tingkat bawah. Perwakilan kota sebenarnya tidak bekerja dengan kelompok-

Universitas Indonesia

kelompok masyarakat yang secara asli mewakili masyarakat tingkat bawah. Persetujuan dilakukan dengan diam-diam atas rencana dan merencanakan persiapan bersama badan-badan pemerintah yang kemungkinannya tidak menggambarkan pandangan masyarakat pada tingkat bawah. Masyarakat tingkat bawah yang menghadiri pertemuan tidak sadar akan hak minimal mereka, tanggung jawab dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka dari program. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup dari perwakilan kota untuk memampukan masyarakat mengkaji perwakilan kota mengembangkan rencana atau rencana inisiatif bagi diri mereka yang dibutuhkan oleh badan-badan pemerintah.

Kemudian derajat partisipasi masyarakat berikutnya yaitu kemitraan (*partnership*). Disini kekuasaan terdistribusi secara nyata melalui negosiasi masyarakat dan pemegang kekuasaan atau badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah setuju berbagi tanggung jawab pengambilan keputusan dan perencanaan melalui sebuah struktur seperti halnya pengurus kebijakan gabungan, komite perencanaan dan mekanisme bagi kebuntuan pemecahan masalah. Aturan dasar ditetapkan bukanlah diperuntukan perubahan sepihak. Kemitraan dapat bekerja paling efektif ketika terdapat dasar kekuasaan yang diorganisir dalam masyarakat dimana pemimpin masyarakat dapat akuntabel, ketika kelompok masyarakat memiliki sumber daya finansial untuk membayar pemimpin dengan honor yang memadai atas upaya waktu yang dihabiskan dan ketika kelompok memiliki sumber daya untuk merekrut dan memecat tenaga teknis mereka, pengacara dan para pengorganisir masyarakat. Dengan komposisi demikian warga memiliki beberapa pengaruh tawar menawar murni terhadap hasil akhir rencana (sepanjang kedua bagian itu menemukan itu berguna bagi memelihara kemitraan). Masyarakat dapat menyampaikan kepada pejabat kota bagian partisipasi warga yang diganti dengan merubah aturan dasar dari peran penasehat warga yang lemah kepada perjanjian pembagian kekuasaan yang kuat. Masyarakat melalui organisasi-organisasi bentukan masyarakat memiliki keanggotaan atau dalam

Universitas Indonesia

komite-komite bentukan pemerintah terkait pembuatan kebijakan. Organisasi-organisasi masyarakat mendapatkan dukungan pendanaan dari komite-komite bentukan pemerintah untuk memelihara organisasi-organisasi bentukan masyarakat. Organisasi-organisasi bentukan masyarakat memiliki kekuasaan untuk menginisiasi rencana bagi mereka untuk terlibat dalam perencanaan bersama dengan komite-komite bentukan pemerintah dan dapat mengkaji rencana inisiatif komite tersebut. Bahkan organisasi-organisasi bentukan masyarakat ini memiliki kekuasaan veto dimana tidak ada rencana yang diajukan kepada masyarakat tanpa telah dikaji oleh organisasi-organisasi bentukan masyarakat dan perbedaan opini telah berhasil dinegosiasikan dengan organisasi-organisasi bentukan masyarakat.

Derajat kekuasaan masyarakat dari tangga partisipasi masyarakat yang kedua yaitu kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power*). Pada tingkat ini, negosiasi antara masyarakat dan pejabat publik dapat menghasilkan suatu keadaan dimana masyarakat mencapai otoritas pengambilan keputusan yang dominan terhadap rencana dan program. Masyarakat memiliki kursi mayoritas pada badan-badan bentukan pemerintah terkait kebijakan, masyarakat memiliki kursi mayoritas yang jelas dan kekuasaan yang khusus dan murni. Masyarakat memegang acara yang signifikan untuk menjamin akuntabilitas program bagi mereka. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan perlu memulai proses tawar menawar daripada bertindak menekan. Masyarakat tingkat bawah dapat membuat kerjasama dalam suatu organisasi yang telah didelegasikan kekuasaan untuk menyiapkan keseluruhan rencana program dan kebijakan. Organisasi kerjasama masyarakat tersebut dapat memiliki perwakilan yang lebih besar dalam badan-badan bentukan pemerintah sehingga terjamin suara mayoritas masyarakat ketika mengajukan rencana yang dikaji oleh badan-badan bentukan pemerintah. Sisi lain bisa juga ada ketentuan dimana masyarakat memiliki veto ketika perbedaan opini tidak dapat diselesaikan lewat negosiasi.

Derajat kekuasaan masyarakat yang ketiga yaitu kontrol warganegara (*citizen control*). Pada tingkat ini, pemegang kekuasaan menjamin masyarakat dapat menatakelola sebuah program atau institusi, keterlibatan penuh dalam kebijakan dan aspek manajerial dan dapat menegosiasikan kondisi ketika pihak luar yang ingin merubah mereka. Pada tingkatan partisipasi ini tidak ada lagi persetujuan akhir pada badan-badan atau komite-komite bentukan pemerintah yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat di tingkat kota misalnya. Masyarakat tingkat bawah telah mencapai tingkatan kekuasaan yang signifikan dalam proses perencanaan, rencana tindakan tahun pertama yang akan memerlukan pembentukan beberapa institusi baru masyarakat yang keseluruhannya ditatakelola oleh masyarakat dengan sejumlah uang tertentu yang dikontrakan kepada masyarakat.

Kritik dikemukakan oleh Burns, Hambleton dan Hogget yang mengungkapkan bahwa tangga partisipasi tersebut terpusat pada analisis hubungan antara warga dengan program pemerintah tertentu. Hal ini dapat dipahami karena referensi Arnstein adalah tiga program kesejahteraan sosial Pemerintah Federal Amerika Serikat yang berkaitan dengan pembaharuan perkotaan, anti kemiskinan dan kota percontohan. Meski demikian, tetap saja teori ini digunakan oleh banyak ahli sebagai titik awal penelitian, pembahasan dan pengembangan partisipasi publik.

2.4.4. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Dalam bukunya yang berjudul *Human Relation at Work*, Davis (1962) mengemukakan hal-hal yang dapat disumbangkan dalam rangka berperan serta atau berpartisipasi terhadap suatu kegiatan, antara lain :

- (a). Pikiran (*psychological participation*)
- (b). Tenaga (*physical participation*)
- (c). Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation*)
- (d). Keahlian (*participation with skill*)

(e). Barang (*material participation*)

(f). Uang (*money participation*)

Dengan demikian, partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ketrampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu wadah atau media yang sangat urgen bagi masyarakat dalam memudahkan penyampaian pendapatnya, seringkali menjadi salah satu kendala tersendiri dalam memaksimalkan peran partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu penyediaan sarana maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan atau rembug-rembug umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertulis maupun tidak tertulis.

2.4.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143).

(a). *Jenis Kelamin*. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno et. al, (1992), mengatakan bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi.

Universitas Indonesia

- (b). *Usia*. Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno et. al, 1992). Dalam hal ini, golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.
- (c). *Tingkat Pengetahuan*. Litwin (1986) mengatakan bahwa salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan.
- (d). *Mata Pencaharian*. Mata pencaharian ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Budiharjo (1991) menyatakan bahwa banyak warga yang telah disibukan oleh kegiatan sehari-hari, kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar.
- (e). *Tingkat Pendapatan*. Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Barros (1993) menyatakan bahwa, banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin melakukan kebanyakan pekerjaan dan tidak berkontribusi uang, sementara buruh yang berpenghasilan kurang akan cenderung berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

Menurut Plummer (2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :

- (a). Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk partisipasi yang ada;
- (b). Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
- (c). Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- (d). Jenis Kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.
- (e). Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Soelaiman (1980:9-10) mengemukakan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai unsur-unsur dasar partisipasi sosial diantaranya sebagai berikut:

Universitas Indonesia

- (a). Faktor internal, mencakup unsur-unsur dasar dalam diri anggota masyarakat, antara lain :
- a) Kepercayaan diri
 - b) Solidaritas dan integritas sosial
 - c) Tanggung jawab sosial dan komitmen
 - d) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.
 - e) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat
 - f) Kepekaan dan ketanggapan terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat
- (b). Faktor eksternal, mencakup unsur luar/lingkungan yang diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi, antara lain :
- a) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.
 - b) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan terjadinya partisipasi, mobilitas penduduk dan arus urbanisasi yang memungkinkan adanya integritas dan solidaritas masyarakat dalam suatu kesatuan tempat tinggal.
 - c) Komunikasi yang intensif diantara sesama warga masyarakat, diantara warga masyarakat dengan pemimpinnya serta antara sistem sosial didalam masyarakat dengan sistem luarnya.

Universitas Indonesia

- d) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan serta mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat.

Sunarti dalam Jurnal Tata Loka (2003:9) juga menambahkan mengenai faktor eksternal yaitu pemangku kepentingan yang diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program. Pemangku kepentingan kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Pengaruh bertitik tolak kepada bagaimana kewenangan atau kekuatan pengaruh pemangku kepentingan tersebut, pentingnya bertitik tolak pada permasalahan, kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan yang menjadi prioritas dalam program. Adapun untuk menganalisis hal tersebut, maka perlu : 1) menggambarkan daftar pemangku kepentingan, 2) melakukan penilaian terhadap kepentingan tiap pemangku kepentingan kepada kesuksesan program dan kewenangan pemangku kepentingan, 3) mengidentifikasi resiko-resiko dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi desain program dan kesuksesan program.

Faktor internal dan eksternal di atas menjadi acuan dalam mengkaji motif seseorang yang terdorong untuk berpartisipasi maupun yang mengalami hambatan berpartisipasi terhadap suatu kegiatan pembangunan. Namun, faktor pendorong partisipasi terhadap suatu kegiatan pembangunan harus ditumbuhkembangkan. Berdasarkan hasil penelitian Blustain (1980) dalam Ndraha (1990), masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

- (a). Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- (b). Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

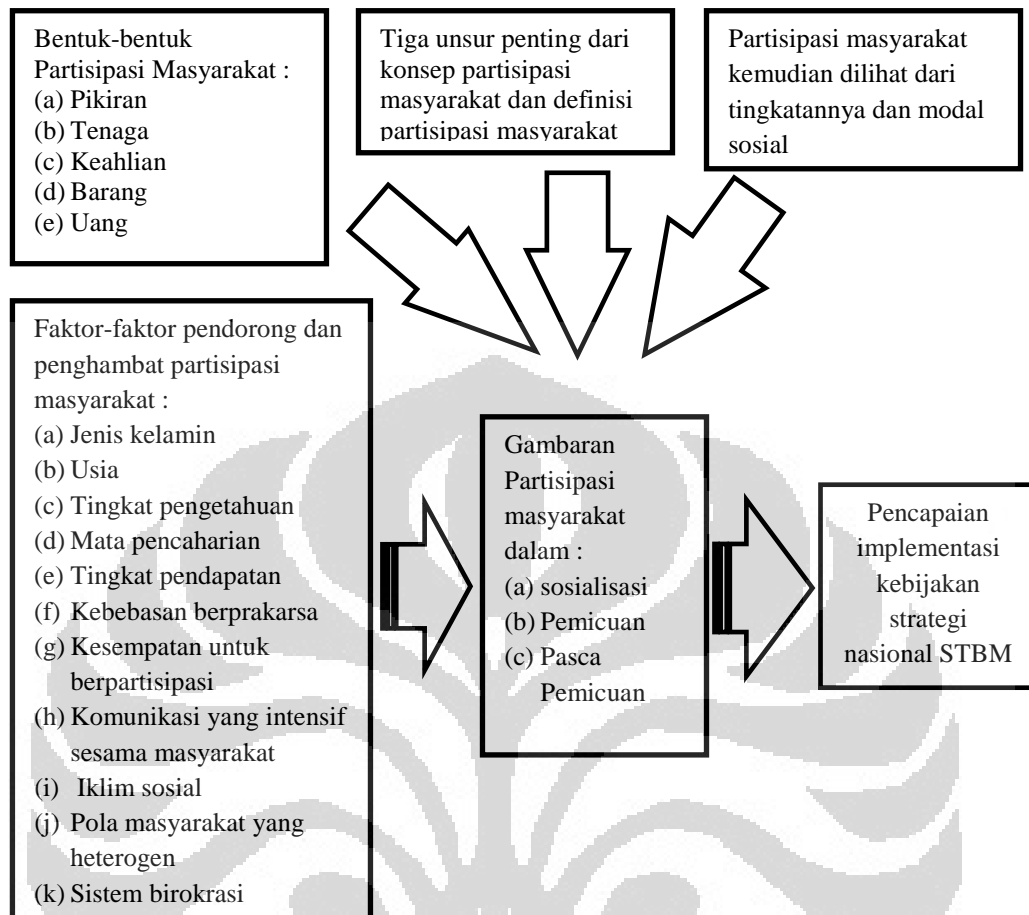
- (c). Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- (d). Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

2.4.6. Modal Sosial

Modal sosial merupakan pra kondisi penting juga yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sebuah program (Djamhuri, 2008:96). Modal sosial didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, didalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999). Fukuyama (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinya kerjasama diantara mereka. Cohen dan Prusak L.(2001) bahwa modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

2.5. Kerangka Berpikir Penelitian

Dengan mengacu pada penggambaran uraian mengenai berbagai konsep mengenai partisipasi masyarakat dalam program STBM, derajat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, keterkaitan antar konsep tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 2.2 dibawah ini :



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data empiris yang berhubungan erat dengan gambaran aktual partisipasi masyarakat desa sebagai sebuah gerakan yang diinginkan oleh kebijakan keputusan Menteri Kesehatan dalam pemecahan masalah sanitasi sampai dengan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan meningkatnya ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, faktor pendorong dan faktor penghambat bagi partisipasi masyarakat desa selanjutnya digunakan untuk menguraikan, menggambarkan, menganalisa dan menginterpretasikan partisipasi masyarakat desa dan pencapaian pelaksanaan program. Penggunaan pendekatan kualitatif dapat mengumpulkan informasi secara faktual dari kondisi suatu obyek dan dikaitkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis dan praktis.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi Strategi Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

3.3. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dimana terdapat 10 kecamatan di kabupaten tersebut telah diterapkan pelaksanaan kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Kesepuluh kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Penawangan, Godong,

Tegowanu, Kedungjati, Klambu, Brati, Karangrayung, Tawangharjo, Wirosari dan Kradenan. Dalam batasan penelitian sudah disebutkan dua desa yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu dan Desa Kronggen Kecamatan Brati. Pemilihan kedua desa dengan cara purposive sampling dengan menggunakan kriteria yaitu kecamatan yang memiliki kemajuan paling baik dalam pencapaian desa ODF (Kecamatan Tegowanu) dan kecamatan paling ketinggalan dalam pencapaian desa ODF (Kecamatan Brati)¹. Kedua desa yang akan diteliti memiliki kriteria yaitu desa yang memiliki kepala keluarga pra sejahtera cukup banyak dan sering terkena bencana banjir.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a) Studi literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah berbagai tulisan, jurnal, surat kabar, buku, makalah dan laporan kegiatan yang berkaitan dengan gerakan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengatasi masalah sanitasi.
- b) Wawancara dilakukan dengan maksud untuk “mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian,...” (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 2006:186). Selain itu dapat memastikan dan memeriksa informasi guna mengungkapkan latar belakang sosial, perilaku, keinginan dan interpretasi seseorang mengenai suatu masalah sosial. Kemudian agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas maka dimungkinkan dilakukan *probing*.
- c) Pengamatan Langsung agar memungkinkan peneliti menangkap arti fenomena dan kehidupan budaya, merasakan, serta membentuk pengetahuan sebagaimana yang dialami oleh subyek penelitian.

¹ Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

3.5. Teknik pemilihan Informan

Untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat maka dipilih informan adalah :

- a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Brati. Seseorang yang memegang jabatan ini juga sebagai fasilitator kecamatan atau tergabung dalam tim STBM kecamatan, mengetahui proses upaya mengimplementasikan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada tingkat kecamatan dan melakukan supervisi kepada fasilitator desa dan berkoordinasi dengan pemerintah desa.
- b) Sanitarian Puskesmas Kecamatan Brati. Sanitarian mengemban tugas memfasilitasi pemucuan, berkoordinasi dengan fasilitator desa, pelayanan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat melalui posyandu dan melakukan monitoring.
- c) Kepala Desa Tajemsari dan Desa Kronggen. Kepala desa menandatangani komitmen untuk membebaskan desa dari praktek buang air besar di sembarang tempat, bertanggung jawab pelaksanaan sosialisasi Strategi Nasional STBM, memilih fasilitator desa dan memastikan adanya kemajuan pelaksanaan Strategi Nasional STBM.
- d) Sekretaris Desa Tajemsari. Membantu pelaksanaan sosialisasi Strategi Nasional STBM di tingkat desa, melakukan proses administrasi dari instruksi bupati mengenai pengalokasian dana dalam alokasi dana desa untuk Strategi Nasional STBM, berkolaborasi dengan fasilitator desa dan fasilitator kecamatan dan memegang dokumen RPJM Desa Kronggen.

- e) Sekretaris Desa Kronggen. Sekretaris desa mengetahui informasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa dan memegang dokumen RPJM Desa.
- f) Fasilitator desa dari Desa Tajemsari dan Desa Kronggen. Bertugas menyelenggarakan sosialisasi mengenai Strategi Nasional STBM, melakukan pemicuan, mengorganisasi warga untuk melaksanakan monitoring, berkoordinasi dengan fasilitator kecamatan dan pemerintah desa dalam pelaksanaan Strategi STBM.
- g) Kader STBM Desa Tajemsari. Seseorang yang ditunjuk dan diangkat fasilitator desa untuk membantu fasilitator desa dengan tugas memberikan pendampingan kepada masyarakat dan monitoring
- h) Kepala Dusun. Pemegang administrasi dusun, membantu menyelenggarakan sosialisasi dan pemicuan di dusun dan memastikan kegiatan pembangunan dusun berjalan.
- i) Warga yang belum mengakses jamban sebelum Strategi Nasional STBM. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pemicuan dan mengusahakan bagi dirinya agar dapat mengakses jamban.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus dari awal dilaksanakannya penelitian dan selama proses penelitian dilakukan. Analisa data dilakukan dengan memanfaatkan data yang terkumpul. Data-data tersebut disesuaikan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan selanjutnya disajikan dalam bentuk paparan secara deksriptif. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan tahap-tahap analisis data menurut Sarantakos dalam Alston dan Bowles (1998:195) yaitu : 1) reduksi data; 2) pengorganisasian data dan 3) interpretasi data. Ketiga tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dalam rangka penarikan kesimpulan.
- b) Pengorganisasian data merupakan proses pengumpulan informasi yang betul-betul penting dan dianggap merupakan tema pusat penelitian kemudian dilakukan pengorganisasian terhadap data kedalam kelompok-kelompok tertentu sehingga memberi kemudahan dalam membaca dan memahaminya. Data-data yang diperoleh dari hasil reduksi data kemudian diorganisir dalam kelompok-kelompok tertentu yang dianggap hampir sama dan dihimpun ke dalam satu permasalahan saja.
- c) Interpretasi atau penafsiran merupakan proses mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan dan penjelasan yang akan membawa kepada kesimpulan yang telah teruji dari data-data yang sudah lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan. Dalam penelitian ini penginterpretasian data dilakukan sebagai kelanjutan dari kegiatan pengorganisasian data, berbagai data yang telah diorganisir tersebut kemudian diinterpretasikan secara mendalam dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan permasalahan guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud untuk lebih mempertajam analisa dan pemahaman terhadap berbagai temuan tersebut.

BAB 4

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN PROFIL SANITASI DAN SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN BERIKUT DUA DESA YANG DITELITI

4.1. Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat¹

4.1.1. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi *Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP)* tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka. Berdasarkan studi *Basic Human Services (BHS)* di Indonesia tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah (i) setelah buang air besar 12%, (ii) setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, (iii) sebelum makan 14%, (iv) sebelum memberi makan bayi 7%, dan (v) sebelum menyiapkan makanan 6%. Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga menunjukkan 99,20% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 47,50% dari air tersebut masih mengandung *Escherichia coli*.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per seribu penduduk pada semua umur dan 16 provinsi mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dengan *Case Fatality Rate (CFR)* sebesar 2,52. Kondisi seperti ini dapat dikendalikan melalui intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total. Hal ini dibuktikan melalui hasil studi WHO tahun 2007, yaitu kejadian diare menurun 32% dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, 45% dengan perilaku mencuci tangan pakai sabun, dan 39% perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan mengintegrasikan ketiga perilaku intervensi tersebut, kejadian diare menurun sebesar 94%.

¹ Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008

Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higiene dan sanitasi dengan menetapkan *Open Defecation Free* dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 ñ 2009. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses.

Menyadari hal tersebut di atas, pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain melakukan uji coba implementasi *Community Led Total Sanitation* (CLTS) di 6 Kabupaten pada tahun 2005, dilanjutkan dengan penganangan gerakan sanitasi total oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2006 di Sumatera Barat serta penganangan kampanye cuci tangan secara nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2007. Sebagai tindak lanjut, dilakukan replikasi CLTS di berbagai lokasi oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang menghasilkan perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat, sehingga pada tahun 2006 sebanyak 160 desa telah ODF dan tahun 2007 mencapai 500 desa. (Depkes, 2007).

Perlunya strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat berangkat dari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga diperlukan strategi yang baru dengan melibatkan lintas sektor sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing dengan leading sector Departemen Kesehatan karena sanitasi total berbasis masyarakat ini menekankan kepada 5 (lima) perubahan perilaku higienis.

4.1.2. Maksud Dan Tujuan

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

4.1.3. Pengertian

- a) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
- b) Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
- c) Open Defecation Free yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
- d) Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
- e) Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
- f) Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas:
 - a. Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
 - b. Mencuci tangan pakai sabun.
 - c. Mengelola air minum dan makanan yang aman.
 - d. Mengelola sampah dengan benar.
 - e. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
- g) Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

- h) Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana Buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

4.1.4. Isu dan Tantangan

- a) Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya.
- b) Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (studi World Bank, 2007).
- c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggarannya.

4.1.5. Strategi Nasional

4.1.5.1. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

a). Prinsip

Meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.

b). Pokok Kegiatan

- (a). Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang.
- (b). Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah.
- (c). Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.

4.1.5.2. Peningkatan Kebutuhan

a). Prinsip

Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

b). Pokok kegiatan

- (a). Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan.
- (b). Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas.
- (c). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat.
- (d). Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat.
- (e). Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

4.1.5.3. Peningkatan Penyediaan

a). Prinsip

Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b). Pokok kegiatan

- (a). Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
- (b). Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
- (c). Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

4.1.5.4. Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management*)

a). Prinsip

Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.

b). Pokok kegiatan

- (a). Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi.
- (b). Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pemberlajaran sanitasi di Indonesia.
- (c). Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

4.1.5.5. Pembiayaan

a). Prinsip

Meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.

b). Pokok kegiatan

- (a). Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri
- (b). Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong).
- (c). Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal.

4.1.5.6. Pemantauan Dan Evaluasi

a). Prinsip

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi

b). Pokok kegiatan

- (a). Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat
- (b). Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data.
- (c). Mengoptimumkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis

(d).Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

4.1.6. Pengembangan Rencana Kerja dan Indikator

a). Rencana Kerja

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

b).Indikator

Output :

- (a).Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
- (b).Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- (c).Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air,sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
- (d).Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- (e).Setiap rumah tanga mengelola sampahnya dengan benar.

Outcome :

Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku

4.2. Kondisi Geografis

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kabupaten Grobogan, wilayah Kabupaten Grobogan dibatasi oleh pegunungan Kendeng Utara dan pegunungan Kendeng Selatan yang keduanya membujur dari barat ke timur, terletak diantara $7^{\circ} - 7^{\circ}30' \text{ LS}$ dan $110^{\circ}15' - 111^{\circ}25' \text{ BT}$ yang berbatasan dengan :

Universitas Indonesia

- (a) Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora
- (b) Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora Disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang
- (c) Disebelah Barat Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak

Secara administratif, Kabupaten Grobogan yang berada pada ketinggian 41 meter di atas permukaan laut (DPL) terbagi dalam 19 kecamatan, 280 desa/kelurahan dengan ibukota Kabupaten berada di Purwodadi. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983, luas wilayah Kabupaten Grobogan adalah nomor 2 terluas di Propinsi Jawa Tengah yaitu seluas 197.586,420 Ha (1.975,86 Km²). Jarak dari utara ke selatan \pm 37 km dan jarak dari barat ke timur \pm 83 km. Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan diperoleh data bahwa pada tahun 2008 luas tanah seluruhnya seluas 197.589,511 Ha yang terdiri dari :

Tanah sawah	: 63.435,526 Ha
Tanah bukan sawah	: 134.153,985 Ha

Secara rinci, tanah bukan sawah terdiri dari :

Pekarangan/bangunan	: 29.111,020 Ha
Tegalan/kebun	: 25.168,319 Ha
Tambak/kolam	: 18.000 Ha
Padang gembala	: 2.000 Ha
Rawa	: 15.000 Ha
Hutan Negara	: 68.633,030 Ha
Hutan rakyat	: 3.619,000 Ha
Lain-lain	: 7.587,616 Ha

4.3. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Meskipun secara kuantitatif tidak terdapat kasus yang sangat menonjol, tetapi KLB perlu diwaspadai karena waktu terjadinya tidak mudah diprediksi dan dapat

menyebabkan kematian pada penderitanya. Menurut Profil Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2010 terjadi 4 jenis kejadian luar biasa di Kabupaten Grobogan yaitu *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) sebanyak 5 penderita, Difteri sebanyak 3 penderita, Rubella sebanyak 2 penderita dan Keracunan Makanan sebanyak 37 penderita. Total kasus sebanyak 47 kasus terjadi di 4 desa. Pada tahun 2010 tidak tercatat adanya kejadian luar biasa untuk penyakit diare.

Sanitasi merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Banyaknya penyakit ditularkan karena tidak dilakukan cara-cara penanganan sanitasi yang benar. Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positif apabila diikuti upaya perbaikan sanitasi. Upaya sanitasi meliputi pembagunan, perbaikan dan penggunaan sarana sanitasi, yaitu : pembuangan kotoran manusia (jamban), pembuangan air limbah (SPAL) dan pembuangan sampah dilingkungan rumah kita. Sarana lingkungan pemukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air dan timbulnya penyakit menular. Sarana lingkungan pemukiman yang dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan antara lain jamban, tempat sampah, pengelolaan limbah dan persediaan air bersih. Kondisi sarana kesehatan lingkungan di Kabupaten Grobogan berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Grobogan tahun 2010 sebagai berikut :

- (a). Persentase keluarga dengan kepemilikan jamban sebanyak 58,42% dan yang memiliki jamban sehat 76,28% dari rumah tinggal yang diperiksa.
- (b). Persentase keluarga yang memiliki tempat sampah 73,22% dan yang memiliki tempat sampah sehat sebanyak 68,83%.
- (c). Persentase keluarga yang memiliki pengelolaan air limbah 57,68 % dan yang memiliki pengelolaan air limbah yang sehat 72,16%.
- (d). Persentase keluarga yang dapat mengakses air bersih 64,68%.

Berikut gambaran komposisi kepala keluarga pra sejahtera dan penduduk yang tidak tamat sekolah dasar dari sepuluh kecamatan yang mendapat intervensi untuk implementasi kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Gambaran berikut diberikan untuk melihat pengaruhnya terhadap pencapaian implementasi kebijakan tersebut.

Tabel 4.1. Komposisi Kepala Keluarga Pra Sejahtera dan Penduduk Tidak Tamat Sekolah Dasar Kecamatan Mendapat Program STBM tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepala Keluarga Pra Sejahtera		Penduduk tidak tamat sekolah dasar	
				%		%
Kedungjati	42.411	14.684	5.509	37,5	11.920	28.1
Karangrayung	98.242	27.254	19.660	72,1	37.627	38.3
Penawangan	65.328	21.376	16.899	79,0	22.204	34.0
Kradenan	84.827	24.641	11.033	44,8	26.996	31.8
Wirosari	91.386	25.793	20.550	79,8	27.768	30.4
Tawangharjo	52.154	14.195	10.223	72,0	13.537	26.0
Brati	46.309	15.491	10.923	70,5	13.104	28.3
Klambu	35.428	12.207	5.175	42,4	11.687	33.0
Godong	88.185	26.000	10.982	42,2	24.496	27.8
Tegowanu	50.654	16.349	8.404	51,4	16.535	32.6

Sumber : Grobogan dalam Angka tahun 2011, Biro Pusat Statistik
catatan : telah diolah kembali

Pelaksanaan penelitian ini terjadi pada dua desa yaitu Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu dan Desa Kronggen Kecamatan Brati. Berikut profil dari kedua desa tersebut.

4.4. Desa Tajemsari

Kondisi Geografis Desa Tajemsari terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Tunjunharjo Kecamatan Tegowanu disebelah utara desa ini, Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu disebelah selatan desa ini, Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Demak

Universitas Indonesia

disebelah barat desa ini dan Desa Tegowanu Wetan Kecamatan Tegowanu sebelah timur desa ini. Desa Tajemsari memiliki luas sebesar 401.127 Ha. Dari sisi demografis, Desa Tajemsari pada permulaan tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 2.609 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.231 jiwa sedangkan jumlah penduduk wanita sebanyak 1.378 jiwa. Pola pemanfaatan lahan di Desa Tajemsari sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian sawah, sedangkan sisanya untuk pemukiman. Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Tajemsari adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana di Desa Tajemsari

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1.	Kantor Desa	1
2.	Balai Desa	1
3.	Polindes	1
4.	Masjid	3
5.	Mushola	12
6.	Sekolah dasar	2
7.	Taman kanak-kanak	2

Sumber : Dokumen RPJM Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu periode tahun 2012-2017

Desa Tajemsari sudah memiliki visi yang dituliskan dalam dokumen RPJM Desa yang dinyatakan sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat Desa Tajemsari yang mandiri, sehat dan beriman yang bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan dan industry kecil untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Dalam dokumen tersebut juga dituliskan misi yang dinyatakan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan produksi pertanian sebagai landasan pokok kesejahteraan masyarakat

- b) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
- c) Meningkatkan koperasi sebagai soko guru ekonomi
- d) Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan
- f) Meningkatkan peran serta wanita dalam setiap lini kegiatan desa
- g) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban
- h) Meningkatkan penggalian potensi desa untuk kesejahteraan umum
- i) Meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan
- j) Meningkatkan pembangunan moral dan spiritual masyarakat
- k) Meningkatkan kesadaran teknologi informasi dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi sehingga tercipta komunikasi yang dinamis

Desa Tajemsari telah menyusun RPJM Desa untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan dalam dokumen tersebut dituliskan masalah-masalah desa tersebut yang diurutkan menurut pentingnya masalah mulai dari peringkat pertama dan seterusnya :

- a) Harga hasil panen petani merosot pada saat panen raya
- b) Lahan tergenang kurang dimanfaatkan oleh petani
- c) Banyak anak balita di RT 02 menderita penyakit ISPA
- d) Banyak anak usia remaja tidak bekerja
- e) KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian
- f) Jalan desa di RT 01 rusak karena sering tergenang air
- g) Lingkungan RT 03 dan RT 04 lembab dan kurang sehat

- h) Sebagian besar pengurus LK Desa tidak tampak kegiatannya
- i) Pada musim kemarau sering gagal panen
- j) Banyak kasus diare dan demam berdarah
- k) Perangkat desa dinilai kurang memberikan pelayanan pada masyarakat

Disamping permasalahan diatas, dalam dokumen tersebut juga menuliskan potensi-potensi dari Desa Tajemsari yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Sumber air artesis
- b) Swadaya masyarakat
- c) Irigasi tersier
- d) Luas lahan Persawahan
- e) Adanya Kelompok tani
- f) Adanya koperasi unit desa
- g) Adanya puskesmas pembantu
- h) Adanya kebun obat keluarga
- i) Tersedia posyandu
- j) Tersedia bidan desa
- k) Terdapat tambang batu dan pasir
- l) Tersedia kayu dan bambu yang memadai
- m) Warga yang siap bergotong royong

Terdapat beberapa lembaga di Desa Tajemsari yang menggambarkan potensi masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan kehidupan berorganisasi dalam

upaya membangun desa. Daftar berikut menggambarkan lembaga-lembaga apa saja yang sudah terbangun berikut masalah dan potensinya.

Tabel 4.3. Gambaran Kondisi Lembaga yang ada di Desa Tajemsari

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1.	Pemerintah Desa Dan Badan Perwakilan Desa	Perangkat desa Kurang optimal dalam hal pelayanan pada masyarakat	Perangkat lengkap, Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Pengurus lengkap, Tenaga pengurus potensial
3.	Kelompok tani	Kegiatan kelompok tani di desa kurang aktif	Lembaga ada, Pengurus lengkap
4.	Simpan Pinjam	Kegiatan simpan pinjam tidak lancar	Modal usaha cukup, Pengurus lengkap
5.	PKK	Kurang aktif dalam pembinaan di kalangan masyarakat	Ada program pelatihan, Ada sarana dan prasarana

Sumber : Dokumen RPJM Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu periode tahun 2012 - 2017

4.5. Desa Kronggen

Desa Kronggen menurut data dari statistik hasil pemetaan tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada LONG 110,89806 °E (Bujur Timur) dan RAT 07,13255 ° S (Lintang Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Disebelah utara desa berbatasan dengan Desa Tegal Sumur
- b) Disebelah timur desa berbatasan dengan Desa Katekan dan Karangari
- c) Disebelah selatan desa berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi dan Penawangan
- d) Disebelah barat desa berbatasan dengan Desa Selonjari dan Kandangrejo

Luas wilayah Desa Kronggen adalah 9.662,347 Ha, yang terdiri dari :

- a) Sawah seluas 427.000 Ha
- b) Tanah bukan sawah terdiri atas
 - Pekarangan seluas 145.000 Ha
 - Tegal seluas 155.000 Ha
 - Hutan seluas 199.000 Ha
 - Lainnya seluas 36.437 Ha

Berdasarkan topografi, Desa Kronggen memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl. Sedangkan keadaan hidrologi Desa Kronggen terdapat satu sungai yaitu Sungai Lusi yang melewati Dusun Sembukan.

Adapun Desa Kronggen secara administratif terdiri dari 8 dusun dengan jumlah RW sebanyak 10 dan jumlah RT sebanyak 43 sebagaimana berikut :

- a) Dusun Kronggen Krajan terdiri dari : 1 RW dan 6 lingkungan RT
- b) Dusun Permas terdiri dari : 1 RW dan 6 lingkungan RT
- c) Dusun Sinawah terdiri dari : 2 RW dan 10 lingkungan RT
- d) Dusun Sobotuwo terdiri dari : 1 RW dan 2 lingkungan RT

- e) Dusun Mayang terdiri dari : 1 RW dan 4 lingkungan RT
- f) Dusun Satreyan terdiri dari : 1 RW dan 3 lingkungan RT
- g) Dusun Karangasem terdiri dari : 1 RW dan 3 lingkungan RT
- h) Dusun Sembukan terdiri dari : 2 RW dan 10 lingkungan RT

Banyaknya penduduk Desa Kronggen diketahui sebesar 7.489 jiwa, terdiri dari 3.789 laki-laki dan 3.700 jiwa perempuan dan 2.402 kepala rumah tangga. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,72% dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Kronggen rata-rata sebesar 1502 jiwa per km². Tingkat pendidikan penduduk Desa Kronggen untuk usia 5 tahun keatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kronggen

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tamat perguruan tinggi	164
2.	Tamat akademi	
3.	Tamat SLTA	382
4.	Tamat SLTP	656
5.	Tamat SD	3.513
6.	Tidak tamat SD	39
7.	Tidak sekolah	79

Sumber : Dokumen RPJM Desa Kronggen Kecamatan Brati periode tahun 2012-2017

Dari sisi mata pencaharian, Desa Kronggen adalah desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain-lain, sebagaimana tergambar dalam tabel struktur mata pencaharian berikut :

Tabel 4.5. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	131
2.	TNI/Polri	
3.	Karyawan	
4.	Wiraswasta	559
5.	Tani	913
6.	Pertukangan	30
7.	Buruh tani	929

Sumber : Dokumen RPJM Desa Kronggen Kecamatan Brati periode tahun 2012-2017

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Kronggen adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Kepemilikan Ternak

Ayam/itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
18.552		378	4	1.259

Sumber : Dokumen RPJM Desa Kronggen Kecamatan Brati periode tahun 2012-2017

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Kronggen secara garis besar adalah sebagai berikut :

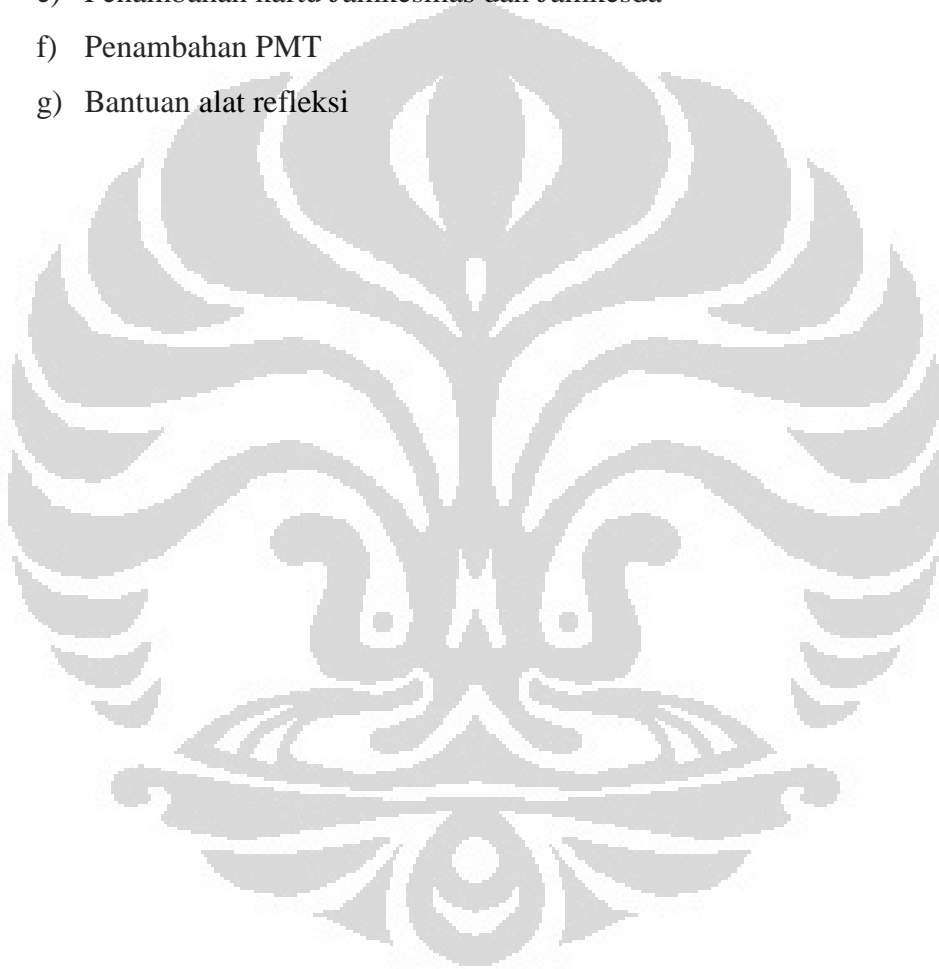
Tabel 4.7. Sarana dan Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan kecamatan	Jalan Desa	Masjid/Mushola
1 unit	6 km	9 km	10.5 km	53

Sumber : Dokumen RPJM Desa Kronggen Kecamatan Brati periode tahun 2012-2017

Desa Kronggen Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun, untuk bidang kesehatan diperoleh daftar masalah sebagai berikut :

- a) Bantuan fogging dan abate
- b) Pengobatan masal
- c) Bantuan jamban
- d) Khitanan masal
- e) Penambahan kartu Jamkesmas dan Jamkesda
- f) Penambahan PMT
- g) Bantuan alat refleksi



BAB 5

PEMBAHASAN

Dalam bab ini mendeskripsikan dan menganalisa fakta-fakta temuan lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tentang Strategi Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008) di Kabupaten Grobogan khususnya di Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu dan Desa Kronggen kecamatan Brati. Berdasarkan maksud di atas maka bab ini dibagi dalam dua kelompok penjelasan. Kelompok penjelasan pertama menuliskan fakta-fakta empiris yang terjadi dalam implementasi strategi di atas. Kelompok kedua melakukan analisa terhadap fakta-fakta partisipasi masyarakat dari kelompok pertama.

5.1. Fakta-fakta Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

5.1.1. Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu

5.1.1.1. Komitmen Kepala Desa

Kepala desa mendapatkan penjelasan mengenai program STBM di kantor Camat Tegowanu dan dalam penjelasan itu disampaikan bahwa program STBM merupakan sebuah upaya untuk mengatasi angka kematian bayi dan balita karena diare. Dari pihak pemerintah kecamatan mewajibkan semua desa untuk berkomitmen dengan memberikan tandatangan untuk membebaskan desa dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tegowanu mengatakan : “Tidak bisa desa tidak ikut program ini” (Sri Mulyati, 24 Maret 2012). Menanggapi ajakan dari pemerintah kecamatan tersebut Kepala Desa Tajemsari menyatakan kekelasannya menandatangani komitmen tersebut. Kepala Desa Tajemsari mempertimbangkan perlu adanya program STBM di desanya dengan alasan seperti dalam kutipan

berikut : “Ekonomi masyarakat desa masih terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan sehingga untuk membuat wc masih terkendala sehingga menjadi dasar kami untuk memacu masyarakat dalam program ini” (Setyobudi, 4 Maret 2012) dan “Sesuai dengan kemajuan zaman agar masyarakat punya etika tidak buang air besar di sembarang tempat” (Setyobudi, 4 Maret 2012).

Pada sosialisasi STBM pada tingkat kecamatan, Kepala Desa Tajemsari diminta untuk mencarikan orang-orang di desanya untuk menjadi fasilitator desa dan beliau memahami bahwa fasilitator desa yang akan bertugas menjalankan program STBM.

5.1.1.2. Tahap Sosialisasi Program STBM di Tingkat Desa

Menindaklanjuti komitmen bersama di atas, kemudian diselenggarakan sosialisasi program STBM pada tingkat desa oleh perangkat pemerintah desa bertempat di balai desa dengan mengundang perwakilan-perwakilan dari dusun. Penentuan waktu kegiatan sosialisasi ini dipertimbangkan bersama-sama oleh perangkat pemerintah desa dan fasilitator desa. Kemudian sosialisasi ini terlaksana yang dihadiri oleh 40 orang sebagai perwakilan-perwakilan tersebut dan sebanyak 20 persen perwakilan yang diundang tidak hadir (*lampiran 2 halaman xlv*). Fasilitator desa yang lain, Saudari Upid Indrawati, menjelaskan bahwa pertemuan sosialisasi ini dihadiri juga oleh sekretaris desa, perangkat pemerintah desa dan sanitarian dari Puskesmas Kecamatan Tegowanu. Dalam penuturan beliau juga dikatakan bahwa sosialisasi ini menjelaskan efek samping dari buang air besar di sembarang tempat yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan membangun kesadaran masyarakat agar buang air besar pada jamban. Setelah diberi penjelasan mengenai program STBM kemudian masyarakat desa diberi kesempatan untuk bertanya. Dalam kesempatan bertanya tersebut, warga bertanya mengenai ada atau tidaknya bantuan untuk membuat jamban. Selalu ada anggapan dari masyarakat bahwa bila ada program baru selalu tersedia bantuan seperti dikatakan oleh Bapak Kristiandoko, fasilitator desa, sebagai berikut “Warga bertanya apakah ada bantuan. Warga berpikir kalau ada

sosialisasi tentang program selalu ada bantuan” (Bapak Kristiandoko, 4 Maret 2012). Pertanyaan masyarakat tersebut ditanggapi oleh fasilitator desa seperti yang dituturkan sebagai berikut :

“Kami menjawab bahwa program STBM ini adalah program non subsidi atau program pemberdayaan masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Warga agak kecewa karena tidak ada bantuan....Saya menyampaikan kalau ada program tidak ada bantuan seharusnya tidak masalah dan program untuk kita bersama. Warga akhirnya dapat menerima program STBM” (Bapak Kristiandoko, 4 Maret 2012)

Terdapat ekspresi kekecewaan dari masyarakat atas tanggapan yang disampaikan oleh fasilitator desa. Penjelasanpun ditambahkan oleh Bapak Kristiandoko untuk menambahkan pengertian kepada masyarakat dan beliau meyakini bahwa program STBM dapat diterima oleh masyarakat.

Selang beberapa minggu dari sosialisasi pada tingkat desa kemudian diadakan sosialisasi STBM pada tingkat dusun sampai dengan tingkat rukun tetangga (RT). Sosialisasi pada tingkat ini dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan pengajian kaum bapak regular setiap malam jumat yang disebut dengan Jamaah Tahlil dan juga mengadakan pertemuan khusus yang mengundang masyarakat untuk menghadiri sosialisasi dan pemicuan. Sosialisasi STBM pada tingkat dusun atau RT ini disampaikan oleh fasilitator desa yang mengadakan sosialisasi program STBM dari satu perkumpulan Jamaah Tahlil ke Jamaah Tahlil di desa ini. Kehadiran masyarakat pada pertemuan pengajian Jamaah Tahlil sudah merupakan kebiasaan yang berlangsung selama 18 tahun dan didorong oleh faktor kesamaan agama, kerukunan dan karena jarang bertemu dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh kesibukan bekerja dan semua kaum bapak yang terbiasa hadir Jamaah Tahlil merasakan kerukunan itu. Di wilayah tanggung jawab fasilitator desa yang lain, Saudari Upid Indrawati, sosialisasi dan pemicuan diadakan dengan sengaja mengundang masyarakat pada siang hari pada jam yang umum masyarakat istirahat bekerja dari sawah dan banyak dihadiri oleh ibu-ibu sementara warga yang tidak hadir beralasan karena masih bekerja di sawah.

5.1.1.3. Tahap Pemicuan

Fasilitator desa, Bapak Kristiandoko, menjelaskan tentang tujuan pemicuan seperti yang dituturkannya sebagai berikut : “Tujuan pemicuan agar warga terpicu dari yang tidak tahu sama sekali menjadi mengerti efek samping dari buang air besar di sembarang tempat sehingga orang itu terpicu dan membuat jamban” (Bapak Kristiandoko, 18 Maret 2012). Fasilitator desa memfasilitasi pemicuan kepada masyarakat dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga yang digunakan adalah gelas yang berisi air minum dan kemudian diilustrasikan bahwa ada lalat yang hinggap di permukaan gelas yang sebelumnya sudah hinggap terlebih dahulu pada sebuah kotoran manusia setelah air dalam gelas diminum dengan posisi mulut menempel pada gelas tersebut. Kemudian penjelasan lain yang digunakan dalam pemicuan kepada masyarakat seperti tidak baik bila ada anak gadis dari anggota keluarga diintip oleh orang lain ketika buang air besar di kali dan beresiko bagi masyarakat ketika buang air besar pada malam hari. Teknik pemicuan lain seperti teknik pemetaan lokasi tempat buang air besar di sembarang tempat dan keluarga yang belum akses jamban tidak digunakan demikian juga dengan teknik transek untuk membantu masyarakat untuk mendalami persoalan buang air besar di sembarang tempat tidak digunakan. Hal-hal itu tidak dapat dilakukan mengingat pertemuan dilakukan di malam hari. Saudari Upid Indrawati mengatakan ketika pemicuan dijelaskan dampak negatif dari buang air besar di sembarang tempat seperti terjadinya penyakit diare dan penjelasan ini memunculkan perasaan takut dari masyarakat. Tugas melakukan pemicuan lebih banyak dikerjakan oleh Bapak Kristiandoko. Beberapa warga yang menjadi peserta pemicuan memahami pesan yang disampaikan pada pemicuan adalah bahwa warga diminta membuat wc. Bapak Sudarmin, salah seorang warga yang juga hadir di jamaah tahlil mengatakan bahwa fasilitator desa, Bapak Kristiandoko dan kader STBM, Bapak Wakijan, yang memberi pemicuan kepada warga. Setelah praktek pemicuan fasilitator desa menanyakan kepada peserta pemicuan yang belum memiliki jamban di rumahnya dan diminta untuk menuliskan nama, kapan akan membuat jamban dan tanda tangan dan setelah

jamban dibangun supaya anggota masyarakat melaporkan. Keterangan warga-warga yang diwawancarai dalam penelitian ini, seperti Bapak Selamat, Ibu Sri Haryanti dan Bapak Sudarmin, mengatakan bahwa ada perasaan tidak enak ketika diminta membuat jamban.

Setelah praktek pemicuan dilakukan muncul pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat menanggapi penyampaian pemicuan oleh fasilitator desa. Pernyataan-pernyataan yang muncul dari anggota masyarakat berupa pernyataan yang menggambarkan kesadaran mereka atas masalah buang air besar di sembarang tempat. Ada anggota masyarakat yang menyatakan akan membuat jamban sederhana dan ada juga pernyataan anggota masyarakat yang menunggu bantuan dari pihak manapun dan Kepala Desa Tajemsari menjelaskan juga bahwa ada warga yang menanyakan mengenai apakah ada bantuan untuk pembangunan jamban. Bapak Kristiandoko juga menambahkan mengenai kejadian setelah praktek pemicuan dengan mengutip pernyataan peserta pemicuan sebagai berikut “kami tahu kalau buang air besar di sembarang tempat dapat menimbulkan penyakit tetapi masalah ekonomi sulit, hidup sehari-hari tercukupi sudah bersyukur” dan hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Tajemsari dalam wawancara terpisah bahwa masyarakat mengungkapkan kesulitannya membangun jamban karena masalah ekonomi. Kader STBM, Bapak Wakijan, mengatakan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk membuat jamban namun masalah pendapatan yang rendah ini yang menjadi hambatan untuk membuat jamban.

Setelah praktek pemicuan, muncul tanggapan dari anggota masyarakat yang sudah memiliki jamban di rumahnya dan tanggapan itu berupa menyinggung anggota masyarakat yang tidak memiliki jamban. Warga yang sudah memiliki jamban memberi pesan agar membuat jamban kepada anggota masyarakat yang belum memiliki jamban. Anggota masyarakat yang diingatkan agar membuat jamban merasa terganggu perasaan namun tidak sampai merusak kerukunan diantara anggota masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh beberapa anggota masyarakat dalam kesempatan wawancara terpisah. Tidak muncul adanya tawaran

bantuan dari anggota masyarakat yang sudah memiliki jamban untuk anggota masyarakat yang belum memiliki jamban. Kemudian tidak muncul pernyataan-pernyataan ide dari peserta pertemuan Jamaah Tahlil sebuah tawaran solusi yang bersama-sama mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat atau membantu anggota masyarakat yang belum memiliki jamban. Hal yang sama juga dikatakan oleh fasilitator desa yang lain, Saudari Upid Indrawati, bahwa tidak ada diskusi membicarakan apa yang bisa dilakukan bersama. Masalah buang air besar di sembarang tempat di desa ini belum dipandang sebagai masalah bersama masyarakat yang menuntut penyelesaian dengan menyusun rencana bersama untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu pengalaman Saudari Upid Indrawati, fasilitator desa, mengatakan bahwa ketika pertemuan sosialisasi dan pemicuan di tingkat dusun dimana masyarakat diundang untuk hadir terdapat ibu-ibu peserta pemicuan yang menanyakan bantuan juga. Menanggapi pertanyaan tersebut, fasilitator desa menjelaskan bahwa tidak ada subsidi dan masyarakat menyambut penjelasan itu dengan mengatakan “kok cuma itu saja”. Masyarakat masih menekankan keinginannya terhadap bantuan dalam membuat jamban di rumahnya.

Bapak Kristiandoko mengatakan bahwa ketika mengundang masyarakat untuk menghadiri pemicuan tidak diberitahukan isi acara pertemuan dalam undangan tersebut dan dikhawatirkan masyarakat tidak hadir pertemuan pemicuan. Pertemuan pemicuan yang diadakan dengan cara mengundang masyarakat dihadiri hanya 30 – 40 orang saja dan jumlah itu belum seluruhnya datang. Warga-warga peserta pemicuan yang diwawancarai dalam penelitian ini mengatakan bisa menghadiri pertemuan pemicuan karena kebetulan sedang beristirahat di rumah. Pertemuan pemicuan demikian juga dihadiri oleh kepala desa.

Fasilitator desa bersama kader STBM tingkat dusun menyatakan bahwa mereka berupaya agar terjadi perubahan perilaku sebagian masyarakat dari perilaku buang air besar di sembarang tempat menjadi buang air besar pada

jamban. Penekanan mereka adalah bukan pada memiliki jambannya yang menjadi tujuan dilakukannya pemicuan namun memotivasi anggota masyarakat berubah perilaku. Fasilitator desa berkeyakinan bahwa bila perilaku anggota masyarakat sudah berubah maka anggota masyarakat tersebut akan memiliki jamban.

5.1.1.4. Tahap Pasca Pemicuan

Pada tahap ini digambarkan beragam dinamika dan pencapaian-pencapaian yang terjadi yang kemudian dikelompokkan penjelasannya. Penggambaran aspek-aspek pencapaian yang terjadi mengacu kepada butir-butir dari Peraturan menteri kesehatan tentang Strategi Nasional Sanitasi Nasional Berbasis Masyarakat.

a). Monitoring dan pengawasan

Saudari Upid Indrawati, fasilitator desa, mengatakan bahwa setelah pemicuan dilakukan pemeriksaan kepada anggota masyarakat yang sudah berkomitmen untuk membuat jamban. Fasilitator desa juga ditugaskan untuk melakukan pemantauan kepada anggota masyarakat yang sudah berjanji membuat jamban dan hal ini dikatakan oleh kedua fasilitator desa di Desa Tajemsari.

Fasilitator desa, Bapak Kristiandoko, mengutarakan mengenai alur informasi yang dibangun mengenai kemajuan penambahan jamban keluarga yang dibangun oleh anggota masyarakat yang belum memiliki jamban. Fasilitator desa 'meminta bantuan' kepada rekan-rekannya di perangkat pemerintahan desa agar melaporkan kepada fasilitator desa bila terdapat penambahan jumlah jamban di wilayah RT atau dusun tempat tinggalnya. Alur informasi yang dibangun seperti dituturkan oleh fasilitator desa sebagai berikut : "Pada saat ketemu tidak sengaja perangkat desa menyampaikan siapa dari warga yang baru saja membuat jamban yang kebetulan berada tinggal di wilayah perangkat desa tersebut"(Bapak Kristiandoko, 17 Maret 2012). Informasi mengenai penambahan jumlah jamban dibangun disampaikan dari perangkat desa yang berdomisili di suatu dusun atau RT pada pertemuan-pertemuan tidak sengaja.

b). Upaya dan persoalan warga mengakses jamban

Terdapat beragam upaya yang dilakukan warga agar dapat mengakses jamban kloset ataupun jamban cubluk tertutup. Keberagaman tersebut antara lain seperti yang dikatakan oleh fasilitator desa, Saudari Upid Indrawati, bahwa warga mengeluarkan dana pribadi untuk membuat jamban yang sebelumnya sudah berkomitmen untuk membuat jamban. Warga juga berupaya agar dapat bantuan seperti keterangan Kepala Desa Tajemsari bahwa ada anggota masyarakat yang menanyakan dana. Berupaya agar mendapat bantuan tersebut karena mengalami kesulitan keuangan. Mereka memohon kepada kepala desa agar mengusahakan bantuan.

Oleh karena faktor kesulitan keuangan dalam membangun jamban, warga menyatakan kesanggupan membuat jamban setelah panen karena disaat itu uang baru tersedia. Keterangan kepala desa bahwa ada warga yang menyatakan akan membuat jamban setelah dia mampu secara ekonomi. Kepala desa menambahkan bahwa kondisi kesulitan keuangan keluarga, sebagian warga Desa Tajemsari berakibat tidak dapat membangun jamban kloset. Seperti warga yang diwawancara dalam penelitian ini yaitu Ibu Tuti, warga RT 02 RW 04 Dusun Plosorejo sampai sekarang belum dapat membuat jamban di rumah karena kesulitan keuangan. Agar dapat mengakses jamban dan tidak buang air besar di sembarang tempat, Ibu Tuti bersama keluarganya menumpang jamban kepada familinya. Bapak Suardi, yang diwawancari dalam penelitian ini, juga menumpang jamban dengan familinya. Kesulitan keuangan ini juga dialami oleh Bapak Sudarmin yang baru satu bulan memiliki jamban kloset dan menceritakan mengapa baru satu bulan lalu membuat jamban kloset seperti perkataan berikut : “Namanya orang cari rejeki ya baru dapat uangnya baru saat itu, kebutuhan keluarga banyak, yang utama untuk anak sekolah” (Bapak Sudarmin, 24 Maret 2012). Bapak Sudarmin sebenarnya menyadari akibat buruk buang air besar di kali namun kesulitan keuangan tersebut yang membuatnya sulit mengatasi masalah buang air besar di kali.

Penelitian ini menemukan warga yang bernama Ibu Munarni, warga RT 02 RW 04 Dusun Plosorejo, bahwa menurutnya menumpang jamban ke tetangga sebanyak satu atau dua kali tidak ada masalah namun tidak mungkin terus menerus menumpang wc dan perasaannya menjadi tidak enak sehingga beliau dan keluarganya tetap buang air besar di kali. Beliau mengalami kesulitan keuangan untuk membangun jamban dan harus melakukan pengeluaran keuangan untuk menghadiri hajatan yang banyak diselenggarakan setelah panen.

Persoalan kesulitan keuangan dalam membangun jamban juga dialami oleh beberapa orang lain yang ditemui dalam wawancara penelitian ini. Beragam usaha dilakukan agar dengan kemampuan keuangan yang ada dapat memiliki jamban kloset seperti pengerjaan pembangunan jamban dengan minta tolong kepada famili dengan upah lebih rendah dari tarif pekerja tukang normal dan upaya membangun jamban kloset dengan cara mencicil pengadaan material dan selesai dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan dan lama setelah pemicuan (Sri Haryanti, 28 Maret 2012).

Upaya warga membangun jamban ini juga ditunjukkan oleh warga desa yang bekerja di kota-kota besar. Mendengar penjelasan agar membuat jamban, warga tersebut mau mengubah prioritas belanja mereka setelah mendapat penghasilan dari pekerjaan mereka kepada pengadaan material jamban seperti dijelaskan oleh Bapak Muslikhin (*lampiran 2 halaman lx*). Penjelasan Bapak Muslikhin bahwa dahulu warga Desa Tajemsari yang bekerja di kota-kota besar kurang memperhatikan persoalan di desa namun kemudian mereka diorganisir agar peduli dengan desanya dan mereka merespon pembangunan desa (*lampiran 2 halaman lx*). Bapak Kristiandoko mengatakan bahwa hanya sebagian saja dari warga Desa Tajemsari yang bersikap seperti itu (*lampiran 2 halaman lii*).

c). Penyebaran pesan-pesan pemicuan

Warga-warga yang diwawancarai dalam penelitian ini mengetahui adanya pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka agar tidak buang air besar di sembarang tempat dan segera mengakses jamban. Frekuensi mendengar pesan

tersebut beragam variasi mulai dari satu kali seperti Ibu Sri Haryanti dan beberapa kali seperti Ibu Munarni dan Bapak Sudarmin. Tempat mendengar pesan tersebut dapat mereka dengar ketika menghadiri pertemuan sosialisasi dan pemicuan seperti Bapak Suardi, Ibu Ngatimah dan Ibu Sri Haryanti, dikunjungi ke rumah mereka oleh kader STBM seperti Ibu Ngatimah, ketika menghadiri pertemuan jamaah tahlil seperti Bapak Sudarmin dan posyandu seperti Ibu Munarni. Orang yang menyampaikan pesan tersebut juga beragam mulai dari fasilitator desa, kader STBM, bidan, istri kepala desa dan mendengar dari keluarga atau famili mereka seperti Bapak Sugiono. Keterangan Bapak Sugiono mengatakan bahwa banyak kesempatan bertemu dengan fasilitator desa dan ketua RT namun tidak pernah mendengar langsung dari mereka tentang pesan-pesan tersebut. Warga-warga tersebut mendengar pesan-pesan tersebut sejak 1 tahun lalu dan ada yang mengatakan sejak tahun 2010 atau tahun 2011. Semua warga yang diwawancarai dan mendengar langsung pesan-pesan tersebut dari fasilitator desa atau kader STBM mengatakan merasakan perasaan tidak nyaman.

d). Kemajuan akses jamban kloset atau jamban cubluk tertutup

Terdapat anggota masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan pemicuan kemudian membuat jamban baik jenis kloset maupun cubluk tertutup. Bapak Wakijan, kader STBM, tidak menyarankan membuat jamban cubluk sehingga semua diwajibkan membuat jamban kloset bagi warga karena jamban cubluk menimbulkan bau yang tidak sedap dan ketika banjir datang jamban jenis cubluk tertutup air. Sebagian anggota masyarakat yang belum punya jamban menumpang menggunakan jamban milik saudaranya dan hal ini sama dengan yang dikatakan oleh beberapa warga yang diwawancarai dalam penelitian ini seperti Ibu Tuti, warga RT 02 RW 04 Dusun Plosorejo dan Bapak Suardi, warga RT 03 RW 03 Dusun Mlangi. Penelitian ini juga menemukan warga yang belum sama sekali membuat jamban seperti keluarga Ibu Munari, warga RT 02 RW 04 Dusun Plosorejo yang sampai sekarang belum memiliki jamban di rumah dan buang air besar masih di kali.

Fasilitator desa, Bapak Kristiandoko, mengatakan pengalamannya selama masa pekerjaan monitoring bahwa ada anggota masyarakat yang semula bersedia untuk membuat jamban bila disediakan bantuan dan sampai dengan sekarang anggota masyarakat tersebut sudah membuat jamban. Terdapat anggota masyarakat akan melaksanakan komitmennya untuk membuat jamban setelah panen. Kader STBM, Bapak Wakijan, mengatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya telah terbangun dua unit jamban kloset setelah panen.

Terdapat beberapa variasi waktu bagi warga untuk membuat jamban di rumah seperti beberapa warga yang diwawancarai dalam penelitian ini, antara lain Bapak Slamet RT 03 RW 04 Dusun Plosorejo baru saja 3 bulan lalu membangun jamban kloset di rumah dengan biaya 1,5 juta rupiah dan sebelumnya pernah buang air besar di sungai, Bapak Sudarmin, warga RT 02 RW 04 Dusun Plosorejo, baru satu bulan lalu selesai membangun jamban kloset dengan biaya 700 ribu rupiah, Bapak Sugiono, warga RT 03 RW 04 sejak satu tahun lalu selesai membangun jamban kloset berikut kamar mandi dengan biaya 7 juta rupiah dan setelah itu tidak pernah lagi buang air besar di sungai dan Ibu Ngatimah, warga RT 03 RW 03 Dusun Mlangi selesai membangun jamban kloset pada bulan Desember 2011 lalu dengan biaya lebih dari satu juta rupiah.

Keterangan Bapak Muslikin bahwa kakus-kakus yang terpasang di atas selokan atau kali sudah dibongkar dengan tujuan agar warga tidak kembali kepada perilaku buang air besar di sembarang tempat. Keterangan ini juga disampaikan oleh warga seperti Ibu Ngatimah dan Ibu Sri Haryanti warga Dusun Mlangi yang mengaku bahwa kakus tersebut memang sudah dibongkar.

Disisi lain terdapat warga, dalam hal ini Bapak Suardi, hingga sekarang tidak berani buang air besar di atas selokan dengan alasan takut ditegur keras oleh Bapak Muslikhin, seorang kader STBM. Keterangan dari fasilitator desa, Bapak Kristiandoko dan pengakuan dari Bapak Suardi sendiri mengatakan bahwa ada suatu pemahaman bagi warga di Desa Tajemsari yang menganggap perangkat

pemerintah desa merupakan orangtua mereka sehingga warga bersikap patuh kepada perangkat pemerintah desa.

Warga-warga yang diwawancarai dalam penelitian ini, seperti Bapak Sudarmin, Ibu Munarni dan Ibu Sri Haryanti, menjelaskan manfaat jamban kloset yang dimilikinya dan menyebutkan bahwa tidak perlu pergi jauh lagi ke kali bila buang air besar, ketika terjadi hujan dan pada waktu malam hari tidak dirasakan repot lagi harus pergi ke kali dan mudah untuk buang air besar.

Desa Tajemsari sempat mengadakan selebrasi desa terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat seperti dikatakan oleh Bapak Kristiandoko dan beliau mengatakan selebrasi ini atas inisiatif dari Ibu Sri Mulyati. Selebrasi dilakukan di kantor desa dan masyarakat sengaja diundang dan kemudian yang hadir hanya 60% dari yang diundang karena masih banyak masyarakat yang masih bekerja di sawah. Fasilitator desa bersama kader STBM berupaya kerja keras menyelenggarakan kegiatan ini.

e). Tetap berperilaku buang air besar di sembarang tempat

Pengalaman monitoring fasilitator desa dan kader STBM mengatakan bahwa masih menemukan anggota masyarakat yang melakukan praktek buang air besar di kali dan mereka menilai bahwa masyarakat sudah terjebak pada kenyamanan melakukan praktek itu. Saudari Upid Indrawati menuturkan dalam wawancara berikut : “Faktanya di dusun Plosorejo warga sudah membuat jamban tetapi masih tetap saja buang air besar di sungai. Meskipun jamban sudah jenis kloset karena warga merasa sudah kebiasaan” (Upid Indrawati, 18 Maret 2012).

Hal ini juga didukung oleh keterangan Kader STBM, Bapak Wakijan, yang menjelaskan bahwa terdapat warga yang sudah memiliki jamban kloset di rumah namun masih melakukan praktek buang air besar di sembarang tempat. Warga tersebut masih seperti itu karena septitank dari jamban klosetnya sudah penuh dan belum dikuras.

Ibu Munarni, yang diwawancarai dalam penelitian ini, karena kesulitan keuangan dalam membangun jamban membuat dia dan keluarganya tetap melakukan buang air besar di kali. Beliau juga sudah mendengar pengarahannya agar tidak buang air besar di sembarang tempat dan segera mengakses jamban. Ibu Munarni menceritakan bahwa tidak merasa terganggu oleh tetangga dengan keadaan dirinya yang masih buang air besar di kali dan beliau pasrah dengan keadaan keuangan rumah tangganya yang belum bisa membuat jamban

f). Bencana banjir

Dipertengahan berjalannya program STBM sempat terjadi bencana banjir. Banjir menyebabkan masyarakat kembali melakukan praktek buang air besar di kali dan ini dilakukan didorong oleh perilaku lama mereka menurut keterangan dari Saudari Upid Indrawati dan Bapak Muslikin. Banjir dijadikan sumber alasan melakukan praktik buang air besar di sembarang tempat. Salah seorang kader STBM, Bapak Muslikhin, mengatakan bahwa masalah itu menjadi pekerjaan rumahnya dan sekarang sudah terantisipasi.

Beberapa warga yang diwawancarai seperti Ibu Ngatimah, warga RT 03 RW 03 Dusun Mlangi dan Ibu Sri Haryanti, warga RT 02 RW 03 Dusun Mlangi, telah membangun jamban dengan posisi lebih tinggi sehingga ketika musim banjir terjadi jamban kloset mereka dapat dipergunakan seperti ketika banjir awal tahun 2012. Demikian juga warga yang menumpang jamban kepada familinya tetap melakukan praktek buang air besar di jamban kloset.

g). Kesadaran warga yang meningkat

Penjelasan Bapak Selamat, Ketua RT 03 RW 04 Dusun Plosorejo, mengatakan bahwa sekarang warga sudah merasa malu buang air besar di sungai padahal dahulu sekitar 3 tahun lalu merupakan hal yang biasa dan umum bagi warga buang air besar di sungai dan hal demikian juga dikatakan salah seorang warganya yaitu Bapak Sugiono yang sudah merasa malu bila buang air besar di sungai. Bapak Sugiono menyebutkan bahwa buang air besar di sungai berakibat

mengotori lingkungan dan Bapak Selamat mengatakan bahwa buang air besar di sungai dapat mengotori wilayah-wilayah lain yang dilalui sungai. Warga lain, Ibu Munarni, mengatakan bahwa akibat buang air besar di sembarang tempat dapat menimbulkan penyakit diare akibat kuman yang dibawa lalat yang hinggap di makanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa warga sebenarnya sudah memahami ketika buang air besar di selokan dapat mengganggu tetangga dan baunya terasa.

h). Pemerintah Desa

Bapak Kristiandoko mengatakan bahwa ada pemahaman pada warga di Desa Tajemsari bahwa perangkat pemerintah desa dianggap sebagai orangtua maka apa yang diminta oleh perangkat pemerintah harus dibantu dan demikian sebaliknya bila warga memerlukan bantuan maka perangkat pemerintah desa juga harus bisa membantu. Dalam pelaksanaan program STBM, perangkat pemerintah desa juga membantu mendorong warga di lingkungan RT tempat tinggalnya (*lampiran 2 halaman liii*). Bapak Muslikhin mengatakan bahwa di Desa Tajemsari terdapat adat bahwa ketua-ketua RT harus siap dan bersedia bila diminta bantuan oleh perangkat pemerintah desa. Pemahaman tersebut sudah turun temurun dari masa kepala desa yang lalu-lalu (*lampiran 2 halaman lx*). Kondisi demikian membantu pelaksanaan program STBM maka koordinasi terjadi antara fasilitator desa, kader STBM dengan ketua RT sehingga informasi perkembangan pembuatan jamban dapat diperoleh dan pembahasan mengatasi hambatan dapat dilakukan. Ibu Sri Mulyati menilai Sekretaris Desa Tajemsari bagus dan dia memikirkan warga-warga yang miskin agar dapat membuat jamban.

i). Refleksi mengenai mengatasi praktek buang air besar di sembarang tempat

Kepala Desa dan Fasilitator desa dalam kesempatan wawancara terpisah mengutarakan bahwa program STBM ini dapat berhasil bila warga distimulasi dengan pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan tidak harus menanggung seluruh pengerjaan pembuatan jamban tetapi sebagian pembiayaannya. Bisa juga

bantuan itu lebih kecil dari swadaya masyarakat. Mereka mengatakan demikian becermis pada program-program sebelumnya seperti program PNPM.

5.1.1.5. Fasilitator Desa dan Kader STBM

Menindaklanjuti hasil pertemuan sosialisasi STBM pada tingkat kecamatan, Kepala Desa Tajemsari menunjuk dua orang warganya untuk menjadi fasilitator desa (FD). Salah seorang dari fasilitator desa yang ditunjuk adalah perangkat pemerintah desa dan salah seorang lainnya merupakan warga biasa yang tidak memiliki kedudukan sebagai perangkat desa, dusun, maupun RT dan RW namun karena memiliki waktu luang yang cukup. Kemudian kedua orang tersebut diperintahkan oleh kepala desa untuk mengikuti pelatihan di Ibu kota Kabupaten Grobogan. Penunjukkan yang dilakukan kepala desa tersebut diakui oleh kedua orang fasilitator desa seperti dituturkan oleh salah seorang fasilitator desa dalam wawancara : “Saya ditunjuk oleh kepala desa menjadi FD” (Bapak Kristiandoko, 4 April 2012) dan salah seorang fasilitator desa yang lain, yang bukan merupakan perangkat desa, dusun ataupun RT/RW, menuturkan dalam wawancara terpisah dari fasilitator desa yang pertama : “Saya jadi FD ditunjuk oleh kepala desa..” (Upid Indrawati, 18 Maret 2012). Orang-orang yang ditunjuk oleh kepala desa tersebut pada akhirnya menerima penunjukkan sebagai fasilitator desa. Orang-orang tersebut yang ditunjuk menjadi fasilitator desa mulanya tidak langsung menyatakan kesediaannya, ada yang berdiskusi untuk tawar menawar dengan kepala desa walaupun pada akhirnya menerima penunjukkan tersebut dengan berbagai alasan seperti yang dituturkan oleh seorang fasilitator desa dalam wawancara : “Saya jadi FD ditunjuk oleh kepala desa. Sempat diskusi dengan kepala desa, akhirnya bersedia alasannya untuk mencari pengetahuan saja” (Upid Indrawati, 18 Maret 2012). Saudari Upid Indrawati mengatakan bahwa tugasnya sebagai fasilitator desa adalah menyadarkan masyarakat agar tidak berperilaku buang air besar di sembarang tempat dan tugas-tugasnya itu diketahuinya ketika mengikuti pelatihan di Ibukota Kabupaten Grobogan.

Selama bekerja sebagai fasilitator desa, Saudari Upid Indrawati merasa didukung oleh salah seorang anggota tim STBM tingkat kecamatan yaitu Ibu Sri Mulyati yang memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Camat Tegowanu dan dirinya sering bertemu dengan Ibu Sri Mulyati dan merasakan pertemanan dengan beliau. Ibu Sri Mulyati mendorong Saudari Upid Indrawati agar desanya cepat terbebas dari buang air besar di sembarang tempat.

Bapak Kristiandoko mengakui bahwa penunjukannya sebagai fasilitator desa oleh kepala desa karena sering membantu masyarakat untuk mengurus administrasi jamkesmas dan beliau bersedia membantu anggota masyarakat yang butuh bantuan pengurusan administrasi tersebut sementara Saudari Upid Indrawati mengakui penunjukannya sebagai fasilitator desa tersebut karena tidak memiliki aktivitas pekerjaan ekonomi sehingga memiliki waktu luang yang cukup. Saudari Upid Indrawati akhirnya mengundurkan diri sebagai fasilitator desa dan menyerahkan tugas tersebut kepada fasilitator desa yang lain yaitu Bapak Kristiandoko. Pengunduran dirinya tersebut dengan alasan tidak bersedia hadir dalam undangan-undangan pertemuan dan lebih jauh disampaikan juga bahwa ada faktor keenganan ketika berada ditengah-tengah orang-orang yang lebih dewasa usianya. Ibu Sri Mulyati menilai bagus untuk saudari Upid Indrawati.

Bapak Kristiandoko, sebagai fasilitator desa, mengungkapkan perasaan senangnya menjalani tugas tersebut. Perasaan senangnya tersebut muncul ketika perubahan perilaku yang dilakukan oleh anggota masyarakat desa ini terjadi. Beliau menjelaskan bahwa belum berubahnya perilaku masyarakat membuatnya termotivasi untuk terus mendatangi pertemuan Jamaah Tahlil untuk mendorong masyarakat agar merubah perilaku buang air besar di sembarang tempat. Dalam penuturannya, beliau juga menjelaskan bahwa : “Pola-pola dan cara-cara STBM belum pernah terjadi sebelumnya pada program-program pemerintah yang masuk ke desa”(Bapak Kristiandoko, 4 Maret 2012). Merupakan hal baru baginya melakukan teknik pemicuan dan belum pernah terjadi pada program-program di Desa Tajemsari sebelumnya terutama program dari pemerintah. Beliau memahami

Universitas Indonesia

teknik-teknik pemicuan merupakan cara-cara pemberdayaan masyarakat sehingga cara-cara seperti itu memotivasi Bapak Kristiandoko untuk mencobanya selama bertugas sebagai fasilitator desa.

Bapak Kristiandoko diberi masukan dan semangat dari fasilitator kecamatan yaitu Ibu Sri Mulyati dan ibu ini menanyakan perkembangan dan kesulitan yang dihadapinya. Ibu Sri Mulyati sering datang ke desa dan beberapa kali muncul tiba-tiba di desa dan beliau juga menyempatkan mendatangi anggota masyarakat. Ibu Sri Mulyati mengatakan bahwa Bapak Kristiandoko dinilai aktif dan baik dalam menangani administrasi desa.

Fasilitator desa, Bapak Kristiandoko, menunjuk kader-kader STBM di tingkat dusun yang berjumlah empat orang dan dua orang diantaranya dinyatakan aktif yaitu Bapak Wakijan dan Bapak Muhammad Muslikhin. Menurut beliau bahwa kader-kader tersebut telah menyatakan kesediaannya menjadi kader. Tugas kader ini adalah menginformasikan siapa saja dari anggota masyarakat yang sudah membuat jamban. Dalam melaksanakan tugasnya seorang kader tidak menagih janji anggota masyarakat yang sudah berkomitmen membuat jamban. Seorang kader melakukan pendekatan kepada anggota masyarakat ketika masyarakat sedang berkumpul di warung sebelum berangkat ke sawah. Menurut penuturan fasilitator desa bahwa para kader bekerja karena ada perasaan malu kalau dusun tempat tinggalnya masih terdapat anggota masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat. Kader-kader ini menyampaikan pesan kepada anggota masyarakat agar buang air besar pada jamban dan akibat buruk yang ditimbulkan bila buang air besar di sembarang tempat dan hal ini diutarakan kembali oleh kader-kader tersebut dalam wawancara terpisah. Kader-kader STBM seperti Bapak Muslikhin dan Bapak Wakijan dinilai superaktif oleh Bapak Kristiandoko (*lampiran 2 halaman liii*). Bapak Kristiandoko juga menuturkan bahwa dirinya memotivasi kader agar terus bekerja.

Bapak Kristiandoko juga mengkisahkan pengalaman perasaannya dan interaksi dengan anggota masyarakat selama menjalankan tugas sebagai fasilitator desa seperti penuturannya sebagai berikut :

“Kadang-kadang merasa putus asa, ada warga memberi sambutan yang tidak enak buat saya seperti perkataan kalau ada sumbangan kami buat jamban, tidak usah anda kesini, tidak usah kejar-kejar kami buat jamban. Orang ini sampai sekarang belum buat jamban dan menurut saya belum sadar”(Bapak Kristiandoko, 17 Maret 2012)

Bapak Muslikhin memahami penunjukannya sebagai kader STBM merupakan pekerjaan sosial dan alasan penunjukannya karena dirinya adalah perangkat pemerintah desa yang memahami keadaan masyarakat dengan baik. Pekerjaan sosial yang dimaksudkan adalah merubah pola hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Diyakini oleh Bapak Muslikhin bahwa proses pemilihan kader melalui rapat perangkat desa dan kriteria yang ditentukan adalah seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki waktu untuk mengerjakan tugas dan memiliki niat yang baik. Sebagai kader STBM, Bapak Muslikhin mengakui bahwa ini adalah tugas berat karena beliau memahami persis perilaku masyarakat di desanya dan merubah perilaku masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan buang air besar di sembarang tempat semenjak kanak-kanak merupakan pekerjaan yang sulit. Bapak Muslikhin bersedia menerima tugas sebagai kader karena target yang diberikan sampai dengan perubahan sikap dan akan menolak bila targetnya adalah masyarakat sampai memiliki kamar mandi dilengkapi dengan jamban. Bapak wakijan merupakan salah satu dari kader STBM yang ditunjuk. Sebelum ditunjuk menjadi kader, beliau adalah ketua RT dan mengakui bahwa dirinya memiliki kepedulian dengan lingkungan. Sebelum program STBM hadir sudah dirasakan oleh Bapak Wakijan sebagai masalah melihat situasi masyarakat yang buang air besar di saluran-saluran irigasi di lingkungan RT tempat tinggalnya dan berkeinginan agar masalah ini diatasi dan kehadiran program STBM sangat tepat dengan keinginannya. Bapak Wakijan mengakui juga bahwa sebagai kader STBM menjalani tugas berat karena tidak mudah merubah perilaku masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan buang air besar di sembarang tempat dari semenjak kanak-kanak.

Universitas Indonesia

Bapak Muslikhin menjelaskan bahwa didalam dirinya sudah terbangun jiwa sosial untuk peduli dengan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Tugasnya sebagai kader telah membawa suasana hatinya kedalam persoalan sosial yang terjadi seperti masalah buang air besar di sembarang tempat. Dirasakan oleh beliau bahwa dalam program ini ada kesempatan untuk leluasa berpikir untuk membawa program ini mencapai keberhasilan dan beliau dapat memberikan apa yang menjadi pemikirannya. Keberaniannya untuk mempraktekan apa yang menjadi pemikirannya telah membawa keberhasilan di lingkungan dusun tempat tinggalnya sehingga tidak ditemukan lagi anggota masyarakat yang melakukan buang air besar di sembarang tempat. Beliau melakukan pengawalan kepada masyarakat yang belum memiliki jamban di rumah untuk mengarahkan, memberikan saran dan solusi dimanapun tempatnya tidak harus formal kemudian bagian kedua setelah kesadaran masyarakat terbangun diarahkan untuk memiliki sarana jamban yang lebih bagus. Beliau dapat berkonsentrasi penuh melakukan pengawasan lebih detil pada lingkungan dusun tempat tinggalnya yang terdiri dari dua RT. Namun pada lingkup di luar dusun tempat tinggalnya, beliau hanya melakukan pengawasan dengan cara survey dan hanya mengetahui perkembangan berkisar 60%.

Setelah bekerja lebih dari setahun sebagai fasilitator desa, Bapak Kristiandoko mengungkapkan pandangannya tentang pelaksanaan program STBM di Desa Tajemsari seperti dikatakan sebagai berikut :

“STBM ini tidak menyulitkan, merupakan tanggung jawab kewajiban warga sendiri. Justru ini membantu pemerintah desa dalam rangka memicu warga mempunyai kesadaran untuk membuat jamban. Kesulitannya pelaksanaan program pembebasan buang air besar sembarangan ini dengan cara swadaya masyarakat. Warga tidak bisa diharuskan membuat jamban, tidak ada bantuan fisik, hanya kesadaran warga untuk berswadaya sendiri”(Bapak Kristiandoko, 18 Maret 2012)

Keterangan dari kedua fasilitator desa dan kader-kader STBM selama menjalankan tugas mereka tidak diberikan imbalan uang atas jasa mereka. Mereka tidak diberi keterangan akan menerima imbalan ketika tugas-tugas baik sebagai fasilitator desa maupun kader-kader STBM diberikan kepada mereka.

Universitas Indonesia

5.1.1.6. Peran Tim STBM Tingkat Kecamatan

Tim STBM untuk Kecamatan Tegowanu terdiri dari empat orang yang antara lain Sekretaris Camat selaku ketua, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris dan dua orang anggota yaitu sanitarian dari UPTD Pendidikan. Kecuali ketua, sekretaris dan anggota sudah mendapatkan pembekalan untuk pelaksanaan program STBM. Peran ketua lebih kepada memberikan penekanan dan ketika rapat koordinasi fasilitator desa ketua memberikan arahan dengan mengingatkan komitmen bupati, camat dan kepala desa agar seluruh desa terbebas dari praktik buang air besar di sembarang tempat. Pihak kecamatan tidak memiliki dana untuk stimulasi fasilitator desa dan tim STBM. Diakui oleh camat bahwa pemerintah kurang memberi dukungan seperti tidak adanya dana. Demikian juga dengan camat kurang mendukung program STBM karena tidak ada dana stimulus dari bupati sehingga camat hanya memberikan perintah. Camat menyerahkan tugas program STBM kepada unit yang tupoksinya sesuai. Tim STBM kecamatan bergerak tanpa dana dan bergerak berdasarkan ide sendiri dan kemampuan pribadi. Pelaksanaan STBM sebatas sampai pilar pertama saja.

Rapat koordinasi antara tim STBM kecamatan dan fasilitator desa berlangsung satu bulan sekali dengan pendanaan dari APBDes. Pertemuan koordinasi ini sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan agar masyarakat tidak berperilaku buang air besar di sembarang tempat lagi selain itu juga untuk memudahkan pengumpulan data mengenai kemajuan jumlah kepemilikan jamban dan jenis jamban. Mengenai pertemuan koordinasi setiap bulan ini juga diceritakan oleh Saudari Upid Indrawati. Menurut keterangan Ibu Sri Mulyati belum ada arahan dari camat atau sekretaris camat mengenai hingga kapan pertemuan koordinasi ini berlangsung.

Disebutkan oleh fasilitator desa bahwa Kepala Seksi PMD, Ibu Sri Mulyati merupakan salah seorang dari tim STBM kecamatan yang memberikan dukungan dengan baik bagi fasilitator desa dan dirasakan sudah sebagai teman.

Ibu Sri Mulyati menjalankan tugas berkunjung ke desa dalam rangka program STBM bersama dengan tugas yang didanai dari surat perjalanan dinas dan bantuan transport untuk penanggung jawab operasional PNPM. Inisiatif demikian yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyati disebabkan oleh pengalamannya yang dahulu sebagai sukarelawan yang memegang tugas sebagai sekretaris PKK selama 5 tahun tanpa upah. Ibu Sri Mulyati mendapat penghargaan dari Bupati Grobogan sebagai fasilitator kecamatan terbaik di Kabupaten Grobogan. Ibu Sri Mulyati pernah meminta kepada camat dan sekretaris camat agar memanggil kepala desa yang desanya lambat kemajuannya dalam upaya membebaskan desa dari praktik buang air besar di sembarang tempat. Dalam pemanggilannya itu, kepala desa diingatkan kembali mengenai komitmen bersama camat dan seluruh kepala desa di Kecamatan Tegowanu untuk membebaskan seluruh desa dari praktik buang air besar di sembarang tempat.

Ibu Sri Mulyati mengatakan bahwa tim STBM lebih banyak mendekati fasilitator desa dalam meminta informasi kemajuan pembangunan akses jamban. Penjelasan dari fasilitator desa, Bapak Kristiandoko, mengatakan bahwa : "Perasaan saya nggak apa-apa, malah berterima kasih ke Ibu Sri yang selalu memantau perkembangan Desa Tajemsari...ndak jadi beban malah pemicu keberhasilan buat kita dan teman-teman" (Bapak Kristiandoko, 24 Maret 2012).

5.1.1.7. Kegiatan-kegiatan Kolektif dan Relasi diantara Masyarakat

Sebanyak 50% warga di desa ini memiliki relasi saudara. Relasi saudara ini memiliki ikatan hubungan sangat erat sekali yang dibuktikan adanya upaya mengangkat derajat saudaranya dengan cara menolong saudaranya seperti membagi garapan sawah kepada saudaranya meskipun areal sawah yang dimiliki dapat dikerjakan sendiri dan hampir semua warga yang berelasi saudara melakukan hal yang demikian. Perbuatan tolong-menolong demikian terjadi ketika salah seorang warga menyelenggarakan hajatan dan warga bisa mati-matian membantu acara hajatan tersebut seperti membawa beras, sembako, minyak goreng, telur dan lain-lain secara komplit untuk diolah menjadi makanan

dan minuman bagi para tamu (*lampiran 2 halaman lxi, lxvi, lvii, lxxii*). Warga bisa meninggalkan pekerjaannya di sawah dan warga desa yang bekerja di luar desa bahkan sampai bekerja di Semarang pulang ke desa demi membantu seorang warga yang menyelenggarakan hajatan (*lampiran 2 halaman lxvi*). Pada kemudian hari kelak, ada warga yang menyelenggarakan hajatan maka seorang warga yang pernah dibantu ketika dia menyelenggarakan hajatan membalas bantuan yang pernah diterima bahkan lebih. Perbuatan tolong menolong terjadi ketika ada salah seorang warga sedang dirawat inap di rumah sakit, warga beramai-ramai menjenguk warga tersebut (*lampiran 2 halaman lxvi*). Salah seorang warga Dusun Plosorejo, Ibu Munari mengatakan bahwa "hidup bertetangga harus saling tolong menolong, seandainya tidak membantu juga tidak apa-apa. Itu tergantung keiklasan hati dan tidak saling dendam".

Ketika ada kematian salah seorang warga desa, warga ramai-ramai terlibat memberikan bantuan dan sampai mengantarkan ke penguburan. Pada malam harinya warga mengaji sama-sama. Tidak ada warga yang menolak untuk terlibat (*lampiran 2 halaman lxvi*).

Di desa ini, karena luasnya area pertanian tidak diimbangi ketersediaan tenaga kerja ketika menanam padi yang mensyaratkan harus bersamaan guna menghindari serangan hama. Untuk mengatasi itu warga memilih dengan jalan saling membantu dengan cara saling bergantian bekerja di sawah milik mereka. Dalam kondisi demikian warga memilih menolak diberikan uang sebagai upah atas jasa bekerja menggarap sawah. Pekerjaan saling membantu ini diorganisir setelah dilakukan diskusi diantara warga yang akan saling membantu. Pekerjaan saling membantu demikian, warga memprioritaskan saudaranya terlebih dahulu baru ke tetangga. Warga bertindak demikian dengan suatu keyakinan bahwa tetangganya dapat merasakan rejeki darinya dan begitu sebaliknya dan warga juga berkeinginan semaksimal mungkin diantara mereka sama-sama baik usaha mereka dan tidak ingin berkekurangan seperti dikatakan oleh Bapak Muslikhin sebagai berikut :

“Prinsipnya warga disini, yang kita dahulukan adalah tetangga supaya tetangga kita itu bisa merasakan rejeki dari saya begitu juga sebaliknya. Warga disini percaya saja kalau dia membantu tetangga maka dia juga akan dibantu oleh tetangganya itu. Warga semaksimal mungkin supaya sama-sama jalan tidak ingin berkekurangan. Itu jelas” (Bapak Muslikhin, 24 Juni 2012)

Di desa ini, kesulitan keuangan seseorang ingin membangun rumah dapat diatasi. Seorang warga dapat menyampaikan niatnya untuk membangun rumah kepada warga dan meminta bantuan. Seorang warga dapat juga meminta bantuan material bangunan yang diperlukan dan warga yang dimintai bantuan memberikan bantuan material itu. Ketika pengerjaan pembangunan rumah, seorang warga yang ditolong dibangunkan rumah menyiapkan makanan bagi warga yang bekerja (*lampiran 2 halaman lxi dan lvi*). Seorang warga ini yang ditolong dibangunkan rumah kelak juga menolong warga yang pernah membantunya membangun rumah baik warga tersebut melangsungkan hajatan ataupun pembangunan rumah dan tidak ada sikap menagih kembali bantuan yang pernah diberikan dan ada rasa tanggung jawab moral untuk membantu. Meskipun seorang warga yang dibantu tersebut sedang bekerja di Jakarta, dia kembali ke desa untuk memenuhi keinginan membalas untuk membantu kepada warga yang memerlukan bantuannya. Tindakan-tindakan demikian dapat terjadi karena warga masih memiliki penjiwaan adat yang masih kuat di dalam dirinya. Tidak ada masalah bagi seorang warga untuk tidak membantu namun warga berpikir adalah tidak 'enak' jika tidak membalas seseorang yang pernah membantunya (*lampiran 2 halaman lvii*). Kesediaan warga untuk membantu seorang warga yang ingin membangun rumah dimotivasi oleh suatu prinsip bahwa seseorang yang sudah menikah harus mendiami rumah miliknya sendiri dan tidak diperbolehkan tinggal bersama orangtuanya dengan tujuan agar seseorang yang baru menikah dapat mandiri. Dalam pandangan Jawa, seperti dikatakan oleh Bapak Muslikhin, bahwa apabila dalam satu pintu atau satu tempat tinggal terdapat dua kepala keluarga maka salah keluarga dari dua keluarga tersebut akan mengalami kekalahan rejeki.

Pada kesempatan lain warga juga berpartisipasi dengan berswadaya membangun mushola (*lampiran 2 halaman lxiii dan lxix*). Warga mengumpulkan

Universitas Indonesia

uang selama beberapa kali setelah panen. Namun untuk mempercepat pembangunan mushola warga dengan melakukan pencarian dana keluar desa. Menurut Bapak Muslikhin dikatakan bahwa "ada motivasi bersaing antar dusun atau desa untuk memiliki mesjid atau mushola yang layak. Warga merasa tempat ibadahnya sudah tidak layak sehingga menimbulkan tuntutan batin agar mushola harus diperbaiki".

Desa Tajemsari merupakan daerah terkena banjir. Masyarakat memahami adanya bahaya banjir bagi areal pertanian warga. Disini warga menunjukkan kemampuannya mengorganisir diri untuk mengatasi masalah banjir ini. Pemerintah desa dengan dana dari APBDes menyewa alat berat untuk melakukan pengerukan tanah untuk membuat tanggul. Warga merelakan sebagian tanah miliknya untuk dikeruk. Kerelaan warga memberikan sebagian kecil tanahnya untuk dikeruk ini lebih didorong oleh pertimbangan untung dan rugi yang diperoleh warga. Sisa tanah yang tidak dikeruk dipergunakan sebagai lahan pertanian yang masih dapat memberikan keuntungan bagi warga berupa dua kali masa panen dalam setahun. Namun kerugian akan diterima warga apabila tidak merelakan tanahnya untuk dikeruk.

Gambaran praktek-praktek yang dilakukan masyarakat diatas menunjukkan adanya kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, didalam berbagai kelompok dan organisasi, serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinya kerjasama diantara mereka dan hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama. Praktek-praktek yang menggambarkan modal sosial.

Budaya gotong royong dalam pembangunan desa mengalami penurunan di desa ini. Terjadi kesulitan untuk mengorgasir masyarakat untuk bergotong royong. Masyarakat menjadi lebih suka memberikan masukan-masukan saja

dalam kesempatan pertemuan. Kepala desa tidak memberikan ketegasan kearah meningkatkan partisipasi masyarakat. Warga memilih mengumpulkan uang sebagai ganti partisipasi masyarakat untuk bekerja dalam pembangunan desa dan uang dikumpulkan untuk membayar orang bekerja dan bapak ketua RT melakukan pengawasan kepada orang yang bekerja. Ini terjadi karena tidak adanya disiplin yang dilakukan oleh kepala desa kepada warga yang tidak ikut bergotong royong sehingga mematahkan semangat warga yang bergotong royong. Masyarakat untuk berswadaya disurutkan dengan menutupi kekurangan dana proyek yang sebagian besar didanai dari program PNPB dengan dana dari kas desa dimana seharusnya kekurangan dana tersebut ditutupi dengan swadaya masyarakat dan masyarakat yang bekerja pada proyek itu diberikan upah. Namun dalam kesempatan program PNPB yang lain swadaya masyarakat masih diberi ruang ketika dana kas desa tidak mampu menutupi seluruh kekurangan dana untuk pembangunan jalan rabat beton yang sebagian besar didanai dari PNPB. Kekurangan dana tersebut seharusnya ditutupi oleh swadaya masyarakat. Kekurangan dana tersebut ditutupi dengan swadaya dari paguyuban pemuda desa yang bekerja di kota-kota besar sehingga mendorong warga yang tinggal di desa untuk berswadaya dengan menyiapkan makanan dan minuman bagi orang yang bekerja membangun jalan rabat beton. Keinginan warga untuk berswadaya pada kesempatan pembangunan jalan rabat beton karena menyadari buruknya jalan yang ada dan kesempatan mendapat bantuan PNPB yang nilainya besar sekali dibanding swadaya yang harus dikeluarkan. Kesempatan tidak disia-siakan oleh warga yang tinggal di desa dan paguyuban pemuda desa sehingga mereka berkeinginan untuk berswadaya. Mereka mempercayai panitia yang mengelola dana pembangunan jalan rabat beton dan tidak berpikir akan dikorupsi dana tersebut.

Namun perbuatan tolong menolong di atas, praktek partisipasi dan swadaya masyarakat belum terjadi ketika salah seorang warga yang belum akses jamban ingin membuat jamban. Belum terpikirkan oleh warga untuk berbuat tolong menolong dalam membangun jamban seperti kebiasaan dalam hajatan,

kematian, membangun rumah atau menjenguk orang sakit. Warga menganggap masalah jamban adalah urusan pribadi dari warga yang belum mengakses jamban. Warga masih mensepelekan masalah jamban atau warga bersikap menomorigandakan atau menomor-empatkan, tidak menjadi prioritas utama di desa dan bukan menjadi masalah tanggungan masyarakat. (*lampiran 2 halaman lxiv*). Bapak Muslikhin mengatakan bahwa "karena gencarnya program ini, untuk memiliki jamban sendiri tidak ada unsur kelompok-kelompok masing-masing warga berjuang sendiri-sendiri". Warga tidak dapat membantu secara pendanaan untuk pembangunan jamban seseorang karena merasa tidak menggunakan fasilitas itu. Dimungkinkan bagi warga membantu dengan tenaga untuk membangun jamban asalkan seseorang yang ingin membangun jamban telah menyiapkan material bangunan terlebih dahulu.

5.1.1.8. Penentuan prioritas pembangunan desa

Di Desa Tajemsari, prioritas pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan dan yang terlibat dalam penentuan tersebut adalah semua aparat desa, lembaga desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus RT dan RW, tokoh-tokoh masyarakat dan usulan-usulan dari dusun. Masyarakat akar rumput dapat terlibat dari pertemuan tingkat dusun dan usulan-usulan dari dusun didiskusikan kembali pada pertemuan tingkat desa kemudian dilanjutkan pembahasan oleh tim kecil yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa beserta perangkat pemerintah desa. Pengamatan terhadap RPJM Desa mereka tidak tercantum aktivitas-aktivitas terkait upaya mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat dan mempertahankan agar warga tidak kembali kepada perilaku buang air besar di kali atau selokan atau sungai. Pernyataan kepala desa bahwa di Desa Tajemsari sudah terbangun tata cara partisipatif dalam menentukan kegiatan pembangunan atau proposal-proposal apa yang dapat diajukan untuk didanai kegiatan pembangunannya.

5.1.2. Desa Kronggen Kecamatan Brati

5.1.2.1. Komitmen Kepala Desa

Pemerintah Kecamatan Brati menyelenggarakan sosialisasi program STBM kepada seluruh kepala desa yang berada di kecamatan tersebut. Kemudian kepala desa diajak untuk berkomitmen agar masing-masing desa mereka terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Pada awalnya kepala desa menolak untuk berkomitmen dan penolakan kepala desa tersebut disebabkan tidak adanya bantuan untuk mengatasi masalah ini sehingga dirasakan akan sulit dicapai. Kemudian Camat Brati menjelaskan bahwa ini program pemerintah sehingga harus didukung lalu akhirnya kepala desa bersedia menandatangani komitmen. Hal di atas merupakan penjelasan dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Brati, Bapak Mustafirin (*lampiran 2 halaman lxxix*).

Diakui oleh Kepala Desa Kronggen bahwa memang terjadi penandatanganan komitmen untuk membebaskan desa dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Kepala desa tersebut mengakui menyetujui penandatanganan komitmen. Kepala Desa Kronggen memiliki alasan untuk menandatangani komitmen tersebut dan alasan itu adalah "Zaman sudah maju seperti sekarang, ya masih ada yang buang air besar di kali, di kolam, seharusnya sudah tidak ada lagi" (Kliwon Utama, 24 Maret 2012). Kepala Desa Kronggen juga mengakui bahwa program STBM merupakan program dari pemerintah daerah Kabupaten Grobogan (*lampiran 2 halaman lxxxiii*).

5.1.2.2. Tahap Sosialisasi Program STBM di Tingkat Desa

Setelah sosialisasi program STBM pada tingkat kecamatan kemudian kepala desa menyelenggarakan sosialisasi tingkat desa dengan mengundang semua perangkat pemerintah desa, dusun dan tokoh masyarakat yang ada bertempat di balai desa. Pemahaman yang ditangkap oleh peserta hadir sosialisasi STBM ini adalah masyarakat seakan-akan diharuskan atau dilarang buang air besar di sembarang tempat dan ditargetkan desa harus terbebas dari tindakan

buang air besar di sembarang tempat sehingga tiap dusun dikerahkan agar setiap rumah tangga di desa Kronggen harus memiliki jamban (*lampiran 2 halaman xcix*).

Setelah penjelasan sosialisasi itu disampaikan kemudian dilanjutkan dengan meminta kepada peserta hadir kapan pelaksanaan pertemuan sosialisasi dan pemicuan di tiap dusun. Pada pertemuan sosialisasi dan pemicuan di tingkat dusun, masyarakat baik bapak-bapak dan ibu-ibu sengaja diundang untuk hadir pada siang hari mengambil waktu ketika masyarakat sedang istirahat setelah bekerja dari sawah antara jam 11 sampai dengan jam 2 siang dan ada juga diselenggarakan pada malam hari. Kehadiran masyarakat dalam pertemuan sosialisasi dan pemicuan ini tidak mencapai 50%. Agar pertemuan sosialisasi dan pemicuan dapat dihadiri oleh masyarakat, tim STBM kecamatan dan fasilitator desa berkoordinasi dengan kepala dusun dan memutuskan waktu dan tempat pertemuan menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk dapat hadir.

5.1.2.3. Tahap Pemicuan

Ibu Siti Rodiyah, seorang fasilitator desa untuk program STBM, mengakui dalam penuturannya bahwa sebelum program STBM banyak anggota masyarakat yang melakukan buang air besar di sembarang tempat karena di wilayah desa ini terdapat banyak kolam yang berisi ikan-ikan tanpa dipelihara dan pada kolam tersebut diletakan jamban sehingga kotoran manusia langsung dibuang ke dalam kolam tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa tingkat pendidikan orang dewasa di Dusun Karangasem adalah SMP kebawah.

Pelaksanaan pemicuan berlangsung di wilayah dusun-dusun dengan mengundang masyarakat baik yang sudah memiliki jamban di rumah mereka dan masyarakat yang belum memiliki jamban. Anggota masyarakat yang belum memiliki jamban banyak yang hadir kegiatan pemicuan. Terjadi tiga kali kegiatan pemicuan seperti di Dusun Sinawah. Kepala Dusun Sobotuwo menolak dilakukan pemicuan dengan alasan jumlah warga yang belum memiliki jamban sedikit sehingga cukup dilakukan pendekatan personal. Pilihan waktu kegiatan pemicuan

setelah berkoordinasi dengan kepala dusun dan ketua RT dan ditentukan waktunya oleh mereka. Pelaksanaan pemucuan ini berlangsung ketika masyarakat sedang beristirahat setelah bekerja dari sawah dan biasanya masyarakat kembali ke rumah. Sebelum pemucuan terdapat anggota masyarakat yang proaktif membantu kegiatan pemucuan seperti menyiapkan peralatan dan mendatangi rumah ke rumah warga agar kumpul mengikuti kegiatan pemucuan. Anggota masyarakat yang proaktif demikian adalah anggota masyarakat yang sudah memiliki jamban di rumahnya. Bapak Gudiyono, fasilitator Desa Kronggen, mengatakan bahwa pada waktu awal kegiatan pemucuan masyarakat datang berbondong-bondong namun ditengah praktek pemucuan berlangsung satu-persatu diantara peserta hadir meninggalkan kegiatan pemucuan. Aksi meninggalkan pemucuan ini terjadi karena diawal disampaikan bahwa tidak disediakan bantuan material bagi warga yang masih buang air besar di sembarang tempat. Fasilitator desa menanyakan kepada peserta pemucuan apakah pertemuan dapat dilanjutkan dengan pemucuan setelah menyampaikan mengenai tidak disediakan bantuan material. Jihan Putri, fasilitator desa, mengatakan bahwa masyarakat sempat mengeluarkan perkataan mengeluh karena tidak adanya bantuan material. Kegiatan pemucuan ini tidak dihadiri oleh semua anggota masyarakat yang diundang dan secara umum kehadiran lebih banyak adalah kaum ibu-ibu meskipun ada satu pertemuan pemucuan dihadiri lebih banyak oleh kaum bapak-bapak. Kehadiran lebih banyak ibu-ibu karena banyak suami mereka yang bekerja di luar kota, ada yang masih bekerja di sawah dan ada juga malas untuk hadir. Fasilitator desa mengakui bahwa untuk mengundang masyarakat tidak mudah.

Aktivitas pemucuan dipimpin oleh sanitarian dari Puskesmas Kecamatan Brati. Sanitarian menggunakan teknik-teknik khusus dalam melakukan pemucuan. Menurut kesaksian fasilitator desa, Ibu Siti Rodiyah, menuturkan bahwa sanitarian memakai gambar seperti warga diajak bermain. Pada penjelasan sanitarian, Ibu Dwiastuti, bahwa dirinya menyiapkan peralatan dan bahan-bahan pemucuan dan teknik yang digunakan adalah bina suasana agar masyarakat tidak kaku, transek dan pemetaan. Ketika penggunaan teknik transek seperti dikatakan

oleh Ibu Siti Rodiyah bahwa warga beramai-ramai melihat lokasi-lokasi buang air besar di sembarang tempat dan juga diikuti oleh kepala dusun. Penjelasan dari Ibu Dwiastuti dikatakan bahwa ada sebagian peserta pemician yang pulang ketika transek dilakukan dengan alasan karena malu.

Pernah pemician dilakukan dengan menumpang sebuah acara arisan ibu-ibu tingkat RT yang berlangsung rutin setiap tanggal 20 setiap bulannya namun yang terjadi pemician tidak dapat dilakukan sehingga hanya diberikan sosialisasi saja. Fasilitator desa, Siti Rodiyah, mengutarakan mengapa kegiatan pemician direncanakan menumpang pada sebuah acara kegiatan masyarakat yang sudah rutin seperti penuturannya sebagai berikut : “Kalau sengaja dibuat undangan untuk hadir kegiatan pemician jarang yang hadir cuma sedikit cuma beberapa orang yang datang..” (Ibu Siti Rodiyah, 18 Maret 2012).

Diakhir praktek pemician seperti dikatakan oleh Ibu Dwiastuti bahwa tampak ekspresi malu, mengeluh dari peserta pemician dan ada dari peserta pemician yang menanyakan ada atau tidaknya bantuan material untuk membuat jamban. Peserta hadir pemician ditanya oleh fasilitator pemician bagaimana solusi mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat dan setelah peserta hadir pemician mengatakan membuat jamban, fasilitator pemician menanyakan kesediaan komitmen membuat jamban dari peserta pemician dengan mencatat nama dan tanda tangan. Terdapat peserta pemician yang menolak membuat berkomitmen bahkan di Dusun Permas tidak seorangpun membuat komitmen. Bahkan ada peserta pemician sekedar berkomitmen dengan alasan takut kepada kepala dusun namun jamban belum dibuat. Ada diantara peserta pemician yang mengajak peserta pemician tidak membuat jamban dengan alasan tanah-tanah di rumah mereka sudah sempit. Dikatakannya juga bahwa diantara peserta pemician yang sudah terbiasa dan merasa nyaman buang air besar di kali dan menggunakan alasan kesulitan dana untuk menunda pembuatan jamban di rumah karena kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan untuk membuat jamban ini umumnya dimiliki oleh masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani dan dari pendapatan mereka terbatas hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada juga

warga yang mengungkapkan janjinya membuat jamban setelah mendapatkan rezeki dari panen padi. Salah seorang fasilitator desa, Saudari Jihan Putri merupakan warga Dusun Permas, mengatakan bahwa “mereka cari alasan saja” untuk tidak berkomitmen membuat jamban dan bila diselidiki ke rumah mereka sebenarnya masih tersedia lahan yang cukup di rumah mereka untuk membuat jamban. Saudari Jihan Putri mengatakan bahwa hal yang sesungguhnya adalah masyarakat sudah merasa mudah dan praktis membuang air besar ke kali yang berada di belakang rumah mereka. Ada seorang anggota masyarakat mengakui bahwa membuat jamban sederhana sekedar untuk diperlihatkan bila terjadi pemeriksaan ke rumahnya namun sehari-harinya membuang air besar tetap di kali. Contoh lain menunjukkan ada anggota masyarakat juga sudah memiliki jamban kloset namun masih tetap buang air besar di kali karena alasan sudah kebiasaan dari sejak kecil. Tidak muncul pembicaraan dari peserta pemicuan upaya-upaya dari masyarakat untuk menolong anggota masyarakat yang kesulitan keuangan untuk membuat jamban. Masyarakat yang sudah memiliki jamban di rumah tidak mengatakan apapun untuk mengingatkan kepada anggota masyarakat yang belum memiliki jamban di rumah. Tidak ada satupun peserta hadir yang sudah memiliki jamban kloset di rumahnya menawarkan kepada anggota masyarakat yang belum memiliki jamban untuk menumpang menggunakan jamban kloset di rumahnya. Selain itu, dalam pertemuan pemicuan sempat terjadi pembicaraan untuk membuat bersama-sama rencana untuk mengatasi masalah buang air besar sembarangan tersebut namun hal itu tidak terlaksana karena tidak ada yang mengingatkan.

Ibu Siti Rodiyah, fasilitator desa, diberi tugas oleh Sanitarian Puskesmas Kecamatan Brati untuk menyampaikan pesan-pesan agar masyarakat tergerak hatinya membuat jamban dan pengakuan Ibu Siti Rodiyah bahwa dirinya menyuruh ibu-ibu peserta arisan agar membuat jamban dan menjelaskan tentang kebersihan. Alternatif penyelesaian masalah buang air besar di sembarang tempat juga disampaikan oleh Ibu Siti Rodiyah seperti yang dituturkannya dalam wawancara : “Saya mengarahkan sebelum ada uang cukup bisa membuat jamban

sementara yaitu jamban cemplung tertutup” (Siti Rodiyah, 18 Maret 2012). Beliau juga menjelaskan bagaimana sikap ibu-ibu dalam pertemuan tersebut dalam mendengarkan penjelasannya mengenai dampak negatif buang air besar di sembarang tempat yaitu biasa-biasa saja. Pernyataan beliau ditanggapi oleh peserta pertemuan dengan pernyataan seperti yang dituturkan beliau yaitu “Warga buat jamban kalau ada bantuan kalau tidak ada bantuan mereka tidak membuat jamban....warga menanyakan ‘ada bantuan ndak bu?’ yang diharapkan memang bantuan” (Siti Rodiyah, 18 Maret 2012).

Bapak Gudiyono mengatakan bahwa aparat pemerintah desa diundang untuk hadir kegiatan pemicuan namun tidak ada seorangpun dari aparat pemerintahan Desa Kronggen yang hadir. Dikatakan juga oleh beliau bahwa kehadiran mereka itu penting untuk meyakinkan peserta hadir pemicuan bahwa program STBM merupakan program dari pemerintah desa juga sehingga masyarakat akan lebih terdorong untuk membuat jamban.

5.1.2.4. Pasca Pemicuan

Disini digambarkan beragam dinamika dan pencapaian-pencapaian yang terjadi. Penggambaran aspek-aspek pencapaian yang terjadi mengacu kepada butir-butir dari Peraturan menteri kesehatan tentang Strategi Nasional Sanitasi Nasional Berbasis Masyarakat.

a). Monitoring dan Pengawasan

Untuk memonitor penambahan jumlah jamban yang dibangun oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan buang air besar di sembarang tempat telah dilakukan pengorganisasian kerja yang mana kepala dusun diberi tugas untuk mengumpulkan data jumlah jamban yang bertambah dan data tersebut diperoleh dari setiap ketua RT yang memonitor rumah tangga yang sudah membuat jamban. Keterangan dari Ibu Dwiastuti mengatakan bahwa kepala dusun melalui istri kepala dusun bertugas mengingatkan anggota masyarakat yang sudah berkomitmen membuat jamban agar memenuhi komitmennya dan hal ini

dikatakan juga oleh istri dari Kepala Dusun Karangasem, Ibu Siti Rodiyah dan istri dari Kepala Dusun Satreyan, Ibu Utami. Fasilitator desa kemudian bertugas merekap data mengenai anggota masyarakat yang telah memenuhi komitmennya. Upaya memonitor ini merupakan perintah lisan Kepala Desa Kronggen agar kemajuan jumlah jamban yang dibangun dilaporkan. Bapak Gudiyono mengatakan bahwa monitoring ini baru sebatas mengumpulkan data penambahan jumlah jamban dan belum kepada upaya pengawasan bersama antara pemerintah desa dengan fasilitator desa dan seharusnya perangkat pemerintah desa terlibat bersama melakukan survey ke lokasi pemukiman masyarakat untuk melihat kemajuan.

b). Upaya dan persoalan warga mengakses jamban

Kesulitan keuangan merupakan alasan yang paling banyak diungkapkan oleh warga, fasilitator desa dan kepala desa. Kesulitan tersebut coba di atasi dengan berbagai upaya yang dilakukan warga agar dapat mengakses jamban. Warga yang belum mengakses jamban, berupaya membuat jamban dengan cara mencicil pengadaan material untuk membuat jamban namun upaya tersebut terhambat karena harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan penghasilan yang tidak tentu yang diterima. Keterangan dari sanitarian bahwa karena kondisi kesulitan keuangan yang serius terdapat warga bertahan tidak membuat jamban agar mendapatkan bantuan untuk pembuatan jamban. Warga sudah membuat jamban cubluk tertutup namun karena terjadi peristiwa banjir mengakibatkan jamban tersebut tertutup oleh lumpur sehingga warga tidak dapat mempergunakan jamban tersebut. Setelah kejadian ini tidak ada upaya oleh anggota masyarakat tersebut untuk membuat jamban kembali sampai akhirnya kembali kepada perilaku buang air besar di sungai. Kedua fasilitator desa dalam kesempatan terpisah menuturkan bahwa jamban cemplung tertutup tidak diusahakan untuk dibuat oleh anggota masyarakat. Dua orang fasilitator desa mengutarakan penuturan dari anggota masyarakat bahwa jamban cemplung tertutup menimbulkan belatung dan bau yang mengganggu tetangga. Jamban jenis cemplung tertutup tidak bisa digunakan ketika genangan banjir terjadi dan

membuat lingkungan menjadi jorok. Anggota masyarakat sudah sempat membuat jamban jenis ini pada akhirnya kembali untuk berperilaku buang air besar di sembarang tempat dan tidak ada jamban cemplung tertutup yang dibuat oleh anggota masyarakat. Terdapat juga anggota masyarakat yang tidak memiliki jamban memilih penyelesaian masalah buang air besar di sembarang tempat dengan menumpang jamban kepada famili yang dekat tempat tinggalnya seperti terjadi di Dusun Karangasem dan Satreyan namun hal itu tidak terjadi seperti di Dusun Sembukan, Dusun Permas, Dusun Sinawah dan Dusun Sobotuwo tidak terjadi.

Kesulitan keuangan dalam membuat jamban juga dapat disebabkan oleh gagal panen yang terjadi. Peristiwa gagal panen yang dialami warga menyebabkan mereka yang sudah berjanji membuat jamban menunda pembangunan jamban mereka. Pendapatan uang diperoleh dari sebuah panen tidak dapat dipergunakan untuk membuat jamban karena harus menutupi kerugian yang diakibatkan oleh gagal panen.

Wawancara dengan Bapak Sumadi, warga Dusun Karangasem, mengetahui adanya arahan agar warga tidak buang air besar di sembarang tempat namun kondisi kesulitan keuangan tersebut membuatnya tidak dapat segera membuat jamban dan merupakan hal yang sulit dikerjakan karena dibatasi oleh kesulitan keuangan disamping terjadi kesulitan keuangan juga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari belum lagi harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri hajatan. Kesulitan keuangan yang dialami ini membuat warga bersikap pasrah.

Keterangan dari Bapak Sugianto dan Bapak Masrukin, warga Dusun Karangasem, bahwa mereka mendengar arahan agar tidak melakukan praktek buang air besar di sembarang tempat dan agar segera mengakses jamban dan arahan tersebut mereka dengar dari istri mereka yang hadir dalam arisan-arisan dimana sosialisasi berlangsung. Keterangan fasilitator desa, Bapak Gudiyono, bahwa di Dusun Sembukan ibu-ibu menggali lubang untuk septitank. Bagi bapak-bapak meskipun tidak menghadiri pertemuan pemicuan namun mereka

mendengar dari istri mereka yang mengikuti arisan ibu-ibu secara reguler mengenai arahan agar menghentikan perilaku buang air besar di sembarang tempat dan segera mengakses jamban. Bapak-bapak yang diwawancara mengakui bahwa mereka mendengar arahan tersebut berkali-kali atau sudah sering. Mereka mengakui bahwa arahan tersebut baik.

Ada beberapa hal yang ikut mempengaruhi upaya untuk mencapai target program STBM. Keterangan fasilitator desa ketika berdialog dengan warga yang belum memiliki jamban di rumah menemukan bahwa kesibukan bekerja kepala keluarga di kota lain menunjukkan kurangnya perhatian mereka untuk mengakses jamban atau membuat jamban di rumah walaupun sudah diberitahu adanya arahan agar merubah perilaku buang air besar di sembarang tempat (Bapak Gudiyono, 18 Maret 2012). Fasilitator desa, Ibu Siti Rodiyah, pernah menemukan satu keluarga telah membuat jamban dalam satu bulan setelah pemicuan namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata keluarga tersebut kebetulan akan menerima kedatangan menantu yang akan tinggal di keluarga itu. Ibu Siti Rodiyah mengakui bahwa di Desa Kronggen memiliki kebiasaan berbenah rumah termasuk membuat jamban bila akan kedatangan menantu yang akan tinggal pada sebuah keluarga dan hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Kronggen, Bapak Gudiyono dan Kepala Dusun Karangasem.

c). Kemajuan akses jamban kloset atau jamban cubluk tertutup

Setelah pemicuan masyarakat baru kemudian membuat jamban setelah beberapa bulan bahkan ada yang lebih dari 1 tahun dan ada juga yang belum sama sekali membuat jamban. Terdapat warga yang mensyaratkan setelah mendapat rezeki dari hasil panen padi baru kemudian membuat jamban, berusaha membuat jamban dengan cara mencicil pengadaan material sesuai dengan ketersediaan uang pada waktu itu dan bertahan menunggu bantuan untuk membuat jamban.

Temuan dari penelitian ini adalah adanya warga, Bapak Sumadi, berhasil menuntaskan upaya mencicil material dalam rentang waktu yang lebih dari enam bulan sampai dengan jamban kloset terbangun sehingga dapat digunakan dan saat

ini sedang proses perapihan. Keseluruhan pembangunan jamban kloset ini dikerjakan dengan secara mandiri.

Warga yang telah membuat jamban adalah anggota masyarakat yang sudah berkomitmen sebelumnya dengan mencatatkan namanya. Keterangan Bapak Gudiyono, fasilitator desa, bahwa terdapat juga tiga keluarga bersama-sama membuat satu jamban dan dipergunakan bersama-sama. Beliau menambahkan juga bahwa terdapat anggota masyarakat yang sudah membuat jamban cubluk tertutup kemudian terjadi banjir sehingga jamban tersebut tertutup lumpur dan setelah kejadian ini tidak ada upaya oleh anggota masyarakat tersebut untuk membuat jamban kembali sampai akhirnya kembali kepada perilaku buang air besar di sungai. Di Dusun Sembukan sempat terjadi terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat namun akibat terjadi peristiwa banjir jamban-jamban yang sudah terbangun tertutup lumpur sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.

d). Pengertian warga mengenai manfaat memiliki jamban

Wawancara dengan Bapak Sugianto dan Bapak Masrukin, warga Dusun Karangasem, dapat menyebutkan manfaat memiliki jamban yang layak di rumah seperti menjaga kebersihan sehingga tidak mengganggu lingkungan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga tidak mengganggu tetangga meskipun mereka masih melakukan praktek buang air besar di kolam dan mereka tengah mencicil pengadaan material untuk membuat jamban. Bapak Sumadi, warga Dusun Karangasem, mengatakan bahwa manfaat memiliki jamban kloset di rumahnya yaitu tidak dilihat orang ketika buang air besar dan merasakan aman menggunakan kloset.

e). Warga bertahan berperilaku buang air besar di sembarang tempat

Wawancara dengan Bapak Sugianto dan Bapak Masrukin, penduduk Dusun Karangasem, yang masih melakukan praktek buang air besar di atas kolam menjelaskan bahwa kolam tersebut berukuran luas dan berisi ikan-ikan bukan

peliharaan. Lokasi kolam ini jauh dari pemukiman penduduk termasuk jauh dari tempat tinggal mereka sehingga dirasakan oleh mereka tidak mengganggu penduduk. Dirasakan tidak mengganggu penduduk karena juga tidak terjadi penumpukan kotoran manusia di atas kolam tersebut dan tidak kurang dalam satu hari kotoran itu sudah hilang dimakan ikan sehingga tidak menimbulkan bau. Kolam tersebut tidak pernah kering ketika musim kemarau. Praktek buang air besar ini sudah mereka lakukan sejak lama sekali dan sampai sekarang belum pernah masyarakat belum pernah menegur mereka. Orang-orang yang sudah berusia lanjut sulit merubah kebiasaannya buang air besar di kolam dan masih melakukan kebiasaannya itu (Siti Rodiyah, 18 Maret 2012). Keterangan fasilitator desa dan Kepala Dusun Karangasem bahwa kakus di kolam masih tetap terpasang hingga sekarang. Pengalaman sanitarian ketika melaksanakan monitoring sempat bertemu dengan ibu-ibu di Dusun Ngawen yang mengatakan kenyamanannya buang air besar di sungai dan dikatakan oleh ibu-ibu tersebut bahwa kotoran langsung hilang terbawa oleh arus sungai dan ibu-ibu dapat sambil bekerja menjaga keramba udang dan hal ini juga dikatakan oleh fasilitator desa. Kenyamanan buang air besar di kolam maupun di sungai yang dirasakan sebagian warga yang berada di Dusun Karangasem dan Sinawah, seperti dikatakan oleh sanitarian dan fasilitator desa telah membuat sebagian warga tersebut sulit berubah. Kesulitan berubah ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kondisi tingkat pendidikan masyarakat yang rendah demikian sehingga mereka tidak memikirkan untuk memiliki kebiasaan hidup sehat yang dampaknya dapat menurunkan belanja pemerintah untuk jamkesmas.

f). Terhentinya perjalanan program

Menurut penjelasan fasilitator desa, Bapak Gudiyono, bahwa pelaksanaan program STBM dalam upaya membebaskan Desa Krornggen dari praktek buang air besar di sembarang tempat untuk sementara waktu terhenti. Dijelaskan juga oleh beliau bahwa kegiatan terakhir pelaksanaan program STBM sudah terjadi 6 bulan yang lalu. Kondisi terhenti program ini disebabkan oleh kesibukan pribadi. Ibu Siti Rodiyah menjelaskan bahwa terakhir dia mengikuti kegiatan-kegiatan

Universitas Indonesia

program STBM dua bulan yang lalu, sampai sekarang belum ada undangan lagi dan belum ada rencana berikutnya.

g). Pemerintah Desa

Bapak Gudiyono mengalami bekerja sendiri sebagai fasilitator desa dan Pemerintah Desa Kronggen kurang memberikan dukungan terhadap program STBM. Saudari Jihan Putri juga mengatakan bahwa aparat pemerintah desa kurang menunjukkan perhatian dan fasilitator desa harus datang ke aparat pemerintah desa untuk berkoordinasi dan meminta bantuan mereka. Pemerintah desa tidak menyediakan bantuan dana transportasi bagi fasilitator desa. Tidak ada tindakan pemantauan dari perangkat RT atau RW dan perangkat pemerintah desa untuk melakukan pengawasan kepada anggota masyarakat yang masih buang air besar di sembarang tempat. Dikatakan oleh fasilitator desa bahwa pemerintah desa masih vakum terhadap program STBM. Bapak Mustafirin menyebutkan faktor dukungan kepala dusun menentukan keberhasilan program STBM dan tidak semua kepala dusun berkomitmen untuk mendukung. Ada kepala dusun yang tidak dinilai berwibawa oleh warganya sehingga sulit mendorong warganya untuk mensukseskan program STBM (*lampiran 2 halaman xcii*). Seperti halnya Kepala Dusun Permas kurang dipercaya warganya sehingga pelaksanaan program STBM terhambat sebagaimana dikatakan oleh Saudari Jihan Putri.

Pemerintah Desa Kronggen pernah merencanakan membantu masyarakat yang belum memiliki jamban sehat dengan memberikan kloset. Namun oleh karena minimnya dana yang dimiliki desa sehingga rencana tersebut tidak bisa direalisasikan. Menurut Bapak Gudiyono bahwa masyarakat tanpa bantuan sekecil apapun cukup sulit untuk dimobilisasi mengatasi persoalan desa seperti masalah buang air besar di sembarang tempat.

Sekretaris Desa Kronggen mengatakan bahwa ketika pembuatan RPJM Desa informasi mengenai STBM sudah masuk ke desa sehingga dalam dokumen RPJM Desa terdapat usulan membuat jamban untuk menindaklanjuti STBM tersebut dan diharapkan dana pembangunan jamban dapat diperoleh dari

Universitas Indonesia

kabupaten. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa untuk tahun anggaran 2012 tidak ditemukan upaya-upaya mendukung pelaksanaan program STBM yang sesuai dengan pendekatan dalam kebijakan Strategi Nasional STBM.

Terdapat hal yang positif terjadi di Dusun Sinawah, kesadaran untuk merubah perilaku buang air besar dan mengupayakan akses jamban disampaikan pada kesempatan pertemuan warga. Hasilnya terdapat jumlah jamban yang bertambah seperti disampaikan oleh Kepala Dusun Sinawah bahwa sudah bertambah sebanyak empat kepala keluarga yang sudah membangun jamban (*lampiran 2 halaman ci*).

h). Refleksi mengenai mengatasi praktek buang air besar di sembarang tempat

Menilai dari pengalaman program ini, kepala desa, Bapak Romdoni, Kepala Dusun Karangasem, fasilitator desa berkeyakinan bahwa masalah buang air besar di sembarang tempat dapat diatasi dengan pemberian subsidi bantuan dengan nilai perbandingan subsidi lebih besar dari swadaya anggota masyarakat yang membutuhkan jamban. Pemikiran ini muncul setelah melihat pelaksanaan kegiatan-kegiatan program PNPM yang telah mencapai hasilnya dengan pendekatan partisipatif didalam pengelolaan programnya.

5.1.2.5. Fasilitator Desa

Ada dua orang yang ditunjuk sebagai fasilitator desa oleh kepala desa di Desa Kronggen. Kedua orang tersebut adalah Bapak Gudiyono yang juga menjabat sebagai kepala Dusun Sembukan dan Saudari Jihan Putri yang bukan berkedudukan sebagai perangkat pemerintah desa, dusun ataupun RT/RW. Saudari Jihan Putri mengundurkan diri setelah bekerja selama 3 bulan dan digantikan oleh Siti Rodiyah yang merupakan istri dari Kepala Dusun Karangasem. Ibu Dwiastuti, sanitarian dari Puskesmas Kecamatan Brati, mengatakan bahwa fasilitator desa bekerja tanpa subsidi dana dan pada suatu waktu bisa mendahulukan kepentingan pribadi untuk dikerjakan dan meninggalkan tugas sebagai fasilitator desa (*lampiran 2 halaman lxxxii*).

Diakui oleh Bapak Gudiyono bahwa dia ditunjuk oleh Pemerintah Desa Kronggen untuk menjadi fasilitator desa dan belum mengetahui apapun mengenai STBM ketika ditunjuk. Diakuinya juga bahwa beliau tidak sempat berdiskusi mengenai penunjukan tersebut dan harus menerima. Beliau menyebutkan bahwa tugas seorang fasilitator desa adalah menyadarkan masyarakat dan tugas ini belum ia ketahui ketika penunjukan dan baru diketahui tugas tersebut pada waktu pembekalan. Menurutnya, isi dari pesan penyadaran kepada masyarakat itu adalah memberi pengertian bahwa buang air besar di sembarang tempat memberi efek buruk terutama kepada kebersihan lingkungan dan ada banyak penyakit yang dapat disebabkan oleh masalah lingkungan yang kotor. Memberikan pengertian mengenai betapa pentingnya jamban merupakan hal pokok yang harus disampaikan kepada masyarakat. Diakuinya bahwa tugasnya sebagai fasilitator desa belum dicabut sampai saat ini dan dirinya mempunyai ikatan dengan Desa Kronggen sampai dengan desa tersebut terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat sehingga masih perlu berjuang terus untuk mencapai target tersebut. Pengalamannya menjadi fasilitator desa telah memberikan manfaat bagi dirinya berupa pengetahuan tentang karakter, budaya dan bagaimana kehidupan keseharian masyarakat dan dirinya sudah lebih dikenal oleh banyak orang. Bapak Gudiyono mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang mendukungnya bekerja sebagai fasilitator desa. Beliau juga merasakan putus asa bekerja sebagai fasilitator desa dan perasaan putus asa ini karena begitu sulitnya mengajak masyarakat untuk membuat jamban namun pekerjaan ini harus terus dilakukan (*lampiran 2 halaman xci*). Bapak Gudiyono merasakan bahwa dirinya bekerja sendiri selama bekerja sebagai fasilitator desa dan pihak pemerintah desa kurang mendukung pelaksanaan program STBM.

Jihan Putri menceritakan bahwa informasi mengenai penunjukannya sebagai fasilitator desa diperoleh dari salah seorang familinya yang bukan seorang perangkat pemerintah Desa Kronggen meskipun penunjukan itu berasal dari pemerintah Desa Kronggen. Informasi itu diterimanya sehari sebelum dirinya harus mengikuti pelatihan bagi fasilitator desa. Beliau mengatakan bahwa dirinya

sempat berpikir dahulu mengenai penunjukannya dan tidak sempat untuk berdiskusi mengenai penunjukannya. Kemudian beliau menetapkan satu motivasi sebagai fasilitator desa yaitu ingin mencari pengetahuan saja dan perasaannya selama menjadi fasilitator desa yaitu “merasa senang saja” dengan tugas ini. Tugas ini memberi manfaat baginya yaitu menjadi lebih mengetahui kondisi dan pola berpikir masyarakat sehingga membantu dirinya dalam bersikap dan bertindak terhadap masyarakat. Selama menjadi fasilitator desa merasakan mendapat dukungan lebih banyak dari sanitarian puskesmas. Dukungan juga dirasakan datang dari anggota tim STBM tingkat kecamatan yang lain seperti dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Brati yang menanyakan kemajuan pencapaian program STBM dan pelaksanaan monitoring apakah sudah dilakukan atau belum.

Ibu Siti Rodiyah yang merupakan istri dari Kepala Dusun Karangasem. Ibu Siti Rodiyah mengakui penunjukkan dirinya sebagai fasilitator desa oleh kepala desa. Penunjukkan tersebut disampaikan oleh istri kepala desa yang mendatangi rumah Ibu Siti Rodiyah. Ibu Siti Rodiyah sempat memikirkan penunjukannya sebagai fasilitator desa ketika penunjukkan itu disampaikan dan mengakui bahwa penunjukkan dirinya sebagai fasilitator desa karena sebagai istri kepala dusun dan termuda diantara ibu-ibu di dusunnya. Ibu Siti Rodiyah mengakui alasan penerimaannya sebagai fasilitator desa karena sekedar ingin saja menjadi fasilitator desa dan mengapa memiliki keinginan itu tidak diungkapkannya.

Ibu Siti Rodiyah berlatih menjadi fasilitator desa tidak melalui kegiatan pelatihan seperti yang diselenggarakan di Ibu Kota Kabupaten Grobogan. Beliau diundang hadir pada acara pemicuan yang difasilitasi oleh Sanitarian dari Puskesmas Kecamatan Brati. Beliau juga mengakui kehadirannya dalam acara pemicuan tersebut untuk melihat bagaimana sanitarian bekerja melakukan pemicuan dan kemudian beliau diberi tugas oleh sanitarian untuk mengarahkan ibu-ibu setelah pemicuan agar membuat jamban khususnya di Dusun Karangasem. Beliau menambahkan juga bahwa ia mengikuti kegiatan program STBM ke dusun

lain diluar dusun tempat tinggalnya bersama-sama dengan sanitarian dan fasilitator desa lain.

Pengakuan dari fasilitator desa dan juga sanitarian bahwa mereka berupaya mengingatkan agar menghentikan praktek buang air besar di sembarang tempat dan membuat jamban di rumah lewat kesempatan arisan ibu-ibu yang berlangsung rutin dan kegiatan posyandu. Fasilitator desa dan sanitarian menceritakan upaya yang dilakukan berkali-kali untuk mendorong warga agar memiliki akses jamban. Wawancara dengan warga, Bapak Sugianto dan Bapak Masrukin, warga Dusun Karangasem, menunjukkan bahwa mereka mengakui sudah beberapa kali atau sering mendengar tentang arahan agar tidak melakukan praktek buang air besar di sembarang tempat dan agar memiliki jamban di rumah. Fasilitator desa, Ibu Siti Rodiyah, mengkisahkan pengalamannya yang dirasakan dirinya kurang direspon baik oleh warga seperti penuturannya berikut : “warga disini diajak bicara hanya jawabnya iya-iya saja supaya cepat pulang” (Siti Rodiyah, 18 Maret 2012).

Sanitarian, Ibu Dwiastuti, mengatakan bahwa fasilitator desa, Bapak Gudiyono, berperan aktif mendorong anggota masyarakat di dusun yang ia pimpin, Dusun Sembukan, agar menghentikan praktek buang air besar di sembarang tempat dan sempat terjadi dusun ini terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat.

5.1.2.6. Peran Tim STBM kecamatan

Tim STBM Kecamatan Brati terdiri dari empat orang yaitu sekretaris camat selaku ketua, kepala seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan dua orang anggota yaitu sanitarian dari Puskesmas Kecamatan Brati dan penilik sekolah dari UPTD Pendidikan Kecamatan Brati. Tim STBM kecamatan telah mendapat pembekalan agar dapat bekerja sebagai tim STBM kecamatan dan sanitarian mendapat pembekalan ketika diawal program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. Camat membentuk tim STBM mengikuti instruksi dari pemerintah kabupaten mengenai susunan tim STBM dan masing-masing anggota

tim STBM bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tugas tim STBM ini bekerja memberikan motivasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Tim STBM juga meminta anggota masyarakat agar membuat jamban bagi yang belum memilikinya.

Dari kantor Kecamatan Brati dan Puskesmas Kecamatan Brati tidak ada dukungan anggaran untuk program STBM termasuk melakukan pemukiman di desa. Dengan tidak adanya dukungan anggaran ini, Kasi PMD menyatukan tugasnya sebagai tim STBM bersama tugas-tugas utamanya yang harus berkunjung ke desa yang didanai oleh anggaran rutin. Kasi PMD mengatakan jumlah anggaran rutin tersebut hanya cukup untuk kebutuhan transportasi dua atau tiga kali kunjungan ke desa. Sanitarian dari puskesmas dapat berkunjung ke desa karena telah disediakan uang transport yang bersumber dari alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditujukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya saja sehingga dengan kondisi seperti ini sanitarian memberikan pelayanan ke posyandu sambil memberikan pengarahan kepada peserta kunjung posyandu agar merubah perilaku buang air besar di sembarang tempat dan menyempatkan bertemu dengan fasilitator desa untuk menanyakan perkembangan kemajuan perubahan perilaku masyarakat dalam buang air besar.

Camat bersama kepala desa sudah membuat komitmen bersama agar pada bulan Juni 2012 seluruh desa sudah dinyatakan terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Camat memberikan motivasi dan menyampaikan keinginannya agar seluruh desa terbebas dari praktik buang air besar di sembarang tempat pada kesempatan-kesempatan pertemuan dengan perangkat pemerintah desa. Untuk mencapai target tersebut, tim STBM meminta kepada fasilitator desa agar mendata ulang bagi anggota masyarakat yang belum mengakses jamban dan mendorong anggota masyarakat tersebut agar mengakses jamban ke familinya terdekat. Tim STBM berkoordinasi dengan perangkat pemerintah desa untuk menanyakan perkembangan akses jamban pada kesempatan berkunjung ke desa dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya dan tim STBM bersikap percaya kepada perangkat pemerintah desa dengan informasi yang diberikan. Kasi PMD

Universitas Indonesia

menyampaikan bahwa koordinasi kunci terletak pada kepala desa untuk mencapai target ini karena kepala desa cukup dituruti oleh perangkat pemerintahan desa.

Tim STBM kecamatan mengadakan pertemuan koordinasi bersama fasilitator desa satu bulan sekali untuk mengetahui perkembangan, permasalahan dan hambatan. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi ini mendapat bantuan dari sebuah LSM pada awal-awal penyelenggaraan program namun dukungan tersebut berhenti menjelang pertengahan dan sampai saat ini. Rapat koordinasi terakhir terjadi pada tanggal 19 April 2012 dan pendanaan penyelenggaraan rapat koordinasi ini dilakukan secara swadaya. Pada kesempatan pertemuan koordinasi ini disampaikan juga mengenai inovasi membuat jamban murah dengan variasi harga 450 ribu rupiah, 550 ribu rupiah dan 700 ribu rupiah agar masyarakat dapat mengakses jamban. Belum ada arahan dari Camat Brati ataupun dari Sekretaris Camat Brati sampai kapan pertemuan koordinasi berjalan.

Sanitarian mengakui bahwa dari atasan belum memberikan dukungan kepada program STBM seperti tidak mengadakan bentuk koordinasi baru di puskesmas terkait program STBM agar sanitarian dapat bekerja lebih baik. Demikian juga dari Camat Brati belum memberikan dukungan dalam hal kemudahan bekerja bagi tim STBM.

Bapak Gudiyono mengatakan bahwa tim STBM kecamatan menunggu berita dari fasilitator desa yaitu meminta informasi tentang perkembangan program STBM di setiap desa dan pernyataan ini sama dengan yang disampaikan oleh fasilitator desa yang lain, Saudari Jihan Putri. Dikatakan juga oleh beliau bahwa fasilitator desa sedang menunggu kunjungan dari tim STBM tingkat kecamatan yang berasal dari kantor camat terutama bagi desa yang belum terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Kunjungan mereka ke desa merupakan hal yang penting agar masyarakat memahami bahwa program STBM bukanlah program yang muncul dari desa tetapi merupakan program yang datang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kehadiran tim STBM tingkat kecamatan baru pada tahap kegiatan pemicuan.

5.1.2.7. Kegiatan-kegiatan Kolektif dan Relasi diantara Masyarakat

Perbuatan memberi pertolongan ditunjukkan oleh warga ketika salah seorang warga sedang membangun rumah. Pertolongan itu datang dari warga yang bermukim disekitar lokasi rumah yang akan dibangun dan warga memberi bantuan tenaga. Bantuan tenaga yang diberikan sampai dengan selesainya pembangunan rumah. Pada kegiatan pembangunan rumah demikian, kaum bapak-bapak bekerja memberikan tenaga untuk membangun rumah sementara kaum ibu-ibu bekerja memasak menyiapkan makanan untuk bapak-bapak yang sedang bekerja membangun rumah itu (*lampiran 2 halaman c*). Praktek demikian dilakukan warga karena sudah menjadi adat dari sejak dahulu. Perbuatan memberi pertolongan ini ditunjukkan lagi oleh warga ketika salah seorang warga mengadakan hajatan, pernikahan atau khitanan, warga yang bertetangga dalam satu dusun pergi ke rumah yang sedang mengadakan hajatan, tanpa disuruh, membawa beras, rokok, gula, makanan dan lain-lain. Warga yang memberi bantuan kepada seseorang yang mengadakan hajatan berpikir bahwa kelak akan dibantu oleh seseorang yang pernah dibantunya. Praktek memberi pertolongan ini dengan satu tujuan meringankan beban seorang warga yang mengadakan hajatan. Begitu juga ketika terjadi kematian seseorang, warga bertetangga satu RT dengan keluarga yang sedang berduka berada di rumah keluarga yang sedang berduka untuk memberikan bantuan. Warga yang berada di RT lain yang berdekatan ikut ke kuburan menyiapkan liang lahat (*lampiran 2 halaman xcvi*). Memberikan pertolongan juga diberikan oleh warga ketika salah seorang warga dirawat inap di rumah sakit, warga beramai-ramai bahkan bisa seluruh warga satu dusun menjenguk dan memberikan uang dan makanan dengan tujuan dapat meringankan beban orang yang sedang sakit.

Di Dusun Permas, terdapat kegiatan darul infaq yang dipromotori oleh mesjid. Kegiatan ini sudah berjalan sejak lama sekali. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan warga untuk berinfaq. Pemanfaatan uang yang terkumpul melalui darul infaq ini untuk perbaikan mesjid dan masa sekarang pemanfaatannya sudah lebih umum atau untuk kegiatan kemaslahatan umat di

lingkungan dusun ini. Infaq ini dipertanggungjawabkan setiap tahun di bulan Juni lalu di bulan Juli dilakukan pengumpulan lagi. Setiap rukun tetangga sudah ditunjuk seseorang untuk melakukan pengumpulan infaq dan bertugas mengumpulkan infaq dengan berkunjung ke rumah-rumah. Setiap tahunnya dihitung jumlah infaq yang terkumpul lalu diadakan rapat dalam musyawarah mesjid Dusun Permas untuk menentukan penggunaan uang yang terkumpul. Uang tersebut bisa juga dipergunakan untuk menolong warga yang sedang berduka. Selain mengumpulkan infaq, warga juga mengumpulkan uang setiap bulan untuk mengisi kas RT dan setiap keluarga member sesuai dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. Salah satu pemanfaatan uang kas RT adalah membangun jembatan. Pembangunan jalan ini merupakan keinginan inisiatif warga RT yang kemudian menindaklanjutinya dengan mengadakan musyawarah untuk membangun jembatan. Bila terdapat kekurangan dana kas RT maka warga menambahkan kekurangan dana tersebut. Warga mengumpulkan uang untuk mengisi kas RT didasari oleh pemikiran bahwa kelak dapat mendanai kegiatan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan warga dan tidak ada paksaan bagi seorang warga mengumpulkan uang itu (*lampiran 2 halaman cvi*).

Di dusun yang lain juga yaitu Dusun Sinawah, warga juga mengumpulkan uang untuk mengisi kas RT dan semua RT memiliki kas RT yang uangnya diperoleh dari warga yang dikumpulkan secara rutin tiap bulan, ada atau tidak ada kegiatan pembangunan warga tetap mengumpulkan uang mengisi kas RT. Sedang berlangsung pembangunan jalan rabat beton di dusun ini dengan pembiayaan dari dana kas RT. Tradisi warga mengumpulkan uang untuk mengisi kas RT sudah berlangsung selama 20 tahun. Warga melakukan musyawarah terlebih dahulu bila ingin menyelenggarakan suatu kegiatan pembangunan di dusun dengan sumber pendanaan dari kas RT atau tambahan uang dari warga. Selain digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton, uang kas RT bisa dipergunakan untuk kegiatan silaturahmi atau menjenguk salah seorang warga yang sakit. Warga mengumpulkan uang untuk mengisi kas RT dengan dasar kesadaran pribadi dan tanpa ada paksaan kepada warga (*lampiran 2 halaman c*).

Terdapat di desa ini aktivitas yang merupakan budaya yaitu kegiatan sedekah bumi. Warga juga mengumpulkan uang yang dikumpulkan secara kolektif untuk membeli hewan untuk dipotong dan diolah menjadi makanan kemudian di makan bersama-sama pada sebuah hajatan yang berlangsung di tiap RW.

Terdapat juga praktek gotong royong ketika pembangunan jalan di dusun. Pengorganisasian warga bergotong royong dilakukan dengan memperhitungkan panjang jalan yang akan dibangun dibagi dengan jumlah orang yang tersedia sehingga warga mengetahui pada bagian mana bekerja membangun jalan. Warga tidak perlu disuruh untuk bergotong royong dan sudah memiliki kewajiban. Warga bersedia bergotong royong membangun jalan itu dengan alasan bahwa jalan yang dibangun akan dirasakan manfaatnya oleh warga. Demikian juga ketika perbaikan tanggul saluran air agar tidak mendatangkan banjir ke pemukiman warga. Pengorganisasian warga bergotong royong dilakukan dengan memperhitungkan panjang tanggul yang akan diperbaiki dibagi dengan jumlah orang yang akan bergotong royong sehingga warga sudah tahu bagian pekerjaannya. Warga tanpa disuruh untuk berangkat bergotong royong. Semuanya itu dikerjakan oleh warga dengan bergotong royong dengan satu tujuan bahwa pada akhirnya mereka juga yang akan merasakan manfaat dari apa yang dikerjakan. Kegiatan gotong royong warga membangun jalan rabat beton terjadi di Dusun Sobotuwo. Sebuah kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan bersama perangkat dusun dan kemudian dilanjutkan dengan pencarian dana dan menempatkan pada alokasi dana desa untuk pembangunan jalan. Perangkat dusun ini kemudian mengorganisir pengumpulan dana swadaya masyarakat dan mengelola swadaya secara efisien dengan cara menyerap ketrampilan dari tenaga ahli bangunan rabat beton. Masih terdapat praktek gotong royong yang lain, praktek gotong royong yang muncul karena adanya persoalan yang dirasakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan mengena kepada keberlangsungan kehidupan ekonomi mereka sehingga mendorong mereka membuat inisiatif dan bertindak seperti mengatasi masalah hama tikus. Warga secara partisipatif bekerja

mengatasi masalah itu pada pagi dan sore hari. Wawancara dengan warga mengatakan bahwa kegiatan gotong royong itu tujuannya menjaga kerukunan antar warga.

Contoh lain, ketika kegiatan program yang juga merupakan hasil dari partisipasi masyarakat adalah pembangunan jalan rabat beton di dusun-dusun yang didanai dari PNPM Mandiri. Bapak Gudiyono mengatakan bahwa dalam pembangunan ini masyarakat menunjukkan sikap proaktifnya. Masyarakat berkeinginan transportasi untuk aktivitas sehari-hari berjalan lancar dan jalan di depan rumah tampak bagus dipandang orang. Disini masyarakat mampu berswadaya disamping ada bantuan dalam jumlah relatif lebih besar dibanding bantuan yang diterima dari PNPM Mandiri. Masyarakat mampu memberikan tindakan spontan dalam menangani pembangunan jalan ini. Hal yang serupa dengan pola bantuan dana dari PNPM Mandiri terjadi juga di Dusun Karangasem ketika membangun jalan rabat beton yang merupakan hasil usulan masyarakat dengan nilai bantuan dari Program PNPM sebesar Rp. 100.000.000,-. Masih terdapat kekurangan dana untuk pembangunan jalan itu sebesar 3% dari total nilai uang yang diperlukan untuk pembangunan jalan itu dan kemudian ditutupi kekurangan itu oleh warga dengan beramai-ramai mengumpulkan uang. Kesediaan warga mengumpulkan uang seperti itu karena kesempatan mendapat bantuan sebesar itu sulit didapat sehingga masyarakat tidak mau melewatkan kesempatan itu dan bersedia berpartisipasi mengumpulkan uang dan masih ditambah kontribusi tenaga untuk pengerjaan jalan tersebut dan akhirnya pembangunan jalan rabat beton dapat diselesaikan.

Masyarakat menunjukkan sikap yang antusias sekali dalam pembangunan infrastruktur jalan ketika diberikan stimulasi bantuan seperti dikatakan oleh Kepala Desa Kronggen. Jumlah swadaya masyarakat yang berhasil dikumpulkan bisa mencapai 30 juta rupiah dalam setiap satu unit pembangunan jalan rabat beton. Di Dusun Sobotuwo, seluruh kepala keluarga memberikan swadayanya bahkan masyarakat pada tingkat perekonomian rendah mampu memberikan sumbangan dana sebesar Rp. 200.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton

Universitas Indonesia

yang merupakan hasil inisiatif masyarakat di dusun ini. Bahkan untuk pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak distimulasi oleh bantuan dan pembangunannya berasal dari inisiatif warga dusun tersebut. Hal serupa terjadi di Dusun Sinawah untuk pembangunan jalan dan mesjid dan dusun ini mendapat penghargaan juara dalam hal swadaya untuk tingkat kecamatan.

Gambaran praktek-praktek yang dilakukan masyarakat di atas menunjukkan adanya kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, didalam berbagai kelompok dan organisasi, serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinya kerjasama diantara mereka dan adanya hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama. Praktek-praktek yang menunjukkan adanya modal sosial.

Tindakan swadaya seperti gambaran di atas tidak terjadi dalam upaya mengatasi masalah perilaku buang air besar di sembarang tempat dengan alasan bahwa hal itu merupakan urusan pribadi seseorang. Tingkat pola pikir masyarakat desa ini belum berpikir untuk kesehatan lingkungan sehingga masalah buang air besar di sembarang tempat masih diabaikan seperti dikatakan oleh Kepala Desa Kronggen. Seorang kepala dusun mengatakan bahwa tidak terpikirkan untuk masalah buang air besar di sembarang tempat diselesaikan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat (*lampiran 2 halaman cii*). Masalah akses jamban dipandang sebagai persoalan pribadi dan diselesaikan secara masing-masing pribadi dan pihak pengurus RT belum mengarah mengatasi masalah akses jamban dalam program RT-nya (*lampiran 2 halaman c*). Bantuan material tidak mungkin dapat diberikan kepada warga yang belum akses jamban namun dapat dimungkinkan oleh warga memberikan bantuan tenaga dan seorang warga yang ingin membangun jamban harus menyiapkan material terlebih dahulu (*lampiran 2 halaman xcvi*). Di Dusun Permas, belum terjadi pemanfaatan dana kas RT atau infaq untuk pembangunan jamban bagi warga yang belum akses jamban. Dapat

Universitas Indonesia

menimbulkan kecemburuan warga bila membantu seorang warga yang belum akses jamban dengan menggunakan dana kas RT (*lampiran 2 halaman c sampai ci*). Penjelasan Saudari Jihan Putri dikatakan bahwa ”tidak muncul saja ide seperti memanfaatkan iuran RT atau infaq..ketika proses pemicuan berjalan sudah dimantahkan oleh warga-warga RT satu lalu semua menolak berkomitmen untuk membangun jamban”.

5.1.2.8. Penentuan Prioritas Desa

Penyusunan rencana pembangunan desa dimulai dari musyawarah masyarakat tingkat RT kemudian hasil musyawarah tingkat RT dibawa kepada musyawarah tingkat RW dan hasil musyawarah tingkat RW dibawa kepada musyawarah tingkat desa. Pada musyawarah tingkat desa menentukan skala prioritas pembangunan. Kemudian berdasarkan skala prioritas tersebut dituangkan dalam RPJM Desa. Terkait dengan program STBM, penyelidikan terhadap RPJM Desa Kronggen yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan penjarangan masalah bidang kesehatan terdapat rencana untuk membangun sebanyak 300 unit wc untuk 300 kepala keluarga. Sekretaris Desa Kronggen mengatakan bahwa rencana pembangunan 300 unit wc tersebut untuk menindaklanjuti program STBM.

5.2. Analisa terhadap Fakta-fakta Implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

5.2.1. Konstruksi Partisipasi Masyarakat yang Terjadi Dikedua Desa

Pada bagian 5.1.1.7 dan bagian 5.1.2.7 menggambarkan contoh-contoh kegiatan yang dikelola secara partisipatif atas dasar inisiatif atau dorongan pribadi dan diputuskan secara bersama-sama dalam suatu musyawarah dan dikerjakan dengan menggunakan sumber daya yang dikumpulkan secara bersama-sama. Dari penggambaran di kedua bagian tersebut ditemukan beberapa pernyataan dengan makna-makna seperti ”tolong-menolong”, ”memberikan materi sebagai bantuan”, ”meninggalkan pekerjaan di sawah atau pekerjaan di kota-kota besar”,

”tidak menolak untuk terlibat”, ”meringankan beban”, ”saling membantu sesuai kesepakatan”, ”saling membantu agar seseorang merasakan rejeki dari yang memberi bantuan atau seseorang tidak berkekurangan”, ”ada musyawarah untuk menentukan kegiatan”, ”warga mengumpulkan uang”, ”agar memiliki fasilitas yang layak”, ”merelakan sebagian tanahnya untuk mengatasi banjir”, ”bersama-sama merasakan manfaatnya”, ”warga bersedia bergotong royong tanpa disuruh-suruh dan tahu apa yang menjadi bagian pekerjaannya”, ”terdapat pengorganisasian pekerjaan untuk sekelompok orang”, ”membuat inisiatif atau hasil inisiatif masyarakat”, ”hasil usulan masyarakat”, ”masyarakat menunjukkan sikap proaktif”, ”memberikan tindakan spontan”, ”pengumpulan swadaya masyarakat berupa uang”, dan ”adanya persoalan yang dirasakan bersama seperti persoalan banjir dan mencegah terjadi hama di kemudian hari. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bagaimana masyarakat di kedua desa berpartisipasi dan dilakukan dalam rangka membangun kerukunan masyarakat.

Di kedua desa masyarakat berpartisipasi untuk memberikan pertolongan dalam bentuk pemberian materi atau tenaga atau uang untuk meringankan beban orang yang ditolong bahkan dapat meninggalkan pekerjaan mata pencahariannya untuk menolong agar orang lain merasakan rejeki dari orang yang membantunya, ada kesediaan diri untuk terlibat membantu dan terjadi kesepakatan untuk saling membantu. Masyarakat berpartisipasi atas dasar inisiatif atau melaksanakan sesuatu kegiatan atas dasar hasil usulan dari masyarakat sendiri yang diputuskan melalui musyawarah, melakukan pengorganisasian pekerjaan, terdapat kerelaan memberi harta milik pribadi seperti tanah atau memberi uang atau memberikan tenaganya untuk mengatasi persoalan, menunjukkan sikap proaktif, tindakan spontan dan pada akhirnya merasakan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Pengertian partisipasi masyarakat di atas menunjukkan relevansinya dengan apa yang diungkapkan oleh Mikkelsen yang mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukannya sendiri oleh masyarakat. Pada penggambaran partisipasi

masyarakat di atas relevan juga dengan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya menurut pengertian Mikkelsen. Kemudian pengertian partisipasi masyarakat di atas sesuai dengan salah satu unsur penting dari konsep partisipasi yang diungkapkan oleh Davis (1962) yaitu kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.

Dari gambaran di atas, bagaimana masyarakat di kedua desa yang diteliti berpartisipasi yang memberi hasil teratasinya persoalan-persoalan yang dirasakan bersama. Namun pada implementasi Strategi Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat terjadi respon dan pandangan dari narasumber yang diwawancarai sebagai berikut : warga menganggap masalah merubah perilaku buang air besar di sembarang tempat atau mengupayakan akses jamban adalah masalah pribadi-pribadi seseorang dan diatasi oleh masing-masing pribadi, bukan masalah yang menjadi tanggungan masyarakat, tingkat pola pikir masyarakat yang belum sampai memikirkan masalah kesehatan lingkungan, program pengurus RT yang belum mengarah mengatasi masalah itu, warga masih mensepelekan masalah itu atau digambarkan sebagai masalah yang dinomor-tigakan atau dinomor-empatkan. Tidak terpikirkan oleh mereka dan tidak muncul ide untuk mengatasi masalah itu sebagaimana masyarakat biasa berswadaya dan berpartisipasi. Bahkan orang-orang yang berada diposisi sebagai fasilitator desa dan kader STBM yang dalam program ini berusaha keras mengatasi masalah ini tidak melakukan penerapan kegiatan-kegiatan dimana masyarakat sudah biasa memberikan swadaya dan berpartisipasi. Ketika kegiatan pemicuan dan pasca pemicuan tidak muncul kegiatan-kegiatan partisipasi seperti gambaran partisipasi masyarakat yang sudah terjadi di kedua desa.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini tidak muncul inisiatif dari masyarakat desa, memberikan usulan dalam musyawarah, memutuskan adanya kegiatan untuk mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat secara partisipatif atau bergotong royong, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dikumpulkan secara kolektif dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah

ini dan memberikan pertolongan kepada seseorang seperti pada kegiatan-kegiatan yang sudah mereka kerjakan secara bersama-sama di desa mereka.

Kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah menetapkan pokok kegiatan yaitu mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam menerapkan prinsip meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar. Pada bagian lain dari kebijakan tersebut juga ditetapkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan pada tingkat dusun yaitu mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong). Seperti apa solidaritas sosial dan partisipasi terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut maka perlu diidentifikasi partisipasi yang terjadi dengan mengkaitkan dengan teori-teori tentang tiga unsur penting dari konsep partisipasi dari Davis (1962) dan definisi-definisi partisipasi dari Mikkelsen dan Mubyarto (1984).

Kepala-kepala desa dari dua desa yang diteliti mengungkapkan kesediaan untuk berkomitmen terhadap tujuan program STBM dan masing-masing memiliki tujuan spesifik sendiri sebagai sikap setuju dengan tujuan program STBM. Seperti pernyataan Kepala Desa Tajemsari : “Ekonomi masyarakat desa masih terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan sehingga untuk membuat wc masih terkendala sehingga menjadi dasar kami untuk memacu masyarakat dalam program ini” (Setyobudi, 4 Maret 2012) dan “Sesuai dengan kemajuan zaman agar masyarakat punya etika tidak buang air besar di sembarang tempat” (Setyobudi, 4 Maret 2012) dan Kepala Desa Kronggen : “Zaman sudah maju seperti sekarang, ya masih ada yang buang air besar di kali, di kolam, seharusnya sudah tidak, ini menandakan kita masih ketinggalan” (Kliwon Utama, 24 Maret 2012). Kepala-kepala desa tersebut telah menunjukkan kontribusi sukarela dalam program STBM dan terdapat kesediaan mereka secara sukarela untuk membantu tercapainya keberhasilan program STBM untuk membebaskan desa dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Kedua kepala desa mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang disediakan bagi mereka. Kewenangan mereka sebagai kepala desa menggambarkan bahwa mereka telah membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini sudah merupakan gambaran keterlibatan

mereka secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan. Bila dikaitkan dengan teori dari Mikkelsen dan Mubyarto maka gambaran di atas menunjukkan adanya partisipasi dari kepala desa.

Kepemimpinan dan komitmen dari kedua kepala desa terhadap kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan pihak pemerintah kecamatan melalui keterangan dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dari kedua kecamatan bahwa pemerintah kecamatan menekankan agar kepala desa berkomitmen untuk program STBM ini (*lampiran 2 halaman xxxvii dan lxxviii sampai lxxix*). Pada tahap di atas menggambarkan sebuah tingkat partisipasi masyarakat yang sudah pada tingkat *partnership* (kemitraan) menurut teori Arnstein (1969). *Partnership* merupakan sebuah tingkatan partisipasi yang didefinisikan oleh Arnstein (1969) yang masuk pada kelompok *citizen power*. Disini pemerintah daerah Kabupaten Grobogan mendelegasikan kekuasaan kepada masyarakat dalam hal ini kepala desa dalam membuat keputusan tetapi pemerintah daerah tetap memiliki pengaruh dalam penentuan keputusan akhir dan masyarakat dalam hal ini kepala desa terlibat dalam proses menentukan kegiatan selanjutnya dan memiliki pengaruh dalam menentukan keputusan akhir. Dalam kejadian ini, bukti diberi kekuasaan dan memiliki pengaruh dalam menentukan keputusan akhir yaitu penandatanganan bahwa kepala desa berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut.

Perangkat pemerintah desa, dusun dan ketua rukun tetangga menunjukkan partisipasinya berupa kontribusi sukarela dalam suatu proyek pembangunan seperti program STBM ini. Partisipasi mereka seperti mengusahakan terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pemicuan pada tingkat dusun, mengundang warga untuk hadir pertemuan sosialisasi dan pemicuan dan terlibat dalam monitoring di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketua rukun tetangga yang belum memiliki jamban berupaya menjadi contoh sudah membuat jamban sehingga bisa dilihat warga lainnya seperti yang terjadi di Desa Tajemsari. Di Desa Tajemsari sekretaris desa melakukan tindakan administratif untuk pembiayaan pertemuan koordinasi fasilitator desa di kantor camat.

Tidak terjadi partisipasi sesungguhnya pada tingkat masyarakat dalam rangka membebaskan desa dari praktek buang air besar. Partisipasi sesungguhnya menurut Mikkelsen yaitu berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri seperti keterangan fasilitator desa dari Desa Tajemsari bahwa belum pernah terjadi masalah praktek buang air besar di sembarang tempat dibicarakan dalam pertemuan perencanaan desa yang kemudian didanai dari anggaran dana desa dan dokumen RPJM Desa mengatasi masalah ini dengan merencanakan pengadaan bantuan toilet dengan berharap didanai dari pemerintah kabupaten bantuan. Namun partisipasi yang terjadi pada tingkat masyarakat pada implementasi kebijakan ini adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Mikkelsen seperti anggota masyarakat membuat jamban bagi diri mereka sendiri untuk kehidupan mereka dan pembangunan kebersihan lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat yang sesungguhnya pernah terjadi di kedua desa seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan mesjid dan jalan rabat beton.

Tiga unsur penting dari konsep partisipasi dari David (1962) terindikasi pada perilaku yang ditunjukkan oleh fasilitator desa baik dari Desa Kronggen dan Desa Tajemsari juga kader STBM. Fasilitator desa dari kedua desa menunjukkan keterlibatan mental dan perasaan seperti bersedia mengikuti pelatihan selama lima hari dan menginap, merasa bekerja sendiri sebagai fasilitator desa karena kurang dukungan dari pemerintah desa, merasa senang ketika masyarakat merubah perilakunya, mengalami penolakan dari warga dan mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa, melakukan penyadaran yang berulang-ulang kepada warga, terdapat sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok yang diberikan oleh mereka seperti sumbangan materi, pikiran dan tenaga dan tanggung jawab mengerjakan tanggung jawab yang sudah didelegasikan kepada mereka. Dikaitkan dengan definisi partisipasi dari Mikkelsen menunjukkan fasilitator desa dan kader STBM memberikan kontribusi sukarela dalam suatu proyek pembangunan dengan berupaya menyelenggarakan

sosialisasi pemicuan, mengupayakan monitoring kemajuan pembuatan jamban oleh warga yang sudah berkomitmen.

Bila fakta-fakta empiris di atas dinilai dengan definisi partisipasi dari Griesgraber dan Gunter (1996) yang mengartikan partisipasi sebagai suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program mulai dari tahap identifikasi sampai implementasi dan evaluasi. Fakta empiris di atas dari implementasi kebijakan di atas maka dapat dinilai bahwa partisipasi tidak terjadi pada implementasi kebijakan tersebut di kedua desa yang diteliti. Evaluasi partisipatif terhadap keseluruhan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tidak terjadi. Begitu juga bila penilaian terhadap fakta empiris dengan menggunakan definisi partisipasi sesungguhnya dari Mikkelsen yaitu berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri maka fakta empiris implementasi kebijakan di atas dapat dikatakan tidak terjadi partisipasi.

Aksi kolektif seperti yang diharapkan lewat konsep Community Led Total Sanitation dari Kamar Kar tidak terjadi di kedua desa khususnya dalam pembuatan jamban namun penyelesaiannya diserahkan lewat masing-masing individu yang berkontribusi dalam masalah dan aksi kolektif hanya terjadi ketika monitoring kemajuan lewat tindakan perangkat pemerintah desa, kepala dusun dan ketua rukun tetangga dalam rangka memperbaharui data kemajuan karena diminta oleh tim STBM kecamatan.

Bila menilai fakta implementasi kebijakan dalam bentuk program STBM yang diungkapkan di atas untuk menemukan partisipasi masyarakat berdasarkan konstruksi pengertian partisipasi masyarakat di atas maka partisipasi masyarakat tidak terjadi. Ini berarti program STBM muncul bukan merupakan usulan dari masyarakat sebagai perwujudan kebutuhan bersama.

5.2.3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Bagian di atas sudah diuraikan bahwa baik kepala desa, perangkat pemerintah desa, dusun dan ketua rukun tetangga, fasilitator desa dan masyarakat

menunjukkan partisipasinya dalam implementasi kebijakan ini namun terdapat perbedaan kedalaman dan jenis keterlibatan diantara mereka. Dengan adanya partisipasi mereka tersebut lalu kemudian mengelompokan partisipasi mereka berdasarkan bentuk yang dikemukakan oleh Davis (1962).

(a) Sumbangan pikiran

Jenis sumbangan ini terjadi ketika kepala-kepala desa dari kedua desa yang diteliti pikiran ketika harus mempertimbangkan memutuskan kepeminatan terhadap implementasi kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan ketika bagaimana mengorganisir implementasi kebijakan ini di desa mereka. Sumbangan pikiran juga diberikan oleh fasilitator desa dari kedua desa ketika menyusun penjelasan ketika pemicuan untuk menyadarkan masyarakat dan berulang-ulang mengingatkan masyarakat. Fasilitator desa memberikan sumbangan pikiran juga ketika berkoordinasi kepala dusun dan ketua rukun tetangga untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pemicuan. Sumbangan pikiran juga diberikan oleh kader STBM dari Desa Tajemsari ketika menyampaikan pesan untuk mendorong warga membuat jamban dan menentukan waktu yang tepat menyampaikan pesan-pesan pemicuan kepada warga. Sumbangan pikiran juga diberikan oleh warga yang menjadi peserta pemicuan yang menyampaikan kesulitannya membuat jamban karena masalah ekonomi dan memohon saran jawaban dari fasilitator pemicuan di kedua desa. Disini warga menunjukkan minat mereka untuk membuat jamban. Sumbangan pikiran juga diberikan oleh Sekretaris Desa Tajemsari yang memikirkan warga miskin agar dapat membangun jamban.

(b) Sumbangan Tenaga

Sumbangan tenaga ditunjukkan oleh fasilitator desa dari kedua desa untuk mengupayakan terselenggaranya pemicuan dari satu dusun ke dusun yang lain, mengunjungi pertemuan-pertemuan warga untuk menyampaikan

pesan pemicuan. Sumbangan tenaga juga diberikan oleh kader STBM bekerja mengunjungi warga untuk menyampaikan pesan pemicuan. Kaum ibu-ibu di Dusun Sembukan bekerja membangun septitank untuk jamban mereka dengan tujuan agar tidak mencemarkan lingkungan yang berakibat juga pada akhirnya kepada manusia. Sumbangan tenaga juga terjadi dari warga yang bekerja membangun jamban yang dikerjakan sendiri. Sumbangan tenaga diberikan juga oleh perangkat pemerintah desa di kedua desa berupa melakukan monitoring dan menginformasikan hasil monitoring kepada fasilitator desa.

(c) Sumbangan materi

Sumbangan materi diberikan juga oleh fasilitator desa dari kedua desa ketika menggunakan kendaraan pribadi mereka untuk berkunjung dari satu dusun ke dusun yang lain. Warga menunjukkan partisipasinya dengan menyumbangkan materi berupa material bangunan untuk membangun jamban dan cara menyiapkan material dilakukan dengan cara mencicil dengan jangka waktu yang panjang.

(d) Sumbangan uang

Sumbangan uang terjadi di Desa Tajemsari yang diambil dari alokasi dana desa yang bersumber dari pendapatan usaha pemerintah desa dan diputuskan oleh perangkat pemerintah desa untuk membiayai pertemuan koordinasi seluruh fasilitator desa di kantor camat.

5.2.4. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Untuk menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan strategi nasional STBM ini, penjelasan terbagi atas faktor internal yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pengetahuan, mata pencaharian, tingkat pendapatan

a. Jenis Kelamin

Dari kedua desa yang diteliti menunjukkan bahwa kontribusi dan keterlibatan sukarela lebih banyak ditunjukkan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu. Seperti kehadiran dalam pemecuan lebih banyak dihadiri oleh kaum ibu-ibu. Kehadiran ibu-ibu ini terjadi karena suami mereka sedang bekerja di kota lain dan peran pembagi tugas yang dilakukan oleh suami. Pekerjaan membuat jamban juga dilakukan baik oleh kaum ibu termasuk mengatur memperkerjakan tukang dalam membuat jamban karena suami bekerja di kota lain.

b. Mata Pencaharian

Kedua desa menunjukkan adanya kaum bapak-bapak sebagai kepala keluarga yang bekerja di kota lain. Kondisi ini mengurangi tingkat ketanggapan dari mereka terhadap upaya pemecahan masalah yang terjadi. Di Desa Kronggen seperti dinyatakan oleh fasilitator desa bahwa kesibukan bekerja di kota lain membuat mereka kurang peduli dengan program yang berlangsung di desa. Fasilitator Desa Tajemsari mengungkapkan hal serupa namun hanya sebagian orang saja yang seperti itu. Bapak Muslikhin mengatakan bahwa dahulu warga Desa Tajemsari yang bekerja di kota-kota besar kurang peduli dengan persoalan di desa namun kemudian mereka diorganisir untuk peduli dengan persoalan di desa dan dikatakannya bahwa banyak kontribusi mereka untuk pembangunan desa. Karena keadaan seperti itu tidak muncul sikap-sikap tidak peduli dari kepala keluarga yang bekerja di kota-kota besar dalam program STBM yang dibuktikan oleh mereka dengan merubah prioritas belanja keluarga.

Kesibukan pekerjaan perangkat pemerintah desa dan fasilitator desa menyebabkan pekerjaan mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat menjadi vakum. Namun Di Desa Tajemsari faktor kesibukan mata pencaharian tidak menghentikan upaya mengatasi masalah ini dan berakhir pada selebrasi desa terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat dan ini terjadi karena supervisi dari salah seorang dari tim STBM tingkat kecamatan, yaitu Kasi PMD Kecamatan Tegowanu.

Howat et.al (2001:261-262) menjelaskan bahwa meningkatnya proporsi anggota rumah tangga sebagai tenaga kerja, lamanya waktu bekerja, meningkatnya kompetisi sehingga menekankan upaya pemeliharaan diri dan keluarga yang berakibat eksklusif terhadap orang lain dan pertumbuhan populasi penduduk kota yang menimbulkan ketidakpercayaan dan isolasi menjadi penyebab berkurangnya modal sosial di masyarakat. Hal di atas menunjukkan indikasi demikian. Tuntutan kebutuhan keluarga menyebabkan banyak warga di kedua desa yang diteliti bekerja ke kota-kota besar dan akan dipengaruhi nilai-nilai ketidakpercayaan dan isolasi akibat pertumbuhan penduduk kota. Maka faktor mata pencaharian kepala keluarga atau anggota keluarga turut mempengaruhi berkurang modal sosial yang sudah ada di desa.

c. Tingkat pengetahuan

Di Desa Kronggen, warga hadir dalam acara sosialisasi dan pemicuan karena sudah terpikir adanya bantuan dalam mengatasi masalah mereka sehingga faktor demikian membuat warga yang belum mengakses jamban tepat tidak memberi kesempatan pada diri mereka untuk terlibat dalam identifikasi masalah dan berupaya mengatasi masalah dengan cara selain mendapatkan bantuan. Penyelesaian masalah dengan cara mendapatkan bantuan muncul dari pernyataan warga yang belum memiliki jamban dan ini terjadi di kedua desa yang diteliti. Pemikiran demikian muncul karena dibangun oleh pengalaman program pemerintah yang memberi bantuan bagi keluarga miskin secara individual seperti beras raskin. Namun pengetahuan mereka dibangun dengan pengetahuan penyelesaian masalah atau upaya pembangunan dengan cara pengerjaan yang kolektif dan mengumpulkan swadaya masyarakat khususnya pada masalah-masalah pembenahan fasilitas umum yang dimanfaatkan bersama atau yang menggambarkan wajah desa mereka. Semua kelompok masyarakat mampu memberikan kontribusi dan keterlibatan sukarela mereka dengan berbagai bentuk sumbangan.

Keterlibatan warga dalam identifikasi masalah melalui pemicuan, upaya penyadaran, pemberian alternatif solusi dan penyampaian pesan pemicuan yang berulang yang dilakukan fasilitator memperbaiki tingkat pengetahuan mereka. Perbaikan tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka membawa mereka pada komitmen untuk membuat jamban dan dibuktikan dengan upaya membuat jamban dengan cara mencicil. Warga didalam upaya memenuhi komitmen mereka juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dibentuk oleh perilaku dan pengalaman yaitu bahwa kebiasaan mereka buang air besar di sungai, kolam, kakus cubluk di tengah tanah terbuka tidak dirasa mengganggu kenyamanan orang lain atau sudah terbangun saling pengertian diantara warga. Kemudian pengetahuan yang dibentuk oleh keadaan pekerjaan mata pencaharian mereka seperti berada di sungai mencari udang sehingga membuat mereka buang air besar di sungai. Dengan demikian pengetahuan demikian menunda penyelesaian masalah ditambah oleh persoalan kesulitan keuangan.

Perangkat pemerintah desa, pengurus dusun dan pengurus RT masih memandang masalah buang air besar di sembarang tempat sebagai masalah yang harus dipecahkan secara perseorangan meskipun dampaknya dirasakan sebagai masalah desa seperti penyakit diare dan persoalan buang air besar di sembarang tempat merupakan kebiasaan seseorang. Masalah ini tidak muncul dalam pertemuan-pertemuan pembahasan perencanaan pembangunan desa. Kepala Dusun Sobotuwo Desa Kronggen mengatakan tidak terpikirkan untuk mengatasi masalah ini secara partisipatif. Dengan tingkat pengetahuan demikian perangkat pemerintah desa, pengurus dusun dan pengurus RT maka mereka belum sampai tingkat partisipasi yang sesungguhnya. Partisipasi mereka hanya pada kontribusi sukarela dalam suatu proyek. Namun partisipasi yang sesungguhnya hanya terjadi pada orang-orang yang diberi peran tanggung jawab dengan nama posisi tertentu terkait dengan program dalam rangka implementasi kebijakan strategi nasional STBM. Tidak adanya partisipasi yang sesungguhnya menunjukkan tidak ada upaya lebih dari sekedar menjalankan tugas sesuai dengan posisi struktural

mereka di masyarakat sehingga berakibat kepada lemahnya dukungan kepada fasilitator desa dan masyarakat seperti pelaksanaan program menjadi vakum.

Tingkat pengetahuan aktual yang dimiliki oleh perangkat pemerintah desa, kepala dusun dan pengurus RT tersebut seperti yang terjadi di atas menentukan solidaritas dan integritas sosial mereka, tanggung jawab sosial dan komitmen mereka, kepekaan dan ketanggapan terhadap masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan kemauan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.

d. Tingkat pendapatan

Semua narasumber yang diwawancarai menyebutkan masalah kesulitan keuangan dari warga yang belum memiliki jamban menjadi masalah utama lambatnya atau tidak selesainya pemecahan masalah ini. Namun warga yang belum memiliki jamban sudah mengalami peningkatan pengetahuan mengenai masalah buang air besar di sembarang tempat dan keinginan untuk mengatasi masalah kesulitan keuangan atau kemiskinan menjadi faktor yang lebih besar pengaruhnya dalam upaya mengatasi masalah. Faktor kemiskinan turut membangun sikap pasrah warga yang belum memiliki jamban untuk mengatasi masalah.

e. Kepemimpinan

Kesenjangan orang-orang yang terlatih, berkomitmen dan memiliki kepentingan terhadap masalah ini menjadi hambatan (*barrier*) mengatasi masalah ini. Kepemimpinan yang berkomitmen terhadap penyelesaian masalah ini merupakan komponen esensial bagi efektifnya partisipasi masyarakat. Sangat penting memiliki orang-orang berpengaruh pada komite-komite pengelolaan program agar tidak terjadi kevakuman program sejak awal dan keterlibatan aktif perangkat pemerintah desa, dusun dan pengurus rukun tetangga memberi keuntungan. Dari perjalanan program di kedua desa menunjukkan kepemimpinan yang dimiliki oleh fasilitator desa dan kader STBM memberi pengaruh kepada

keberhasilan program. Di Desa Tajemsari menunjukkan adanya komitmen yang konsisten yang ditunjukkan oleh fasilitator desa dan kader STBM sehingga pencapaian keberhasilan program lebih baik dari Desa Kronggen. Di desa tersebut komitmen yang konsisten, ketertarikan dan kapasitas fasilitator desa dan kader STBM mengatasi kurangnya dukungan penuh dari perangkat pemerintah desa dan mampu mengajak warga desa merubah prioritas belanja rumah tangga untuk mencicil material pembuatan jamban. Kemudian di Desa Tajemsari dalam sejarahnya terdapat orang-orang yang mampu mengorganisir warga yang bekerja di kota-kota besar yang semula kurang peduli dengan masalah desa lalu kemudian diajak untuk terlibat dalam pembangunan desa dan suasana ini berpengaruh terhadap program STBM. Di Desa Kronggen, fasilitator desa membutuhkan komitmen yang konsisten dari perangkat pemerintah desa yang besar dalam mendukung program ini dan ketiadaan komitmen konsisten tersebut berakibat pada vakumnya program.

f. Iklim sosial

Kedua desa yang diteliti sudah terbangun iklim sosial yang mengisi interaksi sosial dengan aktivitas-aktivitas kolektif seperti Jamaah Tahlil yang berlangsung tiap minggu dalam rangka membina kerukunan bersama seperti di Desa Tajemsari, arisan bagi seluruh perangkat pemerintah desa dan dusun juga sampai dengan tingkat RT seperti di Desa Kronggen, upaya-upaya kolektif dalam membangun fasilitas umum dan tempat ibadah dengan pendanaan swadaya seperti terjadi di kedua desa, mengatasi hama tikus yang dilakukan secara kolektif dan penyelenggaraan program PNPM yang juga dijalankan secara kolektif. Dengan kondisi iklim sosial demikian memberi kesempatan terjadinya seluruh rangkaian dan tahapan penyelenggaraan program STBM mulai dari sosialisasi, tahap pemicuan dan monitoring yang dilakukan secara kolektif.

g. Bantuan Pembangunan

Bantuan pemerintah telah menjadi bagian dari pengalaman partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa. Dalam

gambaran fakta di atas tergambar pernyataan kepala desa dan fasilitator desa dari Desa Tajemsari mengenai refleksi perjalanan program STBM dan dikatakan bahwa program ini dapat berhasil bila warga distimulasi dengan pemberian bantuan. Pernyataan ini diungkapkan becermis kepada pengalaman program PNPM. Mereka menceritakan tentang program yang berhasil dengan partisipasi masyarakat adalah program yang distimulasi oleh bantuan. Demikian juga di Desa Kronggen, pernyataan kepala dusun, kepala desa dan fasilitator desa mengungkapkan pemberian subsidi bantuan dengan nilai lebih besar dari swadaya masyarakat untuk membuat jamban dan hal ini becermis dari pengalaman program PNPM. Masyarakat menunjukkan sikap yang responsif terhadap bantuan pembangunan dari PNPM. Dengan demikian bantuan pembangunan turut menjadi salah satu faktor pendorong partisipasi masyarakat di kedua desa yang diteliti sehingga ketiadaan bantuan pembangunan pada program STBM menjadi penghambat upaya pencapaian target implementasi kebijakan yang diwujudkan dalam program STBM.

h. Kinerja Birokrasi

Kedua desa menunjukkan perbedaan dukungan dari kinerja birokrasi khususnya pemerintah kecamatan. Di Desa Tajemsari, kedua fasilitator desa merasakan manfaat dukungan yang diberikan dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tegowanu, Ibu Sri Mulyati. Kunjungan yang sering dilakukan ibu tersebut dan rasa pertemanan yang dirasakan oleh fasilitator desa membantu kinerja dari fasilitator desa dan perangkat pemerintah desa dalam mengupayakan keberhasilan program STBM. Ibu tersebut mendorong Camat Tegowanu melakukan konsultasi bagi desa yang lambat dalam melaksanakan program STBM. Kecamatan Tegowanu merupakan kecamatan memiliki kemajuan yang paling baik dalam penyelenggaraan program STBM. Namun hal seperti itu tidak terjadi di Desa Kronggen, seperti yang disampaikan oleh fasilitator desa tersebut bahwa tim STBM Kecamatan Brati hadir pada saat pemicuan dan meminta laporan perkembangan pencapaian program. Fasilitator desa merasakan masih kurang dukungan dari mereka dan membutuhkan kehadiran mereka ke desa

sehingga kondisi demikian membuat vakum perjalanan program STBM di Desa Kronggen.

Perbedaan berikutnya terletak pada pemerintahan desa. Di Desa Tajemsari berlaku pemahaman adat bahwa perangkat pemerintah desa dianggap sebagai orangtua maka apa yang diminta oleh perangkat pemerintah harus dibantu dan demikian sebaliknya bila warga memerlukan bantuan maka perangkat pemerintah desa juga harus bisa membantu. Kemudian pemahaman adat berikutnya adalah ketua-ketua RT harus siap dan bersedia bila diminta bantuan oleh perangkat pemerintah desa. Pemahaman tersebut sudah turun temurun dari masa kepala desa yang lalu-lalu. Kondisi demikian membantu pelaksanaan program STBM maka koordinasi terjadi antara fasilitator desa, kader STBM dengan ketua RT sehingga informasi perkembangan pembuatan jamban dapat diperoleh dan pembahasan mengatasi hambatan dapat dilakukan. Sisi lain, terdapat Sekretaris Desa Tajemsari yang memikirkan warga-warga yang miskin agar dapat membuat jamban. Berbeda di Desa Kronggen terdapat sebagian kepala dusun yang berkomitmen mendukung program STBM dan terdapat kepala dusun yang tidak mampu mendorong warganya untuk mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat.

5.2.5. Tiga Unsur Penting Partisipasi dan Keberhasilan Program STBM

Tiga unsur penting dari konsep partisipasi dari Davis (1962) yang antara lain keterlibatan sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, kesediaan memberi sumbangan kepada usaha pencapaian tujuan kelompok dan tanggung jawab yang terjadi pada diri kepala desa khususnya di Desa Tajemsari, fasilitator desa dan kader STBM telah menunjukkan dampaknya kepada keberhasilan program STBM di Desa Tajemsari. Namun di Desa Kronggen, tiga unsur tersebut hanya terjadi pada fasilitator desa saja sehingga keadaan demikian menyebabkan vakumnya perjalanan implementasi kebijakan tersebut.

5.2.6. Faktor Tingkat Pengetahuan, Mata Pencaharian dan Modal Sosial

Pada bagian sub bagian 5.1.1.7 di atas menggambarkan beragam bentuk kegiatan-kegiatan kolektif dan relasi masyarakat di Desa Tajemsari. Masyarakat desa ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bekerja sama ketika salah seorang warga ingin membangun rumah dimana warga memberikan bantuan tenaga, ketika salah seorang warga mengadakan hajatan dimana warga memberikan bantuan materi dan dengan 'mati-matian' membantu bahkan mampu meninggalkan pekerjaannya di sawah, kembali ke desa bagi warga yang bekerja di luar desa sampai dengan Semarang, warga beramai-ramai menjenguk salah seorang warga yang sakit dirawat inap di rumah sakit, warga satu RT berada di rumah duka untuk memberi bantuan ketika ada salah seorang warga meninggal, warga merelakan sebagian kecil tanahnya untuk dikeruk untuk mengatasi banjir, warga memberikan tenaganya ketika ingin membangun rumah salah seorang warga, saling bergantian bekerja memulai menanam padi agar terhindar dari hama di kemudian hari dan terdapat contoh lainnya termasuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Demikian halnya sama dengan Desa Kronggen terdapat aktivitas-aktivitas kolektif yang serupa dengan Desa Tajemsari yang diuraikan pada bagian sub bab 5.1.2.7 pada bab ini namun Desa Kronggen memiliki aktivitas kolektif seperti mengumpulkan uang setiap bulan untuk mengisi kas RT dan mempergunakannya untuk membangun dusun dan aktivitas sosial lainnya dan mengumpulkan infaq secara rutin dikumpulkan dan dipertanggungjawabkan dan dimusyawarahkan bersama untuk memutuskan pemanfaatannya bagi kepentingan bersama, warga satu lingkungan RT membantu bekerja di rumah sebuah keluarga yang merupakan anggotanya yang sedang kedukaan, warga membantu memberikan seperti bahan makanan dan minuman kepada salah sebuah keluarga yang merupakan anggota lingkungannya dan lain-lain.

Secara sederhana, partisipasi masyarakat di kedua desa diformulasikan seperti digambarkan pada bagian 5.2.1 yakni adanya pemberian pertolongan dalam bentuk pemberian materi atau tenaga atau uang untuk meringankan beban orang yang ditolong bahkan dapat meninggalkan pekerjaan mata pencahariannya

untuk menolong agar orang lain merasakan rejeki dari orang yang membantunya, ada kesediaan diri untuk terlibat membantu dan terjadi kesepakatan untuk saling membantu. Masyarakat berpartisipasi atas dasar inisiatif atau melaksanakan sesuatu kegiatan atas dasar hasil usulan dari masyarakat sendiri yang diputuskan melalui musyawarah, melakukan pengorganisasian pekerjaan, terdapat kerelaan memberi harta milik pribadi seperti tanah atau memberi uang atau memberikan tenaganya untuk mengatasi persoalan, menunjukkan sikap proaktif, tindakan spontan dan pada akhirnya merasakan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Gambaran di atas mencirikan adanya komponen-komponen dari definisi modal sosial seperti kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama dan nilai-nilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama, saling pengertian (*mutual understanding*) seperti saling tolong-menolong, adanya kepercayaan (*trust*) diantara mereka dalam pengumpulan dana untuk mengisi kas RT dan memberi bantuan salah seorang keluarga ketika sedang kematian, sakit dan menyelenggarakan hajatan. Dari sini menunjukkan bahwa kedua desa yang diteliti masyarakatnya sudah memiliki modal sosial.

Namun aktivitas-aktivitas di desa dimana partisipasi masyarakat terjadi seperti digambarkan di atas tidak terjadi untuk mengatasi masalah perilaku buang air besar di sembarang tempat atau mengusahakan adanya akses jamban bagi warga yang berperilaku seperti itu. Ada beragam alasan, diantaranya menganggap masalah merubah perilaku buang air besar di sembarang tempat atau mengupayakan akses jamban adalah masalah pribadi-pribadi seseorang dan diatasi dan diatasi oleh masing-masing pribadi, bukan masalah yang menjadi tanggungan masyarakat, tingkat pola pikir masyarakat yang belum sampai memikirkan masalah kesehatan lingkungan, program pengurus RT yang belum mengarah mengatasi masalah itu, warga masih mensepelekan masalah itu atau digambarkan sebagai masalah yang dinomor-tigakan atau dinomor-empatkan. Bahkan orang-orang yang berada diposisi sebagai fasilitator desa dan kader STBM yang dalam program ini berusaha keras mengatasi masalah ini tidak melakukan penerapan

kegiatan-kegiatan dimana masyarakat sudah biasa memberikan swadaya dan berpartisipasi. Tidak terpikirkan oleh mereka dan tidak muncul ide untuk mengatasi masalah itu sebagaimana masyarakat biasa berswadaya dan berpartisipasi. Disini modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat tidak membuat masyarakat berinisiatif dengan memunculkan usulan dalam musyawarah membuat kegiatan pembangunan untuk mengatasi masalah perilaku buang air besar di sembarang tempat, memanfaatkan mobilisasi sumberdaya seperti memanfaatkan kas RT, arisan, infaq yang sudah dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat tidak hanya untuk pembangunan mesjid dan cara adat seperti meminta bantuan material ketika seseorang ingin membangun rumah. Modal sosial yang sudah ada di masyarakat tidak langsung membuat masyarakat berinisiatif berpartisipasi atau mengambil tindakan berswadaya ketika masalah ini diketahui. Tingkat pengetahuan masyarakat untuk memahami masalah dan tingkat pengetahuan untuk menentukan tindakan mereka menjadi faktor pengaruh. Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan modal sosial masyarakat terhadap munculnya inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah yang diketahui oleh masyarakat. Djamhuri (2008: 96) menyatakan bahwa modal sosial merupakan pra-kondisi penting yang berpengaruh kepada partisipasi masyarakat. Namun tingkat pengetahuan lebih menentukan ketimbang modal sosial terhadap munculnya inisiatif partisipasi masyarakat atau menolong seseorang.

Pada halaman 74 pada bab ini disebutkan oleh Bapak Muslikhin bahwa dahulu warga Desa Tajemsari yang bekerja di kota-kota besar kurang memperhatikan persoalan di desa namun kemudian mereka diorganisir agar peduli dengan desanya dan mereka merespon pembangunan desa. Kemudian Bapak Kristiandoko mengatakan bahwa hanya sebagian saja dari warga Desa Tajemsari yang bersikap kurang memperhatikan persoalan di desa karena bekerja di kota-kota besar dan halaman 101 disebutkan oleh Bapak Gudiyono bahwa kesibukan bekerja kepala keluarga di kota lain dan belum memiliki akses jamban menunjukkan kurangnya perhatian mereka untuk mengakses jamban atau

membuat jamban di rumah meskipun pemberitahuan sudah diberikan. Tuntutan kebutuhan keluarga menyebabkan banyak warga di kedua desa yang diteliti bekerja ke kota-kota besar dan dipengaruhi nilai-nilai ketidakpercayaan dan isolasi akibat pertumbuhan penduduk kota Howat et.al (2001:261-262). Kepala keluarga yang bekerja di kota-kota besar menunjukkan kurang memperhatikan persoalan di desa khususnya dalam masalah perilaku buang air besar di sembarang tempat. Sikap kurang memperhatikan tersebut berakibat tereduksinya modal sosial masyarakat khususnya mereka yang bekerja di kota-kota besar.

5.2.7. Partisipasi Masyarakat dapat terjadi tanpa Insentif Keuangan

Desa Tajemsari menunjukkan kemajuan pencapaian rumah tangga yang dapat mengakses jamban sudah hampir seluruhnya dan ini jauh lebih baik dari Desa Kronggen. Namun kedua desa tersebut menunjukkan kejadian-kejadian rumah tangga yang membuat jamban baik yang sudah selesai pembuatan jamban dan sedang dalam mengupayakan mencicil dalam pengadaan material jamban. Tingkat kesadaran yang dipengaruhi pengetahuan dan pengalaman dan tingkat kesulitan keuangan yang besar yang dialami rumah tangga yang menjadi penyebab bagi warga yang belum memiliki akses jamban atau telah memiliki jamban di rumah. Bahwa perjalanan program STBM ini berlangsung tanpa disediakan insentif keuangan dari pemerintah daerah atas jasa perangkat pemerintah desa, fasilitator desa dan kader STBM yang bekerja termasuk juga penyediaan material pembuatan jamban. Tasmin Nahar (2012) dalam kesimpulannya adalah hal yang mungkin untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dengan intervensi tanpa insentif keuangan, maka penelitian ini juga menunjukkan kejadian yang sesuai dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Tasmin Nahar. Hasil penelitian dalam tesis ini menguatkan kesimpulan dari Tasmin Nahar.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan memaparkan dua bagian yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi butir-butir yang merupakan inti dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya sedangkan saran berisi rekomendasi kepada berbagai pihak yang peduli terhadap upaya perbaikan kebijakan dan implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran aktual partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Grobogan sebagai sebuah gerakan yang diinginkan oleh kebijakan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan faktor-faktor pendorong dan penghambat bagi partisipasi masyarakat. Maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- a) Dalam implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini tidak muncul inisiatif dari masyarakat desa, memberikan usulan dalam musyawarah, memutuskan adanya kegiatan untuk mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat secara partisipatif, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dikumpulkan secara kolektif dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah ini atau memberi pertolongan kepada seseorang seperti pada kegiatan-kegiatan yang mereka sudah kerjakan secara partisipatif di desa mereka.
- b) Partisipasi masyarakat desa yang terjadi dalam implementasi Strategi Nasional STBM ini terdiri atas yaitu kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri dan kontribusi sukarela bagi program pembangunan yang ditunjukkan oleh perangkat pemerintah desa, kepala dusun dan ketua rukun tetangga sampai pada tahap berlangsungnya pemecuan dan monitoring

hasil dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri yang ditunjukkan oleh warga yang belum memiliki akses jamban dengan aktifitas membangun jamban.

- c) Terdapat beberapa bentuk sumbangan yang diberikan oleh masyarakat desa sumbangan pikiran, tenaga, materi dan uang dalam implementasi Strategi Nasional STBM yang diberikan oleh perangkat pemerintah desa, fasilitator desa, kader STBM dan warga yang belum memiliki jamban.
- d) Faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Strategi Nasional STBM yaitu jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, kepemimpinan, iklim sosial, bantuan pembangunan dan kinerja birokrasi pemerintah kecamatan. Pada implementasi kebijakan tersebut peran wanita khususnya ibu rumah tangga lebih besar mulai dari kehadiran, penyebaran pesan pemucuan sampai membangun jamban. Ibu rumah tangga mengambil peran kepala keluarga dalam relasi bermasyarakat ketika ketidakhadiran suami dalam relasi bermasyarakat oleh karena pekerjaan.
- e) Faktor tingkat pendapatan atau kemiskinan merupakan faktor penghambat partisipasi masyarakat yang dominan mempengaruhi pencapaian implementasi Strategi Nasional STBM. Kekuatan modal sosial yang ada tidak mampu mendorong masyarakat di kedua desa yang diteliti mengatasi faktor tingkat pendapatan. Faktor bantuan pembangunan merupakan faktor penghambat bagi partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi tersebut. Namun di Desa Tajemsari faktor kemiskinan dapat diatasi oleh faktor birokrasi pemerintah desa yang bekerja baik dalam implementasi Strategi Nasional STBM.
- f) Kepala keluarga yang belum mengakses jamban yang bekerja di kota-kota besar kurang tanggap terhadap upaya pencapaian target implementasi Strategi Nasional STBM begitu juga terhadap persoalan desa. Warga tersebut bekerja di kota-kota besar terpisah dari keluarga dan lingkungan masyarakat desa dalam jangka waktu lama. Sikap kurang tanggap yang ditunjukkan oleh kepala

keluarga yang bekerja di kota-kota besar berakibat reduksi modal sosial di masyarakat.

- g) Faktor kinerja birokrasi pada tingkat kecamatan menunjukkan pengaruhnya sebagai faktor penghambat atau faktor pendukung yang membangun atau mengurangi partisipasi masyarakat dalam upaya membebaskan desa dari praktek buang air besar di sembarang tempat seperti peran yang ditunjukkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tegowanu membangun kinerja baik dari fasilitator Desa Tajemsari. Di Desa Tajemsari, pemahaman adat bahwa perangkat pemerintah desa adalah orangtua bagi warga sehingga apa yang diminta oleh perangkat pemerintah desa harus dibantu oleh warga dan ketua RT harus siap dan bersedia bila diminta bantuan. Hal seperti ini telah menentukan keberhasilan pelaksanaan program STBM di Desa Tajemsari sehingga desa ini lebih unggul dari Desa Kronggen dalam hal pencapaian implementasi Strategi Nasional STBM.
- h) Keikutsertakan masyarakat tanpa diberikan imbalan insentif keuangan dalam implementasi Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dapat terjadi dan memberikan kemajuan peningkatan akses jamban oleh rumah tangga.
- i) Tingkat pengetahuan masyarakat desa lebih menentukan munculnya inisiatif dari masyarakat desa, memberikan usulan dalam musyawarah sebagai upaya mengatasi masalah, memutuskan adanya kegiatan untuk mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat secara partisipatif, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dikumpulkan secara kolektif dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah ini seperti pada kegiatan-kegiatan yang sudah mereka kerjakan secara partisipatif di desa mereka atau memberikan pertolongan kepada seseorang ketimbang modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat.

6.2. Saran

Saran disini berisi rekomendasi kepada berbagai pihak yang peduli terhadap upaya perbaikan kebijakan dan implementasi kebijakan mengenai sanitasi total berbasis masyarakat sehingga mencapai tingkat lebih baik dalam hal terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat. Maka saran disini sebagai berikut

- a) Perhatian perlu diberikan kepada modal sosial yang ada di desa yang bisa terancam tereduksi oleh dominasi dinamika perekonomian seperti anggota masyarakat menjadi tenaga kerja dengan jangka waktu bekerja yang lama dan dipengaruhi oleh nilai-nilai ketidakpercayaan dan isolasi yang tumbuh seiring pertumbuhan kepadatan penduduk kota. Maka perlu pendekatan-pendekatan program yang meningkatkan modal sosial dengan jangka waktu yang panjang. Perlu aktivitas-aktivitas yang membangun kerjasama dan kepercayaan dan melibatkan masyarakat bekerja bersama pada sasaran bersama yang membangun kualitas kehidupan mereka. Maka desain Strategi Nasional STBM perlu memperhatikan peningkatan modal sosial dan implementasi kebijakan ini membangun kerjasama dan kepercayaan dan menempatkan semua komponen masyarakat desa bekerja bersama pada sasaran bersama.
- b) Perlu meningkatkan tingkat pengetahuan perangkat pemerintah desa, dusun, rukun tetangga dan masyarakat desa agar terjadi partisipasi masyarakat berupa pemberian pertolongan dalam bentuk pemberian materi atau tenaga atau uang untuk meringankan beban orang yang ditolong, memprioritaskan waktu bagi orang lain, ada kesediaan diri untuk terlibat membantu, kesepakatan untuk saling membantu, memunculkan inisiatif pemecahan persoalan secara kolektif atau melaksanakan sesuatu kegiatan atas dasar hasil usulan dari masyarakat sendiri yang diputuskan melalui musyawarah, melakukan pengorganisasian pekerjaan, kerelaan memberi harta milik pribadi untuk mengatasi persoalan, menunjukkan sikap proaktif, tindakan spontan dan pada akhirnya merasakan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.

- c) sudah dalam mengatasi persoalan-persoalan yang belum tertangani hingga sekarang.
- d) Badan-badan pemerintah pada tingkat di atas desa perlu mengambil peran membangun modal sosial masyarakat desa melalui supervisi yang konsisten dan berkualitas agar terjadi inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang belum tertangani hingga sekarang.
- e) Perlu pembangunan nilai-nilai positif dalam membangun budaya birokrasi pemerintah desa yang digali dari nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai yang dapat membangun relasi positif antara perangkat pemerintah desa dengan warganya dan relasi positif antara perangkat pemerintah desa dengan jenjang pemerintahan dibawahnya seperti ketua RT atau kepala dusun sehingga produktif bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti terjadi di Desa Tajemsari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan kesejahteraan sosial*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Edisi revisi. Jakarta: FISIP-UI Press.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007a). *Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset Komunitas. Dari pemikiran menuju penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007b). *Intervensi komunitas. Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Alston, Margareth & Wendy Bowles. (1988). *Research For Social Workers An Introducing To Methods*. Australia : Allen & Unwin.
- Budiharjo, Eko. (1991). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung : Alumni
- Burns, Danny, Hambleton, Hoggett. (1994). *The Politics of Decentralisation : Revitalising Local Democracy*. London : The Mac Millan Press.
- Bryant, Carolie & Louise G. White. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Penerjemah : Rusyanto L. Simatupang, Jakarta :LP3ES.
- Cohen, S., Prusak L. (2001). *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. London: Harvard Business Press.
- Coleman, J. (1999). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Terjemahan Susetiawan, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Griesgraber, J.M., and B.G. Gunter (eds). (1996). *Development : New Paradigms and Principles for the Twenty-first century*. East Haven, CT : Pluto Press.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.

- Hasan, Iqbal. (2004). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hunger, David & Wheleen, Thomas. (2011). Essential Of Strategic Management (5th ed.). New Jersey : Prentice Hall.
- John, Gaventa, et al. (2001). Mewujudkan partisipasi : 21 teknik partisipasi masyarakat untuk abad 21. Jakarta: The British Council.
- Joyce, Paul. (1999). Strategic Management for The Public Service. Buckingham : Open University Press.
- Kar, Kamal dan Chambers, Robert. (2008). Handbook of Community Led Total Sanitation. Plan International UK. London.
- Khairudin. (1992). Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta : Liberty
- Litwin, Howard. (1986). Correlates of Community Collaboration. In Yair Levy and Howard Litwin (Eds) Community and Cooperative In Participatory Development. England: Gower Publishing Company
- Midgley, James. (1986). "Community Participation : History, Concept, and Controversies" in James Midgley, et. al. Community participation, social development and the state. London : Methuen.
- Moleong, Lexy. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : . Remaja Rosdakarya,
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). Membangun masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. (2011). Kabupaten Grobogan dalam Angka tahun 2011. Purwodadi : Biro Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- Plummer, Janelle. (2004). Community Participation in China: Issues and Processes for Capacity Building. United Kingdom :Earthscan.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina M. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif. Ed 1,5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rukmana, Nana. (1993). Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

- Sanoff, Henry. (2000). *Community Participation Methods in Design and Planning*. Canada : John Wiley & Sons.
- Saragih, Ferdinand dan Umanto, Eko. (2007). *Pengantar Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Sastropoetra, Santoso. (1986). *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Silalahi, Ulber. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Soelaiman, Holil. (1980). *Partisipasi sosial dalam usaha kesejahteraan sosial*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.
- Soedarno P et. al. (1992). *Ilmu Sosial Dasar : Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. (2004). *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2006). *Pengembangan TKSM sebagai pilar pembangunan kesejahteraan sosial*. Makalah pada seminar pengembangan diklat TKSM, BBPPKS. Yogyakarta, 5 Desember 2006.
- Suparjan dan Hempri, Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.

Jurnal

- Arstein, Sherry. (2000). *A Ladder of Citizen Participation*, dalam *Journal of American Institute of Planner* 1969, dalam *The City Reader* (2nd) edition, Routledge.
- Djamhuri, Tri Lestari. (2008). *Community participation in social forestry program in Central Java, Indonesia : the effect of incentive structure and social capital*. *Agroforest Sys*, Vol. 74, p.83-96 (May).
- Howat, Peter, et.al. (2001). *Community Participation in Road Safety : Barriers and Enablers*. *Journal of Community Health*, Vol 26, No.4 (August).
- Sunarti. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. *Jurnal Tata Loka*. Semarang : Planologi UNDIP.

Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, kajian tentang kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat. Jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial. 12, 1-11.

Artikel Riset

Nahar, Tasmin, et. al. (2012). Scaling up Community Mobilization through Women's Groups for Maternal and Neonatal Health : Experience from Rural Bangladesh. BMC Pregnancy and Childbirth. London : University College London. <<http://www.biomedcentral.com/1471-2393/12/5>>

Skripsi/Tesis

Nefawan, Iman. (2008). Studi Evaluasi Penerapan Pendekatan Community Led Total Sanitation di Kecamatan Lembak dan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. Skripsi Universitas Indonesia.

Surotinojo, Ibrahim.(2009). Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi oleh Masyarakat (Sanimas) di Desa Bajo Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo Gorontalo. Tesis Universitas Diponegoro.

Bacaan lain

Fukuyama, Francis. (2000). Social Capital and Civil Society. International Monetary Fund Working Paper, WP/00/74. Authorized for distribution by Mohsin S. Khan. <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0074.pdf>>.

Pemerintah Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kronggen Periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Desa Kronggen.

Pemerintah Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tajemsari Periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Desa Tajemsari.

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Sri Mulyati)**

1. Bagaimana camat menindaklanjuti komitmen yang sudah ditandatangani camat untuk kecamatan yang dipimpinnya terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat ?
2. Bagaimana proses dilalui menuju komitmen kepala desa itu ?
3. Bagaimana perjalanan program STBM ?
4. Sumber pembiayaan APBDes bersumber dari mana ?
5. Apa peran pemerintah kecamatan dalam program STBM ?
6. Dari pemerintah kecamatan menargetkan apa pada program STBM ?
7. Gambaran tim STBM itu seperti apa ?
8. Bagaimana pembiayaan perjalanan Ibu bila ke desa-desa?
9. Bagaimana usaha agar desa-desa menjadi desa ODF ?
10. Menurut Ibu, siapa yang paling banyak Ibu dekati untuk meminta perkembangan mengenai kemajuan pembuatan jamban ?
11. Bagaimana penilaian Ibu terhadap fasilitator desa di Desa Tajemsari ?
12. Menurut Ibu, siapa yang menunjukkan peran yang baik dalam mendukung pelaksanaan program STBM di Desa Tajemsari ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KEPALA DESA TAJEMSARI
KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Setyobudi)**

1. Bisa ceritakan bagaimana awal mulanya kepala desa berkomitmen untuk membuat desa menjadi ODF ?
2. Apakah ada dorongan dari pihak pemerintah kecamatan agar menandatangani surat kepeminatan?
3. Setelah penandatanganan komitmen tersebut, kemudian apa berikutnya?
4. Menurut Bapak, program STBM darimana ?
5. Apa yang Bapak pahami dari sosialisasi program STBM?

(lanjutan)

6. Apakah desa tajemsari masih ada masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat?
7. Berapa jumlah warga yang masih buang air besar sembarangan ?
8. Setelah menerima sosialisasi dari camat lalu apa langkah selanjutnya?
9. Apa respon warga pada waktu sosialisasi?
10. Apakah waktu sosialisasi ada yang mengungkapkan ide?
11. Apa ada usulan lain dalam sosialisasi?
12. Apakah setiap informasi dari kecamatan apakah selalu diinformasikan melalui kegiatan jamaah tahlil?
13. Kenapa masyarakat mau berkumpul mengikuti pertemuan Jamaah Tahlil ?
14. Apa dampak dari masyarakat bertemu ?
15. Apa yang disumbangkan dalam gotong royong tersebut ?
16. Apa lagi yang Bapak lakukan berkaitan dengan program STBM ?
17. Bagaimana prioritas pembangunan desa ditentukan ?
18. Bagaimana tingkat pendidikan warga di desa ini ?
19. Contoh program pembangunan yang berhasil dengan partisipasi masyarakat ?
20. Cara menentukan prioritas pembangunan?
21. Siapa saja yang ikut menentukan prioritas pembangunan?
22. Bagaimana penyelenggaraan sosialisasi program STBM di kecamatan ?
23. Bagaimana pencapaian program STBM menurut pengamatan Bapak ?
24. Bagaimana kebijakan selanjutnya?
25. Bagaimana program pembangunan yang ada desa dikerjakan ?
26. Bagaimana pelaksanaan program STBM ?
27. Kenapa swadaya dan partisipasi masyarakat kurang pada program STBM ?

(lanjutan)

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
SEKRETARIS DESA TAJEMSARI
KECAMATAN TEGOWANU**

1. Bagaimana menurut Bapak tentang Program STBM ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
FASILITATOR DESA TAJEM SARI
KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Kristiandoko)**

1. Bagaimana Bapak bisa menjadi fasilitator desa ?
2. Kenapa Bapak bisa dipilih jadi fasilitator desa ?
3. Apa jabatan sebelum menjadi FD ?
4. Apakah pembekalan yang diberikan sudah cukup untuk menjadi fasilitator desa ?
5. Setelah pembekalan, apa kegiatan berikutnya?
6. Seberapa banyak orang yang hadir ?
7. Apa yang disampaikan pada acara sosialisasi program STBM ?
8. Kegiatan apa berikutnya setelah sosialisasi di balai desa ?
9. Apakah buang air besar di sembarang tempat sudah dirasakan sebagai masalah sebelum program STBM?
10. Apakah masalah buang air besar di sembarang tempat pernah di bahas dalam rapat-rapat resmi desa ?
11. Apa yang disosialisasikan di Jamaah tahlil ?
12. Apa ada tanggapan dari masyarakat?
13. Bagaimana pemician dilakukan ?
14. Bagaimana memastikan masyarakat yang janji buat WC ditindak lanjuti oleh mereka?
15. Apakah kader STBM ditunjuk oleh FD ?
16. Alasan kader mau bekerja secara sukarela ?
17. Apa yang didiskusikan kader dengan warga ?

(lanjutan)

18. Apa yang memotivasi fasilitator desa bekerja ?
19. Kenapa Bapak mau menerobos tantangan ?
20. Apakah kader STBM masih aktif?
21. Apa yang Bapak lakukan terhadap kader STBM agar tetap kerja ?
22. Apa yang memotivasi masyarakat mau membuat jamban ?
23. Di jemaah tahlil ada yang sudah punya jamban dan ada yang belum, apa respon warga di jemaah tahlil?
24. Siapa yang mendukung anda?
25. Apa manfaatnya bagi diri anda menjadi fasilitator desa ?
26. Apa pernah diverifikasi ODF desa ini ?
27. Bagaimana persiapan melakukan pemicuan?
28. Apa yang memotivasi warga mau datang ke pertemuan jemaah tahlil ?
29. Harapan dari pemicuan ?
30. Metoda cara-cara praktis melakukan pemicuan?
31. Apa tujuan pemicuan ?
32. Apa tanda keberhasilan program STBM ?
33. Apa ada orang yang dinilai sebagai natural leader ?
34. Apakah pernah diadakan selebrasi ODF ?
35. Siapa panitia yang kerja ?
36. Bagaimana peran tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam program STBM?
37. Apakah mengenai program STBM pernah masuk dalam agenda pertemuan perangkat desa secara resmi ?
38. Bagaimana monitoring kemajuan dilakukan ?
39. Kebijakan kepala desa terhadap STBM ?
40. Bagaimana supaya program STBM bisa berhasil ?
41. Apa program pembangunan desa yang berhasil dengan berpartisipasi masyarakat ?

(lanjutan)

42. Pernahkah ada diskusi menentukan prioritas pembangunan di desa ?
43. Bagaimana aparat desa mengorganisir kegiatan bila ada program pembangunan ?
44. Siapa yang menentukan prioritas pembangunan ?
45. Darimana sumber pembiayaan pembangunan desa ?
46. Bagaimana perasaan anda bekerja sebagai fasilitator desa ?
47. Apakah program STBM menyulitkan ?
48. Apa agenda dalam waktu dekat ini untuk program STBM ?
49. Dari tim STBM kecamatan apa yang dapat dilakukan ?
50. Bagaimana sikap dari bapak-bapak yang bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta menanggapi masalah-masalah desa atau pembangunan desa khususnya program STBM, apakah Bapak pernah menjumpai mereka seperti apa sikap mereka?
51. Ada yang mengatakan bahwa warga-warga yang bekerja di kota besar cenderung kurang tanggap atau kurang peduli kepada masalah-masalah desa atau pembangunan desa ?
52. Siapa yang banyak mendorong Bapak terus bekerja mengusahakan desa bebas ODF ?
53. Bagaimana perasaan Bapak terus diminta informasi berkali-kali oleh tim STBM kecamatan dan diingatkan agar tercapai targetnya?
54. Kadang orang merasa dibebani ketika diminta informasi berkali-kali dan diingatkan agar tercapai target bahkan bisa mengundurkan diri tapi Bapak merasa tidak apa-apa, kenapa bisa begitu ?
55. Siapa yang banyak membantu Bapak di desa ini untuk mengupayakan agar tercapai target program STBM ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
FASILITATOR DESA TAJEM SARI
KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Upid Indrawati)**

1. Bagaimana Anda bisa terpilih menjadi fasilitator desa ?
2. Apa yang ditugaskan kepada Anda sebagai fasilitator desa ?

(lanjutan)

3. Bagaimana susunan isi acara sosialisasi program STBM ?
4. Apa isi pertemuan sosialisasi ?
5. Apa yang dijelaskan ketika pemicuan ?
6. Apakah ada diskusi sesama warga setelah praktek pemicuan ?
7. Fakta hasil monitoring menunjukkan seperti apa ?
8. Anda sebagai warga desa, apakah terganggu dengan warga yang masih buang air besar di sembarang tempat ?
9. Apa manfaat bagi Anda menjadi fasilitator desa ?
10. Siapa orang-orang yang banyak memberi dukungan kepada anda sebagai fasilitator desa ?
11. Siapa yang hadir ketika pemicuan ?
12. Apa pernah dilakukan verifikasi desa ODF ?
13. Apakah ada rencana berikutnya setelah di verifikasi, misalnya untuk mempertahankan desa ODF?
14. Apa yang dibicarakan dengan sanitarian ?
15. Apa alasan kepala desa memilih anda menjadi fasilitator desa?
16. Bagaimana hubungan kerja fasilitator desa dengan pemerintah desa dalam program ini ?
17. Bagaimana tugas-tugas fasilitator desa diberikan kepada anda?
18. Bagaimana kondisi masyarakat yang belum memiliki akses jamban ?
19. Bagaimana warga yang belum mengakses jamban dapat mengusahakan akses jamban dan tidak mudah ?
20. Apakah pernah putus asa selama menjadi fasilitator desa ?
21. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga disini ?
22. Kenapa warga bisa membantu seperti itu?
23. Bagaimana seandainya ada warga yang tidak membantu ?

(lanjutan)

24. Kenapa ketika membangun jamban dalam program STBM tidak terjadi saling membantu seperti itu ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KADER STBM DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Muslikhin)**

1. Bagaimana Bapak bisa terpilih menjadi kader STBM ?
2. Apa manfaat menjadi kader STBM buat diri anda sendiri?
3. Menurut Bapak apa tugas seorang kader STBM ?
4. Bagaimana dampak bencana banjir terhadap program STBM ?
5. Bagaimana pelaksanaan pemucuan di wilayah Bapak ?
6. Ada yang mengatakan bahwa bila warga pergi ke kota-kota besar untuk bekerja cenderung tidak peduli atau cenderung kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan desa atau pembangunan desa ?
7. Bapak pernah bertemu dengan suami-suami yang bekerja di kota-kota besar dari ibu-ibu kita jumpai untuk wawancara, bagaimana tanggapan suami-suami mereka terhadap program STBM ?
8. Desa Tajemsari bisa selebrasi ODF tentunya bukan hasil kerja fasilitator desa seorang, lalu siapa-siapa yang membantu untuk mencapai desa ODF itu ?
9. Bagaimana koordinasi dengan ketua RT pelaksanaan program STBM ?
10. Apa yang dimaksud “ulu” itu ?
11. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di desa ini ?
12. Kenapa warga bisa tolong menolong seperti itu dalam pertanian, apa prinsipnya?
13. Apakah pola tolong-menolong seperti itu terjadi juga dalam pembangunan desa?
14. Kenapa warga tidak mau berpartisipasi bekerja ?

(lanjutan)

15. Dalam program PNPB, gotong royong dan swadaya masyarakat desa seperti apa ?
16. Lalu apa partisipasi masyarakat membangun desa yang berhasil ?
17. Kenapa warga mau menyumbangkan tanahnya untuk mengatasi banjir tadi ?
18. Lalu kenapa juga warga mau memberi sumbangan membangun mushola?
19. Lalu kenapa juga warga mau berswadaya untuk membangun jalan beton desa ?
20. Kenapa dalam membangun jamban dalam program STBM belum terjadi swadaya secara kolektif seperti itu?
21. Kenapa tidak terjadi warga membantu warga yang belum punya jamban?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KADER STBM DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Wakijan)**

1. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai kader STBM ?
2. Apa manfaat bagi Bapak menjadi kader STBM ?
3. Apa tugas Bapak sebagai kader STBM ?
4. Dimana Bapak memberi saran kepada warga ?
5. Apa yang Bapak rasakan mengenai kebersamaan dengan warga disini ?
6. Apa prinsip bagi warga bisa berpartisipasi membantu seperti itu?
7. Bagaimana respon warga terhadap pembangunan desa?
8. Kenapa warga mau memberikan sumbangan untuk pembangunan mesjid, apa prinsipnya?

(lanjutan)

9. Kenapa warga dalam program STBM agar warga dapat mengakses jamban bagi yang belum mengakses jamban belum terjadi partisipasi seperti yang Bapak jelaskan tadi?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Tuti, warga RT 02 RW 4)**

1. Pernahkan Ibu mendengar adanya arahan di desa ini agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?
2. Saat ini bila akan buang air besar kemana ?
3. Apa kesulitan Ibu membuat jamban ?
4. Pekerjaan kepala rumah tangga apa ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Slamet, warga RT 12 RW 3)**

1. Apabila Bapak dan keluarga buang air besar kemana sekarang ?
2. Apa pekerjaan Bapak ?
3. Kenapa baru saat ini membuat jamban ?
4. Pernah mendengar adanya arahan agar warga tidak buang air besar di sembarang ?
5. Bagaimana Bapak bisa membuat jamban kloset di rumah ?
6. Bagaimana perasaan Bapak ketika diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
7. Kenapa Bapak mau membuat jamban ?
8. Apa kegiatan gotong royong Bapak bersama warga disini?
9. Sekarang masalah buang air besar di sembarang tempat di dusun Bapak sudah seperti apa ?

(lanjutan)

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Sudarmin)**

1. Kapan Bapak baru punya jamban kloset di rumah ?
2. Pernah mendapat pengarahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?
3. Bagaimana perasaan Bapak diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?
4. Kenapa Bapak baru satu tahun kemudian membuat jamban kloset ?
5. Kenapa Bapak mau membuat jamban ?
6. Siapa yang pakai jamban kloset di rumah Bapak ?
7. Apa pekerjaan Bapak ?
8. Apa pendidikan terakhir Bapak ?
9. Apa kegiatan Bapak bersama warga di sekitar tinggal Bapak ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Munari warga RT 02 RW 04)**

1. Apabila Ibu dan keluarga akan buang air besar perginya kemana?
2. Apakah Ibu pernah mendengar arahan warga diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
3. Apa pekerjaan kepala rumah tangga?
4. Bagaimana perasaan Ibu diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
5. Apakah Ibu tahu akibat buang air besar di sembarang tempat ?
6. Kalau keperluan mandi dan cuci dimana ?
7. Kapan kira-kira Ibu berencana membuat jamban di rumah ?
8. Pendapatan yang Ibu dapat digunakan untuk apa saja ?

(lanjutan)

9. Berapa kali Ibu mendapat pengarahannya agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
10. Apa pendidikan terakhir Ibu?
11. Apa kegiatan Ibu bersama warga sekitar tempat tinggal Ibu?
12. Bagaimana perasaan Ibu masih buang air besar di sungai?
13. Apa yang Ibu rasakan hubungan dengan warga disini ?
14. Kenapa warga mau membantu seperti itu?
15. Kenapa warga belum dapat bergotong royong waktu membangun jamban ?
16. Bagaimana gotong royong warga untuk membangun desa ?
17. Kenapa warga bisa seperti itu ?
18. Kenapa warga mau membantu ketika ada hajatan, membangun rumah dan kematian ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Sugiono warga RT 03 / RW 04)**

1. Apabila Bapak ingin buang air besar kemana perginya?
2. Kenapa Bapak membuat jamban kloset di rumah?
3. Apa pernah mendengar atau mendapat pengarahannya agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?
4. Apa kegiatan Bapak bersama warga sekitar tempat tinggal Bapak?
5. Apakah masih sempat buang air besar di sungai?
6. Berapa lama Bapak membangun jamban kloset ?
7. Bagaimana air kebutuhan jamban kloset Bapak didapat ?
8. Siapa saja yang memakai jamban kloset milik Bapak?

(lanjutan)

9. Menurut Bapak akibat buang air besar di sembarang tempat?
10. Apa pendidikan terakhir Bapak?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN MLANGI
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Ngatimah warga RT 03 RW 03)**

1. Apakah Ibu tahu ada arahan agar warga tidak buang air besar di sembarang tempat?
2. Kemana Ibu dan keluarga bila ingin buang air besar?
3. Siapa yang mengarahkan Ibu buat jamban?
4. Apa pekerjaan kepala rumah tangga?
5. Kapan Ibu sudah membuat jamban?
6. Kenapa Ibu mau membuat jamban ?
7. Sumber air untuk jamban kloset Ibu darimana?
8. Bagaimana Ibu membangun jamban kloset?
9. Apa manfaat jamban kloset Ibu?
10. Siapa yang menggunakan jamban kloset milik Ibu?
11. Apa kegiatan Ibu bersama warga tetangga Ibu?
12. Dari mana Ibu mengetahui arahan agar warga tidak buang air besar di sembarang tempat?
13. Bagaimana perasaan setelah diberi tahu jangan buang air besar di sembarang tempat?
14. Bagaimana Ibu membangun jamban kloset Ibu?
15. Bagaimana dengan kakus yang dulu ?
16. Ketika banjir lalu bagaimana dengan jamban kloset Ibu?

(lanjutan)

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN MLANGI
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Suardi)**

1. Apakah Bapak pernah mendengar arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?
2. Apa pesan yang disampaikan dalam pertemuan itu?
3. Mengapa diminta membuat WC ?
4. Bagaimana perasaan Bapak tidak diperbolehkan lagi buang air besar di sembarang tempat ?
5. Apa pekerjaan Bapak ?
6. Pendapatan uang yang Bapak terima ditujukan untuk apa saja ?
7. Bagaimana kesan Bapak terhadap famili Bapak yang memberi izin menumpang jamban ?
8. Apakah ada keinginan untuk berusaha membuat jamban?
9. Ketika bencana banjir, lalu kemana Bapak buang air besar ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN MLANGI
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Sri Haryanti warga RT 02 RW 03)**

1. Apakah Ibu pernah mendengar arahan agar warga tidak lagi buang air besar di sembarang tempat?
2. Sebelum Ibu punya jamban kloset di rumah, kemana Ibu dan keluarga buang air besar di sembarang tempat ?
3. Kapan Ibu mendengar arahan itu ?
4. Dimana Ibu mendengar arahan itu ?
5. Berapa kali Ibu mendengar arahan itu ?
6. Kapan Ibu mulai membuat jamban ?
7. Apa pekerjaan kepala rumah tangga ?

(lanjutan)

8. Darimana Ibu mendapat air untuk jamban kloset milik Ibu?
9. Bagaimana perasaan Ibu diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
10. Kenapa Ibu ingin membangun jamban kloset ?
11. Apa manfaat Jamban kloset milik Ibu ?
12. Siapa saja yang menggunakan jamban kloset milik Ibu ?
13. Ketika Ibu masih menggunakan kasus pada waktu lalu, Apakah tidak mengganggu orang lain ?
14. Apakah kegiatan-kegiatan Ibu bersama warga di sekitar ?
15. Ketika bencana banjir datang, kemana Ibu pergi buang air besar ?
16. Apa pendidikan terakhir Ibu ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN BRATI
(Bapak Mustafirin)**

1. Bagaimana camat menindaklanjuti komitmen yang sudah ditandatangani camat untuk kecamatan yang dipimpinnya terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat ?
2. Apakah program STBM ini diwajibkan atau mengharuskan semua desa menjalankannya?
3. Sampai kapan target Kecamatan Brati terbebas dari buang air besar di sembarang tempat ?
4. Sejauhmana keinginan pemerintah kecamatan terhadap kepala desa agar mau membebaskan desa dari praktek buang air besar di sembarang tempat?
5. Dukungan apa yang diberikan camat kepada program STBM?
6. Apakah ada dukungan finansial yang disiapkan oleh pemerintah kecamatan ?
7. Apa tugas dari tim STBM kecamatan ?
8. Bagaimana dukungan finansial untuk tim STBM kecamatan ?

(lanjutan)

9. Apakah tim STBM kecamatan mendapat pembekalan untuk menjalankan tugas ?
10. Bagaimana koordinasi dari tim STBM kecamatan kepada pemerintah desa ?
11. Apa yang menyebabkan Desa Kronggen belum menjadi desa ODF ?
12. Siapa yang Bapak hubungi agar program STBM berhasil ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
SANITARIAN PUSKESMAS BRATI
(Ibu Dwiastuti)**

1. Gambaran tentang tim STBM kecamatan ini seperti apa menurut Ibu?
2. Apakah untuk fasilitator desa disediakan anggaran untuk menjalankan pekerjaan mereka?
3. Bagaimana sosialisasi dan pemicuan diselenggarakan ?
4. Persiapan apa yang dilakukan ?
5. Apakah ada pertanyaan dari masyarakat setelah praktek pemicuan ?
6. Setelah pemicuan apa yang terjadi ?
7. Siapa yang melakukan monitoring kemajuan program STBM ?
8. Waktu ibu berkunjung ke desa dalam rangka monitoring ke desa dan bertemu kepala dusun, apakah memang kepala dusun terlibat monitoring juga ?
9. Menurut Ibu, kenapa mereka mau jadi FD?
10. Menurut Ibu, apa peran dari kepala dusun?
11. Menurut Ibu, bagaimana kemajuan program STBM dari hasil monitoring yang dilakukan?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KEPALA DESA KRONGGEN
(Bapak Kliwon Utama)**

1. Bagaimana cerita Bapak, kepala desa se kecamatan berkomitmen mengatasi masalah praktek buang air besar di sembarang tempat ?

(lanjutan)

2. Bisa diceritakan apa saja prosesnya sebelum penandatanganan komitmen tersebut ?
3. Menurut Bapak, program STBM berasal dari siapa ?
4. Kenapa Bapak berminat juga untuk berkomitmen mengatasi masalah praktek buang air besar di sembarang tempat ?
5. Apa target dari program STBM ini ?
6. Apa yang Bapak tangkap dari pertemuan sosialisasi program STBM?
7. Apa yang muncul dalam diskusi ketika sosialisasi program STBM di balai desa ?
8. Pesan apa dari pertemuan sosialisasi program STBM di tingkat kecamatan ?
9. Apa pandangan Bapak tentang program STBM ?
10. Apa kebijakan pemerintah desa terhadap program STBM ini ?
11. Bagaimana penyelenggaraan kegiatan sosialisasi program STBM di tingkat kecamatan ?
12. Sudah sejauhmana kemajuan yang didapat dari melaksanakan program STBM?
13. Apa program pembangunan desa yang berhasil dikerjakan dengan partisipasi masyarakat ?
14. Kenapa pada program STBM swadaya dan partisipasi warga tidak terjadi ?
15. Bagaimana Prioritas pembangunan desa ditentukan?
16. Bagaimana pemicuan dapat dilaksanakan?
17. Apa hambatan dalam pelaksanaan program STBM ini?
18. Bagaimana kebijakan pelibatan masyarakat?

(lanjutan)

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
SEKRETARIS DESA KRONGGEN
(Bapak Hardijono)**

1. Waktu membuat RPJM Desa sejauhmana mempertimbangkan program STBM?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
FASILITATOR DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Gudiyono)**

1. Bagaimana Bapak bisa terpilih menjadi fasilitator desa ?
2. Pengamatan Bapak di Desa Kronggen sebelum ada program STBM?
3. Apa tugas Bapak sebagai fasilitator desa ?
4. Apakah pelatihan yang Bapak terima sudah cukup membekali Bapak sebagai fasilitator desa ?
5. Bagaimana gambaran proses pemicuan yang terjadi ?
6. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai fasilitator desa?
7. Mengapa Bapak sampai hari ini masih bersedia menjadi fasilitator desa?
8. Pandangan Bapak tentang program STBM bagaimana?
9. Bagaimana reaksi warga ketika pemicuan ?
10. Apa manfaat bagi Bapak menjadi fasilitator desa?
11. Setelah pemicuan sampai hari ini kemajuan program STBM seperti apa?
12. Apakah ada orang yang mendukung Bapak menjadi fasilitator desa atau menyemangati Bapak ?
13. Rencana dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan sehubungan dengan STBM?
14. Kapan terakhir kali kegiatan program STBM ?
15. Apa kebijakan pemerintah desa terkait STBM ?
16. Bagaimana cara mengetahui masyarakat sudah membangun jamban atau belum?
17. Siapa yang diberi tugas untuk memonitoring yang sudah dan yang belum?

xxx

Universitas Indonesia

(lanjutan)

18. Bagaimana tindakan tim STBM kecamatan ?
19. Bagaimana tindakan dari pemerintah desa dalam program STBM?
20. Apa program partisipasi masyarakat apa yang berhasil didesa ini?
21. Kenapa masalah buang air besar sembarangan partisipasi masyarakat tidak seperti PNPM?
22. Bagaimana kesan Bapak selama menjadi fasilitator desa ?
23. Siapa saja yang diundang pemicuan ?
24. Ada tidak yang komentar kasih solusi, misalnya silahkan numpang jamban di rumah saya ?
25. Apakah ada masalah ketika masyarakat bekerja mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
FASILITATOR DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Saudari Jihan Putri)**

1. Bagaimana gambaran kegiatan-kegiatan di awal program STBM terjadi?
2. Bagaimana anda bisa terpilih sebagai fasilitator desa ?
3. Siapa yang lebih banyak mendukung Anda bekerja sebagai fasilitator desa ?
4. Siapa yang memfasilitasi pemicuan ?
5. Bagaimana kegiatan pemicuan ini direncanakan ?
6. Bagaimana gambaran proses selama pemicuan ?
7. Mengapa waktu program STBM, tidak terjadi swadaya warga ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
FASILITATOR DESA KRONGGEN - ISTRI KADUS
(Ibu Siti Rodyah)**

1. Bagaimana ibu bisa dipilih menjadi fasilitator desa ?
2. Bagaimana ibu mempersiapkan pertemuan dengan warga untuk pemicuan ?
3. Setelah Ibu sampaikan pesan pemicuan selanjutnya apa yang terjadi ?

(lanjutan)

4. Bagaimana warga menanggapi pesan pemucuan yang Ibu sampaikan ?
5. Kenapa kegiatan pemucuan harus menumpang acara lain ?
6. Apa yang Ibu jelaskan kepada warga di pertemuan pemucuan ?
7. Seperti apa tingkat pendidikan warga yang mengikuti pemucuan ?
8. Kapan terakhir ada kegiatan program STBM ?
9. Menurut Ibu ada berapa warga yang masih buang air besar sembarangan ?
10. Bagaimana warga yang sudah memiliki jamban di rumah menanggapi pesan pemucuan yang Ibu sampaikan?
11. Bagaimana Sanitarian Puskesmas memfasilitasi pemucuan ?
12. Setelah praktek pemucuan apa yang dilakukan Sanitarian ?
13. Apakah peta yang dibuat selalu diperbaharui datanya ?
14. Bagaimana sikap warga setelah praktek pemucuan ?
15. Apakah ada diskusi diantara peserta pemucuan setelah pesan pemucuan disampaikan ?
16. Apakah ada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ikut terlibat dalam program STBM ?
17. Apakah ada upaya lain agar warga tidak pergi buang air besar ke sungai?
18. Kenapa Ibu bersedia menjadi fasilitator desa ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KETUA KADER POSYANDU
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Ibu Sulastini)**

1. Bagaimana pengalaman Ibu terlibat dalam program STBM ?
2. Sampai sekarang apakah masih ditemukan warga yang buang air besar di sembarang tempat ?
3. Apakah ada tantangan kesulitan selama kegiatan program STBM ?

(lanjutan)

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KEPALA DUSUN KARANGASEM
(Bapak Romdoni)**

1. Menurut Bapak contoh kegiatan pembangunan di desa yang berhasil dengan partisipasi masyarakat ?
2. Apakah ada kegiatan-kegiatan rutin bersama seluruh warga seperti kegiatan keagamaan atau lainnya ?
3. Bagaimana Ibu mengatur kegiatan sebagai fasilitator desa ?
4. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di desa ini ?
5. Apa alasan bagi warga mau melakukan seperti itu ?
6. Lalu kenapa pola saling membantu seperti bisa terpelihara ?
7. Apakah pola-pola kebiasaan seperti itu terjadi juga dalam pembangunan desa?
8. Mengapa bisa terjadi seperti itu apa prinsipnya ?
9. Bagaimana warga bersikap terhadap tetangganya ?
10. Kenapa dalam pembangunan jamban tidak terjadi tolong menolong ?
11. Bagaimana kebersamaan warga disini dalam pembangunan tingkat desa?
12. Mengapa bisa hilang seperti itu partisipasi warga di tingkat pembangunan desa?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KEPALA DUSUN SINAWAH
DESA KRONGGEN, KECAMATAN BRATI
(Bapak Ali Syamsun)**

1. Bagaimana kegiatan-kegiatan program STBM terjadi di Dusun Sinawah?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat di Dusun Sinawah ?
3. Bagaimana kondisi masalah buang air besar di dusun ini ?

(lanjutan)

4. Apa hasil-hasil dari sosialisasi program STBM di balai desa ?
5. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di dusun ini ?
6. Kenapa warga mau mengumpulkan uang untuk kas RT ?
7. Mengapa pola-pola kebersamaan seperti itu tidak terjadi dalam program STBM membangun jamban ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
ISTRI KEPALA DUSUN SATREYAN
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Ibu Utami)**

1. Apa yang ibu ketahui tentang program STBM ?
2. Bagaimana perjalanan program STBM di Dusun Satreyan ?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
KEPALA DUSUN SOBOTUWO
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Sukarmin)**

1. Bagaimana gambaran upaya agar warga bisa mengakses jamban yang tepat ?
2. Bagaimana monitoring kemajuan dan pelaporannya bagaimana mengenai program STBM ?
3. Apa kegiatan pembangunan yang berhasil dengan partisipasi masyarakat?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN SOBOTUWO
(Ibu Suntari)**

1. Kenapa Ibu mau memperbaiki menjadi jamban cubluk tertutup ?
2. Apa masalah Ibu supaya menjadi jamban kloset ?
3. Apa kegiatan ibu bersama warga disini ?

(lanjutan)

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN KARANGASEM
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Sugianto)**

1. Kemana Bapak dan keluarga pergi untuk buang air besar ?
2. Pernahkah Bapak mengikuti acara pengarahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
3. Apa pekerjaan Bapak ?
4. Ada berapa kali Bapak mendengar pengarahan buat warga agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
5. Apakah Bapak pernah diprotes warga buang air besar di kolam?
6. Apa kegiatan Bapak bersama warga di sekitar rumah Bapak?
7. Apa pendapat Bapak tentang arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
8. Apa manfaatnya bila kita memiliki jamban di rumah?
9. Pendapatan yang Bapak terima digunakan untuk apa saja?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN KARANGASEM
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Masrukin warga RT 02 RW 06)**

1. Kemana bila Bapak dan keluarga ingin buang air besar?
2. Menurut Bapak apakah mengganggu bila kita buang air besar di empang?
3. Pernah mendengar arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
4. Kenapa Bapak belum membangun jamban?
5. Apa kegiatan Bapak bersama warga tetangga Bapak?
6. Seandainya Bapak memiliki jamban kloset di rumah, apa manfaatnya?

(lanjutan)

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN KARANGASEM
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Sumadi warga RT 01 RW 06)**

1. Apa pekerjaan Bapak?
2. Apabila Bapak dan keluarga ingin buang air besar kemana perginya?
3. Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah memiliki jamban kloset di rumah?
4. Apa pernah mengikuti arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?
5. Sebelum memiliki jamban di rumah kemana Bapak dan keluarga pergi buang air besar?
6. Bagaimana Bapak bisa membangun jamban kloset?
7. Menurut pendapat Bapak arahan tersebut bagaimana?
8. Apa kegiatan Bapak bersama warga tetangga Bapak?

**DAFTAR PERTANYAAN DITUJUKAN KEPADA :
WARGA DUSUN PERMAS
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Ali Khosiin warga RT 02 RW 02)**

1. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di dusun ini ?
2. Mengapa warga mau mengumpulkan iuran RT ?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Sri Mulyati)**

1. Bagaimana camat menindaklanjuti komitmen yang sudah ditandatangani camat untuk kecamatan yang dipimpinnya terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat ?

Camat juga mengajak seluruh kepala desa untuk sama-sama juga menandatangani komitmen agar desanya terbebas dari praktek buang air besar sembarangan tempat dan penandatanganan itu sudah terjadi.

2. Bagaimana proses dilalui menuju komitmen kepala desa itu ?

Kepala desa diberi penjelasan bahwa program STBM ini untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita karena diare. Semua desa wajib berkomitmen dan memberi tandatangan dan komitmen dipajang di kantor saya. Tidak bisa desa tidak ikut program ini dan saya rasa mereka tidak merasa terpaksa menandatangani itu.

3. Bagaimana perjalanan program STBM ?

STBM program pemberdayaan kebetulan sebagai Kasi PMD. Tupoksinya masuk PMD. Ibu jadi sekretaris STBM, anggotanya dua sanitarian, penilik SD, ketua Sekcam. Sekcam baru belum ikut pelatihan di kabupaten, jadi ibu merangkap sekretaris dan ketua, sekcam lama dipindah, keta belum pernah menangani cara beri penekanan, kalau rapat sekcam memberi arahan kepada FD. Arahan : program yang sudah disepakati kecamatan dengan bupati, camat dan kades. Komitmen program ini, STBM disukseskan, tujuan ingin menurunkan angka kematian bayi, bayi kena diare, 75% disebabkan oleh kotoran manusia yang betebaran yang dibawa lalat. Bagi yang mampu buat jamban, bagi yang belum mampu, menumpang. Pada yang tidak punya dana, untuk memberi dana stimulasi untuk kader dan tim STBM. Pak Camat mengakui Pemda kurang mendukung, Pak Camat seharusnya memberikan dana, dana untuk menggerakkan. Camat menargetkan ODF. Desa pepelannya pepelan, warga biasa BABS di sungai yang mengalir. Warga merasa nyaman disungai, baik mampu dan miskin BABS disungai. Pak Lurah, APBdes, sebagian dana pengadaan jamban bagi yang tidak mampu. Kakusnya sudah bersih.

4. Sumber pembiayaan APBDes bersumber dari mana ?

APBD Desa berasal dari lelangan kekaayaan desa, itu murni pendapatan desa. Ditujukan untuk penanbahan sebagian biaya rapat di kecamatan, blanko monitoring dan ongkos mengerjakan monitoring.

(lanjutan)

5. Apa peran pemerintah kecamatan dalam program STBM ?

Kecamatan hanya menggerakkan tim STBM sudah tidak punya apa-apa tidak punya anggaran. Tim STBM Kecamatan tanpa dana. Tim STBM tidak ada pembekalan. Tim STBM menggerakkan berdasarkan ide sendiri atau kemampuan pribadi. FD dilengkapi dari Dinas Kesehatan. Pelaksananya hanya dipilar pertama (ODF). Koordinasi bulanan dari tim STBM dengan FD, pendanaan dari desa. Koordinasi bulanan STBM mempertahankan supaya warga tidak BABS lagi.

6. Dari pemerintah kecamatan menargetkan apa pada program STBM ?

Minimal kalau belum akses jamban numpang dan harus punya. Jamban cubluk. Kemudian jamban cubluk menjadi permanen. Pak Camat kurang mendukung, karena tidak dapat stimulan dari Bupati. Pak Camat tidak mengurus, Camat tinggal perintah. Tim STBM Kecamatan tetap Rakor dengan pendanaan dari desa. Rakor berjalan akan memudahkan data yang diperlukan untuk masalah kesehatan lingkungan seperti jumlah dan jenis jamban. Pak Camat menyerahkan kepada unit yang tupoksinya kena dengan STBM. Rakor memudahkan lintas sektor untuk melaksanakan program yang dibuat untuk lomba PBHS, lomba desa termasuk jamban. Arahan dari Camat, Sekcam sampai kapan rakor ini belum ditentukan. APBD itu 70% gaji PNS, 5% pendampingan PNPM, 25% untuk program pemda dibagi ke SKPD-SKPD.

7. Gambaran tim STBM itu seperti apa ?

Tim STBM dibentuk berdasarkan SK. Tim STBM dibekali pada awal program supaya bisa melaksanakan program yang direncanakan pemda. Tim STBM Belum pernah ada komunikasi dengan POKJA AMPL. POKJA AMPL belum pernah ke kecamatan dan ke desa juga tidak. POKJA AMPL dan tim STBM Kecamatan dibekali sama-sama.

8. Bagaimana pembiayaan perjalanan Ibu bila ke desa-desa?

Saya pergi ke desa, dananya dari surat perjalanan dinas. Kasi PMD dapat dari PNPM, bantuan transparan untuk penanggung jawab operasional PNPM sehingga saya numpang dana dari itu. Karena itu tupoksinya PMD dapat dana dari SPPD. Pengalaman saya sudah terbiasa kerja PKK tidak ada upah harus berjalan. Saya bekerja tanpa pamrih dari situ diangkat dari PNS dengan tanpa gaji selama 5 tahun hanya honor. Saya diberi penghargaan sebagai fasilitator kecamatan terbaik untuk program STBM dari Bupati. Kemudian sebagai penghargaan sebagai penghargaan penggerak masyarakat terbaik dari Bupati. Bekerja diluar jam kerja terus, bekerja walaupun tidak ada dana.

(lanjutan)

9. Bagaimana usaha agar desa-desa menjadi desa ODF ?

Contohnya kepala desa pepe dipanggil oleh sekcama, pak camat juga. Camat dan sekcama panggil karena saya laporkan desa yang belum mau ODF. Mengingatkan kepala desa yang akan akan komitmen. Saya laporkan kepala desa yang kurang mendukung. Mulai Kepala desa panggil perangkat desanya, ajak bidan. Saya orangnya itu ngeyel atau ngotot.

10. Menurut Ibu, siapa yang paling banyak Ibu dekati untuk meminta perkembangan mengenai kemajuan pembuatan jamban ?

Fasilitator desa

11. Bagaimana penilaian Ibu terhadap fasilitator desa di Desa Tajemsari ?

Mereka bagus aktif. Kalau Pak Handoko bagus menangani administrasi kependudukan Desa Tajemsari

12. Menurut Ibu, siapa yang menunjukkan peran yang baik dalam mendukung pelaksanaan program STBM di Desa Tajemsari ?

Fasilitator desa dua-duanya bagus, kemudian sekretaris desa. Dia memikirkan warga yang miskin yang tidak mampu bagaimana agar mereka bisa buat jamban. Kalau kepala desa kurang mendukung karena sebentar lagi akan memasuki masa purna bakti.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA DESA TAJEMSARI
KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Setyobudi)**

1. Bisa ceritakan bagaimana awal mulanya kepala desa berkomitmen untuk membuat desa menjadi ODF ?

Awalnya kami diberi penjelasan dari tim pokja AMPL tentang program STBM lalu ditawarkan agar desa mau untuk bebas dari buang air besar sembarangan. Kemudian diberi waktu untuk memikirkan bersama di desa kemudian bila setuju agar desa ODF supaya menandatangani surat kepeminatan setelah itu kami, kepala desa sama-sama memberi tanda tangan sebagai komitmen untuk menjadikan desa ODF dan kami berkomitmen juga bersama camat

2. Apakah ada dorongan dari pihak pemerintah kecamatan agar menandatangani surat kepeminatan?

Jelas, tentunya disini kami ikhlas menandatangani surat kepeminatan itu dan kami sadari itu memberi kemajuan buat desa

(lanjutan)

3. Setelah penandatanganan komitmen tersebut, kemudian apa berikutnya?

Kemudian Kepala desa diminta hadir sosialisasi program STBM, camat hanya memberikan arahan saja. Diberi ruang untuk tanya jawab antara kepala desa dan camat. Camat hanya memberikan garis besar saja dan peserta hadir tidak banyak bertanya pada akhirnya kepala desa diminta membentuk tim fasilitator desa dan kemudian ditunjuk Saudara Kristiandoko dan Ibu Upi. Tim ini akan diberi pembinaan melalui pelatihan yang akan diadakan di Purwodadi. Fasilitator desa ini sebagai pemicu atau pembina masyarakat.

4. Menurut Bapak, program STBM darimana ?

Program STBM sebagai program nasional dan pemerintah daerah.

5. Apa yang Bapak pahami dari sosialisasi program STBM?

Desa dipacu untuk pembinaan etika agar tidak membuang air besar dan kecil tidak disembarang tempat. Jadi supaya masing-masing rumah atau masing-masing keluarga punya tempat khusus untuk buang air besar. Sesuai dengan kemajuan zaman agar masyarakat punya etika tidak buang air besar di sembarang tempat. Pada dasarnya program ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya program ini dengan dasar ekonomi masyarakat atau pendapatan masyarakat sudah ada peningkatan pendapatan maka secara otomatis akan berbenah dengan sendirinya. Ekonomi masyarakat desa masih terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan sehingga untuk membuat WC masih terkendala sehingga menjadi dasar kami untuk memacu masyarakat dalam program ini.

6. Apakah desa tajemsari masih ada masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat?

Memang begitu keadaannya masih ada warga yang buang air besar sembarangan

7. Berapa jumlah warga yang masih buang air besar sembarangan ?

20 -25% dan ini adalah mereka yang ekonominya sulit. Karena desa ini sering kena bencana warga suka buang air besar sembarangan

8. Setelah menerima sosialisasi dari camat lalu apa langkah selanjutnya?

Melakukan sosialisasi dengan warga dalam kegiatan jamaah tahlil setiap malam jumat. Masyarakat ditekankan untuk memperbaiki etika. Yang mana malu bila mana dilihat orang lain BAB di sembarang tempat dan moral kita tidak baik. Maka dengan program ini kita lebih menekankan yang belum punya WC sendiri agar menumpang di tempat saudara atau tetangga. Sehingga dilihat orang lain moral kita jadi lebih baik.

(lanjutan)

9. Apa respon warga pada waktu sosialisasi?

Masyarakat menanyakan dana dan bantuan. Saya bingung juga. Maka diupayakan agar jangan BAB di sembarang tempat. Masyarakat ada yang menyampaikan seperti itu. Masyarakat merasa ditekan seperti itu. Masyarakat yang mampu segera sadar agar segera berbenah membuat WC. Masyarakat yang tidak mampu ditekan seperti itu atau diharuskan jelas-jelas tidak mungkin. Masyarakat yang mampu segera membangun dan masyarakat juga sudah merasa malu. Kegiatan sosialisasi ini menumpang pada suatu acara jamaah tahlil. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan balik dari masyarakat. Masyarakat rata-rata mengungkapkan kesulitan mereka untuk membangun WC karena masalah ekonomi. Kalau saya sudah mampu saya akan bangun. Ini menjadi kendala dalam proses pemucuan.

10. Apakah waktu sosialisasi ada yang mengungkapkan ide?

Ada juga. Saya akan membuat tempat buat buang air besar yang sederhana saja seperti orang-orang kuno. Tidak didepan rumah atau tidak dipinggir kali yang penting tertib dan teratur dan tidak dipandang orang.

11. Apa ada usulan lain dalam sosialisasi?

Masyarakat bertanya apakah pak kades bisa mencarikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu agar masyarakat kurang mampu bisa buat WC. Saya menjawab ya mudah-mudahan saya selaku kades punya terobosan mencari bantuan. Saya pikir secara pelan-pelan masyarakat akan berbenah diri. Dengan bahasa halus masyarakat secara pelan-pelan akan berbenah diri tidak perlu ditekan atau dengan manuver.

12. Apakah setiap informasi dari kecamatan apakah selalu diinformasikan melalui kegiatan jamaah tahlil?

Secara umum informasi menyangkut masyarakat banyak kami buat surat edaran di tiap RT karena setiap malam jumat masyarakat kumpul agar disampaikan. Kalau ada respon bersifat temuan-temuan khusus lalu di bawa RT atau perangkat dibawa ke balai desa untuk disampaikan dan ditindak lanjuti ditingkat RT. RT tidak secara khusus membuat pertemuan untuk menghadiri sosialisasi jadi menumpang dalam pertemuan jamaah tahlil.

13. Kenapa masyarakat mau berkumpul mengikuti pertemuan Jamaah Tahlil ?

Karena faktor kesamaan agama faktor kerukunan karena jarang bertemu dalam kehidupan sehari-hari karena kesibukan kerja. Dengan jamaah tahlil itu masyarakat merasa rukun. Ada kebutuhan kerukunan

(lanjutan)

14. Apa dampak dari masyarakat bertemu ?

Ada persatuan, membangun semangat gotong royong. Membangun rumah gotong royong, membangun rumah tenaganya tidak dibayar. Kalau ide, desa kita perlu pembenahan maka ditindak lanjuti dengan kegiatan gotong royong membenahi saluran muncul saling peduli contoh bila ada anggota masyarakat yang sakit, warga berbondong-bondong menjenguk teman yang di rumah sakit, bilamana orang punya hajat dengan bahu membahu membantu di acara tersebut.

15. Apa yang disumbangkan dalam gotong royong tersebut ?

Sumbangan tenaga, pemikiran, ada juga iuran sesuai dengan tinggi rendah kemampuan kalau tidak mampu tidak iuran kalau butuh tenaga warga tidak mampu sumbang tenaga

16. Apa lagi yang Bapak lakukan berkaitan dengan program STBM ?

Menegur yang mereka-mereka yang buang air besar di jembatan pada malam hari. Teguran disampaikan kepada RT atau melalui pertemuan-pertemuan.

17. Bagaimana prioritas pembangunan desa ditentukan ?

Prioritas pembangunan Desa Tajemsari penutasan genangan dan perbaikan jalan. Ada 3 dusun yang tergenang. Jamban cubluk pada waktu terjadi genangan tidak bisa digunakan.

18. Bagaimana tingkat pendidikan warga di desa ini ?

Tingkat pendidikan, kepala keluarga kalau diatas 50 tahun 70% pendidikan SD, 30% nya belum lulus SD, 40 – 50 tahun lulus SMP.

19. Contoh program pembangunan yang berhasil dengan partisipasi masyarakat ?

Program pembangunan jalan, baik dari dana kabupaten berhasil program tersebut karena dikerjakan waktu itu sering banjir. Belum pernah terjamah pembangunan sehingga seperti pemula seperti belum pernah dilaksanakan pembangunan. Karena setiap banjir membawa lumpur. Infrastruktur adalah hal yang susah sehingga warga juga berpikir panjang mau kerja bakti giat sehingga jamban yang dibutuhkan warga kembali bisa digunakan karena dikerjakan dan berfungsi. Ketika banjir kesulitan buang air besar karena kena lumpur.

20. Cara menentukan prioritas pembangunan?

Sesuai kebutuhan

(lanjutan)

21. Siapa saja yang ikut menentukan prioritas pembangunan?

Semua perangkat desa, lembaga desa, BPD, RT/RW, tokoh-tokoh warga serta usulan-usulan dan dusun-dusun setempat. Mulai dari dusun tingkat perdukahan warga tingkat perdukahan ikut, kemudian rapat desa yang terlibat semua perangkat, RT/RW, BPD ikut bermusyawarah, setelah itu ada tim kecil lagi yang terlibat kepala desa, sekretaris desa, perangkat tingkat desa.

22. Bagaimana penyelenggaraan sosialisasi program STBM di kecamatan ?

Sosialisasi di kecamatan pada siang hari pada jam kantor kecamatan. Tidak ada kendala menghadiri pertemuan kecamatan, walaupun ada hambatan seperti ada masalah-masalah desa yang meminta segera diselesaikan. Kalau ada pertemuan kecamatan itu pekerjaan yang paling utama untuk perangkat desa atau kepala desa. Jadi menghadiri pertemuan kecamatan pada jam kerja tidak ada hambatan karena itu di jam kerja kepala desa. Pemerintah kabupaten sudah menyediakan kendaraan roda dua plat merah jadi kami tidak kesulitan. Kalau operasional bensin dari perangkat desa, perangkat desa sudah ada dana operasional dari kabupaten alai kadarnya tidak maksimal.

23. Bagaimana pencapaian program STBM menurut pengamatan Bapak ?

Pada dasarnya sudah bisa maksimal walaupun secara presentase daerah genangan belum maksimal, belum tuntas karena masalah ekonomi, rumahnya sudah reot, masa harus memikirkan lagi kamar kecil dengan cor sangat tidak dimungkinkan jadi alai kadarnya.

24. Bagaimana kebijakan selanjutnya?

Kami sebagai perangkat desa, secara etika memberi pengarahan supaya etika masyarakat bisa dinilai plus sehingga kamipun juga berupaya memberi penekanan kepada perangkat RT /RW, tokoh-tokoh warga yang sekiranya bisa membantu untuk saran, nasehat sudah merupakan dukungan bagi program ini. Perangkat desa merupakan perpanjangan tangan dari fasilitator desa. Para RT juga merupakan ujung tombak dari program ini. Untuk bagaimana warga diarahkan kepada hasil positif dari program ini. Secara resmi ada ditunjuk dan secara tidak resmi perangkat desa punya tanggung jawab membina warganya karena perangkat dibebankan warga-warga satu RT untuk membina warga. Saya instruksikan semua warga perangkat tingkat desa menjalankan tugas ditingkat RT masing-masing.

25. Bagaimana program pembangunan yang ada desa dikerjakan ?

Kalau pembangunan desa ada dua cara. Pertama dikerjakan kontraktual dan swakelola. Kalau program dikerjakan dengan cara kontraktual maka warga dusun dimana ada program dikerjakan dengan kontraktual diberitahukan agar tidak menghambat laju program. Kalau program yang

(lanjutan)

dikerjakan swakelola dilaksanakan disebuah dusun maka dibentuk panitia bilamana diperlukan tenaga terampil panitia itu yang mencarikan. Setiap ada program masuk desa selalu ada sosialisasi. Bila ada dana kabupaten masuk desa ini kemudian masyarakat dikumpulkan kira-kira untuk apa dana ini diprioritaskan nanti. Susunan acara sosialisasi yang pertama penjelasan dulu mengenai program itu diberitahukan apa adanya. Dalam sosialisasi selalu ada tanya jawab.

26. Bagaimana pelaksanaan program STBM ?

Dalam program STBM ini, hal penting adalah adalah komitmen yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Waktu saya menerima sosialisasi STBM di kecamatan saya pikir ada kesulitan dalam melaksanakannya karena masyarakat disini ekonominya rendah, tentunya tidak bisa ditekan dalam waktu yang singkat melaksanakan program itu. Kekuatiranpun ada bilamana ada pertanyaan-pertanyaan baik karena bagi masyarakat tidak mampu untuk beli beras saja sulit ketika keadaan baru banjir dan masyarakat menyampaikan apa bisa pak kades carikan bantuan. Waktu di kecamatan sosialisasi STBM waktu itu tidak banyak yang menanyakan pada dasarnya saya dan rekan-rekan kepala desa diminta untuk mencarikan orang yang bisa menjadi fasilitator desa yang nantinya akan menjalankan program ini untuk nanti diberi pembekalan dalam pelatihan. Yang punya WC kadang buang air besar di sungai karena septictank penuh harus dikuras. Kalau hujan buang air besar dikloset, tidak hujan suka buang air besar di sungai. Kebiasaan belum bisa hilang

27. Kenapa swadaya dan partisipasi masyarakat kurang pada program STBM ?

Tradisi dan SDM Warga, kenapa swadaya tidak terjadi di BABS? WC umum kadang orang yang jorok bikin masalah jadi cekcok, WC umum sering masalah tidak ada air. Ada warga tidak bawa air. Beli kloset, pasir ditoko dijalan besa, kloset yang murah-murah saja.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU

1. Bagaimana menurut Bapak tentang Program STBM ?

Setuju dengan STBM, kesehatan masalah utama daerah perlu sanitasi karena daerah genangan. Pemerintah desa mendelegasikan kepada 2 orang secara administratif. Tahun 2012 dianggarkan 3 juta untuk kegiatan seperti pertemuan tingkat kecamatan tindak lanjut setelah ODF. Pertemuan bulanan ada RKTLnya dan pendanaannya dari APBdes. Pemerintahan desa, mendukung fasilitator desa. Isu dari pertemuan kemudian pemerintahan desa menyikapi. Item dari APBDes untuk STBM tergantung

(lanjutan)

dari hasil pertemuan lebih lanjut dari kecamatan. Isu dari tingkat kecamatan Ibu Sigit, KaPus, Muji (sanitarian). Dulu pernah diverifikasi, Februari 2012 ODF bersyarat. APBdes dasar instruksi Bupati minimal 3 juta baru tahun anggaran 2012 pertama kali. Tahun depan tunggu instruksi 3 bulan sebelum tahun anggaran habis. Tergantung kebijakan desa bila masih membutuhkan.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN FASILITATOR DESA TAJEM SARI
KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Kristiandoko)**

1. Bagaimana Bapak bisa menjadi fasilitator desa ?

Saya ditunjuk oleh kepala desa menjadi FD lalu saya mendapat surat untuk mengikuti pelatihan.

2. Kenapa Bapak bisa dipilih jadi fasilitator desa ?

Kayaknya karena saya sering menolong warga yang sakit, warga butuh dibantu mengurus administrasi jamkesmas. Kalau ada warga yang kesulitan mengurus jamkesmas saya bantu.

3. Apa jabatan sebelum menjadi FD ?

Saya unsur perangkat desa. Sebagai unsur pelaksana dari tahun 2001.

4. Apakah pembekalan yang diberikan sudah cukup untuk menjadi fasilitator desa ?

Sudah cukup. Setelah 3 hari pelatihan saya lakukan sosialisasi di balai desa tentang program STBM.

5. Setelah pembekalan, apa kegiatan berikutnya?

Setelah sosialisasi dari balai desa selang beberapa minggu terus dilakukan sosialisasi ke acara pengajian Bapak-bapak dari satu tempat ke tempat yang lain yang diadakan pada malam jumat. Kalau di daerah Ibu Upi, sosialisasi bersama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu digabung. Pemicuan numpang di acara jamaah tahlil. Disitu dilakukan sosialisasi sedikit langsung ke pemicuan. Sosialisasi di balai desa dihadiri oleh semua perwakilan desa. Mereka diberi undangan untuk hadir di balai desa.

6. Seberapa banyak orang yang hadir ?

Sosialisasi yang hadir sekitar 40 orang yang hadir. Yang tidak hadir 20% dari yang diundang.

(lanjutan)

7. Apa yang disampaikan pada acara sosialisasi program STBM ?

Waktu sosialisasi dijelaskan efek samping dari buang air besar sembarangan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Membangun kesadaran masyarakat agar BAB di tempat yang benar. Setelah diberi pengarahan dalam sosialisasi lalu ada tanya jawab dari warga. Warga ketergantungan pada bantuan dari pemerintah masih ada. Warga bertanya apakah ada bantuan. Warga berpikir kalau ada sosialisasi tentang program selalu ada bantuan. Kami menjawab bahwa program STBM ini adalah program non subsidi atau program pemberdayaan masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Warga agak kecewa karena tidak ada bantuan. Saya menyampaikan kalau ada program tidak ada bantuan seharusnya tidak masalah dan program untuk kita bersama. Warga akhirnya dapat menerima program STBM.

8. Kegiatan apa berikutnya setelah sosialisasi di balai desa ?

Dari sosialisasi kami datangi setiap RT untuk pemucuan di tiap RT. Sedikit demi sedikit warga dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada bantuan berusaha sendiri. Kepala desa menghadiri pertemuan kecamatan kemudian dilanjutkan pertemuan di balai desa dan selalu terjadi seperti itu. Setelah pengarahan sosialisasi lalu ada Tanya jawab. Setelah sosialisasi di balai desa dilanjutkan sosialisasi di jamaah tahlil. Karena pada waktu di balai desa ada yang tidak datang.

9. Apakah buang air besar di sembarang tempat sudah dirasakan sebagai masalah sebelum program STBM?

Masalah BABS sebelum ada program STBM sudah dirasakan sebagai masalah dan malah ini masalah besar. Cuma ketergantungan masyarakat kepada pemda.

10. Apakah masalah buang air besar di sembarang tempat pernah di bahas dalam rapat-rapat resmi desa ?

Belum ada diskusi secara khusus sebelumnya membahas masalah BABS ini. Dalam ngobrol santai pernah dibicarakan warga. Tidak pernah dibahas dalam pertemuan balai desa atau kumpulan. Belum pernah diusulkan dalam diskusi musrenbang. Ini terbentur oleh masalah SDM warga. Belum pernah didiskusikan tingkat RT. Belum pernah diusulkan dalam APBDes. Desa membuat program pembangunan tahunan belum pernah diusulkan masalah BABS ini.

11. Apa yang disosialisasikan di Jamaah tahlil ?

Menjelaskan bahwa ini program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat jangan menunggu subsidi dari program STBM ini. Menjelaskan dampak BABS sembarangan yang menimbulkan penyakit. Langkah kami memberdayakan masyarakat supaya tergugah membuat jamban bilamana mampu dan berharap agar warga tidak BABS.

(lanjutan)

12. Apa ada tanggapan dari masyarakat?

Tanggapan dari masyarakat bahwa saya mampu membuat jamban kalau ada bantuan. Di desa banyak bambu dan bisa membuat WC sederhana. Desa Tajemsari merupakan daerah genangan. WC cubluk tidak bisa dipakai bila terjadi banjir. Baru-baru ini terjadi banjir. Warga di daerah genangan disarankan untuk menggunakan WC tetangga yang WC-nya kloset.

13. Bagaimana pemicuan dilakukan ?

FD menggunakan alat peraga gelas yang berisi air minum kemudian ada lalat hinggap di gelas sementara di sekitar warga ada kotoran manusia dan lalat baru hinggap di gelas minum kita. Bagaimana di keluarga kita ada anak gadis ketika BABS diintip orang, apakah tidak kasihan. Mempertimbangkan apabila malam hari tidak aman kalau BABS. Setelah itu ada yang seketika langsung sadar saya akan buat jamban sederhana. Ada juga yang masih menunggu bantuan.

14. Bagaimana memastikan masyarakat yang janji buat WC ditindak lanjuti oleh mereka?

Telah di bentuk kader-kader STBM tingkat dusun.

15. Apakah kader STBM ditunjuk oleh FD ?

Ya, kader menginformasikan siapa-siapa saja yang sudah membuat WC dan kader menyatakan kesanggupannya menjadi kader. Kader tidak menagih kepada warga untuk membuat jamban bagi yang komitmen membuat jamban. Kader melakukan pendekatan kepada warga. Berkunjung ke warung-warung dimana warga sebelum pergi ke sawah berkumpul di warung.

16. Alasan kader mau bekerja secara sukarela ?

Karena ada perasaan malu karena dusunnya masih ada warga yang BABS.

17. Apa yang didiskusikan kader dengan warga ?

Kader menyampaikan agar BAB di tempat yang benar dan menyampaikan akibat-akibat buruk BABS. Pola-pola dan cara-cara STBM belum pernah terjadi sebelumnya pada program-program pemerintah yang masuk ke desa.

18. Apa yang memotivasi fasilitator desa bekerja ?

Pengetahuan tentang buang air besar sembarangan, cara-cara menumbuhkan pemberdayaan masyarakat belum ada sebelumnya. Pelatihan diberikan cara menyadarkan masyarakat dan cara pemberdayaan seperti ini membuat saya termotivasi untuk mencoba.

(lanjutan)

19. Kenapa Bapak mau menerobos tantangan ?

Supaya satu perdukuan yang masih banyak buang air besar sembarangan agar buang air besar pada tempat yang benar sehingga ini menyebabkan saya menerobos dan datang terus ke jamaah tahlil agar perilaku masyarakat berubah. Saya termotivasi karena metode pemberdayaan masyarakatnya.

20. Apakah kader STBM masih aktif?

Kader masih bekerja sampai sekarang.

21. Apa yang Bapak lakukan terhadap kader STBM agar tetap kerja ?

Memotivasi kader tetap kerja. Saya sampaikan tugas kita belum selesai karena masih ada warga yang buang air besar sembarangan. Yang kami usahakan fasilitator desa dan kader agar masyarakat berubah perilakunya dan buang air besar pada tempatnya jadi intinya bukan masalah punya jambannya tetapi berubah perilakunya. Kalau sudah berubah perilakunya akan memiliki jamban.

22. Apa yang memotivasi masyarakat mau membuat jamban ?

Masyarakat termotivasi membuat jamban karena rasa malu takut diomongin oleh tetangga. Tidak mudah merubah perilaku, tindakan apa yang dilakukan ? terus datang ke jamaah tahlil, datang lagi, terus didorong

23. Di jamaah tahlil ada yang sudah punya jamban dan ada yang belum, apa respon warga di jamaah tahlil?

Yang punya jamban menyinggung yang tidak punya jamban. Melalui jamaah tahlil belum muncul ide-ide solusi lain membantu warga yang belum punya jamban. Dari jamaah tahlil orang yang punya jamban terus mengingatkan warga yang buang air besar sembarangan saja. Belum ada tawaran solusi bersama untuk mengatasi masalah. Orang yang diingatkan perasaannya terganggu merasa nggak enak namun mereka tetap hadir di jamaah tahlil kerukunan tidak terganggu

24. Siapa yang mendukung anda?

Fasilitator kecamatan yaitu Ibu Sigit, suka kasih masukan dan semangat. Selalu menanyakan perkembangan menanyakan kesulitan. Sering berkunjung ke desa dengan muncul tiba-tiba. Beliau juga menanyakan ke warga

25. Apa manfaatnya bagi diri anda menjadi fasilitator desa ?

Perasaan senang ketika warga melakukan perubahan perilaku terjadi

(lanjutan)

26. Apa pernah diverifikasi ODF desa ini ?

Sudah diverifikasi, sudah oleh puskesmas. Verifikasi dengan berkunjung ke warga mengalami kesulitan ke daerah terkena banjir. Yang melakukan verifikasi dari puskesmas, RT dan perangkat dari dusun itu.

27. Bagaimana persiapan melakukan pemicuan?

Sebelum pemicuan, musyawarah dengan teman-teman kader dan FD lain bagaimana pelaksanaannya, kalau ada pertanyaan bagaimana saya menjawabnya, juga mempertimbangkan waktu agar tidak mengganggu, di tempat siapa, cara-cara melakukan pemicuan, pembagian tugas, alat peraga, teknik pemicuan, orang-orang yang menjadi sasaran pemicuan, pria dan wanita. Pemicuan juga ditujukan ke bapak-bapak dan ibu-ibu dan remaja. Ketika mengundang warga, warga diminta hadir tapi tidak di kasih tahu acaranya apa, khawatir kalau mereka tidak datang.

28. Apa yang memotivasi warga mau datang ke pertemuan jamaah tahlil ?

Motivasi warga datang jamaah tahlil karena sudah menjadi kebiasaan dari 18 tahun lalu

29. Harapan dari pemicuan ?

Minimal berubah perilaku buang air besar sembarangan

30. Metoda cara-cara praktis melakukan pemicuan?

Menggunakan air minum dalam gelas. Selesai pemicuan mendiskusikan secara berkelompok mendiskusikan penyebab penyakit diare setelah itu ada yang menyampaikan bahwa saya membuat jamban kalau ada bantuan, ada yang sadar lalu meminta menumpang ke jamban milik saudara dan tetangga. Yang punya jamban bersedia untuk mengizinkan menumpang di jambannya. Ditanya siapa yang mau membuat jamban silahkan tuliskan nama dan tanda tangan. Ada yang komitmen setelah panen. Daftar warga yang komitmen tidak ditempel. Mereka yang mau membuat jamban kalau ada bantuan sampai sekarang belum membuat jamban. Tetapi mereka akan menumpang kalau memungkinkan numpang. Ada warga yang kami tahu kalau buang air besar sembarangan dapat menimbulkan penyakit tetapi masalah ekonomi sulit hidup sehari-hari tercukupi sudah bersyukur.

31. Apa tujuan pemicuan ?

Tujuan pemicuan agar warga terpicu dari yang tidak tahu sama sekali menjadi mengerti efek samping dari buang air besar sembarang sehingga orang itu terpicu dan membuat jamban.

(lanjutan)

32. Apa tanda keberhasilan program STBM ?

Tanda keberhasilan dari jumlah jamban. Berapa jumlah jamban yang bertambah. Desa ini dinyatakan ODF bersyarat jadi belum 100% bebas buang air besar sembarangan jadi harus masih member pengarahan lagi. Belum ada diskusi dengan warga menyepakati tanda-tanda atau syarat-syarat lagi bahwa desa ini sudah ODF

33. Apa ada orang yang dinilai sebagai natural leader ?

Kami dari desa menilai Mbah Mudin sebagai natural leader. Beliau perangkat desa, dia seorang ulama, sedikit banyak kami meminta bantuan pada waktu pemucuan dan dia memberitahukan hadits-hadits yang mengatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain adalah desa. Hanya itu yang diberikan. Yang mengangkat natural leader FD dan kader.

34. Apakah pernah diadakan selebrasi ODF ?

Di desa dilakukan selebrasi ODF, inisiatif selebrasi dari Bu Sri. Beliau yang menyampaikan ke FD. Selebrasi dilakukan di kantor desa, warga diundang. Yang hadir 60%, pada waktu kegiatan banyak warga yang sibuk di sawah.

35. Siapa panitia yang kerja ?

FD dan dibantu oleh kader STBM

36. Bagaimana peran tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam program STBM ?

Ada tokoh ulama di desa, Mbah Mudin, saya minta tolong kepada dia agar menyampaikan satu atau dua hadits agar warga bisa sadar.

37. Apakah mengenai program STBM pernah masuk dalam agenda pertemuan perangkat desa secara resmi ?

STBM belum pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan aparat desa. Selama saya menjadi FD belum ada rapat-rapat desa membahas STBM.

38. Bagaimana monitoring kemajuan dilakukan ?

Pada saat ketemu tidak sengaja perangkat desa menyampaikan siapa dari warga yang baru saja membuat jamban yang kebetulan berada tinggal di wilayah perangkat desa tersebut. Saya minta bantuan kepada teman-teman perangkat untuk menyampaikan kalau ada penambahan jamban di wilayah tinggalnya.

(lanjutan)

39. Kebijakan kepala desa terhadap STBM ?

Ada kader sebagai ketua RT membuat aturan apabila ada warga yang belum berubah perilaku buang air besar sembarangan maka tidak dilayani urusan surat menyurat. Ini terjadi cuma pada satu RT saja yaitu di RT 2 RW 4 Dusun Ploso. Kebijakan RT ini tidak diketahui kepala desa Bapak Wakijan. Belum ada kebijakan apapun dari kepala desa untuk program STBM

40. Bagaimana supaya program STBM bisa berhasil ?

Faktor ketergantungan pada bantuan masih melekat, dari pengalaman itu maka kalau bisa ada bantuan.

41. Apa program pembangunan desa yang berhasil dengan berpartisipasi masyarakat ?

Program PNPM pada kegiatan pengerasan jalan dari warga turun ke jalan ketika ada material pengerasan jalan untuk meratakan material tersebut. Inipun tidak semuanya paling satu atau dua orang yang kebetulan ada di rumah. Warga yang lain tidak turun kejalan mereka pergi ke sawah. Warga yang sedang di rumah dengan kesadaran turun ke jalan gotong royong meratakan material pengerasan jalan. Mereka tidak diorganisir dan tidak disuruh dengan sendirinya mau bekerja. Mereka mau bekerja seperti itu karena butuh.

42. Pernahkah ada diskusi menentukan prioritas pembangunan di desa ?

Ada, akhir tahun 2011. STBM tidak sempat didiskusikan dalam pertemuan perangkat desa

43. Bagaimana aparat desa mengorganisir kegiatan bila ada program pembangunan ?

Kalau ada kegiatan pembangunan desa dibuat panitia pembangunan dari RT setempat. Pemerintah desa mendorong warga gotong royong bersama, swadaya warga bisa bentuknya tenaga atau material

44. Siapa yang menentukan prioritas pembangunan ?

Perangkat desa BPD, tokoh masyarakat RT dan RW

45. Darimana sumber pembiayaan pembangunan desa ?

Ada dari swadaya dan pihak pemerintah

46. Bagaimana perasaan anda bekerja sebagai fasilitator desa ?

Kadang-kadang merasa putus asa, ada warga member sambutan yang tidak enak buat saya seperti perkataan kalau ada sumbangan kami buat jamban,

(lanjutan)

tidak usah anda kesini, tidak usah kejar-kejar kami buat jamban. Orang ini sampai sekarang belum buat jamban dan menurut saya belum sadar.

47. Apakah program STBM menyulitkan ?

Tidak menyulitkan, merupakan tanggung jawab kewajiban warga sendiri. Justru ini membantu pemerintah desa dalam rangka memicu warga mempunyai kesadaran untuk membuat jamban. Kesulitannya pelaksanaan program pembebasan buang air besar sembarangan ini dengan cara swadaya masyarakat. Warga tidak bisa diharuskan membuat jamban, tidak ada bantuan fisik, hanya kesadaran warga untuk berswadaya sendiri.

48. Apa agenda dalam waktu dekat ini untuk program STBM ?

Agenda dalam waktu dekat ini, paling tidak kami dengan teman-teman kader akan mengupayakan supaya kebiasaan dari masyarakat yang sudah tertata dengan rapih agar tidak kembali ke kebiasaan yang lama. Masyarakat yang sudah bikin jamban dari kita fasilitator desa dan kader STBM yang kiranya biasa muter, dalam muter ada informasi dari tetangga-tetangga, Si A sudah buat. Waktu muter tidak sengaja misalnya Pak Wakijan waktu pembagian beras raskin, warga datang dia ngobrol, ada informasi dari tetangganya, oh Si A yang dulu belum bikin sekarang sudah bikin.

49. Dari tim STBM kecamatan apa yang dapat dilakukan ?

Ibu Sigit selalu mengingatkan pemicuan, monitoring, pas kecamatan pas ketemu ada rembukan dengan Ibu Sigit bagaimana ngasih masukan-masukan ke kita.

50. Bagaimana sikap dari bapak-bapak yang bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta menanggapi masalah-masalah desa atau pembangunan desa khususnya program STBM, apakah Bapak pernah menjumpai mereka seperti apa sikap mereka?

Pernah ketemu mereka, mereka mendukung, walaupun jadinya mereka mencicil membeli material, kadang mereka pulang juga uangnya juga suka ndak ada atau ndak cukup.

51. Ada yang mengatakan bahwa warga-warga yang bekerja di kota besar cenderung kurang tanggap atau kurang peduli kepada masalah-masalah desa atau pembangunan desa ?

Ada tapi tidak semua hanya sebagian aja yang bersikap seperti itu.

52. Siapa yang banyak mendorong Bapak terus bekerja mengusahakan desa bebas ODF ?

Tim STBM kecamatan terutama Ibu Sri yang banyak menanyakan perkembangan dan memotivasi saya bekerja

(lanjutan)

53. Bagaimana perasaan Bapak terus diminta informasi berkali-kali oleh tim STBM kecamatan dan diingatkan agar tercapai targetnya?

Perasaan nggak apa-apa, malah berterima kasih ke Ibu Sri yang selalu memantau perkembangan desa tajemsari

54. Kadang orang merasa dibebani ketika diminta informasi berkali-kali dan diingatkan agar tercapai target bahkan bisa mengundurkan diri tapi Bapak merasa tidak apa-apa, kenapa bisa begitu ?

Ndak jadi beban malah pemicu keberhasilan buat kita dan teman-teman

55. Siapa yang banyak membantu Bapak di desa ini untuk mengupayakan agar tercapai target program STBM ?

Saya dibantu oleh dua orang kader STBM yang super aktif dan perangkat desa yang mendorong warga desa di RT tempat tinggal mereka juga ketua RT. Di desa ini punya pandangan kalau perangkat desa itu dianggap orangtua jadi apa yang diminta oleh perangkat harus membantu demikian juga sebaliknya perangkat juga harus bisa mendukung apa bila mereka meminta bantuan kita. Jadi pandangan seperti itu membantu.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN FASILITATOR DESA TAJEM SARI
KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Upid Indrawati)**

1. Bagaimana Anda bisa terpilih menjadi fasilitator desa ?

Saya jadi FD ditunjuk oleh kepala desa. Sempat diskusi dengan kepala desa, akhirnya bersedia alasannya untuk mencari pengetahuan saja

2. Apa yang ditugaskan kepada Anda sebagai fasilitator desa ?

Kemudian disuruh sosialisasi ke warga. Ikut pembekalan ke purwodadi diperintahkan oleh kepala desa. Pembekalan diajarkan agar warga tidak buang air besar tidak sembarangan. Kemudian disuruh sosialisasi ke warga tentang pentingnya menggunakan jamban. Sosialisasi tingkat desa membuat undangan khusus kepada warga. Yang diundang adalah perwakilan dari warga yaitu RT, warga yang tidak punya jamban dan warga yang punya jamban. Warga yang punya jamban diundang agar mensosialisasikan lagi ke warga. Nama undangan menghadiri pertemuan sosialisasi dan warga tahu bahwa mereka akan menghadiri sosialisasi. Yang diundang tidak semua hadir dan yang hadir kurang dari separuh yang diundang.

(lanjutan)

3. Bagaimana susunan isi acara sosialisasi program STBM ?

Sosialisasi terbagi atas penjelasan tentang STBM dan dilanjutkan tanya jawab. Perangkat desa hadir, FD dan sanitarian dari puskesmas. Yang member penjelasan FD. Warga bertanya apakah ada bantuannya. Kemudian FD menjelaskan tidak ada bantuan. Warga meresponnya mau pikir-pikir dulu nanti kalau sudah panen.

4. Apa isi pertemuan sosialisasi ?

Di pertemuan dijelaskan mengenai masalah buang air besar di desa ini. Sosialisasinya menyadarkan warga. Warga merespon mau bikin. Setelah acara tanya jawab, lalu warga ditanya siapa yang mau buat jamban tulis nama dan tanda tangan, bagi warga yang sudah membuat agar melapor. Setelah sosialisasi di tingkat desa dilanjutkan sosialisasi tingkat dusun, warga diundang lagi, sekaligus dilakukan pemicuan, warga yang hadir kebanyakan ibu-ibu. Yang datang kurang dari separuh yang diundang, dilakukan pada siang hari, bapak-bapak tidak bisa hadir karena kerja

5. Apa yang dijelaskan ketika pemicuan ?

Pemicuan tidak melakukan transek, tidak membuat peta, tetapi hanya menyampaikan pesan. Pemicuan dijelaskan tentang arti penting nya membuat jamban bagi kesehatan. Tidak menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memudahkan warga memahami masalah. Pemicuan dilakukan oleh Pak Kristiandoko dan kadang dia sendiri dan beliau yang lebih banyak menjelaskan. Pemicuan pada warga tingkat dusun. Setelah pemicuan warga tanya apa ada bantuan , apalagi ibu-ibu suka bertanya seperti itu. FD menjelaskan bahwa tidak ada subsidi dan respon warga kok cuma itu saja. Pemicuan dilakukan oleh Pak Kristiandoko dan kadang dia sendiri dan beliau yang lebih banyak menjelaskan. Pemicuan pada warga tingkat dusun. Setelah pemicuan warga tanya apa ada bantuan , apalagi ibu-ibu suka bertanya seperti itu. FD menjelaskan bahwa tidak ada subsidi dan respon warga kok cuma itu saja. Waktu pemicuan dijelaskan dampak negatif dari buang air besar sembarangan seperti terjadinya diare, reaksi warga merasa risih dan takut.

6. Apakah ada diskusi sesama warga setelah praktek pemicuan ?

Setelah pemicuan tidak terjadi diskusi dari inisiatif warga bahwa ini masalah bersama mari kita susun rencana apa jalan keluarnya. Tidak ada diskusi warga mau melakukan mengatasi masalah bersama. Mereka berjanji akan membuat jamban. Setelah pemicuan ditanya siapa yang akan membuat jamban segera setelah itu mereka diminta tulis nama dan tanda tangan bagi yang mau membuat jamban. Setelah itu selesai acara pemicuan. Setelah pemicuan dilakukan pemeriksaan kepada siapa-siapa yang sudah berjanji membuat jamban. FD melakukan pemeriksaan atau monitoring. Yang punya jamban memberi pesan kepada yang belum punya jamban agar membuat jamban. Ada juga yang punya jamban diam-diam

(lanjutan)

saja dan tidak menawarkan bantuan. Tidak ada diskusi yang membicarakan apa yang bisa dilakukan bersama. Selesai pemicuan mendiskusikan secara berkelompok mendiskusikan penyebab penyakit diare setelah itu ada yang menyampaikan bahwa saya membuat jamban kalau ada bantuan, ada yang sadar lalu meminta menumpang ke jamban milik saudara dan tetangga. Yang punya jamban bersedia untuk mengizinkan menumpang di jambannya. Ada yang menawarkan numpang kalau belum mampu membuat jamban

7. Fakta hasil monitoring menunjukkan seperti apa ?

Faktanya di dusun Projo warga sudah membuat jamban tetapi masih tetap saja buang air besar di sungai. Meskipun jamban sudah jenis kloset karena warga merasa sudah kebiasaan. Warga yang membuat jamban dengan dana sendiri. Warga merasa enak buang air besar sembarangan di kali. Ada juga warga belum punya jamban setelah dipicu lalu membuat jamban setelah dipicu lalu membuat jamban, jenis jambannya ada yang cemplung dan kloset. Warga ada juga yang numpang di saudara atau tetangga, jamban cemplung dipakai ketika tidak hujan. Yang punya jamban bersedia member izin jambannya digunakan oleh warga yang belum punya jamban. Desa ini sudah diverifikasi ODF. Ada warga mau jamban kalau ada bantuan. Tidak ada peta monitoring, cuma dibuat daftar nama yang mau buat jamban. Daftar nama tidak ditempel tapi disimpan

8. Anda sebagai warga desa, apakah terganggu dengan warga yang masih buang air besar di sembarang tempat ?

Sebenarnya buang air besar sembarangan di kali sebenarnya mengganggu karena air mengalir dekat rumah.

9. Apa manfaat bagi Anda menjadi fasilitator desa ?

Saya sudah menyerahkan tugas FD ke Pak Kristiandoko, saya berhenti menjadi FD. Alasannya bersedia hadir kalau ada undangan. Saya tidak bisa ikut. Keluarga saya mendukung saya menjadi FD tetapi tidak terlibat membantu.

10. Siapa orang-orang yang banyak memberi dukungan kepada anda sebagai fasilitator desa ?

Ibu Sri dari kantor camat memberi dukungan bagi saya sebagai FD. Saya sering bertemu dengan Ibu Sri. Ibu Sri mendorong saya agar desa saya cepat ODF dan beliau sering datang ke rumah saya. Jadinya saya berteman baik dengan Ibu Sri.

11. Siapa yang hadir ketika pemicuan ?

Waktu pemicuan yang hadir warga yang punya jamban dan yang tidak punya jamban

(lanjutan)

12. Apa pernah dilakukan verifikasi desa ODF ?

Verifikasi yang melakukan dari kecamatan

13. Apakah ada rencana berikutnya setelah di verifikasi, misalnya untuk mempertahankan desa ODF?

Tidak ada rencana kegiatan untuk mempertahankan tetap ODF

14. Apa yang dibicarakan dengan sanitarian ?

Dari puskesmas tidak ada diskusi khusus dengan sanitarian cuma pertemuan bulanan di kecamatan dan dipertemuan hanya membicarakan langkah-langkah selanjutnya

15. Apa alasan kepala desa memilih anda menjadi fasilitator desa?

Karena saya menganggur yang punya waktu banyak sehingga bisa ikut pelatihan.

16. Bagaimana hubungan kerja fasilitator desa dengan pemerintah desa dalam program ini ?

Ada koordinasi antara FD dengan pemerintah desa

17. Bagaimana tugas-tugas fasilitator desa diberikan kepada anda?

Waktu jadi FD dikasih tahu tugas-tugas menjadi FD dan tugas diberikan waktu pelatihan. Tugasnya menyadarkan warga.

18. Bagaimana kondisi masyarakat yang belum memiliki akses jamban ?

Lebih banyak warga yang mengalami masalah ekonomi

19. Bagaimana warga yang belum mengakses jamban dapat mengusahakan akses jamban dan tidak mudah ?

Saya juga berusaha bagaimana caranya supaya warga bisa sadar

20. Apakah pernah putus asa selama menjadi fasilitator desa ?

Tidak pernah mengalami putus asa. Secara pribadi bisa menyenangkan pekerjaan menjadi FD. Karena sering pertemuan ke kecamatan yang membuat saya menjadi sulit.

21. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga disini ?

Hubungan warga disini erat. Kayak hubungan saudara. Ada keperluan apa-apa main ke tempat saudara bicara begini-begini bisa kasih-kasih solusi. Tukar pengalaman. Kalau ada makanan saling kasih gantian. Kalau ada

(lanjutan)

hajatan, orang meninggal warga gotong royong saling membantu. Kayak ibu-ibu ramai-ramai datang membantu masak. Bangun rumah gotong royong. Kerja bakti bareng-bareng, warga bantu tenaga. Warga yang rumahnya dibantu dibangun memberikan makanan dan rokok buat orang yang kerja.

22. Kenapa warga bisa membantu seperti itu?

Ya, karena sudah tradisi. Dari dulunya sudah begitu. Sesama tetangga enaknya hidup bisa rukun. Misalnya kita punya hajatan. Warga-warga disini yang bekerja di Jakarta bisa datang semua menolong yang hajatan .

23. Bagaimana seandainya ada warga yang tidak membantu ?

Tidak apa-apa. Tapi kita berpikir sendiri tidak enak. Jadi saling mengerti.

24. Kenapa ketika membangun jamban dalam program STBM tidak terjadi saling membantu seperti itu ?

Kalau jamban itu, urusan pribadi-pribadi, itu urusan sendiri. Warga masih menyepelkan. Artinya terserah kamulah.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KADER STBM DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU (Bapak Muslikhin)

1. Bagaimana Bapak bisa terpilih menjadi kader STBM ?

Setiap ada progam dari tingkat nasional yang kemudian difasilitasi oleh kecamatan sehingga sampai kedesa. Dalam hal ini tangan kepanjangan desa adalah RT dan perangkat desa yang mengetahui secara persis kehidupan sosial dimasyarakat selalu dilibatkan dalam unsur rapat desa sehingga dari awalnya program itu masuk desa secara langsung saya tahu tetapi kapasitas saya sebagai perangkat desa belum diangkat sebagai kader. Setelah proses pelantikan sebagai fasilitator desa membawa hasil harus dijalankan sehingga program ini sesuai dengan mekanismenya harus mengangkat kader, kebetulan saya yang diangkat. Yang menjadi pertimbangan peran saya mau menjadi kader, unturnya adalah dalam hal ini perlu saya garis bawahi adalah unsur sosial. Unsur yang melibatkan pola hidup masyarakat dari budaya yang jelek berubah menjadi budaya yang lebih baik kalau dalam kajian saya itu adalah suatu pola kebiasaan yang berakibat menjadi suatu bencana. Dalam lingkup STBM orang BABS nanti ada lalat dan menjadi sakit juga warga dalam kriteria bencana yang diakibatkan oleh manusia. Dalam kajian saya di BNPB masalah ini

(lanjutan)

ada hubungannya dengan tugas saya. Jadi kader menurut saya penunjukan tetapi melibatkan rembuk dulu atau musyawarah dari sekdes dan kades sehingga yang punya kemampuan mungkin sekiranya punya waktu, kemampuan, kompetensi yang punya kehatian yang paling penting dalam hal ini mau mendukung. Mungkin saja itu. Waktu diajak yang terpikir ini tugas berat bukan tugas ringan karena saya tahu persis perilaku dan budaya masyarakat saya. Yang harus digeser dari budaya BABS yang sudah turun temurun. Diarahkan atau diegeser menjadi kebiasaan baru BAB pada tempatnya dalam benak. Buat saya ini tugas berat terlepas apakah dilihat unsur pendanaan, apakah ada subsidi nantinya untuk membuat sarana atau tidak yang jelas dalam benak saya berpikir bagaimana membuang kebiasaan masyarakat seperti ini. Kemudian saya berpikir ini nanti tujuannya sampai mana apakah harus punya jamban bagi masyarakat yang belum atau samai mana lalu disampaikan tujuannya sampai perubahan sikap. Kalau begitu saya mau terima. Masyarakat tidak harus membuat tempat BAB diluar kemampuan masyarakat. Yang paling penting bagaimana perilaku bisa berubah. Makanya saya mencoba dulu. Programnya waktu itu masuk tiap RT-RT ang mana tiap malam jumat, ada jamaah tahlil disitu menjadi sarana kita untuk memaparkan program. Sata hanya punya patokan satu malam saja untuk masuk ke wilayah. Kalau respon masyarakat mungkin ada wacana dalam benak saya untuk bisa dirubah perilakunya, mungkin saya teruskan kalau tidak berbentur terhadap masyarakat, masyarakat itu sensitif kebetulan. Dalam rapat ada sesi tanya jawab sehingga saya bisa bertanya respon masyarakat bagaimana meskipun arahnya jelas. Dari sesi tanya jawab saya bisa menangkap keinginan masyarakat. Setelah saya paparkan bagaimana dampaknya dari kesehatan, dari lingkungan yang sejalan lingkup versinya saya bisa menangkap masyarakat sekarang ternyata sudah mempunyai pola pikir yang sudah modern juga. Hanya saja wadahnya atau timnya yang serius bagaimana menanganinya ini belum ada. Oleh karena itulah saya memastikan diri ayo terus kita masuk.

2. Apa manfaat menjadi kader STBM buat diri anda sendiri?

Karena saya itu adalah didikan daripada jiwa sosial untuk menumbuhkan rasa sosial itu sulit apapun bentuknya. Permasalahan sekecil apapun yang melibatkan kerugian diantara sesama masyarakat dalam sesama manusia itu jelas akan membawa hati kita masuk dalam permasalahan itu. Sehingga dalam program ini, seolah-olah ada keleluasaan cara berpikir kader untuk membawa keberhasilan program ini. Kita bisa memberikan apa yang menjadi pikiran kita. Kita salurkan untuk kesuksesan program ini. Kalaupun itu sukses itu memberikan nuansa jiwa kita itu hal yang luar biasa. Terbukti dengan adanya program ini, karena tidak terbebani dengan adanya unsur harus membuat sarana yang bagus, saya jadi berpikir sata ambil rencana jangka pendeknya saya berpikir harus bisa merubah sifat atau perilaku masyarakat itu jangka panjang. Bagaimana setelah mereka bisa membenahi ekonomi, kita arahkan lagi bisa membuat saran yang sesuai dengan yang menjadi keinginan negara. Terbukti sekarang hampir

(lanjutan)

tidak ada yang buang air besar diselokan – selokan itu tidak ada meskipun itu menumpang, meskipun 3 rumah jadi satu, 2 rumah jadi satu, semua yang punya perilaku yang buruk sekarang sudah berubah menjadi pada porsinya masing-masing. Ambil contoh karena saya bisa mengawasi lebih detail. Secara pribadi saya bisa mengoptimalkan karena saya mengetahui perilaku masyarakat yang dekat dengan sungai saja itu jelas sudah ada perubahan 2 RT satu dusun. Secara significant sudah ada perubahan perilaku total sama sekali. Saya bekerja untuk satu desa cuma saya berharap yang saya pastikan dekat dengan sungai dulu. Sesuai dengan kemampuan saya dimana kesubukan saya sebagai perangkat. Untuk diwilayah lain, saya hanya survey kemungkinan saya pribadi hanya memprediksikan berkisar 60 – 70% mengetahuinya perubahan dalam program ini.

3. Menurut Bapak apa tugas seorang kader STBM ?

Menata masyarakat agar bergeser perilaku buruknya dan manfaatnya juga bagi masyarakat sendiri. Saya harus mengawal untuk pertamanya adalah menjawab bagaimana mengawal memberikan saran dan solusi dimanapun tempatnya tidak harus formal meskipun secara pribadi sudah saya laksanakan. Kedua, bagaimana setelah kesadaran masyarakat itu terpupuk sehingga saya bisa mengarahkan lagi untuk memiliki sarana yang lebih layak sehingga arahnya bisa lebih bagus lagi. Kewenangan saya dimasyarakat adalah menanggung atau bagaimana mengatur agar kehidupan sosial masyarakat tidak ada benturan. Sebelum persoalan itu dilanjutkan kedesa, saya secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Dirumah si A buang air besar sembarangan saya kasih tahu tetangganya si B bahwa akibat si A keluarga si B bisa kena penyakit mencret. Kalau si A buang air besar sembarangan tolong si B lapor kesaya nanti ketika di forum pertemuan di jamaah saya umumkan saya selesaikan secara tidak langsung supaya dia malu. Sehingga meskipun dia menumpang ataupun membuat WC seadanya terbukti dikerjakan. WC sederhana itu cemplung ada ditutup, kloset ada.

4. Bagaimana dampak bencana banjir terhadap program STBM ?

Ketika diawal program, selalu menjadi masalah mengenai banjir. Karena kebiasaan masyarakat jelas berubah sesuai dengan mengikuti alamnya. Semua perilaku masyarakat dengan sengaja BABS. Dengan alasan banjir lalu seenaknya BABS kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan yang bagus bisa berubah lagi dengan alam banjir. Saya beritahu banjir itu tidak selamanya, 12 bulan tidak banjir terus karena tidak mungkin. Paling sekarang ini rame-rame bangun, banjir hanya sebulan saja. Mungkin fasilitas dirumahnya tidak bisa digunakan semaksimal mungkin hanya sebulan, sisanya masih bisa. Tetapi alasan dengan adanya banjir, bertumpu pada masalah banjir. Terus mereka alasannya menjadi seperti itu terus. Ini menjadi PR saya kebetulan sekarang sudah terantisipasi, walaupun banjir

(lanjutan)

ternyata terbukti fasilitas tidak bisa digunakan, tapi setelah fasilitas bisa digunakan juga diteruskan kebiasaan itu.

5. Bagaimana pelaksanaan pemician di wilayah Bapak ?

Pemician digabung Bapak-bapak dan Ibu – Ibu (2RT), siang hari pemican, jam 10.00 – 14.00, warga dengan sengaja diundang, diundang semua KK, yang hadir 30 – 40 orang. 2 RT 197 KK yang prioritas yang belum punya jamban. Pak Lurah hadir, FD dau desa lain juga hadir. Program Nasional, semua kelembagaan dilibatkan dalam program STBM.

6. Ada yang mengatakan bahwa bila warga pergi ke kota-kota besar untuk bekerja cenderung tidak peduli atau cenderung kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan desa atau pembangunan desa ?

Memang dulunya pernah seperti itu tetapi kemudian mereka diorganisir untuk diajak agar peduli dengan masalah-masalah ataupun pembangunan desa. Banyak disini pembangunan sarana-sarana hasil sumbangan mereka.

7. Bapak pernah bertemu dengan suami-suami yang bekerja di kota-kota besar dari ibu-ibu kita jumpai untuk wawancara, bagaimana tanggapan suami-suami mereka terhadap program STBM ?

Mereka baik, mau merubah prioritas mereka yang semula untuk yang lain karena ada pengarahannya ini mereka mau memprioritaskan membangun jamban walaupun jadinya bertahap menciil untuk membeli material.

8. Desa Tajemsari bisa selebrasi ODF tentunya bukan hasil kerja fasilitator desa seorang, lalu siapa-siapa yang membantu untuk mencapai desa ODF itu ?

Yaitu orang-orang dibawah perangkat, bapak-bapak RT yang banyak membantu. Disini ada adatnya bapak-bapak RT harus siap dan bersedia kalau diminta bantuan oleh perangkat desa. Itu pernah disampaikan kepala desa yang dulu dan itu turun-temurun. Sehingga Bapak-bapak RT bersedia membantu.

9. Bagaimana koordinasi dengan ketua RT pelaksanaan program STBM ?

Koordinasi dengan mereka terjadi menanyakan perkembangan dan masalah dan mana yang perlu dibantu kalau perlu sosialisasi lagi kalau RT itu masih banyak yang belum akses jamban atau kurang perkembangan. Pertemuan mereka tidak usah resmi kapan ada waktu ketemu atau bersamaan kegiatan lain sekaligus dibahas mengenai program STBM.

9. Apa yang dimaksud “ulu” itu ?

Suatu petugas perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa dan gunanya untuk membantu mengupayakan sarana pertanian.

(lanjutan)

10. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di desa ini ?

Disini kebanyakan 50% warga masih ada kaitan saudara. Jadi hubungan saudara disini sangat erat sekali. Bagaimana mereka bisa bekerja sama ataupun bisa mengangkat derajat saudara yang belum mampu. Misalnya saya punya sawah yang luas bisa saja saya kerjakan sendiri tetapi saya kasih ke saudara saya garapan sawah dan rata-rata hampir semua seperti itu. Seperti kegiatan jamaah tahlil, kegiatan-kegiatan budaya masih berjalan lancar. Kalau ada orang hajatan. Bisa mati-matian membantu. Misalnya kalau saya punya hajatan, itu warga bisa datang bawa beras, sembako minyak goreng, telur nanti dimasak untuk disediakan kepada para tamu. Nanti kalau saudara saya punya hajatan, saya harus mengembalikan bahkan lebih. Bisa sama banyaknya. Jadi tolong menolong seperti itu. Contoh lain, ada sistem kerja. Karena jumlah warga disini sedikit. Tetapi jumlah lahan pertaniannya luas. Kemudian pola tanam padi harus bersamaan. Pada saat mereka mau tanam semua tidak ada orang kerja upahan. Akhirnya warga saling membantu. Warga yang satu bekerja di tempat orang lain kalau sudah selesai orang itu membantu orang yang membantu bekerja di sawahnya sampai selesai. Saya dikasih uang tidak mau untuk upah kerjakan sawah dia begitu juga dikasih uang tidak mau kerjakan sawah saya. Akhirnya supaya pada mau bekerja maka dibuat sistem rembuk, yang mau tanam saya dulu atau kamu dulu. Kalau kamu dulu saya bantu kamu. Untuk memotong hasil panen padi juga begitu. Cuma disini yang didahulukan keluarga dulu. Kalau keluarga sudah selesai baru membantu ke tetangga-tetangga. Tanam padi harus serempak punya selang waktu sepuluh hari kalau misalnya sampai dua minggu bisa kena hama. Jadi harus serempak. Sehingga perlu kebersamaan seperti itu dalam pertanian. Tidak mungkin sawah orang lain kena hama lalu padi saya tidak kena hama pasti semua kena hama. Jadi perlu kebersamaan dalam pertanian.

11. Kenapa warga bisa tolong menolong seperti itu dalam pertanian, apa prinsipnya?

Prinsipnya warga disini, yang kita dahulukan adalah tetangga supaya tetangga kita itu bisa merasakan rejeki dari saya begitu juga sebaliknya. Warga disini percaya saja kalau dia membantu tetangga maka dia juga akan dibantu oleh tetangganya itu. Warga semaksimal mungkin supaya sama-sama jalan tidak ingin berkekurangan. Itu jelas. Seperti saya bangun rumah, saya tidak keluarkan uang. Saya pengumuman ke rumah-rumah, saya sampaikan bahwa saya akan membangun rumah nanti tolong dibantu. Saya tinggal siapkan makanan kasih berkat untuk mereka yang kerja. Misalnya orang lain sudah saya bantu begitu saya bangun rumah, orang-orang yang bekerja di Jakarta, nanti istrinya telpon ke suaminya kasih tahu si anu mau bangun rumah, mereka bisa pulang hanya untuk membalas bahwa saya pernah ditolong oleh orang itu. Tidak peduli dia hutang dulu yang penting pulang. Atau misalnya ada orang punya hajatan, harus pulang juga. Warga prinsipnya bisa seperti itu karena tidak lebih karena

(lanjutan)

penjiwaan adat seseorang yang sudah mendarah daging. Yang mendorong seseorang bisa bergerak seperti itu adalah dia sudah mengerti bahwa adat budaya ya seperti itu sehingga dorongan untuk bergerak itu kuat. Kalau bangun rumah, warga ada juga yang diminta sumbangan material dan itu betul-betul dikasih sebaliknya nanti warga itu minta tolong saya, dia tidak menagih apa yang pernah dia berikan, atau misalnya dia mengadakan hajatan, dia minta tolong dan dia bilang ke saya, tolong nanti kumpul-kumpul di resepsi saya sampai selesai. Nanti naluri saya mengatakan kita harus balas dia. Lalu saya hitung bantuan yang dia sudah berikan nanti saya kembalikan. Kemudian saya arahkan dalam bentuk barang yang lain. Orang hajatan itu dihitung dan dicatat orang-orang yang kasih barang sama dia.

12. Apakah pola tolong-menolong seperti itu terjadi juga dalam pembangunan desa?

Ada titik kesalahan pemerintah desa. Saya juga orang didalam pemerintah desa. Budaya gotong royong dalam hal pembangunan desa seolah-olah malah berkurang. Yang jelas arahan agar masyarakat bergotong royong membangun desa kayaknya sulit, sifat masyarakat itu, setiap pertemuan Jamaah Tahlil, disitu saya hadir, partisipasi masyarakat itu hanya masukan-masukan saja. Bahwa desa memiliki PAD desa hasil lelang sawah yang dijual ke masyarakat nanti dikembalikan lagi untuk membangun desa ditambah lagi dana dari alokasi dana desa dari kabupaten. Kalau kurang bisa mengajukan proposal ke dinas-dinas terkait. Pola pikir masyarakat yang SDM-nya masih rendah seperti itu justru di desa ini untuk pemerintahan desa yang sekarang partisipasi masyarakatnya berkurang, sangat berkurang. Dari kepala desa tidak ada ketegasan kea rah meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat gotong royongnya malah pemikiran, bahwa begini pak kades enaknya, malah tindakan tidak ada. Misalnya mau bersih-bersih kubur, mau bersih-bersih jalan-jalan kalau mau lebaran, tanah-tanah harus dikasih obat agar tumbuh rumput lalu pasang lampu, malah dari kades warga dikasih uang untuk beli obat rumput. Kalau ada kegiatan misalnya tiap KK ditarik uang untuk membayar orang kerja. Mengumpulkan uang itu merupakan hasil musyawarah wilayah masing-masing. Gotong royong pada tidak mau. Lalu gimana baiknya, ada warga usul agar tiap KK ditarik uang saja lalu uang yang terkumpul kemudian untuk membayar orang kerja dan beli material kemudian yang mengawal kerja pak RT.

13. Kenapa warga tidak mau berpartisipasi bekerja ?

Awalnya dulu pernah ada gotong royong, lalu ada yang ikut kerja gotong royong dan ada juga yang tidak ikut kerja. Yang tidak berangkat ini kesannya tidak ada tindak lanjut menangani yang tidak ikut gotong royong. Seolah-olah ada pembiaran, tidak ada sanksi, tidak dimarahi, tidak ada apa-apa kepada warga yang tidak gotong royong sehingga yang ikut gotong royong pada iri lalu warga berpikir bila ada pekerjaan membangun

(lanjutan)

desa lagi, agar adil semua, lebih baik kumpulkan uang saja, terserah saya ikut gotong royong atau tidak.

14. Dalam program PNPM, gotong royong dan swadaya masyarakat desa seperti apa ?

Sebenarnya secara keuangan ada budaya misalnya nilai proyek pembangunan desa itu seratus lima puluh juta lalu PNPM hanya member seratus empat puluh empat juta maka kekurangannya enam juta rupiah sebenarnya harus dari swadaya masyarakat. Ini malah kekurangan itu ditutupi dari kas pemerintah desa bukan dari swadaya masyarakat. Masyarakat disuruh kerja malah dibayar.

15. Lalu apa partisipasi masyarakat membangun desa yang berhasil ?

Waktu mengatasi masalah banjir di areal pertanian. Agar pertanian tetap produktif dan setahun saja bisa dua kali masa tanam yang seharusnya bisa tiga kali, waktu itu pemerintah desa dari dana APBDes, hasil lelang tanah sawah, menyewa alat berat ekskavator begu. Warga disitu peran aktifnya adalah bahwa sawah yang dikeruk oleh alat berat adalah sawah milik pribadi masyarakat. Warga merelakan sawahnya dikeruk untuk mengantisipasi banjir agar pertanian bisa sukses.

Warga semua merelakan tanahnya. Kedua, pembangunan mushola. Masyarakat pernah mengumpulkan dana sampai dengan satu juta delapan ratus ribu rupiah kemudian setelah panen warga mengumpulkan dana lagi. Kemudian kekurangannya warga mencari dana dengan membuat proposal. Ketiga, pembangunan jalan beton yang dibantu dari dana PNPM lalu masih ada kekurangan dan kemudian ditutupi kekurangan itu sebagian dari sumbangan paguyuban pemuda kampung yang bekerja di luar kota sebesar dua juta rupiah dan masih ada kekurangan sedikit yang kemudian ditanggung oleh dana dari kas desa. Warga juga diminta swadayanya dengan menyiapkan makanan bagi orang yang bekerja membangun jalan beton. Orang yang kerja masih warga desa ini.

16. Kenapa warga mau menyumbangkan tanahnya untuk mengatasi banjir tadi ?

Sebenarnya pola pikir warga masih mempertimbangkan untung dan ruginya menyumbangkan tanahnya. Dengan merelakan tanahnya dikeruk untuk membuat tanggul kemudian banjir tidak terjadi lalu warga masih bisa dua kali masa tanam. Kalau dihitung-hitung warga masih mendapatkan penghasilan yang cukuplah dan tidak rugi dibanding kalau tidak dikeruk tanahnya ya tentunya bisa gagal panen dan sudah pasti rugi.

(lanjutan)

17. Lalu kenapa juga warga mau memberi sumbangan membangun mushola?

Dalam pembangunan mushola, prinsipnya ada persaingan antar dusun, antar desa. Disana-sana itu tempat ibadahnya sudah layak pakai lalu disini kok belum layak. Merasa bahwa tempat ibadah saya seperti itu, ada tuntutan batin harus diperbaiki karena sudah tidak layak lagi.

18. Lalu kenapa juga warga mau berswadaya untuk membangun jalan beton desa ?

Kalo pembangunan jalan beton tadi, misalnya nilai proyeknya seratus dua puluh empat juta rupiah lalu dibantu PNPM sebesar seratus dua puluh juta rupiah, warga merasa tidak mau kehilangan mau kehilangan kesempatan untuk dapat dana sebesar itu lebih baik warga mengumpulkan dana dua juta rupiah. Seumpama warga disuruh kumpulkan uang sebesar seratus dua puluh juta rupiah jelas tidak mungkin. Warga berpikir kalau jalan itu tidak di beton jelas jalan becek semua susah orang jalan disitu. Untuk program PNPM memang ada peraturannya harus ada swadaya masyarakat. Masyarakat tidak berpikir bahwa uang itu akan dikorupsi oleh panitia, mereka hanya berpikir dengan saya mengeluarkan uang dua juta rupiah saya sudah dapat jalan bagus.

19. Kenapa dalam membangun jamban dalam program STBM belum terjadi swadaya secara kolektif seperti itu?

Itu belum kepikir sama sekali oleh warga yang namanya program STBM itu asas manfaatnya untuk bersama. Kesannya yang muncul untuk pribadi. Memang awalnya ditujukan terlebih dahulu kepada perubahan perilaku untuk menyadarkan warga. Kalau sudah sadar maka aka nada tuntutan arahnya sudah lain. Warga akan berpikir kurang enak buang air besar sembarangan mending saya berbenah diri. Kita tidak berfokus pada teknis jambannya tapi menyadarkan masyarakat dampak negatif dari buang air besar sembarangan. Kalau bangun wc dibangun dengan sistem swadaya kelihatan susah. Soal jamban ditempatkan oleh warga di nomor tiga atau empatkanlah dan tidak menjadi prioritas utama di desa. Yang menjadi prioritas utama adalah rumah. Disini warga punya prinsip, seseorang bila sudah menikah baik jelek atau bagus diharuskan mendiami rumah sendiri. Tidak diperbolehkan gabung dengan orangtuanya. Diharapkan anak yang sudah menikah bisa mandiri. Dalam istilah Jawa, satu pintu dua KK maka yang satu akan kalah rejekinya. Misalnya saya gabung dengan orangtua saya maka rejekinya kalah salah satu. Kalau soal jamban ada unsure disepelekan. Itu masih sifatnya pribadi-pribadi. Karena gencarnya program ini, untuk memiliki jamban sendiri tidak ada unsur kelompok-kelompok masing-masing warga berjuang sendiri-sendiri.

(lanjutan)

20. Kenapa tidak terjadi warga membantu warga yang belum punya jamban?

Itu dinilai oleh tetangga masyarakat sekitar bukan menjadi masalah tanggungan masyarakat atau menjadi prioritas dan itu tidak.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KADER STBM
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Wakijan)**

1. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai kader STBM ?

Sebelum jadi kader saya sudah jadi ketua RT termasuk juga saya perduli dengan lingkungan. Lingkungan saya ini kumuh, dan orang-orang itu BAB dan buang sampah seenak-enaknya saja. Belum memiliki kepedulian dari masyarakat. Pak Kristiandoko ini sosialisasi di jamaah tahlil. Pak Kades dan Ibu kades masuk ke Yasinan dan saya terus ditunjuk jadi kader. Sebelum ditunjuk saya sudah punya kepedulian dan saya kemudian ikut serta. Untuk masyarakat yang ekonominya sangat lemah ini, kemauan ada tetapi masalah ekonomi rumah tangga kemaren panen ada tambahan dana, bangun jamban kloset. Yang membutuhkan biaya sedikitnya 3 juta rupiah. Beli gorong-gorong untuk septiktank, paralon, kloset. Ambil air dari sumur pakai pompa air sanyo dan sekalian sama kamar mandi. Sudah tertata rapih. Dulunya BAB dikali, saluran irigasi dimanfaatkan untuk BAB. Jadi saya menjadi RT dan keperluan saya ini didukung STBM sehingga saya sangat cocok saya sangat berterima kasih untuk program itu. Waktu disampaikan saya setuju sekali ini bukan pekerjaan mudah karena ini bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang BABS dan kemudian program ini warga diarahkan ini sangat bertentangan. Saya mengatakan kalau tidak mengikuti apa yang disampaikan RT ini, kalau ada program pemerintah yang mau bantu, saya tidak akan kasih.

2. Apa manfaat bagi Bapak menjadi kader STBM ?

Saya ikut terharu karena dulu belum ada program ini dan apa namanya sampah, BABS sekarang sudah terkendali. Sekarang orang sakit muntaber sudah berkurang sama sekali, dulunya sering.

3. Apa tugas Bapak sebagai kader STBM ?

Tugas Kader adalah memberi saran agar tidak BABS keluh kesahnya akan menjadi penyakit, menyampaikan air harus matang untuk diminum.

4. Dimana Bapak memberi saran kepada warga ?

Saya mulai dari keluarga saya dulu, kemudian dijamaah tahlil, lalu saya datang kerumah-rumah, ketika menagih, pas pembagian beras raskin ibu-

(lanjutan)

ibu sudah mengumpul disitu, saya kasih saran. Yang berdekatan rumahnya sama-sama membuat jamban yang sesuai dengan kemampuan dulu. WC cubluk tidak saya sarankan karena ada kelemahannya. Yang saya sarankan WC Kloset. Pada musim hujan, septiktank harus dikuras. Kalau tidak dikuras bisa membuat kotorannya berada diatas.

5. Apa yang Bapak rasakan mengenai kebersamaan dengan warga disini ?

Kadang-kadang ada yang menjengkelkan dan ada yang bagus. Saya jadi RT merasakan 60 % warga ikut apa yang deprogramkan RT , yang 20% ada yang bandel, 20% ada yang bandel tapi bisa ikut dan bisa juga tidak. Orang tidak sama. Antara warga dengan yang lain tidak ada masalah. Disini warga saudara semua. Saudara satu keturunan. Disini 90% warga mau berpartisipasi. Artinya ini mengikuti program yang dicantumkan oleh pemerintah desa atau RT. Disini kalau ada yang meninggal tidak ada yang membandel, semua ikut terlibat dan ikut mengantarkan mengubur. Mengaji bareng-bareng semua, malamnya mengaji. Kalau ada yang punya hajatan, mau menikahkan anak atau sunatan, orang-orang meninggalkan pekerjaan di sawah, warga-warga yang bekerja diluar desa sampai Semarang pulang ke kampung membantu warga yang sedang hajatan. Warga berpartisipasi di hajatan itu. Kalau warga bekerjanya jauh sampai ke Jakarta dimaklumi kalau tidak datang berpartisipasi dalam hajatan itu. Di Hajatan, warga turut merasakan kebahagiaan, mendoakan, dan membuat makanan. Warga-warga datang bawa beras, sembako komplit dan rokok. Warga bisa seperti itu karena sudah tradisi dari dulu sejak nenek moyang. Ketika nanti ada saudara lain lagi yang mengadakan hajatan harus dibalas. Kalau ada warga yang sakit dirawat di rumah sakit, warga disini ramai-ramai menjenguk ke rumah sakit itu.

6. Apa prinsip bagi warga bisa berpartisipasi membantu seperti itu?

Kalau saya tidak mengikuti kesatuan itu, nanti kalau ada apa-apa dengan saya, misalnya saya mengadakan hajatan atau kemalangan takut tidak dibalas untuk ditolong oleh warga disini. Saya punya hajatan takut tidak dihadiri, kalau ada kemalangan atau kesusahan dibiarkan begitu saja oleh warga disini. Kegiatan-kegiatan seperti itu, berpartisipasi dalam hajatan atau kedukaan atau ada yang sakit sudah menjadi program RT. Warga berpartisipasi memberi sumbangan.

7. Bagaimana respon warga terhadap pembangunan desa?

Dalam program sangat baik. Seperti disini dapat donator membangun mesjid. Donatur tidak menanggung biaya seluruhnya untuk pembangunan mesjid dan memberi kesempatan kepada warga disini untuk memberi sumbangan, meskipun sedikit. Saya berkonsultasi dengan teman-teman ketua RT agar hari minggu warga berswadaya membangun mesjid. Dalam program PNPM, saya sampaikan bahwa ini program pemberdayaan, apa

(lanjutan)

yang dibantu pemerintah merupakan hanya stimulant. Yang bertanggung jawab semua warga. Saya sebagai pengelola kegiatan. Uangnya sekian lalu dibelikan barang-barang sekian. Kerja ini warga semua punya kewajiban. Kerja PNPM ini misalnya targetnya pembangunan jalan sepanjang 330 meter kemudian bisa dikembangkan menjadi bertambah 50 meter dengan semangat kerja warga bergotong royong.

8. Kenapa warga mau memberikan sumbangan untuk pembangunan mesjid, apa prinsipnya?

Disini warga berpikir, ada orang yang mau memberi bantuan dalam jumlah besar untuk sekian luas bangunan mesjid, andaikata warga memberikan iuran untuk menanggung semua biaya pembangunan mesjid perlu berapa tahun untuk menyelesaikan pembangunan mesjid itu. Padahal, kondisi keuangan warga pas-pasan saja. Ada rasa terharu, makanya kita, 60% warga disini berbondong-bondong membantu bekerja membangun mesjid itu.

9. Kenapa warga dalam program STBM agar warga dapat mengakses jamban bagi yang belum mengakses jamban belum terjadi partisipasi seperti yang Bapak jelaskan tadi?

Pikiran warga itu, masa saya harus membantu warga yang membangun sesuatu di rumahnya orang itu. Dibantu bisa saja, dibantu dengan tenaga saja ketika membangun jamban. Warga tidak membantu dana. Alasan warga tidak bantu dengan dana ya karena ngapain bantu dana bangun wc itu lalu tidak saya gunakan.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Tuti, warga RT 02 RW 4)**

1. Pernahkan Ibu mendengar adanya arahan di desa ini agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?

Pernah menghadiri pertemuan pengarahan di posyandu oleh bidan, acara ibu lurah dan ibu bidan. Tidak ada pengarahan didusun

2. Saat ini bila akan buang air besar kemana ?

Pernah juga BABS di sungai. Setelah mempunyai anak satu, saya tidak BAB disungai lagi, sudah lama sebelum kenal STBM. Sekarang numpang dengan saudara.

(lanjutan)

3. Apa kesulitan Ibu membuat jamban ?

Masalah ekonomi, uang hasil kerja suami hanya untuk belanja sehari-hari

4. Pekerjaan kepala rumah tangga apa ?

Suami pulang 2/3 bulan kerja di Jakarta.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Slamet, warga RT 12 RW 3)**

1. Apabila Bapak dan keluarga buang air besar kemana sekarang ?

Dulunya belum tapi sekarang sudah buat 3 bulan, jamban kloset 1,5 juta. Kloset dibeli ditoko material merek Ina. Dulu pernah BABS disungai. Akibat BABS bisa mengotori tempat lain-lain

2. Apa pekerjaan Bapak ?

Kerja pertanian, sawah.

3. Kenapa baru saat ini membuat jamban ?

Karena sebelumnya belum punya uang, menunggu panen.

4. Pernah mendengar adanya arahan agar warga tidak buang air besar di sembarang ?

Dengar STBM dari Jamaah tahlil. Jamaah taklih bertemu 1 minggu sekali. Tiap jamaah taklih menyampaikan, mengingatkan warga

5. Bagaimana Bapak bisa membuat jamban kloset di rumah ?

Bikin WC meminjam dulu uangnya, tetap bikin WC. Setelah panen nanti dikembalikan

6. Bagaimana perasaan Bapak ketika diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Ada perasaan tidak enak ketika disuruh membuat jamban.

7. Kenapa Bapak mau membuat jamban ?

Takut dikomplain warga karena selaku RT.

(lanjutan)

8. Apa kegiatan gotong royong Bapak bersama warga disini?

Kegiatan gotong royong bangun musholla. Karena ada bantuan sebagian diteruskan oleh warga.

9. Sekarang masalah buang air besar di sembarang tempat di dusun Bapak sudah seperti apa ?

Masyarakat sudah merasa malu BABS, dulunya umum, sudah 3 tahunan

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Sudarmin)**

1. Kapan Bapak baru punya jamban kloset di rumah ?

1 bulan lalu baru membangun jamban kloset modalnya Rp. 700.000,-, kloset beli merek Toto. Buang air besar dulu dikali sekitar 20 meter dari rumah saya. Lama baru buat wc karena masalah ekonomi juga praktis karena tidak jauh.

2. Pernah mendapat pengarahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?

Pernah dapat pengarahan jangan BABS dijamaah tahlil, yang kasih pengarahan Bapak Wakijan, Bapak Kristiandoko.

3. Bagaimana perasaan Bapak diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?

Perasaan waktu dikasih tahu jangan buang air besar sembarangan ntar kalau ada rejeki mau beli. 1 tahun lalu dengar pengarahan. Lebih dari sekali mendapat pengarahan. Waktu dikasih tahu, jawanna belum ada rejeki minta tenggang waktu

4. Kenapa Bapak baru satu tahun kemudian membuat jamban kloset ?

Namanya juga cari rejeki, kebutuhan keluarga banyak. Yang utama untuk sekolah

5. Kenapa Bapak mau membuat jamban ?

Kalau hujan, tidak perlu report, kalau malam buang air besar tidak jauh-jauh, dekat rumah ada sumur. Setelah punya jamban tidak pernah buang air besar sembarangan lagi.

(lanjutan)

6. Siapa yang pakai jamban kloset di rumah Bapak ?

Yang pakai jamban itu adalah keluarga saya. Sebenarnya tahu akibat buang air besar sembarangan tapi mau gimana lagi

7. Apa pekerjaan Bapak ?

Kerja tukang, buruh tani,

8. Apa pendidikan terakhir Bapak ?

Pendidikan terakhir SD

9. Apa kegiatan Bapak bersama warga di sekitar tinggal Bapak ?

Didesa ikut kerja gotong royong bersih –bersih lingkungan. Ikut aktif jamaah tahlil

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN PLOSTOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Munari warga RT 02 RW 04)**

1. Apabila Ibu dan keluarga akan buang air besar perginya kemana?

Saya belum punya WC, kalau buang air besar ke sungai

2. Apakah Ibu pernah mendengar arahan warga diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Saya pernah mendengar pengarahan di posyandu dan soal buat WC yang kasih tahu dari Ibu Lurah. Cuma di posyandu dua kali. Saya tanya kalau sudah punya uang gimana Bu. Ibu Lurah Bilang “numpang di tetangga” kalau satu dua kali mungkin bisa, tapi kalau terus menerus saya ndak enak. Akhirnya ndak menumpang. Belum punya jamban karena masalah biaya.

3. Apa pekerjaan kepala rumah tangga?

Bapak yang kerja pembajak sawah di desa ini. Ikut kerja disawah cuma tanam padi. Bapak buruh tani. Buruh tani dapat upah harian

4. Bagaimana perasaan Ibu diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Perasaan saya, kalau punya WC dirumah kalau mau buang air besar mudah kalau dirumah. Perasaan saya ndak enak aja.

(lanjutan)

5. Apakah Ibu tahu akibat buang air besar di sembarang tempat ?

Akibat buang air besar sembarangan, banyak penyakir yang dibawa lalat. Lalat pergi ke makanan dan makanan harus ditutup rapat.

6. Kalau keperluan mandi dan cuci dimana ?

Mandi cuci disumur, sumur milik keluarga yang dipakai 3 rumah satu keluarga. Sumurnya sudah puluhan tahun. Kalau kemarau masih ada air. Tidak pernah surut. Menurut saya airnya bersih tidak kuning.

7. Kapan kira-kira Ibu berencana membuat jamban di rumah ?

Rencana, manusia hidup berencana, tapi ya ndak tahulah gimana. Keinginan ingin punya WC sendiri tapi kapa, tapi gimana lagi

8. Pendapatan yang Ibu dapat digunakan untuk apa saja ?

Pendapatan diutamakan untuk biaya makan sehari-hari, sekolah dan biaya sehari-hari. Habis panen banyak yang buat hajatan dan harus hadir karena mampir satu dusun masih saudara. Habis panen banyak hajatan bisa sampai 10, kalau kesana bawa uang, beras, gula dan makanan

9. Berapa kali Ibu mendapat pengarahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Dua kali dapat pengarahan itu. Kalau suami di jamaah tahlil. Ibu dapat pengarahan diposyandu dirumah kades.

10. Apa pendidikan terakhir Ibu?

Pendidikan terakhir SD

11. Apa kegiatan Ibu bersama warga sekitar tempat tinggal Ibu?

Di desa ini kegiatan saya cuma keposyandu tiap 2 bulan sekali. Pergi ke jamaah yasin setiap senin. Jamaah yasin pindah-pindah, pernah dirumah saya

12. Bagaimana perasaan Ibu masih buang air besar di sungai?

Sekarang masih buang air besar di sungai perasaan dengan warga ya biasa aja.

13. Apa yang Ibu rasakan hubungan dengan warga disini ?

Ya sama seperti saudara sendiri. Kalau ada apa-apa, kalau ada pekerjaan saling gotong royong. Saling membantu. Contoh kalau apabila ada warga yang membangun rumah, warga bersama-sama membantu seperti membangun fondasi rumah. Kalau warga yang punya pekerjaan di luar

(lanjutan)

kota tidak bisa membantu. Kalau ada pekerjaan hajatan, saling membantu sama-sama.

14. Kenapa warga mau membantu seperti itu?

Hidup bertetangga harus saling tolong menolong. Seandainya tidak membantu juga tidak apa-apa. Itu tergantung keiklasan hati dan tidak saling dendam.

15. Kenapa warga belum dapat bergotong royong waktu membangun jamban ?

Paling kalau membantu hanya tenaga saja. Warga yang mau membangun jamban harus siapkan materialnya dulu. Kalau tidak ada materialnya gimana warga bisa bantu. Warga membantu dengan tenaganya membangun rumah warga.

16. Bagaimana gotong royong warga untuk membangun desa ?

Contoh membangun mesjid, tidak banyak yang bantu. Warga berpikir kerja itu tidak ada uangnya. Yang mau membantu paling orangnya sedikit tidak sampai sepuluh orang dan membantunya tidak seterusnya.

17. Kenapa warga bisa seperti itu ?

Warga, yang dicari cuma uang..uang dan membantu cuma satu dua hari kalau untuk seterusnya tidak bisa. Waktu membangun mesjid, tiap Hari minggu harus ada warga yang kerja bakti. Yang datang cuma sedikit. Paling banyak sepuluh orang. Warga lainnya di rumah tidak mau kerja bakti. Alasannya katanya minggu kemaren sudah berangkat gotong royong. Ada juga alasan tidak kerja bakti karena ada pekerjaan di sawah.

18. Kenapa warga mau membantu ketika ada hajatan, membangun rumah dan kematian ?

Istilahnya biar gantian, besok-besok kalau saya punya hajatan biar warga bisa membantu saya. Prinsipnya disini warga satu dengan yang lain ya saudara. Saudara kalau ada perlu apa-apa sehingga bisa meminta bantuan dan saling membantu.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN PLOSOREJO
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Sugiono warga RT 03 / RW 04)**

1. Apabila Bapak ingin buang air besar kemapa perginya?

Dulu BAB disungai sekarang sudah punya kloset sejak 1 tahun lalu. WC Kloset dibuatkan oleh anak saya.

2. Kenapa Bapak membuat jamban kloset di rumah?

Alasan membuat WC karena istri Bapak ini pernah mengalami jatuh dan anaknya kasihan sama ibunya, maka dibuatkan WC.

3. Apa pernah mendengar atau mendapat pengarahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?

Belum pernah mendapat pengarahan agar tidak buang air besar sembarangan. Kalau ketemu sehari-hari dikasih tahu RT jangan buang air besar sembarangan. Saya dengar dari saudara pengarahan kepada warga agar jangan buang air besar sembarangan dari Ibu bidan.

4. Apa kegiatan Bapak bersama warga sekitar tempat tinggal Bapak?

Saya tidak ikut hadir di jamaah tahlil, dulu pernah ikut, sekarang tidak. Sering ketemu dengan pak Kristiandoko, tapi kasih tahu saya soal pengarahan agar tidak buang air besar sembarangan belum. Ketika pak Kristiandoko ke jamaah tahlil saya tidak hadir. Ikut gotong rotong bantu orang punya hajatan

5. Apakah masih sempat buang air besar di sungai?

Buang air besar di sungai jadi malu karena ada pengarahan. Setelah punya jamban saya belum pernah BAB disungai

6. Berapa lama Bapak membangun jamban kloset ?

Kalau orang miskin lama bisa bikin WC

7. Bagaimana air kebutuhan jamban kloset Bapak didapat ?

Air tidak sulit dan sudah cukup walaupun musim kemarau

8. Siapa saja yang memakai jamban kloset milik Bapak?

Yang pake jamban Keluarga saya.

(lanjutan)

9. Menurut Bapak akibat buang air besar di sembarang tempat?

Mengotori lingkungan. Warga bisa marah, saya juga ngak enak perasaan. Ikut gotong rotong bantu orang punya jamban

10. Apa pendidikan terakhir Bapak?

Pendidikan SD belum lulus kelas 2

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN MLANGI
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Ngatimah warga RT 03 RW 03)**

1. Apakah Ibu tahu ada arahan agar warga tidak buang air besar di sembarang tempat?

Tahu, disuruh buat WC. Tahu itu dari 2011

2. Kemana Ibu dan keluarga bila ingin buang air besar?

Dulu buang air besar di kakus di belakang diatas empang. Sekarang buat WC di rumah.

3. Siapa yang mengarahkan Ibu buat jamban?

Disuruh oleh pak Muslikin buat WC dirumah. Modalnya berapa? 1 juta lebih

4. Apa pekerjaan kepala rumah tangga?

Yang bekerja suami, kuli bangunan di jakarta

5. Kapan Ibu sudah membuat jamban?

Kira-kira Desember 2011 bikin WC, suami pulang 2 sampai 3 bulan sekali.

6. Kenapa Ibu mau membuat jamban ?

Biar enak, baunya tidak keluar rumah

7. Sumber air untuk jamban kloset Ibu darimana?

Sumber air dari sumur dekat rumah

8. Bagaimana Ibu membangun jamban kloset?

Yang bikin WC saudara diberi upah

(lanjutan)

9. Apa manfaat jamban kloset Ibu?

Ya enak aja

10. Siapa yang menggunakan jamban kloset milik Ibu?

Yang pakai WC keluarga dirumah dan saudara famili yang menumpang WC. WC dipakai saudara tidak merasa terganggu.

11. Apa kegiatan Ibu bersama warga tetangga Ibu?

Tidak ada kegiatan bersama dengan warga. Pertemuan di posyandu

12. Dari mana Ibu mengetahui arahan agar warga tidak buang air besar di sembarang tempat?

Dengar pengarahan jangan BABS dari pak Muslikin didepan rumah

13. Bagaimana perasaan setelah diberi tahu jangan buang air besar di sembarang tempat?

Pikirannya mau bikin tapi uangnya belum kumpul.

14. Bagaimana Ibu membangun jamban kloset Ibu?

Membuat WC mencicil, pertama buat klontong, kloset, bikinnya sebentar, setahun mencicil sampai selesai. Mau bikin WC pikirannya sudah lama. WC Kloset dulu dengan dipagari dengan bilik sederhana.

15. Bagaimana dengan kakus yang dulu ?

Kakus sekarang sudah dibongkar, kakus disekolan dekat sawah

16. Ketika banjir lalu bagaimana dengan jamban kloset Ibu?

Waktu banjir, WC masih bisa dipakai, klosetnya agak tinggi

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN MLANGI
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Bapak Suardi)**

1. Apakah Bapak pernah mendengar arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat ?

Pernah, sudah lama tahun lalu. Mendengar dari Pak Muslikin, saya bisa hadir di pertemuan karena sedang di rumah. Lagi istirahat

(lanjutan)

2. Apa pesan yang disampaikan dalam pertemuan itu?

Yang didengar supaya bikin WC

3. Mengapa diminta membuat WC ?

Supaya bersih, supaya buang air besar tidak susah. Saya tidak bisa buat WC karena tidak punya modal. Buang air besar numpang di WC keponakan.

4. Bagaimana perasaan Bapak tidak diperbolehkan lagi buang air besar di sembarang tempat ?

Saya takut dimarahin oleh Bapak perangkat. Sampai sekarang belum bisa buat WC. Perangkat desa dianggap sebagai Bapak, ada pemahaman seperti itu di desa ini, jadi manut.

5. Apa pekerjaan Bapak ?

Pekerjaan sebagai kuli bangunan

6. Pendapatan uang yang Bapak terima ditujukan untuk apa saja ?

Pendapatan buat beli beras

7. Bagaimana kesan Bapak terhadap famili Bapak yang memberi izin menumpang jamban ?

Keponakan saya baik saja sama saya numpang WC. Saya tidak pernah lagi buang air besar di selokan

8. Apakah ada keinginan untuk berusaha membuat jamban?

Belum bisa juga untuk mencicil buat WC. Keluarga masih punya tanggungan anak sekolah.

9. Ketika bencana bandir, lalu kemana Bapak buang air besar ?

Kalau banjir, tetap di WC keponakan, tidak pergi buang besar sembarangan

(lanjutan)

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN MLANGI
DESA TAJEMSARI KECAMATAN TEGOWANU
(Ibu Sri Haryanti warga RT 02 RW 03)**

- 1. Apakah Ibu pernah mendengar arahan agar warga tidak lagi buang air besar di sembarang tempat?**

Saya pernah mendengar arahan agar tidak buang air besar sembarangan. Yang saya dengar agar tidak buang air Sebelum arahan tidak ada rencana buat WC.

- 2. Sebelum Ibu punya jamban kloset di rumah, kemana Ibu dan keluarga buang air besar di sembarang tempat ?**

Dulunya buang air besar di selokan dipinggir-pinggir rumah, dekat rumah, diatas selokan bikin kakus. Sekarang sudah berhenti sudah punya WC kloset.

- 3. Kapan Ibu mendengar arahan itu ?**

Tahun 2010 dengar arahan itu

- 4. Dimana Ibu mendengar arahan itu ?**

Di pertemuan

- 5. Berapa kali Ibu mendengar arahan itu ?**

Sekali saja dengar disitu

- 6. Kapan Ibu mulai membuat jamban ?**

Lama setelah mendengar arahan karena dananya tidak ada. Buat WC menciil lama ada setengah tahun. WC, sama kamar mandi, 3 juta belum jadi. Sebenarnya dulu ingin beli Cuma belum punya uang

- 7. Apa pekerjaan kepala rumah tangga ?**

Suami kerja bangunan di Jakarta. Pulangnya lama 1- 2 bulan sekali

- 8. Darimana Ibu mendapat air untuk jamban kloset milik Ibu?**

Sumber air dari sumur, dekat rumah. Air di angkut dari sumur

- 9. Bagaimana perasaan Ibu diminta agar tidak buang air besar di sembarang tempat?**

Perasaan saya tidak enak dikasih tahu jangan buang air besar di sembarang tempat

(lanjutan)

10. Kenapa Ibu ingin membangun jamban kloset ?

Ya ingin punya sendiri

11. Apa manfaat Jamban kloset milik Ibu ?

(tidak bisa mengungkapkan)

12. Siapa saja yang menggunakan jamban kloset milik Ibu ?

Yang menggunakan WC tersebut sekeluarga di rumah

13. Ketika Ibu masih menggunakan kasus pada waktu lalu, Apakah tidak mengganggu orang lain ?

Kotorannya mengganggu tetangga. Kotoran mengapung di air tergenang, kotoran lama mengapung, kalau ikannya banyak bisa hilang. Selokan dekat rumah Selokan dekat rumah tetangga juga dekat dengan selokan, tetangga juga buang air besar sembarangan diselokan sekarang sudah berubah ke WC. Kotorannya mengganggu baunya terasa. Tetangga tidak pernah merasa terganggu karena merasa sama – sama mengerti.

14. Apakah kegiatan-kegiatan Ibu bersama warga di sekitar ?

Tidak ada kegiatan bersama dengan warga yang lain. Paling ngobrol sama saudara. Tetangga dekat masih saudara, kanan-kiri rumah.

15. Ketika bencana banjir datang, kemana Ibu pergi buang air besar ?

Walaupun banjir, WC masih bisa digunakan, WC dibuat tinggi

16. Apa pendidikan terakhir Ibu ?

Pendidikan terakhir SD

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN BRATI
(Bapak Mustafirin)**

1. Bagaimana camat menindaklanjuti komitmen yang sudah ditandatangani camat untuk kecamatan yang dipimpinnya terbebas dari praktek buang air besar di sembarang tempat ?

Diadakan sosialisasi kepada kepala desa tentang program STBM. Kemudian kepala desa diajak untuk berkomitmen agar desa terbebas dari praktek buang air besar sembarangan. Waktu diajak awalnya tidak mau untuk berkomitmen karena tidak ada bantuan untuk membangun jamban.

(lanjutan)

Kemudian camat menjelaskan bahwa ini program pemerintah harus didukung. Lalu akhir kepala desa mau menandatangani komitmen.

2. Apakah program STBM ini diwajibkan atau mengharuskan semua desa menjalankannya?

Dari pemerintah kabupaten sebetulnya tidak begitu mengharuskan atau wajib semua desa menjalankan program STBM.

3. Sampai kapan target Kecamatan Brati terbebas dari buang air besar di sembarang tempat ?

Juni 2012

4. Sejauhmana keinginan pemerintah kecamatan terhadap kepala desa agar mau membebaskan desa dari praktek buang air besar di sembarang tempat?

Pemerintah kecamatan sangat mendorong agar kepala desa berkewajiban berkomitmen untuk program STBM.

5. Dukungan apa yang diberikan camat kepada program STBM?

Camat menganjurkan kepada perangkat desa pada kesempatan pertemuan, Camat menyampaikan mendorong desa-desa agar ODF.

6. Apakah ada dukungan finansial yang disiapkan oleh pemerintah kecamatan ?

Tidak ada anggaran finansial. Anggaran yang diterima kecamatan adalah anggaran sesuai tupoksi.

7. Apa tugas dari tim STBM kecamatan ?

Masing-masing anggota tim STBM bekerja sesuai tupoksinya. Pemerintah daerah harus punya petugas dibawah untuk menjalankan program STBM. Tugas tim STBM memotivasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

8. Bagaimana dukungan finansial untuk tim STBM kecamatan ?

Untuk tugas-tugas lain datang ke desa tidak ada transport. Anggaran dari kecamatan ke desa sebenarnya anggaran cukup untuk 2 atau 3 kali kunjung. Rapat koordinasi fasilitator desa lalu swadaya, terakhir 19 April, meminta laporan perkembangannya dan persiapan untuk ODF, tidak ada transport disampaikan. Rapat koordinasi lalu mendata ulang, yang belum akses, mengakses jamban ke saudara yang berdekatan. Pada waktu datang ke desa sekalian ditanya untuk melihat perkembangan kemajuan program STBM.

(lanjutan)

9. Apakah tim STBM kecamatan mendapat pembekalan untuk menjalankan tugas ?

Dapat pembekalan untuk bekerja sebagai tim STBM. Tim STBM kepada ke perangkat desa agar menyuruharganya untuk membuat jamban.

10. Bagaimana koordinasi dari tim STBM kecamatan kepada pemerintah desa ?

Koordinasi tidak ada kesulitan dengan perangkat desa, soal dilaksanakan percaya saja. Kuncinya kepala desa. Karena perangkat manut kepada kades

11. Apa yang menyebabkan Desa Kronggen belum menjadi desa ODF ?

Misalnya Dusun Sinawah, tidak bisa ODF karena ada sungai. Ada rumah-rumah yang belakangnya langsung ke sungai sehingga membuat orang supaya praktis langsung buang air besar ke sungai. Rumah mereka sudah mepet dengan sungai. Kemudian tanah di dusun berbatu dan lahan sempit sehingga sulit membangun jamban. Masalah lain karena juga kepala dusun kurang mendukung. Ada kepala dusun kurang berwibawa sehingga tidak mampu mendorong warga untuk program ini. Kemudian kalau kepala dusun tidak komitmen kurang mendukung program STBM. Tidak semua kepala dusun komitmen. Kepala dusun yang mendukung misalnya kadus Streyan, Karangasem dan Mayang.

12. Siapa yang Bapak hubungi agar program STBM berhasil ?

Fasilitator desa, minta data kemajuan program kepada fasilitator desa. Fasilitator desa yang menangani program STBM di desa. Kalau kepala desa sebagai komando. Memang lebih banyak kepada kepala desa.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN SANITARIAN PUSKESMAS BRATI
(Ibu Dwiastuti)**

1. Gambaran tentang tim STBM kecamatan ini seperti apa menurut Ibu?

Dulu diawal sekali program, kami, tim STBM Kecamatan pernah diberi pembekalan. Tim STBM dikumpulkan di Bappeda, perencanaan, kesepakatan dan hambatan dan keluh kasus. Dana transport untuk STBM tidak ada. Dana transport untuk kegiatan sehari-hari sesuai dengan tugas saya dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) sesuai dengan tupoksi saya. Minim dukungan dana terkait dengan STBM. Untuk pemicuan awalnya tim STBM kecamatan dapat dukungan transport. Pak camat maunya mendukung ODF. Camat memberikan motivasi. Tim STBM kecamatan melakukan pemicuan, monitoring, tiap bulan ada rakor membahas permasalahan, hambatan, perkembangan perilaku masyarakat

(lanjutan)

dalam BABS. Dari camat tidak ada dukungan dana. Dari Bappeda pernah ada uang transport, ada rapelan uang transport sekitar 2 atau 3 kali. Transport BOK untuk menjalankan tugas sehari-hari seperti ke posyandu STBM ikut numpang kegiatan. Puskesmas dan kecamatan tidak menyediakan anggaran. Belum pernah menetapkan rapat koordinasi seluruh fasilitator desa sampai kapan karena juga kesulitan dana. Atasan saya biasa saja dan tidak ada tindakan administratif tidak ada. Puskesmas memberi mandat kepada bidan desa ikut mendukung STBM arahan dari Kepala puskesmas. Tidak ada bentuk koordinasi baru yang dibangun untuk membuat saya melakukan kerja lebih baik. Bidan desa tugasnya banyak, paling tidak bidan desa mengetahui perkembangan STBM. Tidak ada dukungan kemudahan bekerja bagi tim STBM dari Camat.

2. Apakah untuk fasilitator desa disediakan anggaran untuk menjalankan pekerjaan mereka?

Fasilitator desa tidak disediakan anggaran

3. Bagaimana sosialisasi dan pemicuan diselenggarakan ?

Saya sengaja mengundang bapak-bapak, ibu-ibu di dusun-dusun. Yang hadir paling cuma 50%. Kalau kehadiran Bapak-bapak pada pertemuan di malam hari. Acara malam hari juga sengaja diundang. Yang hadir juga kira-kira 50%. Pertemuan sosialisasi di balai desa setelah sosialisasi membuat kesepakatan masing-masing dusun untuk menjadwalkan pemicuan.

4. Persiapan apa yang dilakukan ?

Menentukan waktu, koordinasi dengan kepala dusun, saya menyesuaikan dengan waktu kesediaan masyarakat untuk hadir. Pemicuan di siang hari ada ketika warga sedang istirahat bekerja dari sawah. Menyiapkan peralatan dan bahan-bahan pemicuan, ada macam-macam metode dengan transek, bina suasana, pemetaan. Bina suasana agar warga tidak tegang. Pada waktu kegiatan transek ada warga yang tidak ikut karena malu. Respon warga pada waktu pemicuan ada rasa malu juga, ada yang merasa tidak enak hati dan geluh

5. Apakah ada pertanyaan dari masyarakat setelah praktek pemicuan ?

Warga bilang tidak ada dana membuat jamban dan warga menanyakan apakah ada bantuan. Saya menjelaskan tidak ada bantuan. Setelah pemicuan ada yang sadar dan ada juga yang tidak sadar, ada yang memanas warga agar tidak buat jamban dan bilang lahan rumahnya sudah sempit. Warga yang sulit berubah terutama yang dekat dengan sungai, alasannya tidak ada dana dan juga merasa sudah terbiasa buang air besar sembarangan di sungai dan tidak mau berubah

(lanjutan)

6. Setelah pemicuan apa yang terjadi ?

Tidak terjadi saling membantu warga antara warga yang mampu tidak menolong warga yang tidak mampu. Warga yang punya jamban sungkan mengingatkan tetangganya yang buang air besar sembarangan. Karena warga yang punya jamban merasa tidak membantu apa-apa kepada warga yang belum punya jamban. Warga yang punya jamban tidak berani. Saya menanyakan kesepakatan siapa yang mau buat jamban, kemudian kesepakatan itu ditempel di rumah ketua RT atau kepala dusun.

7. Siapa yang melakukan monitoring kemajuan program STBM ?

Yang diberi tugas monitoring adalah Pak RT, kepala dusun, dan FD. Pengamatan saya kepala dusun melakukan monitoring dan FD-nya juga bertanggung jawab. Saya juga melakukan monitoring langsung ke warga dan saya menanyakan ke kepala dusun, FD merekap laporan kepala desa.

8. Waktu ibu berkunjung ke desa dalam rangka monitoring ke desa dan bertemu kepala dusun, apakah memang kepala dusun terlibat monitoring juga ?

FD merekap laporan dari kepala dusun. Waktu saya monitoring di dusun ngawen ketemu ibu-ibu bilang lebih enak buang air besar di kali langsung hilang dan juga bisa sambil menjaga keramba udang. Masyarakat sulit untuk berubah karena kotoran manusia untuk makan ikan (di dusun Sinawah) di empang. Ini juga disebabkan karena pendidikannya kurang. Di dusun Sinawah masyarakatnya tidak mau semua membuat jamban. Pak RT-nya negatif tidak ada respon perubahan. Saya kebetulan monitoring Dusun Sinawah, yang membuat kesepakatan ada yang buat ada yang belum membuat jamban karena masalah dana.

9. Menurut Ibu, kenapa mereka mau jadi FD?

Mereka mau bekerja. Karena non subsidi fasilitator desa bekerja tanpa subsidi dana dan pada suatu waktu bisa mendahulukan kepentingan pribadi untuk dikerjakan dan meninggalkan tugas sebagai fasilitator desa, ya kadang mereka bekerja dan kadang juga mereka tidak bekerja. FD-nya, Pak Gudiyono, aktif mendorong warga di dusunnya membuat jamban. Sempat di dusunnya ODF namun karena datang banjir warga kembali ke sungai untuk buang air besar.

10. Menurut Ibu, apa peran dari kepala dusun?

Kepala dusun melalui istrinya mendatangi warga, cuma tidak bisa memaksa warganya

(lanjutan)

11. Menurut Ibu, bagaimana kemajuan program STBM dari hasil monitoring yang dilakukan?

Diantara warga yang bertahan akan membuat jamban bila ada bantuan akhirnya ada yang membuat jamban dan ada juga yang tidak. Diantara warga yang tidak membuat jamban ada yang tidak membuat jamban karena kepala keluarga sedang merantau, ada yang merasa enak buang air besar di kali, ada yang karena masalah dana, Di dusun Sinayah ada warga yang merasa lebih enak diatas kolam ikan sehingga kotoran langsung di makan ikan dengan membuat jamban diatas empang.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA DESA KRONGGEN
(Bapak Kliwon Utama)**

1. Bagaimana cerita Bapak, kepala desa se kecamatan berkomitmen mengatasi masalah praktek buang air besar di sembarang tempat ?

Penandatanganan komitmen memang terjadi agar desa-desa seluruh kecamatan bisa ODF.

2. Bisa diceritakan apa saja prosesnya sebelum penandatanganan komitmen tersebut ?

Penjelasan mengenai program STBM diberikan terlebih dahulu kepada kami, para kepala desa, agar kami berminat lalu ada waktu buat kami untuk berpikir atau mendiskusikan sebelum menandatangani surat komitmen..dan kami menyetujui kepeminatan itu dan menandatangani..memang ikhlas menandatangani komitmen itu

3. Menurut Bapak, program STBM berasal dari siapa ?

Program STBM merupakan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

4. Kenapa Bapak berminat juga untuk berkomitmen mengatasi masalah praktek buang air besar di sembarang tempat ?

Zaman sudah maju seperti sekarang, ya masih ada yang buang air besar di kali, di kolam, seharusnya sudah tidak ada lagi

5. Apa target dari program STBM ini ?

STBM ini program dari pemda Grobogan yang targetnya 2012 harus bebas dari kebiasaan BABS.

(lanjutan)

6. Apa yang Bapak tangkap dari pertemuan sosialisasi program STBM?

Perintah yang disampaikan agar disampaikan kepada warga sedesa kronggen.

7. Apa yang muncul dalam diskusi ketika sosialisasi program STBM di balai desa ?

Setelah saya informasikan kepada warga muncul pertanyaan klasik mau dapat bantuan apa. Padahal program itu pemicuan hanya memberi semangat, istilahnya pencerahan agar warga mempunyai jamban.

8. Pesan apa dari pertemuan sosialisasi program STBM di tingkat kecamatan ?

Desa itu akan membentuk tim, istilahnya fasilitator STBM tersebut. Terdiri dari dua fasilitator yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 2 orang tersebut bertugas melakukan pemicuan. Kerjanya itupun tidak cuma 2 orang dari desa saja, tapi tim dari kabupaten pun ikut gabung mengarahkan pemicuan di wilayah kami. Di desa sosialisasi hanya saya beserta perangkat, tim itu langsung terjun ke wilayah desa kami

9. Apa pandangan Bapak tentang program STBM ?

Pandangan saya pribadi, pemicuan adalah pencerahan yang harus tetap dilaksanakan secara terus menerus secara rutin dan tidak bosan-bosan warga harus diberi pencerahan selain kita harus bersabar dalam arti memberi pencerahan kepada warga kita juga harus maklum kalau warga sudah mempunyai kemampuan finansial, ekonomi, tentunya dengan sendirinya akan membangun yang namanya sarana sanitasi tersebut, tentunya warga juga mempunyai keinginan kehidupan yang layak salah satunya memiliki sarana sanitasi tersebut. Namun karena keterbatasan dan kesibukan akhirnya dinomor duakan.

10. Apa kebijakan pemerintah desa terhadap program STBM ini ?

Kebijakannya itu tidak hentinya memberi support kepada perangkat pemerintah desa, kadang kita suka tanyakan pada rapat dinas maupun rapat koordinasi perkembangan. Memberi bantuan materi atau lainnya belum.

11. Bagaimana penyelenggaraan kegiatan sosialisasi program STBM di tingkat kecamatan ?

Sosialisasi di kecamatan dilakukan pada saat jam kerja kecamatan.

(lanjutan)

12. Sudah sejauhmana kemajuan yang didapat dari melaksanakan program STBM ?

Desa ini belum ODF dan pemerintah desa yang melanjutkan saja. Pemicuan sudah baik ditata sedemikian rupa menarik untuk warganya pada saat pemicuan tetapi saat pelaksanaan, target yang mengalami keterlambatan paling hanya beberapa orang yang melaksanakan langsung buat tetapi ada juga yang sekedar hadir dipemicuan tetapi pelaksanaan dan responnya seperti mau dapat bantuan apa , saya hadir sendiri didusun sembukan

13. Apa program pembangunan desa yang berhasil dikerjakan dengan partisipasi masyarakat ?

Pembangunan jalan Rabat beton. Warga dikasih stimulan antusias sekali kalau ada hubungannya dengan infrastruktur jalan, warga antusias sekali. Yang disumbangkan warga tidak hanya tenaga juga materi seperti bahan material.

14. Kenapa pada program STBM swadaya dan partisipasi warga tidak terjadi ?

Analisa pribadi saya kenapa warga kurang antusias untuk STBM, tingkat pola pikir masyarakat belum kearah kesehaan tersebut diabaikan dan dinomor duakan, lingkungan dan pekarangan yang masih luas kalau dibangun rabat beton disitu ada faktor kebersamaan, kalau STBM jamban sifatnya agak pribadi. Tingkat pendidikan warga, rata-rata 40 tahun kebawah SMP-SMA, kalau sudah diatas 40 tahun SMP-SD

15. Bagaimana Prioritas pembangunan desa ditentukan?

Ada istilahnya RPJMDes itu diawali dengan musyawarah Antar warga tingkat RT kemudian tingkat RW / dusun setelah itu dibawa ketiingkat desa dengan planning tersebut dituangkan dalam RPJMDes. Disamping itu setelah dirapatkan didesa ada skala prioritas itu diurutkan dari yang teratas. Dari keseluruhan target Rabat beton mungkin kurang 2 atau 3 dusun.

16. Bagaimana pemicuan dapat dilaksanakan?

Fasilitator desa ini yang berkoordinasi dengan perangkat desa yaitu kepala dusun untuk melaksanakan pemicuan untuk melaksanakan program lain yang dibuat dengan STBM tersebut. Fasilitator desa melakukan pemicuan dia dibantu oleh perangkat desa yang ada.

(lanjutan)

17. Apa hambatan dalam pelaksanaan program STBM ini?

Hambatan dalam pelaksanaan STBM ada diwarga terutama karena kesibukan, kedua karena kurangnya kesadaran, pola pikir, pola hidup yang mungkin belum kearah sana, kurangnya faktor ekonomi.

18. Bagaimana kebijakan pelibatan masyarakat?

Pembangunan diwilayah dusun masing-masing, partisipasi masyarakat pasti. Partisipasi masyarakat dalam hal menentukan RJPMDes, membuat rangking atau urut dari RPJMDes, mana-mana yang skala prioritas itu juga dengan partisipasi masyarakat. STBM belum masuk dalam diskusi-diskusi perencanaan desa, karena pola pikir yang belum mengarah kesitu. Pendapatan yang diterima oleh keluarga lebih penting untuk dikonsumsi. Pekerjaan masyarakat disini supaya dapat makan. Tradisi warga disini kalau mengadakan hajatan entah khitanan atau menikahkan anak pasti membenahi rumah salah satunya membuat jamban ini tradisi di desa.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN SEKRETARIS DESA KRONGGEN
(Bapak Hardijono)**

1. Waktu membuat RPJM Desa sejauhmana mempertimbangkan program STBM ?

Waktu pembuatan RPJM Desa ini informasi STBM sudah masuk ke desa. Maka disini ada usulan membuat jamban untuk menindaklanjuti STBM itu. Dananya diharapkan dari kabupaten.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN FASILITATOR DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Gudiyono)**

1. Bagaimana Bapak bisa terpilih menjadi fasilitator desa ?

Pertama kali kita ditunjuk dari desa, mau tidak mau kita ditunjuk dan tidak tahu STBM itu apa, belum tahu apa-apa ketika ditunjuk. Pada waktu pelatihan, baru tahu. Ditunjuk oleh pemerintah desa secara tertulis. Tidak ada kesempatan untuk berdiskusi, harus terima.

2. Pengamatan Bapak di Desa Kronggen sebelum ada program STBM?

Warga BAB disungai, sungai bersih karena kotoran terbawa air dan lingkungan dusun ini bersih tidak ada kotoran manusia.

3. Apa tugas Bapak sebagai fasilitator desa ?

(lanjutan)

Yang paling pokok adalah menyadarkan masyarakat yang dulunya tidak tahu, dikasih tahu, jadi tidak boleh menggurui, dikasih pengertian kalau BABS efeknya terutama bagi lingkungan, banyak sekali penularan penyakit.

4. Apakah pelatihan yang Bapak terima sudah cukup membekali Bapak sebagai fasilitator desa ?

Pelatihan sudah cukup membekali saya menjadi fasilitator desa.

5. Bagaimana gambaran proses pemicuan yang terjadi ?

Waktunya pemicuan masyarakat ada yang acuh tidak acuh, ada yang proaktif, ada yang membantu kita, saya kerja sama dengan fasilitator kecamatan, Ibu Dwiastuti, Bapak Mustafirin, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, sekretaris camat, dan UPTD pendidikan. Kronggen belum ODF terutama Dusun Sinawah dan Permas, warganya masih primitif, susah, masyarakat tidak mau tahu. Pemicuan di Dusun sembukan, Satreyan, Karangaasem, Kronggen, Sinawah paling sering. Penerimaannya susah. Pemicuan sampai tiga kali. Pada waktu pemicuan yang hadir lebih banyak yang perempuan. Pilih waktu pemicuan koordinasi dengan kepala dusun, biasanya yang menentukan adalah kepala dusun. Pemicuan ada yang menumpang diacara warga, ada yang diundang warga. Mengundang mereka hadir koordinasi dengan ketua RT dan kepala dusun. Pemicuan dengan mengundang dilaksanakan siang. Pemicuan dilakukan setelah mereka pulang istirahat dari sawah. Yang diundang adalah Bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah diundang ada yang datang dan ada yang tidak. Yang datang kira-kira 50% yang hadir, peran kepala dusun penting ketika hadir pemicuan. Perempuan yang banyak datang karena banyak bapak-bapak yang kerja diluar kota, ada yang belum pulang dari sawah, ada juga yang malas. Ada juga yang datang, selang beberapa menit pulang. Yang menentukan pemicuan ke dusun ini, kedusun yang sana itu adalah fasilitator desa koordinasi dengan Ibu Dwiastuti lalu mereka bersama pergi kedusun tersebut. Waktu pemicuan setelah sepakat waktu antara fasilitator desa, warga dan sanitarian. Kalau sanitarian tidak bisa hadir, kita tunda dulu. Ngumpul undang warga untuk bisa datang tidak mudah. Warga tidak berani janji membuat jamban 1, 2 bulan, rata-rata 6 bulan sampai dengan 1 tahun, itu buat pernyataan. Ada yang langsung. Masyarakat petani disini menunggu punya uang, menunggu habis panen

6. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai fasilitator desa?

Saya merasa sebagai fasilitator desa kerja sendiri, dari pihak desa kurang mendukung secara kemasyarakatan. Aparat pemerintah desa kami undang pas pemicuan, tapi tidak ada yang datang. Padahal itu penting, pengaruhnya sangat penting. Yang sering datang malah sanitarian, Ibu Dwiastuti pemicuan datang, pak Mustarifin datang pemicuan. Penting pemerintah desa datang, efek warga tahu bahwa ini program pemerintah

(lanjutan)

juga. Efeknya kedepan juga masyarakat itu diarahkan untuk sehat, pengeluaran pemerintah daerah untuk jamkesmas juga menurun, masyarakat yang tidak tahu, susah. Masyarakat yang proaktif ikut membantu pelaksanaan pemucuan, menyiapkan peralatan, ada warga yang mendatangi warga suruh kumpul. Yang proaktif yang sudah mempunyai jamban. Kalau yang belum punya jamban punya masalah ekonomi yang kurang.

7. Mengapa Bapak sampai hari ini masih bersedia menjadi fasilitator desa?

Saya punya ikatan dengan desa sebelum desa kronggen 100% ODF, kita masih punya janji dengan desa, kalau belum ODF kita masih akan berjuang terus.

8. Pandangan Bapak tentang program STBM bagaimana?

Pemerintah Kabupaten berpatokan 2012 Kabupaten Grobogan bisa ODF, tapi saya tidak yakin kadang masyarakat masih terbelakang, mungkin karena pengaruh ekonomi kalau sama sekali tidak ada bantuan, pemucuan masalah jamban masyarakat kurang aktif, kurang proaktif, penambahan jamban banyak sekali ada yang sederhana, kalau ekonominya baik merasa mampu buat jamban buat jamban kalau yang belum jamban sederhana dulu. Jamban sederhana aslinya bermasalah terutama dengan bau. Modal jamban kloset Rp. 500.000,- sudah cukup, udah jamban kloset dengan septiktank. Ada warga yang jamban sederhana, ada yang menggunakan ada yang buang air besar sembarangan lagi, karena bau juga mengganggu tetangganya

9. Bagaimana reaksi warga ketika pemucuan ?

Reaksi warga ketika pemucuan, pertama kali masyarakat berbondong-bondong dulu, setelah mendengarkan kita, warga pulang satu persatu, karena harapan mereka kita datang membawa bantuan, setelah mereka tahu kita datang tidak bawa apa-apa mereka pergi satu satu. Yang masih tertinggal, secara sepakat satu dusun satu RT tidak tetapi mereka punya pemikiran sendiri bahwa harus punya jamban. Itu yang pada umumnya. Yang tersisa tidak menanyakan bantuan lagi. Kami mengajak bareng-bareng masyarakat mereka diberi pengertian betapa pentingnya jamban, itu yang paling pokok.

10. Apa manfaat bagi Bapak menjadi fasilitator desa?

Yang paling penting, kita tahu karakter masyarakat, saya sendiri sebagai masyarakat desa kronggen punya keinginan masyarakat desa kronggen pertama sehat dulu. Dengan adanya program STBM. Masyarakat bisa tahu betapa pentingnya jamban. Ketika saya sebagai kepala dusun, jarang bepergian kedusun lain, jadi kita tahu masyarakat sana kayak apa, karakternya budayanya sehari-harinya kayak apa. Kita sendiri jadi terkenal.

11. Setelah pemicuan sampai hari ini kemajuan program STBM seperti apa?

Setelah pemicuan sampai hari ini masih ada yang belum buat jamban karena dia sudah BABS dengan santainya, dengan masa bodohnya sampai sekarang belum memikirkan masalah jamban. Saya pernah dialog dengan yang belum buat jamban dengan alasan tidak punya duit, karena kesibukan kerja diluar kota. Warga yang bekerja di luar kota kurang kurang perhatian dengan masalah buang air besar sembarangan padahal sudah dikasih tahu, santai saja mereka. Dari kecil sampai sekarang sudah kebiasaan seperti itu. Mereka juga banyak yang janji membuat jamban tapi nyatanya sampai sekarang ada yang membuat jamban dan ada yang membuat jamban sederhana tetapi sudah tidak mereka gunakan lagi. Masyarakat diarahkan untuk kemajuan susah sekali

12. Apakah ada orang yang mendukung Bapak menjadi fasilitator desa atau menyemangati Bapak ?

Tidak ada

13. Rencana dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan sehubungan dengan STBM?

Untuk sementara pasif.

14. Kapan terakhir kali kegiatan program STBM ?

Terakhir kegiatan STBM Ini 6 bulan yang lalu

15. Apa kebijakan pemerintah desa terkait STBM ?

Dulu pernah ada rencana dari desa itu rencana membantu kloset cuma kita lihat anggaran dari desa masih minim, belum terlaksana, terealisasi. Masyarakat tanpa bantuan sekecil apapun agak susah. Kalau ada bantuan kloset masyarakat terpancing untuk lebih lagi. 6 bulan terakhir ini pasif karena kesibukan masing-masing

16. Bagaimana cara mengetahui masyarakat sudah membangun jamban atau belum?

Nanti ada laporan dari kepala dusun masing-masing ke desa.

17. Siapa yang diberi tugas untuk memonitoring yang sudah dan yang belum?

Kepala dusun berkoordinasi dengan ketua RT nanti yang keliling ketua RT. Didusun ada pertemuan, biasanya disitu dilaporkan dibarengkan dengan agenda yang lain. Perintah dari kepala desa secara lisan kepada kepala

(lanjutan)

dusun untuk melaporkan kemajuan pembuatan jamban. Setiap satu bulan sekali kumpul dikecamatan, meminta informasi mengenai perkembangan STBM. Fasilitator kecamatan menunggu berita kita.

18. Bagaimana tindakan tim STBM kecamatan ?

Fasilitator masing-masing sedang menunggu kunjungan dari tim STBM kecamatan terutama yang belum ODF. Masyarakat biar tahu bahwa program STBM bukan hanya dari desa saja, tapi benar-benar dari tingkat pusat dari tingkat pemda sendiri bahwa mereka menganjurkan itu. Tim STBM sempat orang saling koordinasi mengkover semua desa satu kecamatan. Jadi masing-masing tidak dibagi wilayah. Kalau tidak ada pemicuan mereka belum datang. Itu yang saya tunggu sendiri, masyarakat biar tahu bahwa program ini tidak main-main. Setiap pemicuan mereka selalu datang. Ibu Dwiastuti datang ke desa selain pemicuan juga ke posyandu, selain pemicuan ibu Dwiastuti tanya-tanya ke masyarakat. Sejauh mana perkembangan masyarakat yang buat jamban dan juga bertemu dengan saya.

19. Bagaimana tindakan dari pemerintah desa dalam program STBM?

Dari desa sendiri belum ada yang melakukan kontrol bareng-bareng dengan fasilitator desa. Seharusnya perangkat desa ikut juga bareng dengan kita survey kelapangan lihat kemajuan. Yang sudah membuat jamban lapokan ke pak RT. Pak RT tahu lingkungan satu RT dekat paling sekitar 50 KK dan ada kegiatan di wilayahnya, warga pasti ngomong ke Pak RT, saya sudah buat jamban. Program STBM ini kan program pemerintah STBM program pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

20. Apa program partisipasi masyarakat apa yang berhasil didesa ini?

Program PNPM Mandiri Desa, terutama dengan membangun jalan menjadikan masyarakat itu prokatif, mereka inginnya jalannya bagus, transportasi lancar kemana-mana tidak ada halangan terutama dengan yang ada hubungannya dengan pembangunan jalan, pembangunan masjid masyarakat mau berswadaya. Swadaya sebagian, swadaya termasuk tenaga dan dana. Itu seperti begitu ada bantuan dan perlu swadaya langsung respon. Seperti pembangunan jalan antar desa masyarakat berswadaya sampai 30 juta.

21. Kenapa masalah buang air besar sembarangan partisipasi masyarakat tidak seperti PNPM?

Itu karena urusan pribadi. Kalau jalan bisa dipandang orang, didepan rumah kita. Masyarakat mau berswadaya kalau pemerintah memberi bantuan

(lanjutan)

22. Bagaimana kesan Bapak selama menjadi fasilitator desa ?

Putus asa saya alami. Masyarakat diajak yang baik untuk membangun jamban susah sekali. Saya bisa tahu karakter masyarakat. Ada disini 3 rumah membuat 1 jamban bareng-bareng nanti penggunaan bareng-bareng membuat jamban sederhana. Baiknya pekerjaan ini harus jalan terus.

23. Siapa saja yang diundang pemician ?

Waktu pemician semua diundang

24. Ada tidak yang komentar kasih solusi, misalnya silahkan numpang jamban di rumah saya ?

Tidak ada

25. Apakah ada masalah ketika masyarakat bekerja mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat ?

Warga dusun sembukan, dia sudah membuat jamban, satu saat kena lumpur, sampai penuh (jamban sederhana), mereka harus membuat jamban lagi, kalau begitu terus masyarakat menjadi malas sehingga kembali BABS disungai. Dulu habis banjir tahun 2010, benar-benar semua sudah membuat jamban warga-warga ditepi sungai, mereka sudah membangun jamban lalu tertimbun lumpur karena banjir kembali BABS

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN FASILITATOR DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Saudari Jihan Putri)**

1. Bagaimana gambaran kegiatan-kegiatan di awal program STBM terjadi?

Ketika awal-awal pemician, Pak Mustafirin datang. Itu hadir di pemician di Dusun Sembukan ada dua kali, Dusun Sinawah ada 3 kali dan Dusun Permas ada satu kali.

2. Bagaimana anda bisa terpilih sebagai fasilitator desa ?

Dulunya Pak Mustafirin datang ke perangkat pemerintah desa menanyakan siapa yang bisa dipilih menjadi fasilitator desa lalu dari perangkat desa diusulkan katanya saya. Saya mendapat informasi terpilih menjadi fasilitator disampaikan oleh masih keluarga saya yang sebenarnya bukan perangkat desa dan disampaikan sehari sebelum pelatihan ke Purwodadi dan langsung besoknya saya diminta ikut pelatihan. Awalnya mikir-mikir dulu lalu diputuskan ikut saja dan mau tahu saja dulu. Waktu menjalani tugas itu ya senang-senang saja. Manfaatnya jadi lebih tahu kondisi masyarakat, tahu pola pikir masyarakat dan jadi tahu gimana menyikapinya.

(lanjutan)

3. Siapa yang lebih banyak mendukung Anda bekerja sebagai fasilitator desa ?

Yang lebih banyak mendukung Ibu Dwiastuti, Sanitarian puskesmas. Pak Mustafirin Cuma tanya perkembangan. Ibu Tuty mendukung, dia banyak menanyakan perkembangan, waktu pemicuan datang, tanya monitoring sudah dibuat belum. Kalau perangkat desa ya serba sulit dan masyarakat juga sulit. Perangkat pemerintah desa kurang menunjukkan perhatian, tidak ada dukungan dana transport. Kitanya harus datang ke perangkat desa untuk koordinasi, minta bantuan mereka.

4. Siapa yang memfasilitasi pemicuan ?

Yang lakukan pemicuan Pak Gudiyono, sanitarian, saya nggak berani karena kenal masyarakatnya susah.

5. Bagaimana kegiatan pemicuan ini direncanakan ?

Pemicuan sengaja mengundang warga. Pemicuan 6 kali yang numpang sekali, yang menumpang sekali jadinya banyak sosialisasi. Milih waktu koordinasi dengan Pak Kepala dusun. Milih waktu pemicuan jam 11 siang karena warga sudah pulang dari sawah. Yang belum punya jamban banyak yang hadir, mau hadir dikira akan dapat bantuan WC. Bilang ke kepala dusun mau pemicuan. Warga ikut pemicuan sampai akhir.

6. Bagaimana gambaran proses selama pemicuan ?

Ada keluar perkataan mengeluh, karena tidak ada bantuan. Sebelum pemicuan sudah dikasih tahu tidak ada bantuan, lalu ditanya pemicuan bisa dilanjutkan. Semua pemicuan warga dikonfirmasi dulu apa bisa dilanjutkan pemicuan. Ditanya warga setelah pemicuan siapa yang mau bangun jamban, kalau tidak mau ditanya apa alasannya. Solusinya ditanya masalah buang air besar sembarangan lalu kenapa buat jamban. Tidak punya lahan, tidak ada biaya, disungai lebih praktis, lebih banyak bilang tidak punya lahan. Menurut saya, cari-cari alasan saja. Tanahnya sebenarnya masih bisa buat jamban. Alasan sesungguhnya masalah kepraktisan, karena belakang rumah sudah sungai. Alasana sesungguhnya belum ada kesadaran. Di RT 02 Dusun Permas sudah punya jamban, tapi wc masih buang ke sungai. Di Dusun Sinawah ada buat jamban kalau dicek sudah buat tapi buang air besar masih ke sungai. Di RT 05 dusun Permas sudah punya WC kloset dirumah tapi buang air besar sembarangan di sungai karena dari kecil sudah kebiasaan. Tidak ada pemantauan dari RT / RW, perangkat desa untuk memantau warga yang buang air besar sembarangan. Dari perangkat desa vakum. Tidak ada yang komitmen sehingga masih ada yang buang air besar sembarangan. Komitmen tidak jaminan karena takut sama kepala dusun jadi dibuatlah komitmen. Di Dusun Permas warganya dengan kepala dusun tidak dianggap oleh warga.

(lanjutan)

7. Mengapa waktu program STBM, tidak terjadi swadaya seperti itu ?

Tidak muncul saja ide seperti memanfaatkan iuran RT atau infaq. Waktu pemicuan juga yang datang warga-warga yang belum punya jamban dan warga dari RT satu. Warga RT satu itu pendidikannya rendah dan pemilihan ketua RT digilir. Waktu itu ketika proses pemicuan berjalan sudah dimentahkan oleh warga-warga RT satu lalu semua menolak berkomitmen untuk membangun jamban.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN FD DESA KRONGGEN ISTRI KADUS
(Ibu Siti Rodiyah)**

1. Bagaimana ibu bisa dipilih menjadi fasilitator desa ?

Dipilih jadi fasilitator desa karena ditunjuk oleh Ibu kepala desa langsung. Waktu ditunjuk dulunya saya mikir-mikir dulu lalu suami saya izinkan yang sudah saya terima. Secara pribadi setuju aja. Selama saya jadi FD yang melakukan pemicuan adalah Ibu Santi dari pansimas dan Ibu Tuty dari Puskesmas Brati. Saya diundang oleh mereka untuk melihat mereka kerja melakukan pemicuan nanti disampaikan kepada warga agar warga tergerak hatinya karena masih ada warga yang belum punya jamban. Tugas saya mengarahkan ibu-ibu setelah pemicuan agar membuat jamban. Saya mengarahkan warga numpang pada acara arisan setiap tanggal 20. Setelah arisan saya mengarahkan ibu-ibu khusus di Dusun Karangasem. Ibu Tuty meminta agar saya mengarahkan ibu-ibu khusus di Dusun Karangasem. Saya pergi ke dusun lain kalau ada undangan

2. Bagaimana ibu mempersiapkan pertemuan dengan warga untuk pemicuan ?

Saya mempersiapkan untuk mengarahkan ibu-ibu dengan membuat catatan kecil. Isi catatan hanya menyuruh warga agar membuat jamban. Saya mengarahkan sebelum ada uang cukup bisa membuat jamban sementara yaitu jamban cemplung tertutup.

3. Setelah Ibu sampaikan pesan pemicuan selanjutnya apa yang terjadi ?

Beberapa bulan belum ada yang buat jamban padahal setiap pertemuan sudah saya ingatkan

4. Bagaimana warga menanggapi pesan pemicuan yang Ibu sampaikan ?

Warga jawabnya iya-ya saja kalau ada rejeki. Paling cuma satu orang setelah jarak satu bulan membuat wc, ternyata orang itu mau menyambut menantu masuk rumahnya. Warga disini buat jamban kalau ada menantu yang mau masuk. Warga tidak membuat jamban sederhana. Sebelum STBM warga banyak buang air besar sembarangan karena di desa ini banyak empang. Di empang buat jamban sampai sekarang masih banyak warga yang buang air besar di empang. Warga tidak mau buat jamban

(lanjutan)

ceplung karena bau dan ada belatung kalau buang air besar di kolam langsung bisa hilang di makan ikan sehingga warga merasa nyaman buang air besar di empang. Jamban ceplung pada waktu hujan tergenang air dan lingkungan jadi jorok. Pemicuan biasanya menumpang di acara yang biasa warga buat. Sanitarian datang ke acara arisan untuk pemicuan. Warga buat jamban kalau ada bantuan kalau tidak ada bantuan saya tidak membuat jamban. Warga menanyakan “ada bantuan ndak bu” yang diharapkan memang bantuan. Warga berpikir kalau ada program slalu ada bantuan. Warga ngomongnya kalau sudah panen mau buat jamban tapi belum buat jamban. Memang sebelumnya warga mengalami gagal panen jadi harus menutupi kerugian gagal panen

5. Kenapa kegiatan pemicuan harus menumpang acara lain ?

Kalau sengaja dibuat undangan untuk hadir kegiatan pemicuan jarang yang hadir cuma sedikit cuma beberapa orang yang datang 10 -15 orang padahal yang diundang seluruh kepala keluarga yang jumlahnya 180 kepala keluarga. Warga yang diharapkan datang termasuk warga yang punya jamban dan yang tidak punya jamban.

6. Apa yang Ibu jelaskan kepada warga di pertemuan pemicuan ?

Saya menjelaskan tentang kebersihan. Warga disini diajak bicara hanya jawabnya iya-iya saja supaya cepat selesai.

7. Seperti apa tingkat pendidikan warga yang mengikuti pemicuan ?

Tingkat pendidikan orang dewasa di dusun ini SMP kebawah. Peserta yang hadir kebanyakan orangtua yang pendidikannya SMP kebawah.

8. Kapan terakhir ada kegiatan program STBM ?

Sampai sekarang saya masih mengikuti kegiatan STBM. Terakhir saya mengikuti kegiatan STBM 2 bulan lalu sampai sekarang belum ada rencana lagi. Belum ada undangan lagi

9. Menurut Ibu ada berapa warga yang masih buang air besar sembarangan ?

Ada 12-16 KK di dusun saya yang buang air besar sembarangan sampai sekarang. Buat saya sebenarnya bermasalah orang buang air besar sembarangan tapi buat orang-orang tua tidak bermasalah karena dari dulu sudah begitu. Buang air besar sembarangan bermasalah karena lalat menempel di makanan kita.

10. Bagaimana warga yang sudah memiliki jamban di rumah menanggapi pesan pemicuan yang Ibu sampaikan?

Warga yang sudah punya jamban diam-diam saja dalam pertemuan

(lanjutan)

11. Bagaimana Sanitarian Puskesmas memfasilitasi pemucuan ?

Ibu Tuti memicu pakai gambar seperti warga diajak bermain. Tidak ada peta yang ditempel di tempat umum. Kegiatan pemucuan juga pakai kegiatan transek di dusun lain kepala dusun ikut warga ikut ramai-ramai kegiatan transek tapi tidak semua.

12. Setelah praktek pemucuan apa yang dilakukan Sanitarian ?

Didata yang belum punya tetapi data tidak ditempel di tempat umum

13. Apakah peta yang dibuat selalu diperbaharui datanya ?

Belum ada kegiatan memperbaharui peta di tempat umum

14. Bagaimana sikap warga setelah praktek pemucuan ?

Sikap warga biasa-biasa saja ketika diterangkan dampak negative buang air besar sembarangan

15. Apakah ada diskusi diantara peserta pemucuan setelah pesan pemucuan disampaikan ?

Sempat ada diskusi bagaimana mengatasi masalah buang air besar sembarangan secara bersama-sama tetapi tidak jalan. Tidak ada yang mengingatkan agar rencana yang dibuat bisa jalan

16. Apakah ada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ikut terlibat dalam program STBM ?

Tidak ada tokoh-tokoh agama yang terlibat dalam STBM

17. Apakah ada upaya lain agar warga tidak pergi buang air besar ke sungai?

Menurut saya supaya desa ini terbebas dari buang air besar sembarangan perlu kesadaran masing-masing warga dan harus ada bantuan untuk memancing warga. Jamban-jamban di empang masih terpasang

18. Kenapa Ibu bersedia menjadi fasilitator desa ?

Saya pengen aja jadi fasilitator desa. Ibu kepala desa pilih sebagai FD karena saya termuda, kata ibu kepala desa katanya saya itu ibu kepala dusun.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KETUA KADER POSYANDU
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Ibu Sulastini)**

1. Bagaimana pengalaman Ibu terlibat dalam program STBM ?

Terasa tugas berat untuk saya. Saya sempat ngomong, saya orang bodoh tidak bisa. Lalu mereka bilang tidak apa-apa termasuk latihan saya dibujuk lagi. Akhirnya saya mau, termasuk sukarelawan. Akhirnya saya mau karena siapa lagi, kan orang desa tidak mau itu. Jadi kader itu orang desa tidak mau. Karena tidak ada apa-apanya. Dari lubuk hati saya sendiri harus berbakti kepada masyarakat supaya masyarakat maju. Tugas saya, kalau ada pertemuan didusun-dusun kalau ada arisan-arisan itu ikut penyuluhan. Khusus ibu-ibu, masalah kebersihan, masalah kalau buang air besar sembarangan jangan disembarang tempat, kalau masyarakat sudah buat WC, ndak ada penyakit menular. Tidak ada bantuan untuk pengadaan WC. WC cubluk, kalau ada angin, bau kotoran terasa. Masyarakat berpikir kalau sudah punya rejeki, tidak pakai buat yang bagus. Sementara kalau belum punya uang ya buat WC Cubluk. Didusun lain masyarakat merasa nyaman, tidak buang modal bikin WC, warga bicara seperti itu. Kalau mau, supaya dibantu supaya bisa bangun WC. Setelah pemicuan, tanggapan warga, kalau orang desa yang diminta bantuan saja. ” Kalau di suruh buat WC, mana bantuannya”. Ada yang mau janji mau buat jamban kalau saya sudah punya rejeki. Selama jadi kader, rasanya biasa-biasa saja. Bisa dilewati dengan santai, saya tidak merasa putus asa, dari gadis sampai sekarang jadi kader terus. Jadi kader manfaatnya menambah pengalaman, bisa mengerti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, misalnya tentang kebersihan bagaimana saya menyumbangkan tenaga. Saya sudah menyuluh ke dusun sembukan, mayang, permas, sinawah. Kalau pemicuan, saya ditugaskan membuat daftar hadir. Pergi ke dusun-dusun itu warga diundang ke tempat pak RT. Kebanyakan yang datang ibu-ibu, kalau siang yang paling banyak datang adalah ibu – ibu. Acara pemicuan sekitar jam 2. Sekitar jam 3, mereka akan kesawah lagi. Siang itu panas, warga istirahat semua. Ibu – ibu yang banyak datang, karena kalau dikasih tahu manut. Bapak-bapak yang datang hanya sedikit, 1, 2 orang saja. Bapak – bapak hadir didusun Satreyan malam hari, karena bisanya pertemuan malam.

2. Sampai sekarang apakah masih ditemukan warga yang buang air besar di sembarang tempat ?

Masih ada warga yang buang air besar sembarangan, warga mintanya bantuan, saya senang juga kalau ada bantuan, saya serahkan saja. Yang beritikad membuat jamban, Pak Supriyanto RT 03, Kadarto RT 03, Pak Jalman RT 01 baru buat jamban.

(lanjutan)

3. Apakah ada tantangan kesulitan selama kegiatan program STBM ?

Pengalaman saya ada yang menyakitkan dengan seorang RT. Mintanya yang tidak-tidak, mintanya bantuan. Tanahnya sempit, rumah saja padat-padat, kalau nanti membuat cubluk baunya menyengat kata Pak RT, marah-marah mintanya bantuan, ada faktor kecemburuan karena daerahnya tidak dapat bantuan fasilitas air bersih, dusun sinawah.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA DUSUN KARANGASEM
(Bapak Romdoni)**

1. Menurut Bapak contoh kegiatan pembangunan di desa yang berhasil dengan partisipasi masyarakat ?

Contoh program yang berhasil ada partisipasi warga yaitu program PNPM karena ada bantuan. Contoh pembangunan jalan, ada bantuannya dan warga tahu kalau bikin jalan ada manfaatnya. Ada swadaya juga dari warga sebesar 9 juta sekitar 3 % dan bantuan PNPM lebih dari 100 juta. Warga berpikir sayang kalau bantuan itu tidak diambil karena uangnya besar dan warga cuma menambah sedikit saja. Warga mau bekerja kalau ada bantuan

2. Apakah ada kegiatan-kegiatan rutin bersama seluruh warga seperti kegiatan keagamaan atau lainnya ?

Ada pertemuan kegiatan agama buat bapak-bapak tapi jarang ikut kalender jawa.

3. Bagaimana Ibu mengatur kegiatan sebagai fasilitator desa ?

Kegiatan saya sebagai FD ikut kegiatan STBM ke dusun lain bersama-sama FD yang lain dan bersama sanitarian.

4. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di desa ini ?

Disini kalau ada warga yang bangun rumah, hayo-hayo bareng membantu supaya cepat berdiri. Kalau ada warga disini mau bangun rumah maka orang-orang di sekitarnya dengan sendirinya bantuin biar cepat selesai. Semisalnya lagi pas ada yang punya hajatan, mantu atau sunatan, dalam satu perdukuan ini pasti warga kesitu semua. Tidak usah disuruh-suruh dengan sendirinya datang, ada yang bawa rokok, gula, makanan.

5. Apa alasan bagi warga mau melakukan seperti itu ?

Warga memberi bantuan tenaga. Kalau material sudah dari orang yang mau bikin rumah. Kalau bangun rumah warga membantu bisa sampai selesai. Warga bisa begitu sudah adat sejak dari dulu.

6. Lalu kenapa pola saling membantu seperti bisa terpelihara ?

Misalnya si A sudah punya hajatan lalu si B pergi ke hajatan si A. Warga berpikir suatu saat nanti kalau saya punya hajatan biar orang tanpa disuruh bisa bantu biar meringankan yang punya hajatan.

Termasuk juga kalau ada kematian, lain lagi. Kalau misalnya yang ada kematian itu di RT satu maka warga-warga di RT satu harus di rumah orang yang lagi duka lalu bantu-bantu apa-apa. Warga yang di RT dua dan RT tiga ikut ke kuburan siapkan tempat liang lahat. Itu sukarela semua.

7. Apakah pola-pola kebiasaan seperti itu terjadi juga dalam pembangunan desa ?

Misalnya dalam pembangunan jalan. Pertama jalannya diukur dulu berapa meter panjangnya lalu nanti yang mau gotong royong dihitung ada berapa orang nanti warga-warga itu kebagian kerja berapa meter ya modelnya kayak begitu. Disini tidak usah disuruh sudah merasa punya kewajiban seperti itu.

8. Mengapa bisa terjadi seperti itu apa prinsipnya ?

Alasannya ya jalan yang kita bangun untuk kita sendiri yang merasakannya. Yang baru ini waktu perbaikan tanggul modelnya ya begitu juga. Kalau tidak diperbaiki air itu bisa membanjiri rumah-rumah penduduk. Diukur dulu berapa panjang tanggulnya lalu dibagi berapa orang yang mau gotong royong. Lalu tanpa disuruh sudah berangkat sendiri. Prinsipnya ya itu lagi kita juga yang merasakan baiknya.

9. Bagaimana warga bersikap terhadap tetangganya ?

Ya tolong menolong dengan kesadaran.

10. Kenapa dalam pembangunan jamban tidak terjadi tolong menolong ?

Tidak mungkin disini tetangga yang ini bantu kloset yang sana bantu klontong untuk warga yang itu. Bantu tenaga warga mungkin bisa dan yang punya rumah harus siapkan materialnya dulu.

Disini warga kebanyakan saling saudara. Kalau dihubung-hubungkan satu dusun itu bisa ketemu semua saling saudara. Disini misalnya ada salah satu warga yang sakit dirawat di rumah sakit. Itu dengan sendirinya lagi orang satu dusun ikut menengok ke rumah sakit. Warga satu dusun menengok semua. Lalu datang kesana ada yang kasih uang, ada juga yang bawa makanan supaya sedikit meringankan orang yang sakit. Warga bisa berbuat seperti karena dulunya kalau ada orang yang sakit suka ada orang-orang yang berkunjung memberikan nasehat-nasehat atau petunjuk.

(lanjutan)

11. Bagaimana kebersamaan warga disini dalam pembangunan tingkat desa?

Warga tidak begitu sadar lagi untuk pembangunan di tingkat desa. Paling sadarnya masih ditingkat dusun. Kalau dulu-dulu masih.

12. Mengapa bisa hilang seperti itu partisipasi warga di tingkat pembangunan desa ?

Mungkin sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan mencari uang seperti kesibukan di sawah. Warga ke sawah tidak ada liburnya.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA DUSUN SINAWAH
DESA KRONGGEN, KECAMATAN BRATI
(Bapak Ali Syamsun)**

1. Bagaimana kegiatan-kegiatan program STBM terjadi di Dusun Sinawah?

Lemah Ekonomi, janda, kebetulan dekat sungai, dari puskesmas sudah sering memberi penyuluhan yang diundang yang belum punya WC. Ada kehendak membuat, menunggu penghasilan dari panen, mau membuat WC. Yang sudah ada, Pak Satrimin buat wc cemplung. Informasi STBM dan balai desa Pak kades undang pertemuan, warga sekan-akan diharuskan atau dilarang BABS, dari pertemuan itu tiap desa bisa ODF. Tiap dusun dikerahkan agar warganya membuat jamban. Di balai desa diundang RT, RW, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang memberi penyuluhan dari puskesmas. Banyak yang hadir pertemuan dusun tapi ada yang tidak hadir. Pertemuan siang hari jam 3, warga sudah banyak yang dirumah. Pemicuan membuat peta, yang diundang hadir kebanyakan bapak-bapak. Tanggapan warga setelah panen, kalau punya anak sudah kerja, semangatnya bagus mengatasi buang air besar sembarangan.

2. Bagaimana partisipasi masyarakat di Dusun Sinawah ?

Masalah gotong royong dan swadaya, gang-gang dibangun swadaya masyarakat, PNPM ada swadaya masyarakat berupa tenaga dan uang. RT 01, RW 03 pernah usul buat WC umum. Tidak ada warga yang usul memberi izin menumpang di jamban. Rencana membuat WC umum belum terealisasi tunggu ada pemasukan. Sumbangan ke kas RT, minimal Rp. 1.000,- tiap tanggal 20. Alokasi dana RT terserah untuk apa saja, yang sudah terjadi untuk pembangunan jalan, membangun mesjid karena di tiap dusun ada mesjid. Di Dusun Sinawah mayoritas tani, sebenarnya buruh tani. Buruh tani Rp. 20.000,- / hari jam 7 – 12. Kalau sampai sore ditambah lagi. Buruh tani, ekonomi kurang, pas-pasan makan, kadang kurang, pas-pasan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

(lanjutan)

3. Bagaimana kondisi masalah buang air besar di dusun ini ?

Sudah kebiasaan BAB di sungai. Setelah diberi penyuluhan, sudah pikir-pikir kalau BAB di sungai. Mereka yang BAB di sungai kebanyakan yang sudah sepuh-sepuh.

4. Apa hasil-hasil dari sosialisasi program STBM di balai desa ?

Kepala desa hanya memberi arahan supaya tidak buang air besar sembarangan tidak ada instruksi ke kepala desa. Puskesmas cuma minta ke para Kepala dusun supaya memerintahkan warga agar buang air besar sembarangan pada tempatnya. Pak Kepala dusun meninjau perkembangan pembuatan jamban dan siapa yang sudah membuat jamban. Program STBM, saya bekerja sukarela. Pertemuan di balai desa siang jam kerja. Datang sukarela tidak ada fasilitas transport. Operasional kepala dusun dari kantor desa tidak tentu, tiap tahun dapat. Didapat dari pemasukan desa dan kas desa.

5. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di dusun ini ?

Sekarang di dusun ini warga sedang gotong royong membangun jalan rabat dengan dana dari kas RT. Disini tiap-tiap RT ada arisan kalau di RT lima setiap minggu pahing, RT dua RW lima setiap minggu wage. Ada musyawarah dulu kalau ada pembangunan dusun dan uangnya dari warga, mau uangnya dari kas RT atau kekurangannya ditambah oleh warga. Uang kas pernah juga digunakan untuk ziarah ke makan wali tiga di Demak, Kudus, Muria. Ada pembangunan atau tidak uang kas RT tetap kumpul dan bisa digunakan untuk silaturahmi atau jenguk warga yang sakit.

6. Kenapa warga mau mengumpulkan uang untuk kas RT ?

Kesadaran dari pribadi tidak dipaksa, timbul dari nurani. Mengumpulkan uang kas ini sudah berjalan dua puluh tahun. Ada kegiatan sedekah bumi setiap bulan sebelas tahun Jawa, warga mengumpulkan uang, urunan, untuk beli hewan untuk dipotong, dimasak dan dimakan sama-sama. Warga membuat hajatan tiap RW. Warga disini juga bangun rumah masih gotong royong. Pak Mudin, bangun rumahnya gotong royong. Warga sudah tradisi seperti itu, dengan kesadaran, bapak-bapak kerja, ibu-ibu masak menyiapkan makanan buat orang kerja. Kesadaran warga disini masih bagus, rasa kebersamaan masih tertanan bagus. Kalau ada salah seorang warga yang hajatan, warga memberi sumbangan secara sukarela demi kerukunan.

7. Mengapa pola-pola kebersamaan seperti itu tidak terjadi dalam program STBM membangun jamban ?

Itu masih pribadi-pribadi. RT-RT belum mengarah kesana dalam program RT-nya. Lama kelamaan akan terpikir kesitu. Itu kepentingan pribadi sendiri. Kalau wc dibangun dengan dana kas RT warga yang lain bisa

(lanjutan)

cemburu. Ada pertemuan mengumumkan kepada warga agar masalah wc supaya warga bisa punya wc sendiri. Sekarang warga yang punya wc sudah bertambah. Ada empat kepala keluarga.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN ISTRI KEPALA DUSUN SATREYAN
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Ibu Utami)**

1. Apa yang ibu ketahui tentang program STBM ?

Warga disuluh agar membuat jamban yang sederhana dan tertutup. Bagus kalau bisa kloset.

2. Bagaimana perjalanan program STBM di Dusun Satreyan ?

Waktu pemicuan ditanya kapan akan buat jamban. Pak Warno membuat jamban terlambat dari waktu yang direncanakan. Waktu pemicuan, warga mengaku siapa yang belum punya jamban. Ibu Dusun melakukan pengecekan ke rumah yang sudah berjanji. saya ditanya oleh ibu Bidan. Warga berjanji buat jamban kalau sudah panen. 3 orang itu sudah janji cuma sekarang belum dipantau apakah sudah apa belum membangun jambannya.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA DUSUN SOBOTUWO
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Sukarmin)**

1. Bagaimana gambaran upaya agar warga bisa mengakses jamban yang tepat ?

Bisa kita takut-takuti warga tidak mendapat pelayanan Jamkesmas supaya warga bergerak. Warga di bimbing yang belum bisa punya jamban. Disini tidak ada pemicuan. Pemicuan dari pintu kepintu. Kumpulkan RT/RW setelah sosialisasi. RT dikasih informasi. Masyarakat yang miskin tidak punya WC. Bagi warga tidak mampu diminta buat jamban sederhana. RT dan kepala dusun turun langsung. Kalau sudah punya jamban, ada menantu bikin jamban

2. Bagaimana monitoring kemajuan dan pelaporannya bagaimana mengenai program STBM ?

Tanggal 27 tiap bulan ke pertemuan perangkat desa dan kepala desa, tiap tanggal 27 pertemuan perangkat sekaligus arisan bapak-bapak dan ibu-ibu. Disitu laporan disampaikan.

(lanjutan)

3. Apa kegiatan pembangunan yang berhasil dengan partisipasi masyarakat?

Pembangunan jalan rabat beton yang di depan sana. Itu seluruhnya bersumber dari dana alokasi desa dan swadaya masyarakat. Awal mulanya kami pernah berdiskusi rekan-rekan di KPPS di dusun ini kemudian muncul ide ingin membangun jalan rabat beton. Lalu kami berupaya dengan menjual kapuk dari pohon-pohon yang ada di dusun ini dan hasil pendapatan penjualan itu masuk sebagai dana alokasi desa yang kemudian kami gunakan sebagai dana pembangunan jalan rabat beton. Namun dana alokasi desa itu masih kurang. Kemudian kami upayakan didiskusikan dengan warga dan warga setuju. Warga memberikan swadayanya dengan nilai yang bervariasi menurut kemampuan ekonomi mereka. Semua warga bisa memberikan swadayanya termasuk warga yang kurang mampu bisa memberikan swadaya sebesar dua ratus ribu rupiah dan swadaya yang terkumpul ditambah dana alokasi desa tadi kami gunakan untuk membangun jalan rabat beton. Selain jalan itu juga pembangunan mesjid. Itu murni swadaya masyarakat dusun ini.

4. Mengapa cara-cara berswadaya seperti itu belum terjadi dalam membangun jamban pada program STBM ?

Tidak terpikir saja

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN SOBOTUWO
(Ibu Suntari)**

1. Kenapa Ibu mau memperbaiki menjadi jamban cubluk tertutup ?

Karena malu dengan tetangga. Saya berusaha punya jamban seperti mereka

2. Apa masalah Ibu supaya menjadi jamban kloset ?

Susah dananya. Kerjaan saya buruh di tempat membuat batu bata

3. Apa kegiatan ibu bersama warga disini ?

Ya ngobrol santai saja

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN KARANGASEM
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Sugianto)**

1. Kemana Bapak dan keluarga pergi untuk buang air besar ?

(lanjutan)

Buang air besar saya di empang, yang ada ikan liar. Bikin kakus diempang. Masalah saya belum punya WC adalah karena biayanya belum ada. Posisi kakus jauh dari rumah disekeliling empang tidak ada rumah. Tidak ada tumpukan kotoran karena dimakan ikan, 1 hari sudah hilang. Kalau ada hujan langsung hanyut ke sungai. Empang tidak pernah kering.

2. Pernahkah Bapak mengikuti acara pengarahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Yang ikut pengarahan ya ibu-ibu. Saya tidak pernah. Pernah dengar dari itu ada pengarahan agar buat jamban ibu ikut arisan

3. Apa pekerjaan Bapak ?

Pekerjaan saya hanya buruh tanah.

4. Ada berapa kali Bapak mendengar pengarahan buat warga agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Sudah berkali-kali mendengar tapi dananya belum ada. Perasaan saya pingin buat ya sementara ini saya baru sebagian menyiapkan materal untuk membangun jamban.

5. Apakah Bapak pernah diprotes warga buang air besar di kolam?

Saya tidak pernah diprotes oleh warga BAB diempang

6. Apa kegiatan Bapak bersama warga di sekitar rumah Bapak?

Kegiatan bersama-sama warga cari hama tikus kalau sekarang-sekarang ini. Kerja bakti benahi saluran. Cari tikus sore hari atau pagi hari

7. Apa pendapat Bapak tentang arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Menurut saya arahan semacam itu baik kalau bisa seluruhnya punya jamban tapi masalah rezeki kadang ada kadang tidak.

8. Apa manfaatnya bila kita memiliki jamban di rumah?

Manfaat kalau punya WC Kloset, menjaga kebersihan, kalau buang air besar juga tidak perlu keluar rumah malam hari. Supaya disemua lingkungan tidak bau, gampang merawat.

9. Pendapat yang Bapak terima digunakan untuk apa saja?

Yang utama, keuangan untuk biaya sekolah sehari-hari

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN KARANGASEM
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Masrukin warga RT 02 RW 06)**

1. Kemana bila Bapak dan keluarga ingin buang air besar?

Sementara masih di empang. Empang ikan liar dan banyak. Empang lebar, panjang dan dalam ada 10 meter dan kedalaman 2 meter. Bikin kakus di empang. Sudah lama sekali saya buang air besar di empang. Pernah berpikir untuk punya WC tapi buruh tani itu penghasilannya tidak tentu. Tapi saya sudah siapkan pasir untuk buat WC. BAB di empang mengganggu warga tidak mungkin. Menurut saya tidak mengganggu lingkungan sekali cemplung dimakan ikan

2. Menurut Bapak apakah mengganggu bila kita buang air besar di empang?

Perasaan saya tidak mengganggu warga dan tidak bau, sekali buang dimakan ikan dan kotoran hilang. Tidak sampai sehari, tidak ada tumpukan kotoran. Jarak empang kerumah warga itu sekitar 50 meter.

3. Pernah mendengar arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Sering mendengar arahan agar warga punya WC kalau sedang pertemuan wanita sebulan sekali.

4. Kenapa Bapak belum membangun jamban?

Penghasilan kurang, utamakan untuk kebutuhan sehari-hari

5. Apa kegiatan Bapak bersama warga tetangga Bapak?

Kegiatan bersama-sama warga kumpulan jamaah-jamaah dan sudah lama sekali tidak ada. Ikut gotong royong, itu kerukunan kampung, kalau ada kegiatan digerakkan secara sukarela. Kalau PNPM gotong royong ada ganti rugi dikasih uang tidak seharian kerja

6. Seandainya Bapak memiliki jamban kloset di rumah, apa manfaatnya?

Banyak sekali, bisa menjaga kebersihan, tidak mengganggu lingkungan, menjaga kebersihan itu hal utama, agama menyarankan

(lanjutan)

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN KARANGASEM
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Sumadi warga RT 01 RW 06)**

1. Apa pekerjaan Bapak?

Saya buruh tani, tidak punya lahan pertanian, kerja dapat upah, upahnya harian. Kalau dibutuhkan, kalau tidak ya menganggur

2. Apabila Bapak dan keluarga ingin buang air besar kemana perginya?

Sekarang baru bikin WC, istilah tunggu kalau punya penghasilan. Membuat WC dengan cara menyicil, sekarang masih perbaikan. Beli bahan material WC mencicil.

3. Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah memiliki jamban kloset di rumah?

Manfaatnya banyak, kalau kita BAB tidak dilihat orang, kloset nyaman

4. Apa pernah mengikuti arahan agar tidak buang air besar di sembarang tempat?

Saya tahu ada arahan agar punya WC tapi mau gimana. Saya orang miskin, mau bangun pikir-pikir dulu. Mendengar arahan buat WC dari pertemuan. Yang pergi ke pertemuan isteri. Saya tidak kesana, pertemuan ibu – ibu. Arahan supaya cepat-cepat buat WC. Kalau saya sih besok-besok saja kalau punya uang. Membiayai keluarga saja sulit. Anak sudah sekolah lanjutan, belum ongkos naik bis, belum lagi bayar SPP, bayar rekening listrik, belum lagi ada keluarga punya hajatan, jadinya pikir-pikir gimana bisa buat WC

5. Sebelum memiliki jamban di rumah kemana Bapak dan keluarga pergi buang air besar?

Buang air besar di rombongan, didesa luas tanahnya, kalau ganggu warga lain ya mengganggu, bau sih bau, di desa tanahnya masih luas, sehingga bisa agak jauh dari rumah warga. Posisi rombongan jauh dari rumah supaya baunya tidak mengganggu rumah

6. Bagaimana Bapak bisa membangun jamban kloset?

Agar menjaga tidak menimbulkan penyakit

7. Menurut pendapat Bapak arahan tersebut bagaimana?

Menurut saya itu arahan bagus

(lanjutan)

8. Apa kegiatan Bapak bersama warga tetangga Bapak?

Kegiatan gotong royong benahi saluran. Ikut sih ikut gotong royong tujuannya menjaga kerukunan desa.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN WARGA DUSUN PERMAS
DESA KRONGGEN KECAMATAN BRATI
(Bapak Ali Khosiin warga RT 02 RW 02)**

1. Bagaimana kehidupan kebersamaan warga di dusun ini ?

Disini ada kegiatan darul infaq. Kegiatan yang promotornya orang mesjid. Ini sudah berjalan sudah sejak lama sekali sejak saya masih anak-anak sudah berjalan. Kegiatan ini tujuannya untuk membangkitkan warga untuk berinfaq. Kalau dulu penggunaannya untuk perbaikan mesjid. Kalau sekarang sudah lebih umum atau untuk kegiatan demi kemaslahatan umat di lingkungan Dusun Permas. Infaq itu dipertanggungjawabkan setiap setahun sekali di bulan Juni lalu bulan Juli ditarik lagi dari warga. Untuk Darul infaq ini tiap RT ada petugas pengumpul infaq. Saya termasuk petugas pengumpul infaq. Petugas itu datang ke rumah-rumah untuk mengumpulkan infaq. Penggunaannya bisa untuk menolong warga yang sedang kedukaan. Infaq ini setiap tahun dihitung berapa yang sudah terkumpul lalu dirapatkan dalam musyawarah mesjid Dusun Permas untuk menentukan mau dipergunakan untuk apa uang itu. Contoh lain disini misalnya bangun jembatan. Pembangunan jembatan ini swadaya RT. Membangun jembatan merupakan keinginan inisiatif warga RT sini. Disini ada kas RT yang dikumpulkan tiap sebulan sekali terserah yang mau memberi berapa lalu terkumpul ada berapa juta. Kemudian ada keinginan tinggi lalu diadakan rapat bersama untuk membangun jembatan dan pembangunannya menggunakan kas RT itu dan kekurangannya ditambah dari warga.

2. Mengapa warga mau mengumpulkan iuran RT ?

Warga berpikir suatu ketika nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk kebersamaan, misalnya ada kematian bisa diambil dari kas RT itu. Warga ditarik iuran tanpa ada rasa paksaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 852/MENKES/SK/IX/2008**

TENTANG

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : > bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, perlu disusun Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;

(lanjutan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 - 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**
Kedua : Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 September 2008



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 852/Menkes/SK/IX/2008
Tanggal : 9 September 2008

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi *Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP)* tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Berdasarkan studi *Basic Human Services (BHS)* di Indonesia tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah (i) setelah buang air besar 12%, (ii) setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, (iii) sebelum makan 14%, (iv) sebelum memberi makan bayi 7%, dan (v) sebelum menyiapkan makanan 6 %. Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga menunjukkan 99,20% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 47,50 % dari air tersebut masih mengandung *Escherichia coli*.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per seribu penduduk pada semua umur dan 16 provinsi mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dengan *Case Fatality Rate (CFR)* sebesar 2,52. Kondisi seperti ini dapat dikendalikan melalui intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total. Hal ini dibuktikan melalui hasil studi WHO tahun 2007, yaitu kejadian diare menurun 32% dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, 45% dengan perilaku mencuci tangan pakai sabun, dan 39% perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan mengintegrasikan ketiga perilaku intervensi tersebut, kejadian diare menurun sebesar 94%.

Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higiene dan sanitasi dengan menetapkan *Open Defecation Free* dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target *Millennium Development Goals (MDGs)* tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses.

Menyadari hal tersebut di atas, pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain melakukan uji coba implementasi *Community Led Total*



Sanitation (CLTS) di 6 Kabupaten pada tahun 2005, dilanjutkan dengan pencanangan gerakan sanitasi total oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2006 di Sumatera Barat serta pencanangan kampanye cuci tangan secara nasional oleh Menko Kesra bersama Mendiknas dan Meneg Pemberdayaan Perempuan tahun 2007.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan replikasi CLTS di berbagai lokasi oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang menghasilkan perubahan perilaku buang air besar di sembarang tempat, sehingga pada tahun 2006 sebanyak 160 desa telah ODF dan tahun 2007 mencapai 500 desa. (Depkes, 2007).

Perlunya strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat berangkat dari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, sehingga diperlukan strategi yang baru dengan melibatkan lintas sektor sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing dengan leading sektor Departemen Kesehatan karena sanitasi total berbasis masyarakat ini menekankan kepada 5 (lima) perubahan perilaku higienis.

B. Maksud Dan Tujuan

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

C. Pengertian

1. **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat** yang selanjutnya disebut sebagai **STBM** adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
2. **Komunitas** merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
3. **Open Defecation Free** yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
4. **Cuci Tangan Pakai Sabun** adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
5. **Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga** yang selanjutnya disebut sebagai **PAMRT** adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
6. **Sanitasi total** adalah kondisi ketika suatu komunitas:
 - Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.



- Mencuci tangan pakai sabun.
 - Mengelola air minum dan makanan yang aman.
 - Mengelola sampah dengan benar.
 - Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
7. **Jamban sehat** adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
8. **Sanitasi dasar** adalah hadala sarana sanitasi rumah tanggayang meliputi sarana Luang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

II. ISU DAN TANTANGAN

- Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya.
- Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meringgal karena diare setiap tahunnya dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (studi World Bank, 2007).
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggarannya.

III. STRATEGI NASIONAL

A. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

1. Prinsip
Meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.
2. Pokok Kegiatan
 - Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang
 - Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah.
 - Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.



B. Peningkatan Kebutuhan

1. Prinsip
Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.
2. Pokok kegiatan
 - Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan.
 - Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas.
 - Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat.
 - Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat.
 - Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

C. Peningkatan Penyediaan

1. Prinsip
Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pokok kegiatan
 - Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
 - Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
 - Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

D. Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management*)

1. Prinsip
Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
2. Pokok kegiatan
 - Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi.
 - Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan sanitasi di Indonesia.
 - Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

E. Pembiayaan

1. Prinsip
Meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.
2. Pokok kegiatan
 - Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri
 - Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong).
 - Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal.

F. Pemantauan Dan Evaluasi

1. Prinsip
Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi
2. Pokok kegiatan
 - Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat
 - Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis
 - Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.

IV. PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

A. Rencana Kerja

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

B. Indikator

Output :

- Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
- Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
- Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Outcome :

- Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

TINGKAT	INSTITUSI	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
RT/Dusun/ Kampung	Tim Kerja STBM tingkat RT/Dusun/ Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong) 2. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat 3. Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat 4. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya, setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (ODF) di lingkungan tempat tinggalnya 5. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan STBM 6. Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan 7. Memperkenalkan opsi-opsi teknologi 8. Mempunyai strategi pelaksanaan dan exit strategi yang jelas
Desa	Tim Kerja STBM Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa, Para Guru, dsb untuk memfasilitasi gerakan masyarakat. Tim ini mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa 2. Memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan 3. Mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan (O & M) yang sedang berjalan dan tanggungjawab ke atas 4. Memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang peka
Kecamatan	Pemerintah Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan Badan Pemerintah dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM 2. Mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut 3. Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TINGKAT	INSTITUSI	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
		4. Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap ter-update secara berkala
Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi yang baru 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat kabupaten mengenai pendekatan yang baru 3. Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM 4. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten 5. Memberikan dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua institusi di kabupaten.
Provinsi	Pemerintah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait tingkat Provinsi dan mengembangkan program terpadu untuk semua kegiatan STBM 2. Mengkoordinasikan semua sumber pembiayaan terkait dengan STBM 3. Memonitor perkembangan strategi nasional STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan kepada tim Kabupaten 4. Mengintegrasikan kegiatan higiene dan sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM 5. Mengorganisir pertukaran pengetahuan/pengalaman antar kabupaten
Pusat	Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait tingkat Pusat dan mengembangkan program terpadu untuk semua kegiatan STBM 2. Mengkoordinasikan semua sumber pembiayaan terkait dengan STBM 3. Memonitor perkembangan strategi nasional STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan kepada tim Provinsi 4. Mengintegrasikan kegiatan higiene dan sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM 5. Mengorganisir pertukaran pengetahuan/pengalaman antar kabupaten dan/atau provinsi serta antar negara

(lanjutan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VI. PENUTUP

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mengandung strategi nasional yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian daripada Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM).

Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses sanitasi, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penetapan strategi dalam pedoman ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat lebih terarah dan terukur.

Strategi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan yang sesuai spesifik lokal serta memicu penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan, peningkatan penyediaan, dan pengelolaan pengetahuan dalam akses sanitasi serta perilaku masyarakat yang higienis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perilaku higienis masyarakat dan meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi khususnya serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

CURRICULUM VITAE

Nama : Erickson Sidjabat
Tempat lahir : Bogor
Tanggal lahir : 9 Desember 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Email : erick_son_s@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

- a. Tahun 1998 memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung
- b. Tahun 1990 tamat sekolah menengah atas dari SMA Negeri 2 Bandung
- c. Tahun 1987 tamat sekolah menengah pertama dari SMP Negeri 3 Bandung
- d. Tahun 1984 tamat sekolah dasar dari SD Strada Budi Luhur Bekasi

Riwayat Pekerjaan :

- a. World Vision Indonesia mulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Advocacy Specialist
- b. Partnership for Governance Reform in Indonesia pada tahun 2010 dengan tugas sebagai konsultan
- c. World Vision Indonesia mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 dengan jabatan terakhir sebagai ADP Manager

Pelatihan/lokakarya/seminar yang pernah diikuti :

- a. Global LEAP learning event di Bangkok pada bulan Agustus tahun 2005
- b. Nutrition Jump Start Workshop for Pacific Region di Jakarta bulan November 2008